

BAHASA INDONESIA SEBAGAI EMBRIO BAHASA ASEAN
(Peluang dan Tantangan Menuju ASEAN Community 2015)

Achmad Zulfikar
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Abstrak

Bahasa Indonesia kini telah menjadi bahasa potensial untuk dipelajari oleh masyarakat Internasional dikarenakan kemajuan yang ditunjukkan Indonesia di segala sektor, utamanya bidang ekonomi. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia juga menjadi pasar yang strategis. Bahkan di tahun 2015, Indonesia telah memasuki era Komunitas ASEAN, dimana negara-negara di kawasan Asia Tenggara akan berintegrasi menjadi masyarakat ASEAN. Makalah ini merupakan hasil telaah dari aspek politik, dan bahasa yang merupakan gagasan untuk merealisasikan bahasa Indonesia sebagai embrio bahasa ASEAN. Metode yang digunakan yakni kajian teoretik dari perspektif hubungan internasional. Kesimpulan dari makalah ini menitikberatkan pada peluang, tantangan, dan rekomendasi. Indonesia memiliki peluang secara kekuatan nasional, dan itikad politik dari pemerintah, namun demikian Indonesia juga menghadapi tantangan yakni rivalitas dengan Malaysia yang juga ingin merebut peluang Indonesia, serta kurangnya penanganan teknis terkait wacana yang ingin direalisasikan. Sedangkan rekomendasi yang diusulkan oleh penulis yakni mendorong pakar bahasa, Badan Bahasa, dan Kemlu RI untuk mengambil perannya masing-masing untuk bersama-sama menyukseskan wacana ini.

Kata Kunci: Bahasa Indonesia, Bahasa ASEAN, Komunitas ASEAN

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang sangat potensial. Geopolitik Indonesia yang strategis, ditambah lagi dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berlimpah menjadikan Indonesia sebagai pasar strategis untuk dikelola. Hal ini tentunya berimbas pada alat komunikasi yang digunakan sehari-hari yakni bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa ini di masa kini tidak hanya dipelajari oleh orang Indonesia, namun juga oleh orang asing yang tertarik dengan potensi yang dimiliki Indonesia.

Di skop yang lebih kecil yakni kawasan Asia Tenggara, Indonesia juga termasuk negara anggota yang mempunyai banyak potensi. Arus perdagangan dan investasi di kawasan ASEAN berdatangan dari negara-

negara maju. Menjelang era Komunitas ASEAN 2015, dimana negara-negara di kawasan Asia Tenggara akan berbaur menjadi masyarakat ASEAN. Tentunya dibutuhkan prasyarat yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan integrasi salah satunya dari aspek kebahasaan. Bahasa sebagai alat komunikasi memegang peranan penting dalam proses integrasi. Melalui bahasa, seseorang dapat mengerti maksud dan tujuan yang ingin dibicarakan. Hal ini dapat mengurangi kesalahan dalam berkomunikasi, serta mempererat rasa kepemilikan satu sama lain.

Pertanyaan yang terlintas di benak para akademisi yang merupakan pemerhati bahasa: apakah pemerintah dan pemangku kepentingan terkait menempatkan urgensi perumusan bahasa ASEAN sebagai prioritas? Tentunya pertanyaan ini tidak bisa hanya sekedar di jawab tanpa melakukan telaah lebih lanjut terhadap upaya pengguliran wacana bahasa ASEAN di berbagai forum publik.

Lebih lanjut dalam makalah ini akan dibahas peluang dan tantangan bahasa Indonesia sebagai embrio bahasa ASEAN menuju Komunitas ASEAN 2015. Kajian ini sangat menarik mengingat Indonesia memiliki kekuatan dan potensi yang luar biasa jika dilihat dari sudut pandang kajian Hubungan Internasional. Kemudian dari aspek politik bahasa, Indonesia memiliki latar belakang historis terhadap bahasa Indonesia yang merupakan bahasa persatuan yang tentunya dapat memberikan inspirasi agar menjadi momentum awal bagi persatuan Komunitas ASEAN 2015.

Rumusan Masalah: Bagaimana peluang dan tantangan bahasa Indonesia agar menjadi embrio bahasa ASEAN dalam menyongsong Komunitas ASEAN 2015.

B. Kekuatan Diplomasi Kebahasaan Indonesia

Diplomasi kebahasaan dalam kajian Hubungan Internasional termasuk dalam kategori diplomasi kebudayaan. Secara makro, diplomasi kebudayaan adalah usaha-usaha suatu negara dalam upaya memperjuangkan kepentingan nasionalnya melalui dimensi kebudayaan dalam percaturan masyarakat internasional termasuk di dalamnya adalah bidang-bidang sosial, ekonomi, maupun kebahasaan. (Tulus dan Wahyuni, 2007:19)

Sedangkan kekuatan diplomasi suatu bangsa di kancah internasional banyak ditentukan oleh kekuatan nasional bangsa tersebut. Kekuatan nasional menurut Morghenthau (2010:125) sebagaimana merujuk pada pengertian dasar kekuatan (*power*) merupakan kekuatan negara atas pemikiran dan tindakan negara lainnya, fenomena atau gejala yang dapat ditentukan manakala negara satu sama lain hidup dalam hubungan atau pergaulan sosial.

Dalam mengukur kekuatan nasional suatu bangsa, maka perlu diketahui komponen atau unsur kekuatan nasional yang menopangnya.

Morghentau (2010:135-180) memberikan 9 unsur kekuatan nasional sebagai berikut: (1) geografi, (2) sumber daya alam, (3) kemampuan industri, (4) kesiagaan militer, (5) penduduk, (6) karakter nasional, (7) moral nasional, (8) kualitas diplomasi, dan (9) kualitas pemerintah.

Dalam konteks keindonesiaan maka 9 unsur tersebut dapat dipaparkan secara singkat sebagai berikut: *Pertama*, unsur geografi. Indonesia merupakan negara kepulauan di Asia Tenggara yang memiliki 13.487 pulau besar dan kecil yang terhampar di khatulistiwa. Posisi Indonesia yang terletak pada koordinat 6°LU - 11°08'LS dan dari 95°BT - 141°45'BT, serta diapit oleh dua samudra, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Didukung juga dengan luas daratan 1.922.570 km² dan luas perairan 3.257.483 km².

Kedua, sumber daya alam. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya sumber daya alam. Menurut World Bank (1994) sumber daya alam Indonesia meliputi minyak bumi, timah, gas alam, nikel, kayu, bauksit, tanah subur, batu bara, emas, dan perak dengan pembagian lahan terdiri dari tanah pertanian sebesar 10%, perkebunan sebesar 7%, padang rumput sebesar 7%, hutan dan daerah berhutan sebesar 62%, dan lainnya sebesar 14% dengan lahan irigasi seluas 45.970 km.

Ketiga, kemampuan industri. Perkembangan industri di Indonesia tidak signifikan berpengaruh terhadap kekuatan nasional, karena ekspansi industri asing yang masuk ke Indonesia lebih dominan dibandingkan pembangunan industri dalam negeri.

Keempat, kesiagaan militer. Ketiga faktor yang telah disebutkan sebelumnya menunjang unsur keempat ini. Kesiagaan militer ditunjang oleh pranata militer yang mampu mendukung politik luar negeri yang ditempuh. Kemampuan ini didasari pada inovasi, teknologi, kepemimpinan, dan kuantitas maupun kualitas angkatan bersenjata. Indonesia dalam hal ini terus berbenah, karena militer Indonesia dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara sudah mulai berekspansi dalam misi-misi perdamaian yang difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Kelima, penduduk. Berdasarkan pencacahan Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Indonesia adalah sebesar 237.556.363 orang, yang terdiri dari 119.507.580 laki-laki dan 118.048.783 perempuan. Distribusi penduduk Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa yaitu sebesar 58 persen, yang diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21 persen. Selanjutnya untuk pulau-pulau/kelompok kepulauan lain berturut-turut adalah sebagai berikut: Sulawesi sebesar 7 persen; Kalimantan sebesar 6 persen; Bali dan Nusa Tenggara sebesar 6 persen; dan Maluku dan Papua sebesar 3 persen. (Badan Pusat Statistik: 2010)

Keenam, karakter nasional. Indonesia memiliki karakter nasional Pancasila dengan sembojannya Bhinneka Tunggal Ika (*unity in diversity*),

disertai dengan kebijakan luar negeri bebas-aktif. Maka kebijakan yang dirumuskan akan mengacu pada karakter nasional yang dimiliki.

Ketujuh, moral nasional. Poin ini dapat dipahami sebagai kebulatan tekad suatu bangsa untuk mendukung politik luar negeri pemerintahnya dalam waktu damai dan perang. Di Indonesia poin ini sangat terkait dengan rasa nasionalisme dan patriotisme rakyat Indonesia, yakni rasa cinta tanah air yang kemudian mendasari bagi keterlibatan dalam upaya bela negara.

Kedelapan, kualitas diplomasi. Poin ini sangat penting karena merujuk pada upaya maksimalisasi unsur kekuatan nasional yang lain sehingga dapat mengatasi permasalahan internasional yang berkaitan langsung dengan kepentingan negara. Dalam hal ini, Indonesia memiliki visi diplomasi 'membuat seribu kawan tanpa ada satu musuh'. Hal ini menunjukkan upaya Indonesia untuk menjalin kerjasama dan kemitraan dengan mengedepankan sikap keterbukaan.

Kesembilan, kualitas pemerintah. Pemerintah memegang peran sentral dalam pembentukan kebijakan luar negeri. Pada poin terakhir ini ditekankan bahwa pemerintah yang baik berarti tiga hal: di satu pihak perimbangan antara sumber daya material dan manusia yang turut membentuk kekuatan nasional, di pihak lain, politik luar negeri yang akan ditempuh, dan dukungan rakyat untuk politik luar negeri yang akan ditempuh. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia harus mampu menjalankan perannya secara strategis dan efektif.

Dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam rangka menjalankan diplomasi kebahasaan secara intensif dan efektif, pada dasarnya Indonesia sudah ditunjang oleh 9 unsur kekuatan nasional yang dimiliki dan turut menentukan kekuatan diplomasi Indonesia. Berdasarkan kekuatan yang dimiliki maka Indonesia dapat memaksimalkan potensinya dalam rangka menyelesaikan tujuan yang ingin dicapai.

C. Bahasa sebagai Alat Pemersatu Menuju Komunitas ASEAN 2015

Dalam konteks keindonesiaan, bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat vital salah satunya sebagai bahasa persatuan, atau bahasa nasional. Kedudukan ini dimiliki oleh bahasa Indonesia sejak dicetuskannya sumpah pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dan dihadapkan dengan kenyataan bahwa bahasa Melayu yang mendasari bahasa Indonesia itu, telah dipakai sebagai *lingua franca* selama berabad-abad sebelumnya di seluruh kawasan Indonesia. (Alwi dan Sugono, 2011b:5)

Perlu disadari juga bahwa pada peristiwa sumpah pemuda 1928 bahasa Indonesia telah mengukuhkan kehadirannya sebagai bahasa yang demokratis, yang tidak mencerminkan status stratifikasi sosial pemakainya. Oleh karena itu bahasa Indonesia dapat diterima dan dengan mudah dipelajari

oleh generasi muda bangsa dari seluruh kelompok etnik yang juga memiliki bahasa daerah yang beranekaragam.

Di dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai (1) lambang kebanggaan nasional, (2) lambang identitas nasional, (3) alat pemersatu berbagai kelompok etnik yang berbeda latar belakang sosial budaya dan bahasanya, dan (4) alat perhubungan antarbudaya serta antardaerah.

Selain berkedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara, sesuai dengan ketentuan yang tertera di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Bab XV, Pasal 36: Bahasa negara ialah bahasa Indonesia.

Di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai (1) bahasa resmi kenegaraan, (2) bahasa pengantar resmi di lembaga pendidikan, (3) bahasa resmi di dalam perhubungan dalam tingkat nasional, (4) bahasa resmi untuk pengembangan kebudayaan nasional, (5) sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, (6) bahasa media massa, (7) pendukung sastra Indonesia, dan (8) pemer kaya bahasa dan sastra daerah. (Alwi dan Sugono, 2011b:5)

Seringkali bahasa Indonesia hanya dipandang sebagai alat komunikasi, namun perlu kita sadari potensi yang strategis bahasa Indonesia untuk melakukan ekspansi ke ranah yang lebih luas dengan melakukan diplomasi kebahasaan, salah satunya menjadikan bahasa Indonesia sebagai embrio bagi perumusan bahasa ASEAN.

Menjelang integrasi Komunitas ASEAN 2015 seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) mulai berbenah diri dan mempersiapkan berbagai macam strategi guna menghadapi momentum ini. Perlu diketahui bahwa saat ini seluruh negara anggota ASEAN yang terdiri atas Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Viet Nam telah mempersiapkan sektor-sektor potensial negaranya agar mampu bersaing dan unggul dari negara anggota lainnya.

Seyogyanya para ahli kebahasaan turut berkontribusi dalam menyongsong Komunitas ASEAN, salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan merumuskan bahasa ASEAN. Saat ini bahasa yang digunakan sebagai bahasa pergaulan dalam forum pertemuan ASEAN masih menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar, padahal beberapa negara anggota ASEAN memiliki kesamaan bahasa yakni bahasa Melayu yang merupakan asal mula bahasa Indonesia.

Mengacu pada kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan melalui momentum integrasi komunitas ASEAN 2015, Indonesia harus tampil di depan sebagai pionir bagi perumusan bahasa ASEAN, salah satu usulan konkrit yakni menjadikan bahasa Indonesia sebagai embrio bagi bahasa ASEAN. Diharapkan dengan hadirnya bahasa ASEAN dapat menjadi

alat pemersatu bagi Komunitas ASEAN sebagaimana keberadaan bahasa Indonesia saat peristiwa sumpah pemuda 1928.

D. Peluang dan Tantangan Bahasa Indonesia sebagai Embrio Bahasa ASEAN

Indonesia pada dasarnya memiliki kekuatan untuk melakukan diplomasi kebahasaan, didukung 9 unsur kekuatan nasional yang beberapa diantaranya merupakan keunggulan Indonesia. Di tambah lagi dengan pengalaman Indonesia dalam menjadikan bahasa sebagai alat pemersatu digambarkan dalam peristiwa sumpah pemuda 1928. Melalui pembahasan ini akan dikaji lebih lanjut terkait peluang dan tantangan yang dihadapi Indonesia untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai embrio bahasa ASEAN.

Itikad politik (*political will*) merupakan salah satu penentu bagi keberhasilan Indonesia merebut peluang tersebut. Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2011 merupakan momentum awal bagi pewacanaan bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN. Pada masa tersebut telah banyak wacana yang bergulir dari berbagai pihak terkait dukungannya terhadap upaya ini.

Forum "*Roundtable Conference Indonesia-Malaysia*" merekomendasikan penggunaan Bahasa Indonesia-Malaysia sebagai bahasa resmi di lingkungan Perhimpunan Bangsa di Asia Tenggara (ASEAN).

Hal tersebut disampaikan oleh Mantan Dubes Indonesia untuk Kamboja, Nazaruddin Nasution pada 28 Juli 2011. Ia menambahkan bahwa pihak-pihak terkait dalam forum ini akan menyampaikan rekomendasi tersebut dan berharap para kepala negara dan kepala pemerintahan anggota ASEAN dapat menyetujuinya dalam konferensi tingkat tinggi mereka nanti. (Republika Online, 2011)

Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso dalam pertemuan parlemen negara-negara ASEAN pada 23 September 2011 menyatakan bahwa delegasi RI dengan penuh pendirian mengusulkan Bahasa Indonesia bisa digunakan sebagai bahasa resmi ASEAN. Ia juga menambahkan bahwa bahasa Indonesia digunakan oleh banyak orang yang merupakan penduduk di negara ASEAN, seperti Malaysia yang menggunakan bahasa Melayu (akar bahasa Indonesia). Namun demikian yang berkeberatan yakni Filipina yang hanya 5 persen penduduknya berbahasa Indonesia di wilayah Moro dan sekitarnya. (VIVAnews, 2011)

Pewacanaan bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN pada KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) ASEAN ke-18 dan 19 pada 4-8 Mei 2011 di Jakarta dan 17-19 November 2011 di Bali rupanya tidak masuk ke dalam prioritas pembahasan. Indikasinya karena tidak ada keputusan yang menyinggung hal ini. Namun demikian, pada konferensi pers pada KTT

ASEAN ke-18 di Jakarta Presiden SBY dengan bangga menggunakan bahasa Indonesia, termasuk saat menjawab pertanyaan dari wartawan asing. (detikNews, 2011) Penggambaran ini patut dilihat sebagai salah satu itikad politik presiden untuk mempromosikan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang dapat digunakan pada forum pertemuan ASEAN.

Sedangkan tantangan yang dihadapi yakni rivalitas antara Indonesia dan Malaysia dalam memperebutkan pengaruh terhadap bahasa ASEAN. Menteri Penerangan, Komunikasi, dan Budaya Malaysia, Rais Yatim saat melakukan kunjungan ke Sumatera Barat mengusulkan agar bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa resmi di kawasan Asia Tenggara. Ia mendasarinya pada penelitian yang dilakukan di Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, dan selatan Thailand yang menggunakan Bahasa Melayu dan Bahasa Indonesia sebagai percakapan sehari-hari. (VIVANews, 2011b)

Selain itu, tantangan juga datang dari negara yang bukan penutur bahasa Melayu maupun bahasa Indonesia seperti Filipina, Kamboja, Thailand, Laos, dan Myanmar. Negara yang menyatakan keberatan secara langsung barulah Filipina. Hal yang perlu diperhatikan adalah prinsip-prinsip pada Piagam ASEAN. Salah satunya yakni, "menghormati prinsip-prinsip teritorial, kedaulatan integritas, tidak interverensi dan identitas nasional anggota ASEAN".

Dikarenakan bahasa merupakan identitas nasional bagi suatu bangsa, termasuk Indonesia, dan negara anggota ASEAN lainnya. Maka cara-cara yang digunakan untuk mendorong agar disepakatinya bahasa ASEAN haruslah menggunakan pendekatan yang lunak agar negara anggota ASEAN selain penutur bahasa Melayu maupun bahasa Indonesia mendapatkan pengertian yang memadai.

Tantangan berikutnya yakni tidak masuknya bahasa ASEAN sebagai prioritas dalam KTT ASEAN. Penulis mengindikasikan alasan tidak masuknya bahasa ASEAN dalam pembahasan di KTT ASEAN karena kurangnya pembahasan sebelum pelaksanaan KTT di antara pemangku kepentingan di bidang kebahasaan. Pembahasan yang menyeluruh (holistik) oleh para ahli yang berkompeten di bidangnya sangat diperlukan untuk menetapkan teknis-teknis pelaksanaan, sebelum dilakukan pengesahan melalui forum KTT.

E. Penutup

Kesimpulan

Bahasa Indonesia memiliki peluang yang besar untuk menjadi embrio bahasa ASEAN dalam rangka menyongsong Komunitas ASEAN 2015. Hal ini didasarkan pada kekuatan nasional Indonesia yang cukup memadai di kawasan Asia Tenggara, utamanya unsur sumber daya alam (SDA) dan

penduduk (SDM) yang berlimpah. Kekuatan nasional ini akan menjadi modal Indonesia untuk menjalankan diplomasi kebahasaan secara intensif dan efektif dalam rangka menyukseskan tujuan yang ingin dicapai.

Kedudukan bahasa Indonesia yang salah satunya menempati posisi sebagai bahasa persatuan dapat menjadi landasan yang kokoh bagi visi Komunitas ASEAN 2015 kedepannya yang dapat semakin bersatu dengan adanya bahasa persatuan di ASEAN.

Peluang ini didorong juga itikad politik yang datang dari pihak pemerintah, namun demikian tantangan yang ada ialah rivalitas antara Indonesia dan Malaysia dalam mengambil peluang tersebut, serta prinsip 'identitas nasional' yang harus di hormati bagi negara anggota ASEAN yang penutur bahasa Indonesia atau Melayu-nya minoritas.

Hal yang perlu diperhatikan juga bahwa penanganan teknis terhadap wacana bahasa Indonesia sebagai embrio bahasa ASEAN perlu dilakukan, yakni dengan melibatkan para ahli bahasa dari Indonesia dan seluruh negara anggota ASEAN untuk merumuskan bahasa ASEAN, kemudian merekomendasikannya ke forum pertemuan pemimpin negara ASEAN sebagai prasyarat politik.

Rekomendasi

Melalui makalah ini, penulis memberikan usulan kongkrit yang dapat dijalankan dalam rangka mendorong agar wacana tersebut dapat ditindaklanjuti.

- Mendorong pakar bahasa dari seluruh ASEAN untuk memformulasikan dan merumuskan struktur bahasa ASEAN agar dapat menjadi rujukan bagi pembuatan kebijakan para petinggi ASEAN.
- Mendorong Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud untuk secepatnya mengambil peran sebagai inisiator untuk merealisasikan pembahasan lebih lanjut terkait bahasa ASEAN.
- Mendorong Kementerian Luar Negeri RI untuk terlibat memberikan masukan dan arahan mengenai upaya yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak terkait agar dapat merealisasikan wacana bahasa ASEAN.

Diharapkan dengan peran lebih yang diambil Indonesia dalam pewacanaan bahasa ASEAN dapat menempatkan posisi tawar Indonesia untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai embrio bahasa ASEAN dapat meningkat hingga tercapainya tujuan yang diinginkan.

Daftar Pustaka

Alwi, Hasan, dan Dendy Sugono (ed.). 2011. *Politik Bahasa*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud.

Alwi Hasan, dan Dendy Sugono (ed.). 2011b. *Politik Bahasa: Rumusan Seminar Politik Bahasa*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud.

ASEAN. 2011. *Roadmap for an ASEAN Community 2009-2015*. Jakarta: ASEAN Secretariat.

Badan Pusat Statistik. *Hasil Sensus Penduduk 2010: Data Agregat Per-Propinsi*- http://www.bps.go.id/65tahun/SP2010_agregat_data_perPropinsi.pdf, diakses 30 Juli 2013.

Burchill, Scott dan Andrew Linklater. 2011. *Teori-Teori Hubungan Internasional*. Bandung: Nusa Media.

Cipto, Bambang. 2007. *Hubungan Internasional di Asia Tenggara*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

detikNews. *KTT ASEAN Hasilkan 10 Kesepakatan Penting*-<http://news.detik.com/read/2011/05/08/221910/1635039/10/ktt-asean-hasilkan-10-kesepakatan-penting>, diakses 30 Juli 2013.

Djelantik, Sukawarsini. 2008. *Diplomasi antara Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Irsan, Abdul. 2010. *Peluang dan Tantangan Diplomasi Indonesia*. Jakarta: Himmah Media.

Jackson, Robert and Georg Sorensen. 2009. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Lombok News. *Sembilan Capaian KTT ASEAN 2011 di Nusa Dua Bali*-<http://lomboknews.com/2011/11/19/sembilan-capaian-ktt-asean-2011-di-nusa-dua-bali/>, diakses 30 Juli 2013.

Mahbubani, Kishore. 2011. *Asia Hemisfer Baru Dunia: Pergeseran Kekuatan Global yang Tak Terelakkan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Morgenthau, Hans J. 1999. *Politik Antar Bangsa*. Terjemahan Cecep Sudrajat direvisi oleh J.Thomson Buku III, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Nuraeni Suparman, Deasy Silvy, dan Arfin Sudirman. 2010. *Regionalisme dalam Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Republika Online. *Badan Bahasa: Dukung Indonesia Jadi Bahasa ASEAN*-
<http://www.republika.co.id/berita/internasional/asean/13/08/20/mrsi41-badan-bahasa-dukung-indonesia-jadi-bahasa-asean>, diakses 30 Juli 2013.

Warsito, Tulus, dan Wahyuni Kartikasari. 2007. *Diplomasi Kebudayaan: Konsep dan Relevansi bagi Negara Berkembang Studi Kasus Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

VIVAnews. *Indonesia atau Melayu Bahasa Resmi ASEAN?*-
<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/249562-indonesia-atau-melayu-bahasa-resmi-asean->, diakses 30 Juli 2013.

VIVAnews (b). *Malaysia Usulkan Melayu Jadi Bahasa ASEAN*-
<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/249528-malaysia-usulkan-melayu-jadi-bahasa-asean>, diakses 30 Juli 2013.

Winarno, Budi. 2011. *Isu-isu Global Kontemporer*. Yogyakarta: Center for Academic and Publishing Service.

Zulfikar, Achmad. 2013. *The Role of Social Media as the Catalyst of ASEAN Community 2015 Integration*. Makalah. Disajikan pada 4th Social, Development, and Environmental Studies International Conference 2013 di Universiti Kebangsaan Malaysia 19 Maret 2013.

Subtema: 3

PERAN SEKOLAH INDONESIA KUALA LUMPUR (SIKL) DALAM MEMPERKUAT JATI DIRI DAN MEMARTABATKAN BANGSA MELALUI PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA (BI)

Oleh Alpansyah

(Penulis adalah guru Bahasa Indonesia Sekolah Indonesia KBRI Kuala Lumpur dan mahasiswa program Ph.D. pada *University Pendidikan Sultan Idris*, Malaysia. Posel: alpansyah2006@yahoo.com)

Abstrak. Permasalahan dalam tulisan adalah bagaimanakah peran Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL) memperkuat jati diri dan memartabatkan bangsa melalui pembelajaran Bahasa Indonesia (BI) di kalangan siswa SIKL di tengah kondisi masyarakat warga negara Indonesia di Malaysia yang terkadang sudah menggunakan bahasa Malindo (Melayu—Indonesia). Dalam memperkuat jati diri dan memartabatkan bangsa melalui pembelajaran BI di kalangan siswa, SIKL—selain melaksanakan kegiatan kurikuler—melaksanakan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler berupa: (1) *project based learning* (PBL); (2) lomba pidato dan puisi berbahasa Indonesia; (3) kegiatan bengkel sastra; (4) penulisan slogan-slogan; (5) memperbaiki secara langsung ‘*direct*’ kata/kalimat siswa yang salah; serta (6) pelayanan berbahasa Indonesia untuk siswa *homestay*. Tentu saja untuk mencapai tujuan tersebut dukungan semua pihak dan kesungguhan institusi sekolah termasuk seluruh guru (bukan hanya guru bahasa Indonesia) sangat diperlukan.

Kata Kunci: Bahasa Indonesia (BI), Bahasa Melayu Malaysia (BM), jati diri bangsa, sekolah Indonesia luar negeri (SILN), *project based learning* (PBL), dan *homestay*.

1. Pendahuluan

Pembicaraan mengenai jati diri dan martabat bangsa merupakan topik yang selalu hangat dan menarik untuk diperbincangkan terlebih lagi bila topik tersebut berkaitan dengan negara tetangga yaitu Malaysia. Hal itu ini dapat dipahami mengingat Indonesia dan Malaysia adalah negara yang serumpun dan bertetangga, tetapi hubungan diplomatik antarkedua negara sering mengalami pasang surut. Beberapa kejadian yang membuat barometer hubungan kedua negara sedikit “memanas” sebagaimana selama ini sudah menjadi pemberitaan media massa, seperti: (1) perlakuan warga Malaysia terhadap para tenaga kerja Indonesia (TKI) dan pembantu rumah tangga (PRT) asal Indonesia (kasus Nirmala Bonat dan lain-lain); (2) masalah-masalah yang berkaitan dengan kejahatan kemanusiaan, seperti pembunuhan (kerap disinyalir berkaitan dengan penjualan organ tubuh), pemerkosaan (baru-baru lalu berdasarkan informasi media massa justru dilakukan oleh oknum *Police Diraja Malaysia*), perdagangan manusia (sebagaimana yang diungkap *Mirgran Care*); (3) masalah tapal batas kedua negara; (4) pengklaiman secara sepihak karya seni dan budaya, seperti *tari pendet*, *tari kecak*, lagu *rasa sayange*, dan motif *batik*; serta (5) pendiskreditan terhadap

tokoh-tokoh bangsa Indonesia (Bapak B.J. Habibie dan Bapak Abdurrahman Wahid) oleh warga negara Malaysia.

Pembicaraan jauh akan lebih menarik dan menghangat lagi bila konteks jati diri dan martabat bangsa tersebut dikaitkan dengan masalah penggunaan bahasa, yaitu bahasa Melayu yang merupakan asal usul bahasa Indonesia (BI). BI yang dipakai sekarang ini tidak sama lagi dengan bahasa Melayu yang menjadi asalnya. BI telah banyak menerima anasir-anasir dari bahasa daerah dan bahasa asing. Dibandingkan dengan bahasa Melayu Malaysia dan Melayu Brunei, Penelitian Sugono (2008:4) menunjukkan bahwa—berdasarkan *indeks token*—persamaan bahasa Indonesia, sebagai bahasa yang berasal dari rumpun bahasa Melayu, dengan bahasa Malaysia hanya berkisar 31% dan dengan bahasa Brunei hanya 26%. Dalam perkembangan selanjutnya persamaan ini diprediksi akan semakin jauh mengingat BI lebih lebih mengutamakan istilah BI itu sendiri dalam perkembangannya, barulah kemudian bahasa daerah dan bahasa asing (terutama bahasa Inggris).

Fauzi sebagaimana dimuat Majalah *Tempo* (18 Mei 2009) mengatakan bahwa para pekerja Indonesia baik TKI maupun PRT di Malaysia menggunakan bahasa Melayu Malaysia (BM) yang terkadang sudah "bernuansa" Indonesia (bercampur dengan gaya, makna, dan intonasi bahasa Indonesia)—sederhananya, sebut saja "bahasa Malindo" atau "bahasa campuran Malaysia-Indonesia".

Tak sebatas itu, Fauzi juga merujuk pada pengalaman pribadinya, "Pengaruh bahasa Melayu itu masih terasa walau majikan pekerja itu adalah orang Indonesia juga. Bukti nyatanya, ya keluarga saya sendiri. Kedua anak saya, Aji dan Bintang, belajar di dua sekolah: pagi di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, dan petang di sebuah sekolah agama (madrasah) di Malaysia. Jadi, bisa dipastikan: betapa bahasa mereka benar-benar 'bahasa Malindo'! Walau setiap saat kami berusaha berkomunikasi dengan bahasa Indonesia, *sikit-sikit* tetap saja 'berbau' Melayu. Lucu, rada aneh, tapi *seronok*," demikian ungkap Fauzi.

Lebih jauh Fauzi menyimpulkan bahwa kemampuan WNI dalam berbahasa daerah (asal mereka) ternyata tak berubah. Berapa lama pun mereka tinggal di Malaysia, dengan etnis apa pun mereka bergaul, mereka tetap fasih berbahasa daerah tatkala berkomunikasi dengan rekan sekampung. Buktinya, di daerah *Chow Kit*, Kuala Lumpur, misalnya, yang terkenal sebagai "mini Indonesia", sering terdengar antarsesama WNI tengah *ber-kumaha-ria* atau *ber-piye-kabare* dalam versi Sunda, Jawa, Minang, Madura, Aceh.

Pada sisi lain, di Kuala Lumpur (Malaysia) terdapat lembaga sekolah untuk masyarakat Indonesia yaitu sekolah Indonesia Indonesia Kuala Lumpur (SIKL) yang pengelolaannya di bawah Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dalam hal Kemenlu dan Kemendikbud. Sebagai sekolah Indonesia tentu saja kurikulum yang digunakan adalah kurikulum pendidikan di Indonesia. Tujuan pendidikannya jelas merujuk pada tujuan pendidikan nasional dan tentu saja pemakaian Bahasa Indonesia pada premis sekolah Indonesia adalah wajib.

Dari uraian di atas dapat diketahui bagaimana kompleksnya permasalahan pemakaian BI dalam konteks pemerkuatan jati diri dan pemertabatan bangsa di luar negeri khususnya di Malaysia. Permasalahan dalam tulisan adalah bagaimanakah peran SIKL dalam memperkuat jati diri dan memertabatkan bangsa melalui pembelajaran bahasa Indonesia di kalangan siswa SIKL? Untuk menjawab permasalahan ini pada tulisan ini akan disampaikan: latar belakang siswa SIKL; pembelajaran BI di SIKL; hambatan-hambatan yang ditemui; serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

2. Latar Belakang Siswa

SIKL merupakan institusi pendidikan yang berada dalam dua naungan kementerian, yaitu Kementerian Luar Negeri (Kemenuk) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Dari ke-14 sekolah Indonesia luar negeri (SILN), hanya Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK) yang sepenuhnya bernaung di Kemendikbud. Saat ini terdapat empat belas SILN yang tersebar di berbagai negara, seperti: (1) Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL) di Kuala Lumpur, Malaysia; (2) Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK) di Kinabalu Malaysia; (3) Sekolah Indonesia Singapura (SIS) di Singapura; (4) Sekolah Indonesia Bangkok (SIB) di Thailand; (5) Sekolah Indonesia Nederland (SIN) di Belanda; (6) Sekolah Indonesia Moskow (SIM) di Rusia; (7) Sekolah Indonesia Davao (SID) di Filipina; (8) Sekolah Indonesia Cairo (SIC) di Mesir; (9) Sekolah Indonesia Riyadh (SIR) di Arab Saudi; (10) Sekolah Indonesia Yangon (SIY) di Myanmar; (11) Sekolah Indonesia Jedah (SIJ) di Arab Saudi; (12) Sekolah Indonesia Tokyo (SIT) di Jepang; (13) Sekolah Indonesia Damaskus (SID) di Siria; serta (14) Sekolah Indonesia Beograd (SIBE) di Yugoslavia.

Keberadaan SIKL dan latar belakang siswanya sangat berkaitan dengan sejarah berdirinya SIKL. Berdasarkan buklet terbitan SIKL berjudul "Profil Sekolah Indonesia Kuala Lumpur" keberadaan SIKL dimulai sejak dibukanya kembali Kantor Penghubung Republik Indonesia untuk Malaysia pada tahun 1967. Pada saat itu para *home staff* dan *local staff* KBRI Kuala Lumpur memandang perlu adanya sebuah institusi sekolah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi putra-putri mereka.

Apa yang dirasakan para *home staff* dan *local staff* KBRI mendapat tanggapan positif dari Atase Pendidikan KBRI yang pada saat itu dijabat oleh Bapak Bambang Sumadio. Sejak itulah meskipun dalam keterbatasan sarana dan prasarana, SIKL (waktu itu disingkat SIK) mulai menyelenggarakan pembelajaran. Saat itu belajar hanya seminggu sekali, setiap hari Sabtu. Gurunya pun hanya dua orang yaitu Bapak Umar Rauf dan Bapak Rawi Hadis.

Kegiatan belajar berlangsung tersendat dan sempat dihentikan karena mengalami kesulitan teknis. Setelah Atase Pendidikan dan Kebudayaan diserahterimakan kepada Bapak Muhammad Alwi Oemry. Kegiatan belajar dibuka kembali. Prakarsa untuk mendirikan SIKL itu memperoleh dukungan sepenuhnya dari Bapak Mayjen H. A. Thalib Gelar Deputi Santio Bawo, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Kerajaan Malaysia beserta jajarannya. SIKL diresmikan pada 10 Juli 1969 dengan penggungtingan pita oleh Ibu Nurdjanah Thalib, istri Duta Besar LBBP, dan kata sambutan dari Yang Mulia Dato' Haji Abdul Rachman Yakob, Menteri Pelajaran Malaysia pada saat itu. Doa penutup disampaikan oleh Bapak R.S. Sofyan, yang menjadi guru mata pelajaran Agama. Atase Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Muhammad Alwi Oemry ditugaskan sebagai kepala SIKL yang pertama. Secara resmi pendirian SIKL telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 05/1971 tanggal 7 Januari 1971.

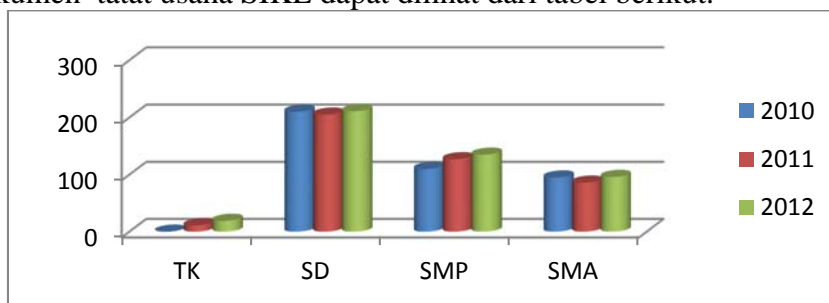
Saat ini SIKL telah maju dengan pesat dan menyelenggarakan pendidikan mulai dari jenjang taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA). Adapun jumlah keseluruhan siswa yang belajar di SIKL adalah 454 siswa. Dari jumlah tersebut dapat diperinci untuk jenjang TK sebanyak 19 siswa; jenjang SD sebanyak 209 siswa; jenjang SMP sebanyak 132 siswa; serta jenjang SMA sebanyak 91 siswa.

Tidak seperti awal berdirinya, siswa SIKL berasal dari putra-putri kalangan *home staff* dan *local staff* KBRI sekarang, sekarang siswa SKIL berasal dari putra-putri dari para profesional, dosen, *student*, guru, pekerja, dan lain-lain. Penamaan status pekerjaan yang digunakan dalam tulisan ini mengikuti istilah yang lazim dipakai di Malaysia.

Siswa yang belajar di SIKL pun tidak semua siswa permanen, maksudnya masuk di awal tahun pelajaran dan keluar setelah tamat. Penerimaan siswa di SKIL sepanjang tahun

dan mutasi siswa pun setiap saat. Hal itu terjadi karena mengikuti pekerjaan orang tua mereka. Oleh sebab itu kohor pergerakan siswa keluar-masuk di SIKL sangat fluktuatif.

Gambaran jumlah siswa SIKL dan latar belakang orang tua siswa berdasarkan sumber dari dokumen tatat usaha SIKL dapat dilihat dari tabel berikut.



3. Pembelajaran BI

Pembelajaran BI di SKIL dilaksanakan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku secara nasional. Sampai saat ini, tahun pelajaran 2012/2013, SIKL menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Dalam standar isi (SI) jelas disebutkan bahwa pelajaran bahasa Indonesia untuk jejang SD adalah 5 jam pelajaran per minggu; SMP 4 jam pelajaran per minggu; dan SMA 4 jam pelajaran per minggu. Begitu pula standar kompetensi dan kompetensi dasar yang diajarkan sesuai dengan kompetensi yang disyaratkan secara nasional dan kembangkan di tingkat satuan pendidikan.

Tentu saja tulis ini tidak akan menjelaskan secara panjang lebar pembelajaran bahasa Indonesia berdasarkan acuan KTSP, tetapi yang perlu dijelaskan di sini adalah bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran BI terhadap siswa SIKL di tengah kondisi perbedaan sosial masyarakat karena perbedaan negara. Siswa masuk sekolah pukul 07.45 kemudian pulang sekolah pukul 14.15. Dalam perjalanan dari sekolah ke tempat tinggal atau sebaliknya (saat melintas di depan pertokoan atau kedai, berpapasan dengan orang-orang di sepanjang koridor jalan menuju stasiun KTM (kereta tanah Melayu), stasiun MRT, dan stasiun monorel, saat berada dalam gerbong KTM, MRT, atau monorel) siswa sudah berada dalam lingkungan masyarakat Malaysia yang *nota bane* di sana menggunakan bahasa Melayu Malaysia, bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa India (dapat ditambahkan bahasa campuran antara ketiganya).

Di SKIL sepenuhnya siswa menggunakan BI, kecuali dalam konteks sedang belajar bahasa asing. Pelajaran pertama di dalam kelas biasanya diawali dengan siswa memberikan salam, berdoa sebelum belajar dan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Setelah itu barulah pembelajaran berlangsung sebagaimana seharusnya. Pada tulisan ini akan dipaparkan proses belajar-mengajar pada pokok bahasan menulis pantun dan kalimat efektif dalam pelajaran bahasa Indonesia untuk siswa kelas 7 SMP.

Pada pembelajaran menulis pantun, langkah awal pembelajaran yang sering penulis lakukan adalah dengan mengajak siswa menyanyi bersama mengikuti irama lagu. Lagu yang diperdengarkan tentu telah dipilih sedemikian rupa sehingga syairnya memenuhi syarat-syarat sebuah pantun. Demikian pula media yang digunakan, biasanya proyektor dan pengeras suara sudah tersedia dalam kelas, guru hanya menyiapkan instrumen lagu melalui komputer jinjing (laptop).

Hari itu dalam pembelajaran menulis pantun di kelas VII, siswa menyanyikan lagu dengan syair “Cicak Rowo” yang bunyinya lebih kurang sebagai berikut:

*Kucoba-coba melempar manggis
Manggis kulempar mangga kudapat
Kucoba-coba melamar gadis
Gadis kulamar janda kudapat*

Demikianlah siswa menyanyi dengan riang seirama dengan lagu yang dipopulerkan oleh Didi Kempot itu. Setelah itu guru menjelaskan tujuan pembelajaran hari itu dan memberikan gambaran fungsi pantun bagi masyarakat Indonesia yang lebih banyak memiliki tradisi sebagai masyarakat Melayu. Pada saat ini dieksplorasi sebanyak mungkin nilai-nilai yang tercatat dalam sebuah pantun sebagai ciri masyarakat Melayu, yaitu pantun sebagai media berkomunikasi antarmuda-mudi, menyambut tamu, acara perkawinan, nasihat orang tua kepada negerasi muda, dan senda gurau dalam keadaan santai seperti teka-teki.

Guru mengajak siswa menganalisis ciri-ciri pantun berdasarkan model syair lagu “Cicak Rowo” yaitu: (1) berjumlah empat baris; (2) bersajak a-b-a-b; baris ke-1 dan ke-2 merupakan sampiran; baris ke-3 dan ke-4 merupakan isi. Tentu analisis tersebut lebih banyak dikaitkan dengan pengalam siswa dan pemaknaan arti sampiran dan isi.

Setelah siswa benar-benar memahami ciri-ciri pantun tersebut, siswa diajak untuk mengutak-atik bait-bait sampiran dan bait-bait isi. Misalnya dengan mengganti kata *melempar manggis* dengan *mengiris buncis* atau *merebus kubis*; mengganti kata *mangga* dengan *kelapa* atau *jambu*. Intinya siswa pada akhirnya dapat menyimpulkan bahwa perubahan bait terakhir dari sampiran juga akan mengubah isi dan membongkar bait-bait sampiran tanpa memperhatikan isi akan membuat pantun tersebut kehilangan “pantunnya”.

Bila pemahaman siswa dirasakan mantap, tentu pertanyaan yang diajukan siswa dijadikan indikatornya, barulah siswa diberi latihan berupa bait-bait pantun yang rumpang, baik pada sampiran hanya disediakan isi atau rumpang pada isi hanya disediakan sampiran serta variasi di antaranya.

Pelajaran akan berlangsung terus sampai siswa dapat membuat pantun sendiri. Tugas itu diberikan sebagai pekerjaan rumah. Pertemuan berikutnya siswa menyanyikan pantun yang telah mereka buat sendiri itu dengan menggunakan model lagu lain seperti “Ayam Jago” atau “Rasa Sayange”.

Demikianlah contoh satu pembelajaran bahasa Indonesia di kelas VII SIKL pada materi pelajaran menulis pantun. Pembelajaran seperti ini selain memberikan pemahaman tentang pantun pada siswa juga ditanamkan rasa nasionalisme dengan merasa bangga pada jati diri bangsa yang memiliki berbagai kearifan dalam setiap perilaku masyarakatnya.

Pada pembelajaran kalimat efektif pun materi pembelajaran diangkat dari kalimat-kalimat yang bersumber dari kalimat, frasa, dan kata yang dikenal siswa. Penjelasan dimulai dari substansi berbahasa yaitu sebagai alat komunikasi. Tentu saja komunikasi yang baik adalah komunikasi yang berterima antara pembicara dan lawan berbicara. Lebih daripada itu ucapan atau tulisan yang disampaikan pembicara mewakili pikiran dan perasaannya. Ucapan atau tulisan yang berbelit-belit sehingga tidak jelas juga mencerminkan jalan berpikir penutur atau penulisnya. Coba bandingkan dengan kalimat berikut: *Menjual hasil tembakau kepada*

orang belum 18 tahun adalah dilarang dan kalimat *Dilarang menjual rokok kepada anak di bawah umur*.

Kedua kalimat itu menginformasikan hal yang sama tetapi kalimat kedua merupakan kalimat yang efektif dalam bahasa Indonesia karena lebih ringkas, lebih cepat dipahami, struktur kalimat sederhana (S-P-O-K) sedang kalimat pertama (K-P-Pel) tanpa subjek. Kata *hasil tembakau* (merupakan produk tetapi belum tentu rokok atau sigaret) padahal yang dimaksudkan adalah *rokok*, sehingga sudah frasanya panjang malah tidak jelas.

Di sinilah letak bahasa menunjukkan cara berpikir (budaya) seseorang. Kalimat dalam BI adalah kalimat yang efektif (jelas, singkat, dan padat) sehingga tidak bermakna taksa. Lalu siswa mencoba mensinarai beberapa kalimat yang biasa ia temukan. Hasilnya seperti berikut: *Pusat perkhimatan hawa sejuk kereta*. (diterjemakan menjadi: *Pusat perbaikan AC mobil*). *Bangunan ini sedang ada pembinaan naik taraf, segala kesulitan amat dikesali* (diterjemahkan menjadi: *Bangunan ini sedang diperbaiki, mohon maaf atas ketidaknyamanan Anda*).

4. Hambatan-Hambatan

Mengajarkan BI bagi putra-putri masyarakat Indonesia di Malaysia ternyata bukanlah pekerjaan mudah. Banyak faktor penghambat, di antaranta adalah BM dan BI merupakan dua bahasa yang serupa tapi tak sama. Terdapat beberapa kata/frasa dalam bahasa Indonesia juga dipakai dalam BM, tetapi kata yang sama itu memiliki makna yang berbeda bahkan sangat jauh artinya.

Dampaknya adalah seperti yang disinyalir oleh Fauzi dalam tulisannya di atas mengatakan celaknya bahasa yang dipakai siswa bukan pula BM yang sebenarnya tetapi juga bukan BI yang baik dan benar sehingga muncul bahasa baru yang oleh Fauzi pada awal tulisan ini disebut dengan bahasa Malindo (Malaysia-Indonesia).

Beberapa bahasa Indonesia (kalimat, klsusa, frasa, dan kata) yang serupa tapi tak sama dengan BM adalah sebagai berikut.

No	Kata	Makna dalam BI	Makna dalam BM
1	banci	waria (wanita pria)	sensus
2	boleh	bisa/dapat	dapat
3	butuh	perlu	ingin (birahi)
4	cemas	khawatir	darurat (<i>emergency</i>)
5	cuti	izin tidak bekerja	libur
6	dewan	majelis atau badan	aula/balai
7	gaduh	rusuh	berkelahi
8	ibu pejabat	orang tua perempuan pejabat	kantor pusat
9	jeruk	buah <i>orange</i>	manisan
10	jimat	ajimat	hemat
11	kakak	lelaki yang lebih tua	perempuan yang lebih tua
12	kaki tangan	antek, budak	pekerja (staf)
13	kereta	kendaraan, kereta angin	mobil
14	kira	duga	hitung
15	lewat/liwat	lalu	sodomi
16	mangsa	memakan/sasaran kejahatan	korban
17	meletup	ledakan kecil (mercon)	ledakan besar (<i>explosive</i>)
18	pejabat	orang yang menjabat	kantor (<i>office</i>)
19	pemandu	penuntun (<i>guide</i>)	sopir
20	percuma	gratis	sia-sia
21	pokok	utama	pohon
22	pusing	pening	berputar arah

23	semalam	tadi malam	kemarin
24	senang	riang	mudah
25	sulit	sukar	rahasia
26	tandas	habis sama sekali	toilet

Mengingat banyak bentuk kata yang serupa tapi tak sama tentu saja dalam pembelajaran BI guru harus menjelaskan terlebih dahulu makna kata itu sebelum dipakai dalam kalimat. Beberapa materi pelajaran dalam BI yang harus menjelaskan terlebih dahulu istilah-istilah yang serupa tapi tak sama tersebut misalnya materi tentang gagasan pokok paragraf, kata bersinonim dan berantonim, kata baku dan tidak baku serta kalimat efektif.

5. Upaya yang Dilakukan

Sebagaimana dijelaskan di awal tulisan ini bahwa pembelajaran BI terhadap putra-putri masyarakat warga negara Indonesia di SIKL memiliki situasi yang berbeda dengan para siswa di tanah air. BI sebagai alat komunikasi juga merefleksikan budaya, cara berpikir, karakter manusia Indonesia sebagai jati diri. Di tengah situasi masyarakat luar yang memakai bahasa Melayu Malaysia, bahasa Inggris, bahasa Cina, dan bahasa India, anak-anak Indonesia harus memiliki kebanggaan terhadap BI. Untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut pembelajaran BI di SIKL tidak hanya dilakukan baik melalui kegiatan kurikuler (dalam mata pelajaran sesuai dengan standar isi kurikulum) tetapi juga kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler.

Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler tersebut adalah sebagai berikut: (1) pembelajaran bahasa Indonesia di luar kelas melalui *project based learning* (PBL); (2) lomba pidato dan bahasa puisi berbahasa Indonesia; (3) kegiatan bengkel sastra; (4) penulisan slogan-slogan di beberapa sudut sekolah yang berisi keharusan menggunakan bahasa Indonesia; (5) memperbaiki secara langsung 'direct' kata/kalimat siswa yang salah; serta (6) pembelajaran BI bagi siswa *homestay*.

(1) *Project Based Learning (PBL)*

Istilah yang digunakan dalam kegiatan ini menggunakan bahasa Inggris karena siswa belajar di luar kelas berbasis proyek (tugas) dari berbagai bidang studi, seperti IPA dan IPS. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok dan kelas yang pada akhir kegiatan siswa harus membuat laporan dan mempresentasikan hasil tugas tersebut dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Semester lalu (semester II tahun pelajaran 2012/2013) siswa mengunjungi tempat penangkaran gajah dan suku anak dalam yang berada di Pahang, Malaysia. Para siswa diharuskannya mengamati segala gejala alam mulai dari hewan (gajah), tumbuhan, serta mengambil sampel air yang berada di sana untuk diuji tingkat keasamannya. Tentu saja kegiatan inti dipandu guru IPA. Selain itu juga mengunjungi tempat pemukiman suku anak dalam (*orang asli* dalam BM). Di sini juga siswa mencatat cara kehidupannya, kebiasaannya, serta berbagai peralatan yang sering digunakan termasuk bentuk-bentuk permainan tradisional mereka. Dari kegiatan ini siswa diarahkan untuk menggali pengetahuan dari alam (lingkungan) dan budaya (negara luar) selanjutnya mempersepsinya dengan alam dan budaya Indonesia sebagaimana yang mereka ketahui sebelumnya.

(2) *Lomba Pidato dan Baca Puisi Berbahasa Indonesia*

Lomba pidato dan baca puisi merupakan kegiatan rutin yang dilakukan di SIKL terutama berkaitan dengan peringatan hari besar dan hari bersejarah, seperti Hari Pahlwan, Hari Kartini, Bulan Bahasa, peringatan Hari Kemerdekaan RI dan lain-lain.

Kegiatan lomba pidato dan baca puisi yang baru saja dilakukan adalah dalam rangka Bulan Bahasa dan Hari Pahlawan Tahun 2012. Kegiatan ini menjadi meriah dan berskala besar karena pelaksanaannya bukan saja oleh SIKL, tetapi juga berpadu dengan program Atase Pendidikan KBRI Kuala Lumpur. Hal ini sengaja dilakukan karena selain memperkuat jati diri dan mempertebal rasa kebangsaan kepada seluruh siswa, juga sekaligus menyeleksi para pemenang untuk dipersiapkan mewakili sekolah saat kegiatan lomba seni untuk sekolah luar negeri (SILN) yang biasanya setiap tahun diselenggarakan oleh Kemdikbud.

(3) Kegiatan Bengkel Sastra

Kegiatan bengkel sastra merupakan kegiatan yang ditujukan kepada siswa termasuk guru yang berminat belajar menulis dan mengapresiasi sastra Indonesia. Kegiatan ini dimulai dengan pelatihan menulis lalu apresiasi sastra Indonesia. Hasilnya para peserta dapat menuangkan gagasan/pikiran dalam tulisan baik berupa fiksi maupun nonfiksi dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kegiatan ini mendatangkan para sastrawan dan penyair nasional yang berkolaborasi dengan guru bahasa Indonesia SIKL. Tahun lalu tepatnya November 2012, kegiatan bengkel sastra SIKL mengundang Jamal D. Rahman dan Joni Ariadinata. Hasil tulisan peserta kegiatan bengkel sastra diterbitkan dalam bentuk bunga rampai atau kumpulan cerita pendek.

(4) Penulisan Slogan-Slogan

Slogan, poster, iklan dan pengumuman merupakan salah satu kompetensi yang diajarkan kepada siswa dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia di SIKL. Penerapan dari kompetensi menulis slogan, poster dan iklan tersebut adalah penulisan slogan yang menganjurkan pemakaian BI dengan baik dan benar. Slogan-slogan tersebut di tempatkan (dipasang) di sudut-sudut dinding sekolah atau tempat-tempat strategis lain. Salah satu contoh slogan yang berisi kewajiban menggunakan BI dan rasa bangga menjadi anak Indonesia di lingkungan SIKL dapat dilihat dari gambar berikut.



Salah satu slogan yang berisi kewajiban menggunakan BI dan kebanggaan menjadi anak Indonesia di pasang di dinding gedung SIKL (dok. SIKL)

(5) Pembimbingan Langsung

Wilayah dengan menggunakan premis Indonesia di Kuala Lumpur ada dua yaitu KBRI dan SIKL. Selangkah keluar dari pagar kawasan tersebut berarti sudah berada di negara luar, yaitu Malaysia. Ini artinya di luar pagar kawasan tadi sudah berlaku hukum negara setempat. Konsekuensi dari hal tersebut tentu saja sangat tidak dibenarkan siswa berada di luar lingkungan SIKL baik pada jam istirahat apalagi pada jam pelajaran berlangsung. Di dalam lingkungan SIKL inilah para siswa melakukan berbagai aktivitas, seperti belajar, bermain, berolahraga, berkesenian, jajan di kantin, dan lain-lain.

Saat menemani dan mengawasi—termasuk mengamati kedisiplinan mereka dalam berpakaian, dan hal-hal lain sesuai dengan isi peraturan sekolah—guru berinteraksi secara langsung dengan siswa. Pada saat ini biasanya guru akan segera memperbaiki kalimat lisan, termasuk logat berbicara siswa yang cenderung terkontaminasi dengan bahasa asing (terutama BM). Misalnya, siswa menyebut *tandas* saat meminta izin ke *toilet*. Begitu juga kalimat, “Boleh tak saya nak bagi balik buku ini ke teman saya.” Guru akan mengizinkan siswa tersebut mengembalikan buku itu kepada temannya dengan syarat siswa mengulangi lagi kalimat yang ia ucapkan dengan menggunakan BI, sehingga menjadi, “Bolehkah saya mengembalikan buku ini kepada teman saya”.

(6) Pembelajaran BI kepada Pelajar Asing

SIKL tidak hanya melayani pendidikan bagi putra-putri masyarakat Indonesia di Kuala Lumpur, tetapi juga melayani pelajar asing yang ingin mempelajari budaya dan bahasa Indonesia, seperti yang baru-baru ini siswa dari *Ferny Grove SHS* Australia dan siswa dari Victoria, Australia.

Berdasarkan pengakuan Mr. Michael Ring, salah seorang pembimbing *homestay* siswa Victoria Australia, sebagaimana dimuat dalam pers rilis SIKL, mengatakan bahwa pelajaran BI merupakan salah satu pelajaran favorit bagi siswa di Victoria, Australia karena dianggap penting, mudah, serta netral.

Michael mengatakan, “Ada enam bahasa asing yang diajarkan di sekolah-sekolah di Australia, yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Italia, Bahasa Cina, Bahasa Jepang, Bahasa Jerman, dan Bahasa Prancis.”

5. Penutup

Upaya yang dilakukan SIKL dalam memperkuat jati diri dan memartabatkan bangsa melalui pembelajaran BI di kalangan siswa SIKL dilakukan baik melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler, seperti: (1) pembelajaran bahasa Indonesia di luar kelas melalui *project based learning* (PBL); (2) lomba pidato dan bahasa puisi berbahasa Indonesia; (3) kegiatan bengkel sastra; (4) penulisan slogan-slogan di beberapa sudut sekolah yang berisi keharusan menggunakan bahasa Indonesia; (5) memperbaiki secara langsung ‘direct’ kata/kalimat siswa yang salah; serta (6) pembelajaran BI bagi siswa *homestay*.

Mengingat peran SIKL bukan hanya melayani bidang pendidikan seperti kompetensi berbahasa Indonesia bagi putra-putri masyarakat Indonesia di Kuala Lumpur Malaysia, tetapi lebih jauh daripada itu yakni mengenalkan budaya Indonesia pada umumnya (tarian, nyanyian, alat musik, adat-istiadat dan tentu saja bahasa Indonesia) maka perlu dukungan semua pihak sebagaimana yang sering disebut Prof. Rusdi, Ph.D., Atase Pendidikan KBRI Kuala Lumpur, bahwa selain memberikan pembelajaran untuk siswa, SIKL juga memiliki fungsi sebagai *soft diplomatic* dalam membangun dan mengenalkan citra Indonesia kepada masyarakat internasional.

6. Daftar Bacaan

Fauzi, Nasrullah Ahmad. 2009. (online). (<http://rubrikbahasa.wordpress.com/2009/05/18/bahasa-malindo>). Diunduh tanggal 1 Juni 2013).

KBRI Kuala Lumpur. 2010. *Kamus Indonesia-Malaysia-Inggris*. Pensosbud. KBRI Kuala Lumpur.

Kemdikbud. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta.

UPAYA PEMARTABATAN BAHASA NASIONAL DI TENGAH BERATNYA TERPAAN

E. Aminudin Aziz

Universitas Pendidikan Indonesia

aminudin@upi.edu

Abstrak

Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2009 mengamanatkan kepada Pemerintah agar mengembangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, memelihara dan mempertahankan bahasa daerah, dan mengusahakan internasionalisasi bahasa Indonesia. Amanat konstitusional tersebut tentu saja bukanlah merupakan tugas yang mudah, mengingat kompleksitas kebahasaan yang ada di dalam konteks masyarakat yang global ini. Setiap pengguna bahasa melakukan pergerakan yang amat cepat dan intensif dari satu tempat ke tempat lain, bahkan—mengingat tuntutan kebutuhan komunikasi yang dihadapinya—ia harus menggunakan bahasa-bahasa yang berbeda. Tuntutan untuk menggunakan bahasa daerah semakin berkurang, bahkan melemah, sebab ia hanya dipakai di lingkungan yang amat terbatas dan di dalam konteks komunikasi yang lebih mengedepankan ikatan emosional di antara para pihak yang terlibat dalam konteks tersebut. Penggunaan bahasa nasional sangat dipengaruhi, bahkan sampai derajat tertentu ditentukan, oleh deras dan kuatnya tekanan bahasa asing. Di sisi lain, kesadaran dan sikap penutur jati bahasa Indonesia terhadap bahasa nasional Indonesia sangat lemah. Makalah ini akan memotret realitas kekinian bahasa nasional Indonesia yang sejatinya menjadi salah satu kebanggaan dan jati diri bangsa Indonesia seperti diamanatkan oleh konstitusi tadi. Dalam konteks ini, konstitusi Negara telah mencoba merumuskan upaya pemertabatan bahasa nasional tersebut. Namun, di sisi lain, akan tergambarkan kondisi bahasa Indonesia sebagaimana digunakan oleh para penuturnya, yang sampai sejauh tertentu, menyiratkan ketidakbanggaan menjadi pengguna bahasa Indonesia. Akibatnya, bukan hal yang mustahil, adalah justru telah dan tengah terjadi (upaya) pembusukan bahasa nasional oleh para penuturnya sendiri. Penulis meyakini, salah satu sumber penyebabnya adalah karena situasi kebahasaan saat bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa nasional pada 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia, yang diambil dari bahasa Melayu, bagaimanapun bukan merupakan atau tidak menjadi nilai budaya inti bangsa Indonesia, yang akibatnya kebanggaan dan rasa memiliki secara hakiki terhadap bahasa nasional itu dapat luntur seiring dengan perkembangan jaman yang meliputinya. Oleh karena itu, makalah ini menawarkan sejumlah peluang untuk tetap menjadikan bahasa Indonesia hidup dan bermartabat dalam terpaan dan kencangnya angin globalisasi.

Kata-kata kunci: pemertabatan, bahasa nasional, nilai budaya inti, lingua-franca plus

1. Pengantar

Usia bahasa persatuan Indonesia kini genap 85 tahun. Sebagai bahasa yang ‘baru’, perkembangan bahasa Indonesia bisa dikatakan sangat cepat. Bahkan, apabila ditelusuri jejak bahasa Indonesia pada awal kelahirannya lalu dibandingkan dengan situasi saat ini, kondisi bahasa Indonesia kini boleh dikatakan sudah ‘berganti baju’, dari status sebagai kreol bahasa Melayu yang berfungsi hanya sebagai *lingua franca* ke sosok yang sepertinya kokoh sebagai sebuah bahasa moderen. Selain sebagai bahasa pergaulan, bahasa Indonesia bisa tampil sebagai bahasa pengantar di forum-forum yang semi formal bahkan sangat formal. Bahasa Indonesia pun dapat tampil sebagai pergaulan ilmiah dan sebagai bahasa ilmiah sekaligus. Dengan kata lain, semua prasyarat yang harus dimiliki untuk disebut sebagai sebuah bahasa standar dan memiliki daya hidup yang kuat dapat ditemukan

dalam situasi bahasa Indonesia kini. Bagaimanapun, ini merupakan buah dari politik bahasa nasional yang terarah dan dikawal sejak awal.

Tuntutan agar bahasa Indonesia terus berkembang dalam sosoknya yang moderen memperoleh penguatan legal, ketika diterbitkan Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan. Selain akan terus berkembang dengan sokongan kekayaan yang ada dalam bahasa-bahasa dan budaya daerah, bahasa Indonesia juga akan secara terbuka menerima— karena memang tidak mungkin menolak atau bahkan membendung sama sekali— pengaruh dari bahasa dan budaya asing. Saking kuatnya dorongan untuk mengembangkan bahasa nasional ini, pada UU tersebut bahasa Indonesia bahkan didorong untuk menjadi bahasa internasional. Harapan yang termaktub dalam dokumen legal tentang politik bahasa ini tentu saja harus difahami sebagai sebuah upaya untuk mengangkat martabat bahasa nasional Indonesia ke tataran yang lebih terhormat.

Namun demikian, upaya pemertabatan yang diusung melalui politik bahasa nasional ini, tampaknya tidak senantiasa sejalan dengan realitas yang ditemukan dalam masyarakat pengguna bahasa Indonesia. Mereka seolah-olah melakukan ‘pemberontakan’ terhadap bahasa Indonesia, yang pada gilirannya, baik secara sadar ataupun tidak, justru melemahkan bahkan merusak martabat bahasa Indonesia itu sendiri. Gejala alih/ganti kode yang tidak pada tempatnya, penggunaan kata atau frasa bahasa asing yang berlebihan, penciptaan ‘bahasa gaul’ yang *over-creative*, pembuatan kebijakan yang salah kaprah, merupakan sejumlah contoh yang bisa dinisbatkan sebagai upaya pelemahan status bahasa Indonesia. Makalah ini akan menilik gejala-gejala kontradiktif seperti disebutkan di atas seraya menawarkan sejumlah langkah yang dapat diambil untuk menjamin pelaksanaan politik bahasa nasional itu berada pada jalur yang dikehendaki keberhasilannya.

2. Seputar Kelahiran Bahasa Nasional Indonesia dan Status Nilai Budaya Intinya

Istilah bahasa Indonesia lahir di tengah-tengah perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka dari penjajah Belanda yang telah sangat lama menghuni negeri Indonesia. Para (pemuda) pejuang yang memimpin pergerakan Indonesia merdeka saat itu berasal dari berbagai suku bangsa. Beberapa di antara mereka merupakan pemimpin dari pergerakan organisasi lokal atau bersifat kesukuan. Tak ayal lagi, mereka pun bertutur dalam bahasa daerahnya.

Namun demikian, pada pergerakan yang lebih menasional, bahasa daerah tidak dapat digunakan untuk berkomunikasi di antara mereka. Mereka harus ‘menyepakati’ sebuah bahasa pengantar yang bisa menyamakan visi pergerakan mereka. Para pejuang itu menyadari bahwa kebersamaan dalam perjuangan harus diikat oleh kesamaan visi, dan visi tersebut akan mudah dimengerti dan dipahami bersama manakala di antara mereka ada bahasa yang sama untuk memahaminya. Di sinilah kesadaran mereka muncul, bahwa bahasa daerah masing-masing tidak mungkin digunakan untuk menyatukan visi perjuangan mereka. Saat itu, bahasa Melayu telah secara luas digunakan sebagai *lingua franca*, bahasa pergaulan di berbagai kalangan. Ekologi bahasa Melayu memberikan ruang yang sangat luas kepada para pemimpin perjuangan Indonesia merdeka untuk menjatuhkan pilihan mereka kepada bahasa Melayu tersebut sebagai bahasa persatuan di antara mereka. Saat itu, pada 28 Oktober 1928, mereka tampil ke muka menyatakan memiliki sebuah bahasa persatuan, yang mereka junjung tinggi dengan nama bahasa Indonesia.

Kelahiran bahasa Indonesia dalam situasi seperti itu menyisakan sejumlah pertanyaan apabila dikaitkan dengan jati diri bahasa Indonesia itu sendiri. Yang manakah sebetulnya yang disebut dengan bahasa Indonesia itu? Kalau dia diturunkan dari bahasa Melayu, mengapa ia tidak disebut

bahasa Melayu saja? Seberapa beda ia dengan bahasa Melayu? Siapa pemilik bahasa Indonesia itu? Akan dibawa ke mana perkembangan bahasa Indonesia itu kelak? Dan masih banyak pertanyaan lain yang bisa ditujukan kepada situasi kelahirannya tersebut.

Sejatinya, sebuah bahasa akan menjadi milik dan identitas para penuturnya. Situasi kelahiran bahasa Indonesia seperti digambarkan di atas tidak memungkinkan ada salah satu pihak yang akan berani menyatakan bahwa bahasa Indonesia adalah milik sebuah kelompok perjuangan atau bahkan milik salah satu suku. Ia melainkan menjadi identitas kelompok yang dinisbatkan kepada seluruh warga bangsa Indonesia. Sebagai identitas dari kelompok yang sangat besar dan luas itu, bahasa Indonesia sangat rentan terhadap kematian atau setidaknya penolakan untuk terus didorong berkembang dan maju. Justru kesamaan visi perjuangan Indonesia merdeka yang kemudian terus mengokohkan keberadaan bahasa Indonesia di tengah-tengah perjuangan mereka. Alih-alih ia mati muda, bahasa Indonesia memperoleh dukungan sangat kuat dari warga bangsa Indonesia untuk terus berkembang dan memperoleh pengayaan dari unsur-unsur bahasa daerah (dan kemudian bahasa asing). Bahkan, pascakemerdekaan, bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa resmi Negara.

Namun demikian, ancaman terhadap kematian bahasa Indonesia tidak kemudian surut. Setidaknya, kalau mengamati status bahasa Indonesia di hadapan para pencetus dan para penuturnya, ia bukan merupakan bagian dari inti budaya masyarakat bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang sengaja diciptakan untuk kepentingan politik perjuangan. Ia tidak tumbuh dan berkembang dari atau sebagai ciri hakiki para penuturnya. Dalam hal ini, Smolicz & Secombe (1985) menyatakan bahwa apabila bahasa bukan merupakan nilai budaya inti sebuah masyarakat, ia akan rentan terhadap penglepasan dan apabila ada upaya pemertahanan, maka upaya itu tidak akan terlalu kuat menopang kekokohan daya hidup bahasa tersebut. Di sisi lain, sikap para penutur terhadap bahasa tersebut pun dikhawatirkan tidak akan terlalu kuat/positif. Ancaman yang bersifat internal inilah yang perlu memperoleh perhatian khusus dalam perencanaan kebijakan atau politik bahasa nasional.

3. Politik Bahasa, Sikap Bahasa, dan Pemertahanan Bahasa

Wujud nyata pertama dari politik bahasa nasional tercermin pada peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Penentuan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan Indonesia sementara bahasa Indonesia bukan merupakan bahasa pertama etnis manapun merupakan sebuah strategi monumental untuk mencegah terjadinya kecemburuan linguistik di antara bahasa-bahasa etnis yang ada di tanah air (Wurm, 2003).

Memang benar adanya bahwa bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu dan bahasa Melayu merupakan bahasa salah satu etnis di Indonesia. Namun, kebijakan ini bukan berarti mengistimewakan etnis Melayu seperti yang terjadi di Malaysia. Menurut Rappa & Wee (2006), Malaysia memberikan hak istimewa kepada etnis Melayu sedemikian rupa sehingga bahasa mereka secara mulus menjadi bahasa nasional. Namun, pemberian hak istimewa ini kemudian mempengaruhi sikap para penutur bahasa Melayu terhadap bahasa lain terutama bahasa Inggris. Mereka kadang menganggap bahwa penggunaan bahasa Inggris secara meluas di ranah-ranah resmi telah menjadikan bahasa Inggris sebagai ancaman terhadap bahasa Melayu, walaupun pada kenyataannya, pada kehidupan sehari-harinya, mereka banyak menggunakan bahasa Inggris. Berbeda dengan Malaysia, penggunaan bahasa Inggris secara meluas di Singapura tidak menjadi isu sensitif bagi orang Singapura karena tidak satu pun bahasa etnis mendapat porsi istimewa. Status Bahasa Inggris di Singapura lebih dipandang sebagai bahasa yang netral. Selaras dengan keadaan di Singapura, di Amerika Serikat, meskipun negara ini menjadi habitat bagi banyak bahasa, namun

hanya satu bahasa yang diakui dengan sangat mulus tanpa konflik yaitu bahasa Inggris (Schmid, 2001). Melihat kenyataan ini, politik bahasa nasional diyakini berhasil mengatasi permasalahan kesatuan bangsa.

Dalam ekosistem yang penuh ragam bahasa, di negeri ini perkembangan penggunaan bahasa Indonesia terlihat pesat dan cenderung 'menekan' eksistensi bahasa-bahasa etnis (lokal) sehingga mengarah pada monolingualisasi atau Indonesianisasi penutur. Monolingualisasi ini terlihat pada contoh kasus penutur bahasa Sunda yang lebih memilih untuk menggunakan dan mengajarkan bahasa Indonesia pada anak-anak mereka. Sikap pengguna bahasa seperti ini akan lebih cepat memicu hilangnya eksistensi bahasa-bahasa etnis. Menurut peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Patji (2011), sebanyak 116 bahasa etnis di Indonesia terancam punah. Selain karena faktor kebijakan pemerintah, faktor desakan dari bahasa yang dominan yang hidup berdampingan dengan bahasa etnis bisa menjadi penyebab punahnya suatu bahasa.

Di satu sisi, bahasa Indonesia bisa mendesak bahasa-bahasa lokal sehingga menyebabkan kepunahan. Di sisi lain bahasa Indonesia terdesak oleh bahasa asing (baca: Bahasa Inggris) karena bahasa tersebut dipandang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Dalam konteks berhadapan dengan bahasa asing, pemertahanan bahasa Indonesia perlu disiasati.

Tidak banyak bahasa yang berhasil bertahan ketika dihadapkan kepada bahasa lain yang lebih dominan. Pada kasus para imigran Eritrea berbahasa Tigrinya yang tinggal di Riyadh, Saudi Arabia, generasi kedua para imigran tersebut tidak bisa mempertahankan penggunaan bahasa Tigrinya. Profisiensi bahasa Tigrinya mereka ternyata lebih rendah dibandingkan profisiensi bahasa Arab (Habtoor, 2012). Fakta serupa terungkap dari penelitian yang dilakukan oleh Najafi (2009) terhadap orang Iran berbahasa Persia yang tinggal di Amerika Serikat yang menunjukkan bahwa generasi pertama tidak hanya fasih berbahasa Persia tetapi juga melek bahasa Persia. Hal ini terjadi karena mereka masih mengalami kontak dengan bahasa Persia di antaranya melalui kegiatan membaca teks-teks dalam bahasa Persia dan menonton acara-acara berbahasa Persia. Kondisi pemertahanan ini terindikasi menurun secara drastis pada generasi kedua karena mereka hanya menguasai bahasa Persia pada tingkat bahasa lisan saja. Demikian halnya dengan bahasa Efik di Nigeria. Para penutur bahasa Efik mayoritas ialah bilingual; selain berbahasa Efik mereka pun berbahasa Inggris. Namun, dalam perkembangannya para penutur ini menjadi lebih banyak menggunakan bahasa Inggris dan meninggalkan bahasa Efik. Kini, bahasa Efik statusnya mendekati punah (Offiong & Ugot, 2012). Pengamatan yang penulis lakukan terhadap para imigran berbahasa Indonesia di kota Melbourne pada rentang 1994-2000 menunjukkan hal yang sama. Generasi pertama yang jelas-jelas berbahasa Indonesia ternyata lebih sering menggunakan bahasa Inggris kepada anak-anak mereka pada saat berkomunikasi baik di rumah ataupun di luar rumah. Akibatnya, generasi kedua imigran Indonesia di Melbourne ini tidak banyak yang kompeten dalam bahasa Indonesia. Hal yang lebih parah lagi bahkan terjadi kepada bahasa pertama (bahasa etnis) mereka, yang sudah tidak lagi digunakan untuk berkomunikasi dengan anak-anak mereka.

Penelusuran literatur menunjukkan bahwa masih ada bahasa yang bisa bertahan hidup ketika berdampingan dengan bahasa yang dominan. Hal ini terungkap pada penelitian yang dilakukan oleh Gooma (2011) pada para imigran Mesir berbahasa Arab yang tinggal di Durham, Inggris. Mereka berhasil mempertahankan bahasa Arab Mesir di tengah-tengah komunitas berbahasa Inggris dan mewariskan bahasa Arab Mesir tersebut pada anak-anak mereka. Faktor utama yang melatari pemertahanan bahasa ini ialah bahwa para imigran melihat bahasa Arab Mesir sebagai nilai budaya inti mereka yang terkait erat dengan agama dan identitas.

Melihat kasus bahasa Tigrinya di Saudi Arabia, bahasa Persia di Amerika Serikat, dan bahasa Efik di Nigeria, akan sangat memprihatinkan apabila bahasa Indonesia menjadi 'imigran' di negerinya sendiri. Dengan kata lain, kompetensi dan profisiensi bahasa Indonesia para generasi awal penutur bahasa Indonesia melebihi bahasa asing, namun menurun pada generasi yang datang kemudian. Bukan hal yang mustahil kalau kebijakan bahasa nasional tidak dilaksanakan dengan konsisten, maka bahasa Indonesia menjadi tak terwariskan dengan baik kepada generasi mendatang.

4. Realitas Kekinian Penggunaan Bahasa Nasional

Walaupun sudah bisa dipastikan bahwa belum semua lapisan masyarakat bangsa Indonesia menggunakannya, bahasa Indonesia kini sudah semakin luas dipakai oleh berbagai kalangan di tanah air. Setiap kelompok pengguna bahasa Indonesia ini unik sesuai dengan perannya masing-masing. Pada bagian ini akan disajikan hasil pengamatan sekilas pandang tentang penggunaan bahasa Indonesia di/oleh tiga kelompok pengguna bahasa yang masing-masing memiliki peran yang amat berbeda. Kita akan melihat bagaimana mereka menggunakan bahasa Indonesia dan bagaimana penggunaan tersebut berpengaruh terhadap potensi kelangsungan bahasa Indonesia ke depan.

a. Di media massa

Peran dan pengaruh media, baik cetak maupun elektronik, dalam upaya mengembangkan dan membina pertumbuhan bahasa Indonesia sangat instrumental. Dengan jangkauan yang amat luas dan kekuatannya yang dahsyat dalam mempengaruhi para pengguna bahasa, media telah banyak membentuk perilaku berbahasa mereka. Penggunaan bahasa di media massa dapat dibedakan ke dalam dua jenis. Pertama, bahasa yang dipakai oleh para awak media itu, baik wartawan, penyiar, ataupun reporter, yang dapat disebut sebagai pewarta, dan yang kedua adalah bahasa yang digunakan oleh pemilik atau sumber berita.

Para pewarta menggunakan bahasa dengan tujuan utama menyampaikan berita kepada para pembaca, pendengar, atau pemirsa sebagai sasaran pemberitaan. Walaupun sejatinya mereka tidak pada tempatnya untuk memberikan opini tentang sebuah isi berita, gaya pemberitaan dan pilihan kata serta kalimat yang dipakai sebetulnya bisa mencerminkan opini mereka. Yang lebih banyak bisa mempengaruhi perilaku berbahasa para pembaca, pendengar, atau pemirsa sebetulnya bukan isi berita atau opini yang disajikan pewarta, tetapi lebih pada pilihan kata yang digunakan para pewarta. Para pembaca, pendengar, dan pemirsa bisa sangat gemar untuk menggunakan khususnya istilah baru atau istilah dari bahasa asing hasil kreasi para pewarta yang secara sengaja dimasukkan ke dalam berita yang dibawanya. Mereka sering beranggapan bahwa istilah baru yang digunakan di media memiliki tingkat keberterimaan lebih luas atau keterfahaman lebih tinggi, mengingat para pewarta akan senantiasa memilih kata yang paling mudah dan paling cepat difahami para pendengar, pembaca, dan pemirsa. Di satu sisi, anggapan itu mungkin benar adanya. Akan tetapi, di sisi lain, kreativitas yang ditunjukkan para pewarta dalam menyampaikan berita menyiratkan setidaknya dua hal. Pertama, para pewarta itu tidak memahami secara utuh ragam yang tepat untuk digunakan dalam menyampaikan berita, sehingga pilihan kata menjadi banyak bercampur antara kata/istilah untuk digunakan sebagai ragam resmi-tidak resmi dan baku-tidak baku. Kedua, khusus terkait dengan penggunaan istilah yang diambil dari bahasa asing, hal itu dapat juga menjadi isyarat tentang terbatasnya penguasaan kosa kata yang dimiliki para pewarta akan bahasa Indonesia atau ketidakmampuan menemukan padanan dalam bahasa Indonesia. Namun demikian, cara yang ditempuh para pewarta bisa

juga karena memiliki alasan lain seperti ingin ‘menonjolkan’ bahasa asing dalam berita yang dibawanya.

Dengan mengambil sampel mata acara yang digunakan oleh 12 stasiun televisi yang dimuat di harian *Pikiran Rakyat* selama satu minggu, mulai 29 September sampai dengan 5 Oktober 2013, penulis menemukan fakta bahwa bahasa yang digunakan oleh stasiun televisi itu dapat dibagi kepada empat kategori. Ada mata acara lokal dengan 1) judul berbahasa Indonesia, 2) judul dan konten berbahasa asing, 3) judul bercampur kode antara bahasa Indonesia dan bahasa asing, dan 4) judul berbahasa asing (lihat Tabel 1.). Hal ini tentu saja menyiratkan sejumlah persoalan bila ditinjau dari upaya pengembangan dan pembinaan bahasa nasional untuk menuju kemartabatannya.

No.	Stasiun Televisi	Mata Acara Lokal dengan Judul Berbahasa Indonesia		Mata Acara Lokal dengan Judul dan Konten Berbahasa Asing		Mata Acara Lokal dengan Judul Berbahasa Asing Campur Kode		Mata Acara Lokal dengan Judul Berbahasa Asing		Jumlah Mata Acara Lokal	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1.	MNC TV	153	95,63%	0	0%	0	0%	7	4,37%	160	100%
2.	RCTI	105	82,68%	0	0%	6	4,72%	16	12,6%	127	100%
3.	SCTV	104	83,87%	0	0%	5	4,03%	15	12,1%	124	100%
4.	ANTV	163	92,09%	0	0%	2	1,13%	12	6,78%	177	100%
5.	INDOSIAR	83	82,18%	0	0%	5	4,95%	13	12,87%	101	100%
6.	TRANS TV	108	71,52%	0	0%	19	12,58%	24	15,9%	151	100%
7.	TRANS 7	147	73,87%	0	0%	12	6,03%	40	20,1%	199	100%
8.	METRO TV	83	50%	2	1,2%	0	0%	81	48,8%	166	100%
9.	TV ONE	136	86,62%	0	0%	3	1,91%	16	11,47%	157	100%
10.	GLOBAL TV	78	82,98%	0	0%	5	5,32%	11	11,7%	94	100%
11.	KOMPAS TV	95	62,91%	0	0%	3	1,99%	53	35,1%	151	100%
12.	NET	4	3,96%	0	0%	0	0%	97	96,04%	101	100%
JUMLAH		1259	73,71%	2	0,12%	60	3,51%	385	22,54%	1708	100%

Tabel 1. Judul Mata Acara Televisi selama Sepekan, 29 September – 5 Oktober 2013

Mata acara lokal dengan judul berbahasa Indonesia tampaknya tidak mengherankan, karena memang acara tersebut ditayangkan di televisi lokal dengan target pemirsa penutur bahasa Indonesia. Pilihan kata/leksikon yang digunakan di media ini pun tidak untuk terlalu jauh dipersoalkan, sebab kita masih melihat hal itu ada dalam batas-batas yang wajar dan mudah difahami maksudnya. Judul mata acara tetap menggunakan kata dan/atau ungkapan yang singkat, walaupun terkadang menimbulkan makna taksa, baik karena bersifat metaforis maupun karena polisemi. Namun, sesuai dengan prinsipnya yang hakiki, media akan selalu mencari leksikon yang diyakini akan bisa menarik perhatian para pemirsa. Akan tetapi, persoalannya menjadi lain manakala kita melihat gejala tersebut dari sudut pandang sikap penutur/pengguna bahasa tersebut terhadap bahasa nasionalnya.

Mencampuradukkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing atau bahkan menggunakan bahasa asing secara sengaja untuk judul sebuah mata acara televisi lokal, bagaimanapun menunjukkan sikap penutur bahasa yang kurang positif terhadap bahasanya. Kita ambil misalnya contoh judul acara *Tukang Bubur Naik Haji: the Series*, *English Teacher Tukang Pecel*, *Economic Challenges*, *Go Spot*, *Spotlite*, *On the Spot*, *Sports7 Akhir Pekan*, *Breaking News*, dan sebagainya. Semua acara itu disajikan dalam bahasa Indonesia, dengan target

pemirsa penutur bahasa Indonesia. Hal yang sama dapat pula ditemukan pada media cetak yang penulis amati. Pengamatan terhadap tiga surat kabar besar, yakni *Republika*, *Media Indonesia*, dan *Pikiran Rakyat* edisi cetak dan dua belas media daring menunjukkan bahwa pada surat-surat kabar dan pada media daring ini judul beberapa tajuknya secara disengaja menggunakan (campuran) bahasa asing (baca: Inggris). Misalnya, kita menemukan *Islam Digest*, *Kick Off* (*Republika*), *Freshion*, *Interlude*, *Sportainment*, *Backpacker*, *Foodaholic*, *Back to Boseh* (*Pikiran Rakyat*), *Kick Andy*, *Move*, *Event*, *Intermezzo* (*Media Indonesia*), *detikNews*, *detikFinance*, *detikHot* (*detik.com*), *Travelounge*, *Tempo Store* (*Tempo.com*), *Entertainment*, *Health*, *Female*, *Travel* (*kompas.com*), *Home Nasional*, *Entertainment*, *Lifestyle* (*JPNN.com* [Jawa Pos])). Sulit mencari alasan yang tepat untuk memberikan pembenaran terhadap penggunaan bahasa seperti itu, kalau bukan tujuan yang amat tendensius atau sensasional. Apalagi, seperti kita percayai, bahasa Indonesia kini berada dalam masa pertumbuhan yang memerlukan pembinaan berkelanjutan.

Bahasa yang digunakan oleh sumber/pemilik berita dapat berasal dari para pejabat publik di pemerintahan, tokoh masyarakat, para pesohor, atau bahkan anggota masyarakat biasa. Cara mereka berbahasa sangat beragam dan memiliki daya tarik tersendiri bagi para pembaca, pendengar, dan pemirsa. Setali tiga uang. Bahasa yang unik yang dikreasi oleh para sumber/pemilik berita ini sering kali menjadi bahan tayangan yang menarik bagi para pewarta. Mereka secara berulang-ulang menayangkan pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh sumber berita. Penayangan yang berulang, apalagi berisi ekspresi yang 'unik', akan bisa menjadi modus bagi para pengguna bahasa untuk menirunya. Apalagi, ekspresi bahasa itu berasal dari para tokoh atau pesohor yang menjadi idola masyarakat. Dapat dipastikan, para pengguna bahasa tidak akan terlalu peduli dengan ketepatan, kelayakan, atau kesesuaian penggunaan ekspresi bahasa itu, sebab mereka lebih memperhatikan tokoh di balik pembuat ekspresi bahasa itu.

Model berbahasa para pejabat publik, tokoh masyarakat, atau pesohor tingkat nasional yang terpotret oleh masyarakat awam punya peluang yang besar untuk dijadikan model berbahasa mereka. Ia bagai gelombang besar dan kuat yang melaju ke pinggiran, bisa menghanyutkan benda-benda yang ada di pinggiran itu dan ikut tersapu bersama deras dan kuatnya gelombang. Penyebaran model berbahasa musiman seperti bentuk *Ali Topan Anak Jalanan* dan *Prambors* pada tahun 80-an, *Debby Sahertian* di awal tahun 2000-an, model berbahasa *Alay* di akhir 2000-an, gaya *Syahrini*, tayangan pada acara *Silet* oleh Peni Rose yang *Lebay*, dan yang terkini fenomena celotehan *Vicky Prasetyo*. Begitu cepat masing-masing cara berbahasa itu menyebar dan ditiru, bukan hanya oleh masyarakat awam tetapi juga oleh masyarakat terdidik, termasuk tokoh-tokoh masyarakat.

Memang benar bahwa cara berbahasa seperti disebutkan di atas itu merupakan gejala sesaat yang akan hilang dalam waktu tidak terlalu lama. Akan tetapi, apabila cara-cara berbahasa seperti itu semakin luas digunakan oleh masyarakat dan dicontohkan penggunaannya oleh tokoh-tokoh, serta diperkuat oleh tayangan dalam media yang beragam saluran (cetak dan elektronik), maka hal itu dikhawatirkan akan mengganggu perkembangan bahasa Indonesia yang sedang tumbuh itu. Apalagi, para pengguna bahasa Indonesia kini lebih banyak terdiri atas kaum muda yang sedang tumbuh dan mencari identitas diri. Bukan hal yang mustahil apabila kelak kemudian hari, bahasa Indonesia mereka tidak ajeg dalam bentuk, yakni dalam konstruksi kalimatnya, dan tidak jelas dalam isi, yakni dalam pesan yang ingin disampaikan. Akibatnya, mereka menjadi pengguna bahasa Indonesia yang kurang

cermat. Padahal, kecermatan berbahasa merupakan cerminan dari kecermatan berpikir dan bernalar. Oleh karena itu, sebagai wujud tanggung jawabnya, media massa, pejabat publik, tokoh masyarakat, dan pesohor sudah selayaknya ikut membangun kecerdasan masyarakat itu melalui pemberian contoh berbahasa yang pantas dan layak, sesuai dengan ranahnya.

b. Oleh masyarakat

Ada dua jenis pengguna bahasa yang dapat dinisbatkan ke dalam kategori masyarakat ini. Pertama adalah kelompok masyarakat pengguna bahasa yang 'elit', yang memiliki peluang, pengaruh, keleluasaan, dan jejaring lebih luas untuk menggunakan bahasa dalam berbagai ranahnya. Termasuk ke dalam kelompok ini adalah masyarakat pengusaha menengah dan besar serta para politisi yang keduanya dapat membuat contoh-contoh penggunaan bahasa sesuai dengan keinginannya, baik bentuk, isi, maupun tempat/medianya. Kelompok kedua mirip dengan kelompok pertama, tetapi dalam lingkup yang jauh lebih kecil. Mereka dapat kita sebut sebagai masyarakat awam. Masuk ke dalam kelompok kedua pun adalah mereka yang punya kecenderungan banyak meniru penggunaan bahasa dari kelompok pertama. Kedua kelompok masyarakat ini berbahasa demi tujuan yang amat praktis. Konstruksi bahasa sering kali tidak menjadi perhatian utama, sebab mereka lebih mementingkan isi/pesan yang ingin disampaikan. Namun demikian, kreativitas berbahasa kedua jenis masyarakat ini mencerminkan tingkat keterampilan berbahasa mereka.

Penggunaan bahasa yang mencerminkan sikap berbahasa kelompok pertama dapat kita temukan pada iklan produk perusahaan atau (untuk kondisi dan situasi saat ini) pada spanduk kampanye pemilihan calon kepala daerah atau anggota legislatif. Para pengusaha pengembang perumahan, misalnya, banyak menggunakan istilah-istilah dari bahasa asing untuk kompleks perumahan yang mereka bangun. Demikian pula para pengusaha hotel, tempat rekreasi, taman hiburan, rumah makan, atau produk barang-barang konsumsi rumah tangga. Para pengusaha besar bahkan tidak tanggung untuk menggunakan iklan produknya dengan menggunakan bahasa asing (baca: Inggris) seluruhnya. Para calon kepala daerah atau calon anggota legislatif pun sepertinya tidak mau ketinggalan oleh para pengusaha. Mereka sepertinya berada pada irama yang sama dalam hal berbahasa.

Gejala ini menunjukkan tidak adanya sikap positif terhadap bahasa nasional sendiri, bahkan mungkin menganggap bahasa Indonesia tidak mampu menyampaikan gagasan dengan baik kepada para pembacanya. Alasan lainnya adalah karena adanya anggapan bahwa gengsi yang dimiliki bahasa Indonesia tidak lebih tinggi daripada gengsi bahasa Inggris, sebagai bahasa internasional. Padahal, sasaran informasi mereka adalah masyarakat penutur bahasa Indonesia. Penghuni perumahan dengan nama kompleks diambil dari bahasa asing pun bisa dipastikan lebih banyak, atau bahkan seluruhnya, orang Indonesia yang bahasa pergaulan sehari-harinya mungkin bahasa daerah atau bahasa Indonesia. Para calon pemilih calon kepala daerah dan calon anggota legislatif pun bisa dipastikan warga setempat, yang sehari-harinya berbahasa daerah atau bahasa Indonesia. Maka muncul pertanyaan, apa alasan paling mendasar dan paling rasional sehingga mereka berbahasa seperti itu? Bukankah itu merupakan isyarat rendahnya rasa percaya diri mereka sebagai penutur bahasa Indonesia sehingga mereka tidak mau menggunakan bahasanya sendiri, dan lebih memilih bahasa Inggris? Berikut ini contoh dari penggunaan bahasa oleh kedua kelompok ini, yang diambil dari media cetak dan di pinggir-pinggir jalan.



Gambar 1. Penggunaan Bahasa oleh Kelompok Elit di Spanduk Pinggir Jalan

komunitas MI INDONESIA

Sesi 1 : The 7 Big Mistakes When Hiring (Recruiting) & How to Avoid,
Sesi 2 : The 7 Powerful Steps How to Keep Your Best People

Outline:
Sesi 1:
 The 7 Big Mistakes When Hiring (Recruiting) & How to Avoid
 Apa Yang Anda Pelajari ?
 1. Berbagai kesalahan merekrut yang sering tidak diadani oleh banyak perusahaan
 2. Jebakan-jebakan apa saja yang harus dihindari ketika merekrut karyawan baru
 3. Berbagai tips jitu dan aplikatif dalam merekrut karyawan baru
 Dibahas dengan menyajikan berbagai TIPS PRAKTIS yang bisa Anda PRAKTEKAN SEGERA

Sesi 2:
 The 7 Powerful Steps How to Keep Your Best People
 Banyak perusahaan yang belum memiliki strategi yang jelas bagaimana mempertahankan karyawan-karyawan yang baik & berprestasi agar tidak mudah keluar dan pindah ke perusahaan lain.
 Seminar ini akan membahas dengan sangat rinci bagaimana strategi mempertahankan karyawan yang baik dan berprestasi.
 Seminar ini akan dikemas dalam bentuk tanya jawab dan studi kasus

Lokasi/Tempat:
 Jakarta Design Center – Slipi – Jakarta Barat

Tanggal:
 25 Oktober 2013
 08.00 – 15.00 WIB

Instruktur:
 Freddy Liang, MBA, CBA –
 Freddyway International Learning

Biaya Pendaftaran :
 Rp. 650.000,-/peserta

Informasi pendaftaran:
MI Komunitas
 PIC : Zen-Viv
 HP : (021) 7127 9128 | Fax 021-581-6359
 Telp : 021-582-4886 ; 021-581-2088 Ext 41462
 Email : mikomunitas@mediaindonesia.com
 Web : www.mikomunitas.com
 Fb : www.facebook.com/mikomunitas/like

(Media Indonesia, 16 Okt 2013, hal.8)

Wisata Sem Berhadiah!

MI Komunitas Travelista Photo Competition
 Way to Go

WISATA BUDAYA

Ayo! kirimkan foto jalan-jalan dan destinasi wisata terbaikmu

- 3 Unit Kamera Nikon Coolpix S 3300 untuk 3 foto pemenang di setiap bulannya.
- Kirimkan 3 foto orisinal dalam file jpeg mengenai wisata budaya Indonesia atau mancanegara beserta lokasi lengkap via e-mail ke travelista_mi@gmail.com.
- Lengkapi setiap foto dengan caption foto (what, where, who, why, what, how).
- Diab digital diperbolehkan, sebatas perbaikan dasar kualitas foto (color/walig, cropping, color balance, dodge/burn, reflect/contrast dan saturasi warna) tanpa mengubah keaslian objek.
- Periode foto yang dikirim tahun 2013-2013.
- Diperbolehkan menggunakan kamera ponsel, kamera pocket ataupun kamera SLR.
- Batas akhir pengiriman foto adalah pada tanggal 24 Oktober 2013 pukul 24.00 WIB.
- 3 foto terbaik akan diterbitkan di Travelista Media Indonesia edisi 31 Oktober 2013.

(Media Indonesia, 13 Okt 2013, hal.7)

Gambar 2. Penggunaan Bahasa oleh Masyarakat Awam di Media Cetak

Penggunaan bahasa oleh kelompok kedua dari masyarakat ini tidak jauh berbeda dari cara yang digunakan oleh kelompok pertama. Kedua kelompok masyarakat ini menunjukkan sikap dan cara berbahasa yang nyaris 'seragam'. Seperti halnya kelompok pertama, kelompok kedua ini pun berusaha menggunakan bahasa semenarik mungkin, dan hal itu lebih ditujukan untuk menunjukkan statusnya. Namun, kuat diduga bahwa cara berbahasa kelompok kedua ini muncul sebagai salah satu wujud 'demam berbahasa', yakni mereka mengikuti cara berbahasa kelompok elit, yang mereka anggap memiliki prestise yang lebih terhormat.

Hasil pengamatan penulis menunjukkan bahwa penawaran produk barang dan jasa merupakan ranah yang paling banyak mengandung penggunaan bahasa yang tidak tepat dan tidak pantas. Selain adanya campur kode dan salah ejaan, ditemukan pula pemakaian ekspresi yang tidak tepat dan tidak jelas maksudnya. Namun demikian, karena jangkauan sebarannya relatif tidak luas, pengaruh yang ditimbulkannya pun tidak seluas dan sekuat yang dibuat oleh kelompok pertama. Cara mereka berbahasa hanya dapat diamati pada lingkup yang sangat terbatas di wilayahnya, dan mereka pun tidak memiliki harapan bahwa

bahasa mereka menjadi salah satu model untuk kemudian diikuti oleh pihak lain. Beberapa contoh berbahasa kelompok ini dapat dilihat pada data berikut.



Gambar 3. Penggunaan Bahasa oleh Masyarakat Awam dalam Penawaran Produk

Contoh-contoh di atas ditemukan di tempat umum yang umumnya dilalui oleh masyarakat kebanyakan. Melihat tempat dan sasaran dari pemajannya pun dapat dipastikan bahwa pesan itu untuk masyarakat awam. Akan lebih efektif apabila pesan-pesan itu disampaikan dalam bahasa Indonesia yang sederhana dan jelas. Namun demikian, pemilik pesan itu tidak menghiraukan hal tersebut, tetapi justru lebih memilih untuk mengambil istilah dari bahasa Inggris dan mencampurnya dengan bahasa Indonesia. Masyarakat awam mungkin tidak terlalu faham makna istilah yang dipungutnya. Akan tetapi, istilah-istilah itu telah luas dipakai oleh penutur lainnya, yang besar kemungkinan berasal dari kelompok 'elit' atau telah banyak bergaul dan terpengaruh oleh cara berbahasa kelompok 'elit'. Maka, mereka pun mengikuti apa yang mereka dengar dan/atau lihat dari sekelilingnya. Ikut-ikutan ini tampak dari, misalnya, ketidakcermatan dalam menulis ejaan istilah yang dipungut.

Gejala keragaman berbahasa yang ditunjukkan oleh masyarakat kelompok 'elit' dan awam ini, khususnya dalam hal campur/alih kode, merupakan salah satu bukti kuat tentang adanya gelombang penggerusan bahasa nasional oleh bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Ketika gejala yang sama muncul pada awal tahun 80-an dan kini berulang dengan lebih kuat, sebetulnya bukan karena gagalnya model perencanaan bahasa nasional. Politik bahasa yang dibuat Pemerintah telah secara jelas menggariskan status masing-masing bahasa, yakni sebagai bahasa nasional, daerah, atau asing. Demikian pula, telah jelas model dan tanggung jawab pengembangan dan pembinaannya. Namun, mengingat bahasa Indonesia belum bisa dijadikan sebagai salah satu kebanggaan dan jati diri penuturnya, pengaruh dan tuntutan yang kuat dari lingkungan (global) untuk ikut menggunakan bahasa asing telah meruntuhkan atau setidaknya mengikis nasionalisme yang awalnya dibangun oleh para pencetus gagasan menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang fungsinya mempersatukan rasa kebangsaan bangsa Indonesia. Gagasan ini kemudian memperoleh penguatan konstitusional yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Negara dengan garis politik bahasa yang termaktub dalam Undang-undang nomor 24 tahun 2009.

c. Dalam dunia pendidikan

Sekolah bisa menjadi alat yang efektif untuk meneruskan rumusan politik bahasa yang telah digariskan dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sebagai wahana pendidikan jalur formal, sekolah bisa diharapkan menjadi saluran yang sangat penting dalam

membina keterampilan dan kecermatan berbahasa siswa. Keterampilan berbahasa siswa dan warga masyarakat pada umumnya bisa dikatakan lebih banyak merupakan hasil dari pembinaan yang dilakukan di masa persekolahan. Dengan demikian, peran dan tanggung jawab sekolah menjadi sangat penting.

Namun demikian, tampaknya, kebijakan pendidikan akhir-akhir ini tidak seutuhnya sejalan dengan rumusan politik bahasa. Sampai sebelum Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia membuat amar putusan yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan yang dikenal dengan rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan oleh karenanya harus dihentikan, pembinaan keterampilan berbahasa Indonesia di tingkat persekolahan nyaris memperoleh tekanan yang luar biasa beratnya. Terpaan lainnya adalah diberikannya keleluasaan kepada pihak sekolah untuk menentukan sendiri pelajaran muatan lokal yang akan diberikan kepada siswanya. Banyak sekolah, baik di perkotaan maupun di pedesaan, yang kemudian memilih bahasa Inggris sebagai mata pelajaran muatan lokal.

Untuk sekolah-sekolah dengan status RSBI, bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa pengantar untuk beberapa mata pelajaran tertentu. Tujuannya adalah untuk memajukan siswa kepada wacana akademik dalam bahasa Inggris, sehingga apabila siswa masuk ke dalam percaturan akademik yang lebih global, mereka bisa berwacana dengan sejawatnya. Sementara itu, pemilihan bahasa Inggris menjadi muatan lokal bahkan pada pendidikan di kelas-kelas awal pendidikan dasar dan juga prasekolah, selain sebagai upaya untuk memajukan siswa kepada bahasa internasional itu, juga tampaknya lebih merupakan upaya untuk menaikkan gengsi sekolah. Betapa tidak. Sekolah yang memiliki muatan lokal bahasa Inggris berani tampil mengiklankan diri sebagai sekolah unggul dan akibatnya memungut biaya pendidikan yang lebih bahkan sangat mahal.

Kebijakan pendidikan seperti disebutkan di atas tadi, sampai sejauh tertentu, dapat menjadi ancaman terhadap keberhasilan penerapan politik bahasa. Pihak sekolah (kepala sekolah dan guru) akan berupaya memacu keterampilan berbahasa Inggris semua pihak yang terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran mata-mata pelajaran tertentu tadi. Sementara, siswa juga akan berusaha mengedepankan penguasaan bahasa Inggris mereka agar berhasil dalam pembelajarannya. Bisa jadi, pembinaan keterampilan berbahasa Indonesia tidak menjadi fokus pihak sekolah dan siswa. Akibatnya, keterampilan berbahasa Indonesia siswa khususnya menjadi tidak kokoh, karena memang tidak diarahkan oleh pihak sekolah, yang awalnya justru diharapkan menjadi salah satu garda terdepan dalam pembinaan ini.

Di lain pihak, pemajanan yang terlalu awal terhadap bahasa asing sementara penguasaan bahasa ibu atau bahasa nasional belum kokoh akan lebih banyak menjadi gangguan atau merusak perkembangan bahasa ibu atau bahasa nasional siswa (Bialystok & Hakuta, 1994; McLaughlin, 1984). Ada memang hasil studi yang menunjukkan bahwa pembelajar yang dipajankan kepada beberapa bahasa secara bersamaan dapat berhasil menguasai bahasa-bahasa itu (lihat Espinosa, 2008; Werker & Byes-Heinlein, 2008). Namun studi tersebut tidak secara jelas menyatakan bahwa keterampilan berbahasa para pembelajar dalam bahasa-bahasa itu sama kuatnya, sehingga mereka fasih dalam semua bahasa yang dipelajarinya secara bersamaan itu. Yang justru mengkhawatirkan adalah adanya bukti-bukti dari studi lain yang menunjukkan bahwa pemajanan sekaligus beberapa bahasa akan lebih banyak menjadi pemicu tidak tercapainya kompetensi berbahasa secara optimal, bukan hanya

dalam satu bahasa, tetapi justru dalam semua bahasa yang dipelajari secara bersamaan itu (bandingkan dengan Genesee, 2009; Fillmore, 1991).

Studi yang telah dilaporkan oleh para peneliti Indonesia menunjukkan bahwa proses pembelajaran di sekolah-sekolah dengan status RSBI atau di kelas-kelas awal sekolah dan juga di jenjang prasekolah yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar lebih banyak menimbulkan masalah (lihat Tulungen, Salajang, & Wenas, 2013; Safitri, 2013; Wuradji & Muhyadi, 2011). Guru bidang studi lebih banyak yang tidak menguasai bahasa Inggris untuk membuat wacana kelas tentang bidang studinya (mayalestarigf, 2011). Guru dan juga siswa punya anggapan bahwa banyak konsep pada bidang-bidang studi mereka sulit untuk diajarkan dan dikuasai. Kesulitan mereka, guru dan siswa, makin bertambah ketika konsep itu harus disampaikan dan diterima dalam bahasa Inggris, padahal mereka juga tidak berbahasa Inggris dengan baik. Dengan demikian, mereka lebih sering dan banyak berpikir untuk memilih-milih ungkapan yang tepat dalam bahasa Inggris daripada fokus kepada menyampaikan materi pelajaran. Akibatnya, kreativitas guru menjadi terpasung dalam mengembangkan proses pembelajaran, karena suasana interaksi kelas tidak terlalu dinamis. Guru lebih fokus kepada cara ia berbahasa daripada kepada isi pelajaran yang sedang disampaikannya. Sementara itu, hasil belajar siswa tetap belum menggembirakan. Kompetensi berbahasa Inggris mereka tidak tiba-tiba membaik, demikian pula penguasaan materi pelajaran bidang-bidang studi tertentu itu. Kondisi ini jangan-jangan seperti tergambarkan dalam pepatah “mengharapkan hujan di langit, air di tempayan ditumpahkan”.

Pemajanan bahasa Inggris kepada anak-anak prasekolah oleh para guru bisa juga berpotensi mengganggu perkembangan bahasa anak. Guru bahasa Inggris di jenjang prasekolah belum tentu ahli dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk anak. Kegiatan belajar mengajar dengan materi pembelajaran yang tidak secara cermat memperhatikan perkembangan kebahasaan siswa justru akan membahayakan perkembangan bahasa anak itu sendiri. Pada usia prasekolah, anak masih sedang belajar mengonstruksi bahasa ibunya dan sesekali secara terbatas dipajankan juga kepada bahasa kedua. Bagaimanapun, konsep-konsep linguistik kedua bahasa ini belum secara kokoh tertanam dalam minda anak. Maka, apabila ada bahasa lain lagi yang harus dipelajari, potensi kekacauan akan makin besar. Bukannya proses transfer positif yang akan terjadi, melainkan interferensi negatiflah yang lebih mungkin terjadi.

Guru yang tidak berpengalaman dan tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang proses pembelajaran yang ideal pada tingkat prasekolah akan lebih banyak menyampaikan materi berupa hafalan konsep nyata (*concrete things*) kepada anak-anak didiknya. Proses pembelajarannya dilakukan secara heuristik dengan mencampur kode secara intensif pada setiap tuturannya. Cara-cara seperti ini bisa menjadi propaganda negatif untuk siswa. Mereka dapat mengira bahwa berbahasa bisa dilakukan secara bebas, termasuk kalau harus mencampur-campur kode dari dua bahasa. Anggapan ini akan menumbuhkan sikap bahasa yang tidak positif dari para siswa. Akibatnya, bukannya rasa bangga berbahasa Indonesia, tetapi justru menganggap enteng bahasa nasional tersebut.

5. Usulan Jalan Keluar

Memang berat tantangan yang dihadapi untuk memartabatkan bahasa nasional di tengah-tengah kenyataan seperti digambarkan di atas. Akan tetapi, hal itu bukan berarti bahwa kita tidak perlu melakukan upaya dan berbenah agar pada akhirnya bahasa Indonesia dapat tampil sebagai bahasa yang bermartabat. Sudah terbukti bahwa politik bahasa yang sifatnya hanya perintah dari atas ke bawah (*top down policy*) belum berhasil menjamin tumbuhnya kebanggaan memiliki dan menggunakan bahasa Indonesia di kalangan para penuturnya. Dari keempat jenis perencanaan/politik bahasa (korpus, status, pemerolehan, dan gengsi), tampaknya perencanaan pemerolehan dan gengsi menghadapi persoalan yang lebih rumit. Perencanaan pemerolehan telah “diganggu” selama beberapa waktu dengan kehadiran kebijakan pendidikan yang dikemas dalam konsep RSBI. Sementara itu, perencanaan gengsi belum mampu mewujudkan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang memiliki gengsi tinggi di kalangan para penuturnya. Oleh karena itu, kegagalan model kebijakan/politik bahasa ini harus diperbaiki melalui upaya pendekatan *lingua franca plus* (cf. *elaborated code*). Melalui pendekatan ini, bahasa Indonesia difungsikan bukan hanya sebagai bahasa pengantar seperti di awal pertumbuhannya, tetapi bisa juga berfungsi dan berperan sebagai bahasa ilmu, bahasa bisnis, bahasa sastra, dan cerminan harga diri penutur dan bangsanya. Bahasa Indonesia bukan hanya menjadi tali pengikat antarsuku bangsa untuk bisa saling memahami isi komunikasi di antara mereka. Lebih jauh daripada itu, bahasa Indonesia naik perannya menjadi instrumen yang akan digunakan penuturnya dalam setiap komunikasinya. Pendekatan ini mengandung dua model implementasi, yaitu model sosiologis-fungsional dan model ekonomis. Masing-masing model dipaparkan berikut ini.

a. Model sosiologis-fungsional

Melalui cara ini, mesti diupayakan tumbuhnya kesadaran bahwa bahasa merupakan satu-satunya alat fungsional yang memberikan dampak komunikatif total. Artinya, setiap penutur mesti sampai kepada keyakinan bahwa bahasa Indonesia memiliki potensi yang cukup untuk memenuhi semua kebutuhan komunikasi penuturnya (*sufficiency principle*). Bahasa Indonesia bisa digunakan pada berbagai ranah, baik resmi maupun tidak resmi, dan untuk membicarakan aneka topik. Kalau tahap ini sudah tercapai, maka diharapkan wibawa dan gengsi penutur bahasa Indonesia akan tumbuh dengan sendirinya. Pengokohan fungsi sosial-fungsional bahasa Indonesia ini dapat dilakukan, misalnya melalui Indonesianisasi. Memang benar bahwa gerakan monolingualisasi ini sejauh tertentu akan bertentangan dengan upaya pemertahanan dan/atau perlindungan bahasa daerah. Tahap ini diperlukan guna membenahi terlebih dulu posisi bahasa Indonesia ketika berhadapan dengan kuatnya gerusan pengaruh bahasa asing. Walaupun bahasa Indonesia sulit bahkan tidak mungkin menjadi bagian dari nilai budaya inti penutur bahasa Indonesia, apabila bahasa Indonesia sudah bisa memerankan fungsi sosial-fungsionalnya, lama kelamaan penutur bahasa Indonesia akan menjadikan bahasa Indonesia sebagai salah satu kekayaan yang akan dipelihara bahkan diwariskannya kepada generasi berikutnya. Peningkatan kesadaran seperti ini akan sejalan dengan naiknya peran, fungsi, dan gengsi bahasa Indonesia di dalam kehidupan mereka.

Model ini juga menyiratkan makna bahwa setiap penutur bahasa Indonesia menjadi ‘duta bahasa’. Masing-masing akan memberikan contoh berbahasa yang cermat dan pantas pada setiap ranah komunikasi. Contoh berbahasa yang baik dari mereka yang memiliki pengaruh kuat akan ikut menentukan perkembangan bahasa Indonesia di masyarakat. Kondisi ini sejalan juga dengan pandangan dan watak masyarakat Indonesia yang lebih patriarkal, yakni akan mengikuti contoh perilaku baik dari orang-orang yang dituakan. Dalam kaitan ini,

tokoh-tokoh tadi sejatinya menjadi model berbahasa bagi warga awam. Namun, dengan menyadarkan agar setiap orang menjadi duta bahasa dan model berbahasa, perilaku baik dalam berbahasa itu bukan hanya akan diturunkan secara vertikal dalam pola patriarkal, tetapi juga akan menyebar secara horisontal. Cara ini akan bisa mempercepat kesadaran para penutur dalam meningkatkan martabat bahasa Indonesia.

b. Model ekonomis

Mobilitas ekonomi merupakan kunci dari pendekatan pengembangan bahasa melalui cara ini. Pasar Indonesia yang begitu luas belum bisa menciptakan peningkatan mobilitas ekonomi yang berarti. Pasar ini masih bersifat menerima 'titipan' dari pihak luar tinimbang mengedepankan produk barang dan jasa dari dalam negeri sendiri. Kondisi seperti ini akan menjadi hambatan dalam meningkatkan daya saing dan daya pakai bahasa Indonesia pada transaksi ekonomi. Kemajuan ekonomi pada beberapa negara berkembang seperti China, Thailand, dan Vietnam, misalnya, telah ikut mendorong perkembangan dan daya saing masing-masing bahasa di tengah derasnya gelombang pengaruh penggunaan bahasa Inggris dalam produk barang dan jasa yang mereka hasilkan. Bahasa Indonesia pun bisa berperan seperti itu apabila dukungan politik dan sosial benar-benar berpihak kepada keinginan untuk menumbuhkembangkan bahasa Indonesia.

6. Penutup

Upaya pemertabatan bahasa nasional seringkali diganggu oleh adanya kepentingan yang tidak memahami nilai pentingnya sebuah bahasa sebagai jati diri bangsa. Memang benar bahwa bahasa Indonesia saat ini belum menjadi bagian dari nilai inti budaya masyarakat bangsa Indonesia, merujuk kepada sejarah kelahiran (istilah) bahasa Indonesia pada 28 Oktober 1928. Akibatnya, sikap penutur bahasa Indonesia kepada bahasanya pun tidak terlalu positif. Kondisi ini diperparah dengan model-model berbahasa sesaat yang secara kebetulan ditunjukkan dalam dan dikokohkan oleh media massa dan tokoh-tokoh masyarakat serta pesohor yang kemudian diikuti oleh warga masyarakat. Pada tingkat dan fase tertentu pun Pemerintah seperti tidak menyadari bahwa kebijakan yang dibuatnya, khususnya terkait dengan kebijakan pendidikan justru telah melemahkan posisi dan perkembangan bahasa Indonesia. Kalau hal ini terjadi, maka sesungguhnya bahasa nasional sedang mengalami pembusukan, oleh penuturnya sendiri. Dengan demikian, upaya untuk mengangkat derajat bahasa Indonesia menjadi bahasa yang jauh lebih bermartabat dari posisi saat ini dan bisa memberikan kebanggaan kepada para penuturnya menjadi semakin berat. Perlu upaya yang bisa menyatukan langkah dan menyamakan irama di antara semua pihak. Oleh karena itu, perencanaan bahasa Indonesia sebagai *lingua franca plus* bisa menjadi salah satu agenda yang perlu dipertimbangkan.

7. Referensi

- Bialystok, E., & Hakuta, K. (1994). *In other words*. New York: Basic Books.
- Espinosa, L. (2008). Challenging Common Myths about Young English Language Learners. *FDC Policy Brief, Advancing PI-3*, 8.
- Fillmore, L. W. (1991). When Learning the Second Language Means Losing the First. *Early Childhood Research Quarterly*, 6, 323-346.
- Genesee, F. H. (2009). Early Childhood Bilingualism: Perils and Possibilities. *Journal of Applied Research and Learning*, 2(2), 1-21.

- Gooma, Y. A. (2011). Language Maintenance and Transmission: The Case of Egyptian Arabic in Durham, UK. *International Journal of English Linguistics*, 1(1), 46-53. Retrieved from www.ccsenet.org/ijel
- Habtoor, H. A. (2012). Language Maintenance and Language Shift among Second Generation Tigrinya-speaking Eritrean Immigrants in Saudi Arabia. *Theory and Practice in Language Studies*, 2(5), 945-955.
- mayalestarigf. (2011, Oktober 26). <http://edukasi.kompasiana.com/2011/10/26/rsbi-rintisan-sekolah-berbahasa-inggris-sebuah-tinjauan-kritis-406727.html>. Retrieved Oktober 21, 2013
- McLaughlin, B. (. (1984). *Second language acquisition in childhood: Vol. 1. Preschool children (2nd ed.)*. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
- Najafi, H. (2009). *Language Maintenance and Shift among Iranians Residing in the United States*. PhD Thesis, Arizona State University. Retrieved October 12, 2013, from http://e-resources.pnri.go.id/index.php?option=com_library&Itemid=53&key=1
- Offiong, O. A., & Ugot, M. I. (2012). Minority Language Maintenance: The Case of the Efik Language in South Eastern Nigeria. *Theory and Practice in Language Studies*, 2(12), 2491-2499.
- Patji, A. R. (2011, Desember 16). Retrieved Oktober 12, 2013, from <http://www.tempo.co/read/news/2011/12/16/079372002/169-Bahasa-Etnis-di-Indonesia-Terancam-Punah>.
- Rappa, A. L., & Wee, L. (2006). *Language Policy and Modernity in South East Asia: Malaysia, the Philipines, Singapore, and Thailand*. United States of America: Springer Science & Business Media, Inc.
- Safitri, D. (2013, Januari 8). http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2013/01/130107_mkrbsi.shtml. Retrieved Oktober 21, 2013, from www.bbc.co.uk.
- Schmid, C. L. (2001). *The Politics of Language: Conflict, Identity, and Cultural Pluralism in Comparative Perspective*. New York: Oxford University Press.
- Smolicz, J., & Secombe, M. (1985). "Community languages, core values and cultural maintenance: the Australian experience with special reference to Greek, Latvian, and Polish groups. In M. C. (ed.), *Australia—meeting place of languages. Pacific Linguistics*, C-92. (pp. 11-38).
- Tulungen, T. M., Salajang, S. M., & Wenas, R. J. (2013). Perbandingan Hasil Belajar Matematika Siswa di RSBI Ditinjau dari Durasi Waktu Penggunaan Bahasa Inggris oleh Guru. *JSME MIPA UNIMA*, 1(11). Retrieved Oktober 21, 2013, from <http://ejournal.unima.ac.id/index.php/jsme/article/view/859>
- Werker, J., & Byes-Heinlein, K. (2008). Bilingualism in Infancy: First Step in Perception and Comprehension. *Trends in Cognitive Science*, 12(4), 144-151.
- Wuradji, & Muhyadi. (2011). *Implementasi Program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional di Kota Yogyakarta*. Laporan Penelitian, Universitas Negeri Yogyakarta, Manajemen Pendidikan. Retrieved Oktober 21, 2013, from http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/PENEL.RSBI%202011_1.pdf
- Wurm, S. A. (2003). The language situation and language endangerment in the Greater Pacific area. In M. Janse, & S. Tol, *Language Death and Language Maintenance: Theoretical, Practical, and Descriptive Approaches* (pp. 15-48). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Makalah belum disunting

**BAHASA “PENJAGA GERBANG” SEBAGAI SUMBER PENGUATAN JATI DIRI
DAN PEMARTABATAN BANGSA SERTA TANTANGANNYA PADA ABAD
MODERNITAS AKHIR**

Anang Santoso
FS, Universitas Negeri Malang (UM)

MAKALAH KONGRES BAHASA INDONESIA X
Hotel Grand Sahid Jaya, 28—31 Oktober 2013

**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JAKARTA 2013**

BAHASA “PENJAGA GERBANG” SEBAGAI SUMBER PENGUATAN JATI DIRI DAN PEMARTABATAN BANGSA SERTA TANTANGANNYA PADA ABAD MODERNITAS AKHIR

Anang Santoso

anangsum@gmail.com

FS, Universitas Negeri Malang (UM)

Abstrak: Artikel ini berangkat dari pemikiran bahwa para “penjaga gerbang” memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan dan atau menggunakan bahasa yang higienis yang dapat memperkuat jati diri sebagai bangsa yang terhormat. Fakta menunjukkan bahwa masih banyak para penjaga gerbang itu belum sepenuhnya memiliki kesadaran berbahasa higienis yang dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat banyak. Hanya saja, niat mulia itu tidak mudah dicapai, baik disebabkan oleh kendala internal maupun eksternal. Kondisi era modern akhir menjadi faktor kendala terbesar dalam mencapai tujuan mulia tersebut.

Kata-kata kunci: penjaga gerbang, bahasa yang higienis, jati diri, modernitas akhir

Penjaga Gerbang

Istilah “*Penjaga Gerbang*” (PG). Istilah “penjaga gerbang” (*gatekeepers*) dalam artikel ini merujuk kepada pandangan **Erickson**, yakni individu-individu yang sudah diberikan otoritas untuk membuat keputusan-keputusan atas nama lembaga atau institusi yang akan mempengaruhi mobilitas orang lain atau masyarakat pada umumnya (**Scollon & Scollon**, 1983:157). Otoritas tersebut dapat diperoleh melalui mekanisme prosedur tertentu, baik formal maupun nonformal. Presiden, menteri, ketua partai, pemimpin media, penceramah, ketua lembaga swadaya, dosen, guru, pemimpin perusahaan, elite perempuan, dan elite masyarakat adalah sebagian dari penjaga gerbang tersebut. Para PG tersebut memiliki otoritas dalam menentukan mobilitas anggota masyarakat.

Para penjaga gerbang memiliki banyak kekuasaan: sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Dengan kekuasaannya tersebut seorang penjaga gerbang akan secara mudah mengendalikan orang lain. PG memiliki peluang dan akses yang lebih banyak dalam menghasilkan “teks” tentang pelbagai hal hidup. Teks-teks tersebut untuk selanjutnya dikonsumsi oleh masyarakat awam, suka atau tidak suka, sadar atau bawah sadar. Apa yang dihasilkan oleh PG secara langsung berpengaruh terhadap perilaku masyarakat awam. Bahasa yang digunakan oleh penjaga gerbang tersebut sering menjadi model

bahasa yang dianggap ideal oleh masyarakat awam. Oleh karena itu, tidak mudah menjadi PG khususnya terkait dengan bagaimana mereka harus memproduksi “teks”.

Bahasa yang Tidak Higienis untuk Komunikasi Publik

Sebagai orang yang ucapannya dapat memobilisasi publik, baik vertikal maupun horisontal, bahasa yang digunakan dan dihasilkannya haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu. Mengutip apa yang sudah banyak diperjuangkan oleh para tokoh linguis kritis, bahasa untuk tujuan publik haruslah higienis, bahasa yang dapat “menyehatkan” dan “mencerahkan” masyarakat banyak. Seorang PG harus pandai-pandai memilih dan menggunakan bahasa yang higienis itu, kapan pun dan di mana pun, selama semua itu terkait dengan publik. Bahkan, perlu juga dicermati, pada kasus tertentu meskipun seorang PG ingin memproduksi teks yang *private*, syarat ke higienisan bahasa menjadi sebuah tuntutan. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah warna teks yang *private* akhirnya “dipaksa” menjadi publik. Kasus bocornya percakapan antara petinggi kepolisian Republik Indonesia dengan tersangka kasus tertentu telah mengaburkan makna *private* dan publik dalam teks yang diproduksi oleh orang tertentu.

Berikut dipaparkan sejumlah pemakaian bahasa yang tidak higienis. *Pertama*, pemakaian bahasa yang rasialis. Bahasa yang digunakan oleh PG tidak boleh secara sadar atau bawah sadar menguntungkan ras tertentu, dan sekaligus merugikan yang ras lainnya. Masih banyak PG menghasilkan bahasa yang berkriteria demikian. Ungkapan seperti (1)

- (1) “Saya senang di kota ini didirikan Sekolah Polisi Negara; masak yang jadi polisi hanya orang Jawa dan Batak saja?”

sudah tidak layak dihasilkan dalam konteks kekinian karena menyinggung etnis tertentu yang sebenarnya tidak terlibat dalam komunikasi tersebut. Pertanyaan kritis terhadap ungkapan tersebut adalah “apa yang salah dengan orang Jawa dan Batak sampai-sampai disebut di dalam sebuah pidato resmi yang tidak terkait secara langsung dengan suku Jawa dan suku Batak.” Mungkin saja, si PG tersebut tidak sadar bahwa yang dikemukakannya tersebut telah menyinggung kelompok tertentu. Dalam wacana iklan, misalnya, juga masih secara masif muncul ungkapan (2) dan (3) berikut yang juga tidak higienis.

- (2) Sabun X memutihkan
- (3) Shampo Y untuk rambut lurus

Ungkapan (2) dan (3) tersebut bernada rasis. Putih dan lurus adalah ciptaan dari Yang Mahakuasa. Akan menjadi beda apabila kosakata yang dipilih dalam ungkapan tersebut

adalah “mencerahkan” dan “menyehatkan rambut”. Harus ada perbaikan tampilan jika menginginkan asupan bahasa yang higienis.

Kedua, pemakaian bahasa yang seksis. Bahasa yang digunakan oleh PG juga tidak menguntungkan seks tertentu, dan sekaligus merugikan seks yang lain. Ungkapan (4), (5), dan (6) berikut adalah tidak higienis.

- (4) Laki itu fearless
- (5) Laki tidak pilih-pilih lawan
- (6) Perempuan hanya perlu perhatian

Bahasa iklan dan sinetron dalam (4), (5), dan (6) telah mengajarkan kepada kita bahwa ungkapan yang setiap hari muncul di televisi itu sangatlah tidak higienis bagi relasi laki-laki dan perempuan. Ungkapan tersebut semakin menempatkan laki-laki pada posisi superordinat, dan pada waktu yang bersamaan mendegradasikan perempuan pada posisi subordinat (Santoso, 2013). Jika ini berlangsung secara terus-menerus dan bersifat masif, tentu saja semakin tidak menguntungkan relasi laki-laki dan perempuan dalam wacana gender. Bahkan, dalam kasus yang lain banyak elite perempuan yang secara bawah sadar bangga dengan posisi subordinatnya melalui pilihan ungkapan-ungkapan tertentu (Santoso, 2011).

Ketiga, pemakaian bahasa yang menimbulkan sifat negatif. Ungkapan (7), (8), dan (9) berikut bermakna negatif.

- (7) Indon
- (8) PKI
- (9) Tidak bersih lingkungan

Ungkapan (7) adalah label yang dikenakan kepada tenaga kerja Indonesia di Malaysia oleh surat kabar setempat. TKI—yang *notabene* warga negara Indonesia—memperoleh kesan ‘bodoh’, ‘kasar’, ‘ilegal’, ‘tidak berkelas’, ‘hanya mengandalkan otot, bukan otak’, dan sebagainya. Ungkapan (8) dan (9) sangat akrab dengan rezim Orde Baru untuk memberikan stigma kepada anggota masyarakat Indonesia “yang tersangkut”, “yang diduga tersangkut”, atau yang “disangkut-sangkutkan” dengan sebuah partai politik yang dilarang hidup di Indonesia. Tentu saja, pemakaian bahasa yang menimbulkan sifat negatif ini tidak menjadi asupan yang higienis untuk dikonsumsi untuk masa-masa mendatang.

Keempat, pemakaian bahasa sarkastis ‘kasar’. Masih banyak ungkapan-ungkapan dari PG yang bernada kasar (sarkastis) dan tidak menyehatkan untuk dikonsumsi publik. Pilihan kata pada (10), (11), dan (12) berikut bernada kasar.

- (10) (Hak-hak politiknya) dikebiri
- (11) Mereka rela dibantai demi idealisme politiknya.
- (12) Kita seperti membeli kucing dalam karung.
- (13) Anda seperti seorang ustad di kampung maling.

Ungkapan-ungkapan seperti “dikebiri”, “dibantai” “kucing dalam karung”, dan “kampung maling”, tentu saja tidak menyehatkan apabila untuk konsumsi publik. Terdapat nada kasar dalam ungkapan tersebut (Santoso, 2003). Pada kasus yang lain, dalam wacana politik juga sering muncul pemanfaatan akronim yang tidak higienis, seperti (14) dan (15) berikut.

- (14) kudatuli
- (15) Gestapu

Pemanfaatan akronim, seperti “kudatuli”, atau “gestapu” dalam sejarah politik Indonesia juga menyadarkan kepada kita bahwa akronim yang sebenarnya fenomena biasa dalam semua bahasa, ternyata apabila dioptimalkan untuk bahasa politik menjadi begitu menakutkan karena ada nilai rasa sarkastis tersebut. Ketika kita mendengar akronim “kudatuli” ada kesan sarkasme yang muncul. Demikian juga, ketika mendengar akronim “Gestapu” ada bayangan hitam dari pasukan Nazi yang terkenal kejam itu.

Kelima, pemakaian bahasa topeng. Bahasa topeng adalah bahasa yang menutupi kenyataan yang sebenarnya dan menampilkan bahasa yang berbeda dengan kenyataan tersebut. Bahasa publik sering memanfaatkan fenomena ini. Ungkapan pada (16), (17), dan (18) berikut adalah bahasa topeng.

- (16) keluarga prasejahtera
- (17) bantuan lunak
- (18) Bencana Lapindo adalah bencana alam.

Sangat tidak sehat apabila “masyarakat miskin” disebut dengan “prasejahtera”, apalagi juga ada variasinya, seperti “prasejahtera I” dan “prasejahtera II”. Tidak perlu lagi “utang luar negeri” diganti dengan “pinjaman lunak” atau “bantuan lunak”. Juga, sebuah tragedi terjadi dalam wacana politik Indonesia era reformasi ketika bencana lumpur Lapindo di Sidoarjo oleh sebagian besar anggota DPR—yang *notabene* wakil rakyat—diberilabel “bencana alam”, bukan “bencana karena kecerobohan manusia”. Masih banyak istilah lain yang digunakan untuk tujuan yang salah. Biasanya sebuah rezim pemerintah yang otoritarian banyak memanfaatkan fenomena bahasa topeng.

Keenam, pemakaian bahasa yang dapat menyinggung pihak lain. Ungkapan seperti (19) dan (20) berikut dapat menyinggung pihak-pihak tertentu.

- (19) DPR seperti anak TK.
- (20) Anjing menggonggong, kafilah berlalu.

Kedua ungkapan yang pernah muncul dalam wacana politik Indonesia era (mantan) Presiden Abdurrahman Wahid sudah tidak tepat lagi untuk dipakai. Ungkapan tersebut sangat tidak mengenakan pihak-pihak tertentu. Ungkapan seperti itu tidak menjadi masalah apabila hanya muncul dalam obrolan di warung kopi, gunjingan di pos-pos ronda, sindiran di kantor, dan sebagainya tentu saja tidak menjadi persoalan. Akan tetapi, apabila ungkapan seperti itu muncul dalam wacana publik dan selanjutnya dikonsumsi oleh publik, keadaan yang tidak ideal akan terjadi.

Ketujuh, pemakaian bahasa yang menimbulkan kesan melebih-lebihkan. Ungkapan beberapa elite politik Indonesia seperti (21) dan (22) berikut juga tidak higienis.

- (21) Berbicara demokrasi Indonesia sama dengan berbicara kehancuran.
- (22) Kita berada di sebuah perahu yang akan tenggelam, bernama Indonesia.

Ungkapan (21) dan (22) masih sering muncul dalam wacana politik Indonesia, baik pada era Soeharto maupun era pasca-Soeharto. Ungkapan tersebut tidak sesuai dengan realitas yang ada dan terlalalu berlebihan dalam melihat sesuatu.

Ketujuh jenis pemakaian bahasa yang tidak higienis di atas hanyalah sekadar contoh dari sekian banyak bahasa yang tidak cocok untuk dikonsumsi publik. Memang tidak mudah menjadi PG, khususnya dalam memproduksi teks yang higienis.

PG dan Wacana Dominan

Karena autoritas dan kuasa yang dimilikinya, PG akan banyak memproduksi teks, dan selanjutnya teks tersebut ditransformasikan oleh pelaku media massa menjadi wacana media. Dalam konteks ini, PG memiliki peran yang amat besar dalam membentuk apa yang disebut dengan “wacana akal sehat” (*common-sense discourse*) atau “wacana dominan”. Mereka memiliki sebuah “cara-cara berbicara” dan “cara-cara menulis” terhadap pelbagai persoalan sosial-ekonomi, sosial-politik, dan sosial-budaya. Para PG memiliki kecenderungan tertentu dalam merepresentasikan masyarakat, situasi, dan peristiwa dalam cara-cara tertentu yang mungkin saja membedakannya dengan PG lainnya. Cara-cara merepresentasikan itu sering salah dipahami oleh masyarakat awam.

Bahkan, dalam banyak kasusteks PG tidak dipahami secara benar oleh konsumennya. Inilah yang mengakibatkan kesenjangan antara PG dengan publiknya.

Apa yang dihasilkan oleh PG, misalnya, segera menjadi bahan rujukan oleh para konsumennya. Perspektif yang dibangun oleh PG segera ditiru begitu saja oleh konsumennya. Apa yang menjadi penting oleh PG segera menjadi penting oleh wacana media. Apa yang menjadi “penting” dalam koran segera menjadi apa yang “penting” dalam kehidupan masyarakat. Apa yang penting dalam koran segera menjadi kerangka representasi perilaku dan berpikir. Kita tentunya masih ingat kasus di Negeri Paman Sam tentang skandal yang menggunakan akhiran *gate*. Sejak Nixon dengan *Watergate*-nya muncul dalam pers, muncullah kisah serupa seperti *Irangate*, *Whitewatergate*, *Zippergate*, dan *Fornigate*. Di Inggris pernah ramai dengan kasus *Dianagate* dan *Camilagate*. Bahkan, istilah serupa muncul juga di Indonesia pada era pemerintahan Presiden Gus Dur dengan *Buloggate* dan *Bruneigate*. Wacana yang muncul kemudian itu mengambil secara parsial kata *gate* dari kasus *Watergate*. Padahal, kata *Watergate* adalah satu kesatuan bentukan dari sebuah nama tempat. Akhirnya, apa pun bentuk skandal di sekitar kita, oleh masyarakat awam dan media massa diberi label dengan akhiran *-gate*.

Pada tahun 2004, misalnya, media surat kabar Indonesia telah membentuk sebuah wacana dominan berkenaan dengan kasus Akbar, yakni Akbar adalah orang yang bersalah, koruptor, seharusnya dipenjara, mundur dari Ketua DPR, mundur dari Ketua Partai Golkar, dan sebagainya. Wacana dominan itu telah menjadi bahan rujukan kita semua dalam memberikan penilaian terhadap kasus Akbar terlepas dari apakah Akbar Tanjung itu memang melakukan korupsi atau tidak. Tentu saja, bagi Akbar Tanjung, apabila memang tidak terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang, pembentukan wacana dominan tersebut telah merugikan dia dan keluarganya.

Bahasa yang Higienis dan Penguatan Jati Diri Bangsa

Secara umum jati diri diartikan sebagai identitas yang mengandung ciri-ciri khusus yang berfungsi sebagai penanda keberadaan maupun pembeda bagi seseorang dengan yang lain. Disamping itu, jati diri juga mengandung pengertian “siapa diri kita sesungguhnya”. Seperti halnya bangsa lain, bangsa Indonesia juga memiliki jati diri yang membedakannya dari bangsa yang lain di dunia. Jati diri itu sekaligus juga menunjukkan keberadaan bangsa Indonesia di antara bangsa lain. Jati diri bangsa juga

mengandung pengertian sebagai identitas bangsa yang berfungsi sebagai penanda keberadaan, pencerminan kondisi dan pembeda dengan bangsa lain. Salah satu simbol jati diri bangsa Indonesia itu adalah bahasa, dalam hal ini tentu bahasa Indonesia.

Bahasa Indonesia harus senantiasa kita jaga, kita lestarikan, dan secara terus-menerus harus kita bina dan kita kembangkan agar semakin kokoh sebagai simbol jati diri bangsa. Siapa pun PG tanpa kecuali memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga dan memupuk bahasa Indonesia untuk memperkuat jati diri dan martabat bangsa. Sudah tidak pada tempatnya, karena alasan perebutan kekuasaan akhirnya menghalalkan cara dalam pemakaian bahasanya.

Kelahiran Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan harus dipandang sebagai momentum yang bagus untuk penguatan jati diri bangsa Indonesia. Undang-undang tersebut merupakan amanat dari Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sekaligus merupakan realisasi dari tekad para pemuda Indonesia sebagaimana diikrarkan dalam Sumpah Pemuda, tanggal 28 Oktober 1928, yakni menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia.

Pada tahap selanjutnya adalah bagaimana para PG memberikan sumbangan yang besar dalam penguatan jati diri bangsa melalui pemakaian bahasanya. Menggunakan bahasa higienis dapat dipandang sebagai bagian penguatan nasionalisme. Bahasa yang rasialis akan mencederai keberagaman ras/suku yang membangun Indonesia, juga mencederai nilai-nilai kemanusiaan yang paling dasar. Ras atau suku yang tersakiti dapat memunculkan perasaan sakit yang sifatnya komunal. Bahasa yang seksis juga akan merusak harmoni yang sudah terbangun bagus dalam relasi laki-laki dan perempuan. Demikian juga dengan pemakaian bahasa yang tidak higienis lainnya.

Hanya saja perlu disadari bahwa identitas bukanlah sesuatu yang telah selesai, statis, tertutup, tak berubah dan tetap. Akan tetapi, identitas itu sesuatu yang terbuka, dalam proses menjadi. Identitas ada di dalam ruang, waktu, dan tempat. Identitas nasional yang pernah terbayang pada awal kemerdekaan, tentu saja sudah mengalami perkembangan setelah hampir satu abad merdeka. Perkembangan masyarakat telah mempengaruhi bagaimana bangsa Indonesia merumuskan jati dirinya.

Pelbagai Tantangan pada Abad Modernitas Akhir

Identitas nasional di dalam era global sekarang menjadi sebuah masalah yang serius karena di dalamnya berkembang nilai dan norma yang mengancamnya. Sudah

banyak rumusan yang dikemukakan oleh pelbagai pakar tentang tantangan kehidupan masyarakat pada abad modernitas akhir. Salah satu tantangan yang mengemuka adalah semakin tumbuh subur nya nilai-nilai kosmopolitanisme. Menurut Piliang (2012:186) nilai kosmopolitanisme tumbuh di dalam masyarakat terbuka (*open society*), yakni masyarakat yang sudah tidak ada lagi ikatan (keluarga, suku, bangsa, etnis, agama, ras) yang selesai (*final*). Relasi mereka terhadap semua itu ditentukan bukan oleh ikatan adat, etnisitas, atau nasionalisme, tetapi oleh “pilihan bebas” setiap orang sehingga sudah tidak ada lagi ikatan dan relasi sosial yang permanen. Nilai semata-mata urusan “pilihan” dari berbagai pilihan nilai yang tersedia. Oleh karena itu, karena mereka itu adalah perkara pilihan, nilai-nilai dapat diubah sesuai dengan selera masing-masing.

Tantangan yang kedua adalah semakin subur nya komodifikasi bahasa (Santoso, 2011:9). Komodifikasi (*commodification*) adalah sebuah proses menjadikan sesuatu yang sebelumnya bukan komoditas akhirnya menjadi komoditas. Dalam konteks ini, bahasa diperlakukan dan diolah menurut logika komoditas. Bahasa diperlakukan seperti barang dagangan. Logika yang berjalan adalah bagaimana membuat barang dagangan itu laku sekeras-kerasnya dan secepat-cepatnya. Semakin banyak orang yang mengkonsumsi barang itu semakin bernilailah barang itu. Sebaliknya, semakin sedikit orang yang mengkonsumsi semakin rendahlah nilai barang itu. Pada umumnya keadaan ini memanfaatkan “teori pasar” (*market theory*), segala konsumsi sangat bergantung kepada kehendak konsumen. Kondisi ini banyak terjadi dalam masyarakat kapitalis, yaitu sebuah masyarakat yang pola kehidupan dan budayanya dilandasi oleh pondasi ideologi ekonomi kapitalisme. Banyak fenomena bahasa pada era modern akhir dipilih karena banyak digunakan oleh masyarakat. Yang menjadi persoalan apabila bahasa yang dilahirkan dalam format komodifikasi adalah bahasa yang tidak higienis, peran masyarakat yang kritis masih sangat diperlukan.

Tantangan yang ketiga adalah semakin menonjolnya sikap hibriditas dalam pembentukan wacana. Hibrid adalah istilah dalam bidang biologi yang berarti ‘perkembangbiakan secara bersama dua spesies atau dua molekul yang menghasilkan spesies atau molekul baru’. Hibriditas secara luas digunakan dalam wacana pascakolonial untuk memaknai apa yang dinamakan *cross-cultural exchange* (Ashcroft *et al.*, 2000:109). Hibriditas biasanya merujuk pada penciptaan bentuk-bentuk transkultural baru dalam daerah kontak sebagai hasil dari kolonisasi. Hibridisasi terjadi antara lain dalam bidang-bidang lingual, kultural, politik, dan rasial. Fenomena hibriditas akhir-akhir ini amat menonjol dalam penggunaan bahasa. Bahasa dalam

masyarakat modern akhir amat diwarnai oleh sifat hibriditas ini. Dalam konteks wacana kritis, hibriditas muncul selain sebagai strategi penolakan (*resistance*) terhadap sesuatu, juga dapat menjadi strategi dominasi (**Chouliaraki & Fairclough, 1999:14**). Bagi kelompok tertentu, sering sifat hibriditas ini menjadi tujuan dalam memproduksi bahasa/wacana dalam rangka dominasi atas kelompok lainnya. Kasus pencampuran bahasa asing ke dalam bentukan bahasa Indonesia yang berlebihan adalah pemahaman hibriditas yang tidak sepenuhnya tepat.

Penutup

Sudah dipahami bersama bahwa dalam wacana publik banyak PG—sebagai penghasil teks—yang menitipkan muatan ideologi dan kuasa ke dalam fitur-fitur lingual, baik pada tataran kosata, gramatika, dan struktur teks. Dalam konteks ini, PG sudah seharusnya memiliki kesadaran bahasa kritis yang akan membimbingnya dalam memproduksi teks. Dengan kesadaran tersebut seorang PG akan selalu memilih kata, frasa, dan ungkapan semata-mata demi mencerahkan masyarakat banyak. Ada kesadaran bahwa memproduksi teks bagi PG pada hakikatnya adalah memproduksi akal sehat, memproduksi cara pandang, memproduksi perspektivitas, memproduksi ideologi.

Sebaliknya, bagi konsumen wacana publik, mereka harus memiliki kesadaran bahasa kritis (*critical language awareness*) bahwa telah terjadi penitipan ideologi dan kuasa dalam penggunaan bahasa tertentu oleh para PG. Hanya saja, kesadaran bahasa kritis tersebut tidak selalu—kalau tidak ingin mengatakan tidak ada—ada pada masyarakat awam. Mereka begitu saja mengikuti bahasa yang digunakan oleh PG tanpa ada sikap kritis dan berani mempertanyakan apakah bahasa yang digunakan PG itu higienis atau tidak.

DAFTAR RUJUKAN

- Ashcroft, B., Griffiths, G., & Tiffin, H. 2000. *Post-Colonial Studies: The Key Concepts*. Second edition. London & New York: Routledge.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2011. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Chouliaraki, Lilie & Fairclough, Norman. 1999. *Discourse in Late Modernity: Rethinking Critical Discourse Analysis*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Hill, D.T. 2006. Politik Identitas dalam Budaya Indonesia/Melayu. *Jurnal Susastra 4: Jurnal Ilmu Sastra dan Budaya*, 2(4): hlm. 1—15
- Piliang, Y.A. 2012. Identitas dan Karakter Bangsa dalam Tantangan Budaya Kosmopolitan. *Puitika: Jurnal Humaniora*, 8(2): hlm. 181—195
- Santoso, A. 2003. *Bahasa Politik Pasca Orde Baru*. Jakarta: Penerbit Wedatama Widya Sastra (WWS)
- Santoso, A. 2011a. *Bahasa Perempuan Sebuah Potret Ideologi Perjuangan*. Cetakan ke-2. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara
- Santoso, A. 2011b. Membaca Wacana Publik secara Kritis. Pidato pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Wacana pada Fakultas Sastra, disampaikan dalam Sidang Terbuka Senat Universitas Negeri Malang (UM), 26 Oktober 2011
- Santoso, A. 2012. *Studi Bahasa Kritis: Menguak Bahasa Membongkar Kuasa*. Bandung: Penerbit Mandar Maju
- Santoso, A. 2013. “Laki itu Fearless: Sexist Language, Power, and Mass Media Responsibility. Dalam Sastra, G., Revita, I., Marnita, R., & Handoko (Eds.), *Language and Its Role in Developing National Identity* (pg. 7—14). Proceeding The 1st International Seminar on Linguistics (ISOL-1). Padang: Andalas University
- Scollon, R. & Scollon, S.B.K. 1983. Face in Interethnic Communication. Dalam Richards, J.C. & Schmidt, R.W. (Eds.), *Language and Communication* (hlm. 156-190). New York: Longman Group Limited.

Riwayat Hidup Singkat

Anang Santoso (AS) adalah dosen Sastra Indonesia, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang (UM). Doktor Pendidikan Bahasa diraih di Universitas Negeri Malang (2002). Tahun 2009 AS diangkat sebagai Guru Besar dalam bidang Ilmu Wacana. Beberapa buku yang sudah dipublikasikannya: (1) *Bahasa Politik Pasca Orde Baru*(2003), Penerbit Wedatama Widya Sastra (WWS), Jakarta, (2) *Bahasa Indonesia Keilmuan Berbasis Area Isi Keilmuan* (2007), Universitas Muhammadiyah Malang Press, (3) *Bahasa Perempuan Sebuah Potret Ideologi Perjuangan*(2009; 2011), Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, dan (4) *Studi Bahasa Kritis: Menguak Bahasa, Membongkar Kuasa* (2012, Penerbit Mandar Maju, Bandung. **HP:** 081-334724614, **Telepon:** (0341) 791-113, **E-mail:** anangsum@gmail.com

Subtema: 3

**MENURUNNYA KEBANGGAAN MASYARAKAT
TERHADAP BAHASA INDONESIA SEBAGAI JATIDIRI BANGSA
(Tinjauan tentang Penggunaan Nama Hotel dan Restoran di Solo Raya)**

Oleh

Dr. Farida Nugrahani, M.Hum.

MPBI Program Pascasarjana Univet Bantara Sukoharjo

Ponsel: 081226229733 Surel: farida_nugrahani@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk (1) mendeskripsikan sikap masyarakat multikultural terhadap bahasa Indonesia (ditinjau dari penggunaan nama hotel dan restoran di Solo Raya), (2) mendeskripsikan dampak penggunaan nama asing terhadap eksistensi bahasa Indonesia sebagai simbol jatidiri dan kebanggaan bangsa. Metode penelitiannya adalah kualitatif deskriptif dengan strategi studi kasus terpancang. Subjeknya adalah penutur bahasa Indonesia pemilik hotel dan restoran di Solo Raya, yang dicuplik melalui *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan analisis dokumen, observasi, dan wawancara. Analisis data dilakukan secara induktif, dengan model interaktif. Hasil analisis menunjukkan bahwa ada kecenderungan sikap negatif masyarakat multikultural terhadap bahasa Indonesia. Terjadinya kompetisi bahasa dalam masyarakat, telah menyebabkan adanya pergeseran bahasa (*language shift*), sehingga bahasa yang statusnya lebih kuat (*language of wider communication*) mendesak yang lemah. Hal itu merupakan konsekuensi logis dari era global yang membuka akses interaksi antarbangsa dalam berbagai sektor kehidupan. Dalam kasus ini, meskipun Solo merupakan pusat budaya Jawa, sebagai kota bisnis masyarakatnya multikultural. Dalam kondisi itu, terjadilah situasi kebahasaan transisional yang mendorong tumbuhnya sikap positif masyarakat terhadap bahasa asing, sehingga lebih mengutamakan bahasa tersebut karena dipandang lebih bergengsi dan bernilai ekonomi tinggi. Apabila dibiarkan, hal itu dapat mengganggu perkembangan bahasa Indonesia, bahkan melunturkan nasionalisme serta mengaburkan karakter sebagai penciri identitas dan martabat bangsa dalam percaturan dunia.

Kata Kunci: Sikap Bahasa, Pergeseran Bahasa, Nasionalisme, Karakter Bangsa.

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kesatuan yang memiliki kekayaan budaya. Dengan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika", maka meskipun berdeda-beda

budayanya masyarakat Indonesia tetap satu juga, yaitu satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Itulah "Sumpah Pemuda" yang telah diikrarkan jauh sebelum Indonesia merdeka, pada tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah pemuda itu sampai sekarang masih terus dijaga demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tercinta.

Sebagai salah satu janji dalam "Sumpah Pemuda", bahasa Indonesia diangkat sebagai bahasa pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa lahir dengan latar psikologis, bahwa pemiliknya adalah bangsa yang sama-sama pernah terjajah dan tertindas, sehingga ingin bersatu agar menjadi bangsa yang kuat. Untuk itu dirasakan perlunya alat pemersatu yang dijunjung dan dimiliki bersama, yaitu bahasa Indonesia.

Dalam perjalanannya hingga kini, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia telah dikuatkan sebagai bahasa resmi kenegaraan melalui Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009. Dengan kedudukan bahasa Indonesia yang mantap dasar hukumnya itu, seharusnya nasib kehidupannya pun mantap di kalangan masyarakat pemiliknya. Namun tidak demikian faktanya di lapangan, sebab bila dicermati tampak bahwa fungsi bahasa Indonesia di kalangan masyarakat pemiliknya kini banyak yang mulai tergeser oleh bahasa asing.

Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional sesungguhnya akan tetap terhormat jika bangsa Indonesia sebagai pemiliknya mampu bersikap positif terhadapnya. Sikap positif itu akan menempatkan bangsa ini pada status yang lebih bermartabat. Bangsa yang bermartabat adalah bangsa yang mampu menghormati dan bangga terhadap kekayaan budayanya sendiri. Dalam konteks ini adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, sekaligus lambang identitas jati diri dan kebanggaan bangsa.

Masyarakat Solo Raya sebagai bagian dari bangsa Indonesia, tentunya memiliki kewajiban yang sama dalam menjaga amanat negara, dengan taat terhadap semua undang-undang termasuk undang-undang yang mengatur tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, serta penggunaannya dalam berbagai ranah kehidupan. Oleh sebab itu, sikap masyarakat multikultural di Solo Raya yang multibahasawan terhadap bahasa Indonesia pantas digunakan sebagai barometer pengukur tentang kondisi kehidupan bahasa Indonesia di lingkungan masyarakat pemiliknya pada dewasa ini.

Dari perspektif sosiolinguistik, fenomena sikap bahasa (*language attitude*) dalam masyarakat multibahasawan merupakan gejala yang menarik untuk dikaji karena sikap bahasa dapat menentukan keberlangsungan hidup suatu bahasa di tengah pemilik atau penuturnya. Berdasarkan pada latar belakang itulah, penelitian ini memfokuskan kajiannya pada dua masalah berikut. (1) bagaimana sikap masyarakat Solo Raya terhadap bahasa Indonesia (dilihat dari penggunaan bahasa untuk nama hotel dan restoran)? (2) bagaimana dampak penggunaan bahasa asing sebagai nama hotel dan

restoran di Solo Raya, bagi eksistensi bahasa Indonesia sebagai jatidiri dan kebanggaan bangsa? Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan sikap masyarakat multikultural terhadap bahasa Indonesia, dan latar belakangnya dalam memilih nama, serta dampaknya terhadap eksistensi bahasa Indonesia sebagai jatidiri dan kebanggaan bangsa.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menginspirasi munculnya kembali semangat bangsa Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu, dapat menjadi rujukan dan bahan pertimbangan bagi pentingnya upaya dalam menjaga eksistensi bahasa Indonesia melalui penegakan peraturan perundangan dengan sanksi hukum yang jelas sehingga ada efek jera bagi yang tidak mematuhi.

B. KAJIAN TEORETIK

1. Sikap Bahasa (*Language Attitude*)

Istilah sikap (*attitude*) digunakan pertama kalinya oleh Herbert Spencer (1862), untuk melihat status mental seseorang dan menjelaskan mengapa seseorang dapat berperilaku yang berbeda dalam situasi yang sama (Azwar, 2003:4). Sikap dapat diartikan sebagai suatu kecenderungan individu untuk menerima atau menolak sesuatu berdasarkan penilaian apakah sesuatu itu berharga atau tidak bagi dirinya. Tokoh bidang pengukuran sikap, Thurstone dan Likert (dalam Azwar, 2003:5), berpendapat, bahwa sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan mendukung, memihak (*favorable*), maupun tidak mendukung, atau tidak memihak (*unfavorable*), pada suatu objek yang dihadapinya. Sementara itu menurut Gerung (dalam Sunarto & Hartono, 2002:170), sikap dapat diartikan sebagai kesediaan bereaksi dari suatu individu terhadap suatu hal, berkaitan dengan motif yang mendasari tingkah laku yang berupa kecenderungan, namun belum merupakan aktivitas. Menurut Krech, Crutchfield & Ballachey (1962:177), sikap merupakan sistem penilaian positif atau negatif, perasaan emosi, dan respon terhadap suatu objek. Sikap berperan penting dalam kehidupan, karena seseorang sering dihadapkan pada suatu pilihan antara senang dan tidak senang.

Sejalan dengan definisi sikap, Kridalaksana (2001:197) menyampaikan bahwa **sikap bahasa** adalah posisi mental atau perasaan seseorang terhadap bahasa sendiri atau orang lain. Sikap merupakan fenomena kejiwaan, yang biasanya termanifestasi dalam bentuk tindakan atau perilaku. Namun berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa apa yang tampak dalam perilaku tidak selalu menunjukkan sikapnya. Begitu pula sebaliknya, sikap seseorang tidak selamanya tercermin dalam perilakunya.

Sebagaimana halnya dengan sikap pada umumnya, sikap bahasa juga merupakan peristiwa kejiwaan sehingga tidak dapat diamati secara langsung. Menurut Anderson, sikap bahasa adalah tata keyakinan atau kognisi yang

relatif berjangka panjang, sebagian mengenai bahasa, dan objek bahasa, yang memberikan kecenderungan seseorang untuk bereaksi dengan cara tertentu yang disenanginya. Sikap bahasa akan terlihat melalui perilaku berbahasa atau perilaku tuturnya. Namun tidak setiap perilaku tutur mencerminkan sikap bahasa penuturnya. Demikian pula sebaliknya, sikap bahasa penutur tidak selamanya tercermin dalam perilaku tuturnya.

Sikap terhadap bahasa dapat berupa sikap positif dan negatif. Menurut Garvin dan Mathiot (1968) terdapat tiga ciri sikap bahasa yaitu: (1) kesetiaan bahasa (*language loyalty*) yang mendorong masyarakat mempertahankan bahasanya dan mencegah adanya pengaruh bahasa lain. (2) kebanggaan bahasa (*language pride*) yang mendorong orang mengembangkan bahasanya dan menggunakannya sebagai lambang identitas dan kesatuan masyarakat. (3) kesadaran adanya norma bahasa (*awareness of the norm*) yang mendorong orang menggunakan bahasanya dengan cermat dan santun sebagai faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap penggunaan bahasanya (*language use*).

Ketiga ciri sikap itu merupakan indikator adanya sikap positif terhadap bahasa. Sikap positif terhadap bahasa ditandai dengan adanya semangat untuk menggunakan bahasa sebagaimana bahasa tersebut digunakan oleh kelompok masyarakat tuturnya. Adapun sikap negatif terhadap bahasa ditandai dengan melemahnya semangat anggota masyarakat tutur, untuk menggunakan dan mempertahankan kemandirian bahasanya. Hal itu merupakan indikasi melunturnya kesetiaan terhadap bahasa yang dapat berujung pada hilangnya kesetiaan terhadap bahasanya sendiri. Sikap negatif itu akan terjadi apabila penutur tidak mempunyai lagi rasa bangga terhadap bahasanya, dan mengalihkan kebanggaannya kepada bahasa lain yang bukan miliknya. Hal itu pada umumnya terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor politis, etnis, ras, prestise, ekonomi, efisiensi, kepraktisan, kemudahan, dan berbagai alasan lainnya.

Sebagai contoh adalah kasus penggunaan bahasa Jawa di kalangan penutur muda etnis Jawa. Pada umumnya penutur muda bahasa Jawa telah meluntur semangatnya dalam menggunakan bahasa daerahnya sebagai alat komunikasi dalam lingkungannya. Berbagai alasan yang melatarbelakangi antara lain karena bahasa Jawa dipandang (1) kurang fleksibel, (2) kurang sesuai dengan perkembangan zaman, (3) kurang berkontribusi terhadap kebutuhan hidup masyarakat modern yang berbasis teknologi, (4) rumit, dan kurang praktis, (5) tidak demokratis, dan (6) tidak memiliki akses yang luas dalam pergaulan di era global. Berbagai alasan itu merupakan pertanda bahwa telah terjadi perubahan sikap yang kurang positif terhadap bahasa Jawa dari kalangan penuturnya.

Contoh lainnya, yaitu munculnya sikap negatif masyarakat Indonesia terhadap bahasa nasional. Sikap negatif itu tampak ketika pengguna bahasa

Indonesia tidak memiliki kesadaran untuk bertaat asas kepada kaidah bahasa yang benar, sehingga menggunakan bahasa Indonesia dengan ‘semau gue’, tidak cermat dan tidak tertib.

2. Pergeseran Bahasa (*Language Shift*)

Latar belakang kebudayaan bangsa Indonesia yang kompleks, antara lain ditandai oleh keberagaman bahasa daerah, yang keberadaannya berfungsi sebagai alat komunikasi dalam ranah budaya. Keberagaman masyarakat Indonesia itu, menyebabkan bahasa daerah tetap eksis dalam fungsinya sebagai identitas etnisnya. Selain itu, masyarakat juga menggunakan bahasa Indonesia dalam fungsinya sebagai bahasa pemersatu antaretnis di Indonesia. Sementara itu, dalam kehidupan modern di era global, dengan tatanan kehidupan yang bersifat universal juga mendorong masyarakat Indonesia menggunakan bahasa asing yang dipandang memiliki jangkauan lebih luas dalam pergaulan antarbangsa. Kehidupan di era global menuntut masyarakat Indonesia baik secara terpaksa ataupun sukarela menjadi penutur dwibahasawan, atau bahkan multibahasawan. Konsekuensi logis dari kondisi itu menurut Subroto dkk. (2007:15) adalah terjadinya **kompetisi** di antara bahasa-bahasa yang ada di tengah-tengah masyarakat, sebagai akibat terdapatnya dua bahasa atau lebih dalam masyarakat penutur.

Dalam peristiwa kompetisi bahasa itu, pada akhirnya bahasa yang lebih kuat akan mendominasi bahasa yang lemah, dan bahasa yang lemah akan berusaha bertahan atau tergeser kedudukannya. Fasold (1991:213) menjelaskan, bahwa pemertahanan bahasa merupakan ciri dari masyarakat dwibahasawan atau multibahasawan. Sementara itu, **pergeseran bahasa** (*language shift*) adalah munculnya kecenderungan masyarakat untuk lebih memilih menggunakan bahasa ‘baru’ dalam ranah yang semula menggunakan bahasa ‘lama’. Dalam konteks ini adalah diterimanya bahasa Indonesia sebagai bahasa baru, daripada bahasa daerah sebagai bahasa ‘lama’. Namun demikian pada akhirnya bahasa asing lebih diterima sebagai bahasa yang ‘lebih baru’ daripada bahasa Indonesia yang merupakan bahasa yang ‘lebih lama’, khususnya untuk pemakaian dengan kepentingan tertentu.

Kuatnya pengaruh bahasa asing terhadap bahasa Indonesia semakin mempertegas dominasi bahasa asing terhadap bahasa Indonesia. Lebih lagi ditunjang oleh kurangnya penghargaan masyarakat terhadap bahasa Indonesia. Kondisi itu semakin mempercepat pergeseran bahasa Indonesia menjadi bahasa yang lemah, sehingga ‘lengser’ dari kedudukannya. Menurut Fasold (dalam Subroto, 2007:16), yang berpengaruh terhadap ‘lengsernya’ suatu bahasa adalah adanya kontak penutur dengan bahasa yang lebih ‘kuat’ atau *language of wider communication (LWC)*, dan kontak penutur dengan kekuatan ekonomi atau kebijakan pemerintah.

Dalam perkembangannya, bukan tidak mungkin jika bahasa daerah dan bahasa Indonesia akan terus terdesak oleh bahasa asing yang dapat mengakibatkan terjadinya pergeseran bahasa hingga bahasa daerah dan/atau bahasa Indonesia berada dalam posisi sebagai bahasa yang terdesak (*endangered language*). Menurut Jense (dalam Subroto dkk., 2007:18), ketika kondisi bahasa yang terdesak itu dibiarkan tanpa upaya penanggulangannya, dipastikan akan terjadi kematian pada suatu bahasa (*language death*), sebagai akibat dari terjadinya pergeseran bertahap ke arah bahasa yang dominan dalam kontak bahasa. Dalam konteks ini, penggunaan bahasa daerah mengalami pergeseran ke arah bahasa Indonesia yang lebih dominan, demikian pula penggunaan bahasa Indonesia bergeser ke arah bahasa asing, utamanya dalam konteks kepentingan bisnis yang membutuhkan akses komunikasi lebih luas.

3. Bahasa sebagai Identitas Bangsa

Kebudayaan memang sangat kompleks meliputi hampir seluruh aktivitas manusia dalam kehidupannya. Demikian pula kebudayaan nasional Indonesia yang memiliki sifat khas, dan dapat memberikan kebanggaan kepada masyarakat Indonesia sebagai pemilikinya (Koentjaraningrat, 1987:5).

Menurut Thomas & Wareing (2007:223), dalam komunitas sosial, salah satu cara yang paling dasar dalam menentukan identitas dan mempengaruhi orang lain memandang diri kita adalah melalui bahasa. Adapun sarana linguistik yang dominan digunakan adalah dengan pemberian 'nama'. 'Nama' akan membuat sesuatu menjadi berbeda dari yang lain, karena nama memiliki arti yang penting bagi penyandanginya. Namun sebuah nama dapat menimbulkan masalah jika tidak cocok dengan kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada dalam masyarakatnya. Orang tidak bisa membentuk sendiri identitas sosial yang diinginkannya, karena identitas itu terkait dengan cara orang lain memandang dirinya. Karena pentingnya bahasa sebagai sarana pembentukan identitas, maka bahasa memiliki pengaruh yang besar terhadap kendali sosial. Hubungan antara bahasa dan identitas merupakan hubungan yang kompleks, karena dipengaruhi oleh faktor individu, sosial, dan politik, yang secara bersama-sama membentuk identitas.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, NKRI telah menempatkan bahasa Indonesia dalam kedudukan dan fungsinya yang sangat penting dan terhormat, sepadan dengan keberadaan NKRI itu sendiri. Oleh sebab itu, bahasa Indonesia harus tetap hidup, selama NKRI ini masih merdeka.

Posisi penting bahasa Indonesia sebagai **identitas bangsa** telah ditetapkan melalui Sumpah Pemuda 1928, UUD'45 pasal 36, dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 Pasal 25, yang menetapkan bahwa (1) Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa; (2) Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berfungsi sebagai jatidiri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah; (3) Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa.

4. Multikulturalisme pada Masyarakat

Seiring dengan berlangsungnya globalisasi dunia, timbullah multikulturalisme dalam masyarakat. Jauh sebelum istilah globalisasi populer, pandangan para futurolog seperti Alvin Toffler (1970), John Naisbitt dan Patricia Aburdene (1990), telah menyadarkan kita bahwa pada akhir abad XX akan terjadi perubahan besar dalam peradaban umat manusia. Terjadi lompatan besar dalam kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang mengakibatkan terjadinya perubahan tata nilai dalam kehidupan. Televisi (TV) --dan produk teknologi komunikasi lainnya seperti: *video compact disc (VCD)*, *digital video disc (DVD)*, *film*, *home theatre*, *hand phone*, dan internet--, turut mendorong terjadinya akselerasi perubahan nilai dalam kehidupan masyarakat termasuk pada masyarakat Surakarta.

Banjir informasi dengan muatan sosial budayanya dari negara satu ke negara lainnya terutama dari negara maju (Barat) ke negara dunia ketiga termasuk Indonesia menjadikan dunia sebagai perkampungan global (*global village*). Terjadilah transformasi sosial budaya dalam masyarakat yang berdampak pada perubahan pemahaman, pandangan, dan sikap masyarakat terhadap nilai-nilai kehidupan.

Di Indonesia transformasi sosial budaya mengakibatkan terjadinya pergeseran bahkan perubahan tata nilai dalam kehidupan masyarakat. Pola kehidupan masyarakat kita kini sedang berubah dari masyarakat agraris menuju industrial, dari nilai lokal menuju nilai global-universal, dari monokultural menuju multikultural. Inilah wajah masyarakat kita yang sedang berubah sebagai konsekuensi logis dari berlangsungnya globalisasi.

Fenomena globalisasi yang kemudian melahirkan pluralisme budaya tersebut pada beberapa dekade terakhir ini tampaknya mulai merambah dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Tidak hanya dalam upacara ritual, tradisi keluarga, dan pranata sosial, semangat multikultural mulai menjadi orientasi hidup kalangan masyarakat lebih-lebih dalam dunia bisnis.

Merebaknya multikulturalisme dapat dirunut melalui tiga teori sosial yang menjelaskan hubungan antarindividu dalam masyarakat dengan aneka latar belakang agama, etnik, bahasa, dan budaya. Menurut Ricardo L. Garcia (1982:37-42) teori sosial tersebut adalah: (1) *Melting Pot I: Anglo Conformity* (individu-individu yang beragam latar belakang seperti agama, etnik, bahasa, dan budaya, disatukan ke dalam satu wadah yang dominan); (2) *Melting Pot II: Ethnic Synthesis* (individu-individu yang beragam latar belakangnya disatukan ke dalam satu wadah baru, identitas agama, etnik, bahasa, dan budaya asli para anggotanya melebur menjadi identitas yang baru; dan (3) *Cultural Pluralism: Mosaic Analogy* (individu-individu yang beragam latar belakang agama, etnik, bahasa, dan budaya, memiliki hak untuk mengekspresikan identitas budayanya secara demokratis dengan tidak meminggirkan budaya kelompok minoritas). Masyarakat yang warganya beragam latar belakang budayanya seperti Jawa, Batak, Sunda, Arab, dan Cina, tiap individu berhak menunjukkan identitas budayanya dan mengembangkannya tanpa saling mengganggu.

Dari ketiga teori tersebut, teori ketigalah yang dipandang paling sesuai dengan pengembangan masyarakat global yang pluralistis. Artinya, multikulturalisme mengakui hak individu untuk tetap mengekspresikan identitas budayanya masing-masing dengan bebas. Inilah esensi multikulturalisme dalam masyarakat modern yang heterogen.

Pada situasi sekarang yang disebut antropolog Appadurai (1991:28) sebagai *global ethnoscape*, budaya-budaya memang tetap memuat perbedaan tetapi perbedaan itu tidak lagi bersifat taksonomis, melainkan interaktif membedakan daripada sebagai sebuah esensi. Perbedaan (seperti halnya persamaan) dapat dipahami ibarat sebuah titik pada seutas tali yang dapat digeser ke kanan atau ke kiri. Terjadilah perubahan cara pandang dalam antropologi, misalnya, *ethnic* (etnik) menjadi *ethnicity* (etnisitas, kesukubangsaan), dari Barat menjadi kebaratan, dari Jawa menjadi kejawaan, dan seterusnya.

Perbedaan budaya dapat dipahami sebagai sebuah keniscayaan karena hakikatnya dalam masyarakat pasti terdapat individu-individu yang latar belakangnya beraneka ragam. Pluralisme terdalam akan sampai pada kesepahaman bahwa perbedaan budaya mengartikulasikan hak-hak orang lain dan inti dari kesatuan dalam perbedaan. Dalam konteks ini Dewanto (1991:25) menyatakan bahwa kita tidak sedang dan hidup dalam aneka dunia yang terpisah satu dengan lainnya, melainkan dalam berbagai dunia yang saling bersentuhan, saling pengaruh, saling memasuki satu dengan lainnya. Pluralitas merupakan tahap awal dari proses ke arah itu, salah satu jalan yang memungkinkan kita untuk toleran dan terbuka untuk mempengaruhi dan dipengaruhi.

Berdasarkan pemahaman di atas, dapat dikemukakan bahwa **multikulturalisme** adalah suatu pandangan dan sikap untuk melihat pluralitas budaya --termasuk bahasa sebagai subinti budaya-- sebagai realitas fundamental dalam kehidupan masyarakat. Akhirnya muncul kesadaran bahwa pluralitas dalam dinamika kehidupan adalah realitas bahkan kebutuhan yang tak dapat diingkari.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Solo Raya dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian dipilih dengan tujuan memperoleh sasaran yang memiliki karakteristik masyarakat tutur yang berada dalam lingkungan multikultural. Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari hingga Juni 2013.

Berdasarkan karakteristik **metodenya**, menurut Yin (2000:20) penelitian ini termasuk dalam kelompok studi kasus tunggal terpancang (*embedded case study*). Jumlah kasus yang dikaji hanya satu macam, yaitu tentang sikap masyarakat Solo Raya terhadap bahasa Indonesia, ditinjau dari penggunaan bahasa untuk nama hotel dan restoran, serta dampaknya terhadap eksistensi bahasa Indonesia sebagai kebanggaan dan identitas jatidiri bangsa.

Subjek penelitian ini adalah pemilik usaha perhotelan dan restoran yang terletak di wilayah Solo Raya, baik yang berasal dari penduduk asli maupun pendatang, yang tidak dibatasi latar belakang suku, agama, maupun rasnya. Subjek penelitian yang demikian sengaja diambil agar dapat diperoleh informasi yang lengkap dan beragam dari cuplikan subjek penelitian yang mewakili karakteristik masyarakat Solo Raya yang multikultural.

Data penelitian ini berupa nama-nama hotel dan restoran, serta alasan pemilihan nama oleh pemiliknya. **Sumber data** penelitian ini adalah tempat, narasumber, dan dokumen, yang dipilih dalam posisi yang memungkinkan akses pemerolehan informasi sesuai kebutuhan penelitian. Narasumber utama dalam penelitian ini adalah 10 orang pemilik hotel dan/atau restoran, yang berlatar belakang pribumi dan nonpribumi atau keturunan etnis asing. Narasumber lain yang diperlukan demi kepentingan triangulasi data adalah tokoh masyarakat setempat sebagai pemangku kepentingan. Adapun tempat atau lokasi yang dipilih sebagai sumber data penelitian adalah tempat berdirinya hotel dan restoran yang termasuk dalam wilayah Solo Raya, meliputi Kota Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten (Subosukawonosraten).

Sampel dalam penelitian ini diambil dengan teknik *purposive sampling*, dengan cara mencuplik sumber datanya yaitu sebagian dari hotel dan restoran yang ada di Solo Raya beserta para pemiliknya yang memiliki latar belakang etnis pribumi dan nonpribumi atau keturunan asing. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi dan dokumentasi, serta

wawancara mendalam (*in-depth interviewing*). Teknik itu dipilih karena menurut Yin (2000:109) merupakan teknik yang dapat diterapkan sebagai dasar bagi pengumpulan data yang esensial dalam studi kasus.

Analisis data dilakukan sejak proses pengumpulan data berlangsung di lapangan hingga diperoleh simpulan yang mantap dalam verifikasi melalui proses siklus. Data dianalisis dengan teknik induktif melalui model analisis interaktif dari Miles & Huberman (2004:23), yang melibatkan tiga komponen meliputi reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan/verifikasi.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Sikap Masyarakat Multikultural terhadap Bahasa Indonesia

Sejak berabad-abad lalu kota Surakarta yang lebih terkenal dengan sebutan 'Solo' merupakan salah satu pusat kekuasaan politik, ekonomi, dan kebudayaan Jawa dengan latar sejarah keraton Kasunanan dan Mangkunegaran, pewaris dinasti Mataram. Di Solo tumbuh subur kebudayaan Jawa termasuk bahasa (daerah) Jawa. Hingga kini Solo (dan Yogyakarta) masih tetap menjadi pusat pengembangan budaya Jawa dan menjadi tujuan para ilmuwan dari mancanegara yang ingin mendalami kebudayaan Jawa, termasuk bahasanya.

Meskipun demikian, dalam perkembangannya masyarakat Solo Raya tidak dapat terlepas dari arus globalisasi yang menimbulkan transformasi sosial budaya, termasuk dalam hal penggunaan bahasa Jawa. Orientasi hidup masyarakat tidak lagi lokal melainkan universal. Lebih-lebih dalam dunia bisnis, kecenderungan masyarakat ke arah universal semakin terasa. Oleh karena itu, wajarlah jika kemudian dalam rangka meraih sukses dalam bisnis terjadi pergeseran orientasi dalam penggunaan bahasa. Hal itu terasa dalam penggunaan nama-nama hotel dan restoran. Nama-nama hotel, dan restoran, tidak lagi bertahan pada nama-nama dalam bahasa lokal Jawa melainkan mulai bergeser ke arah bahasa universal (asing). Namun demikian, masih ada pula yang bertahan dengan nama-nama lokal kedaerahan.

Sebagai kota budaya sekaligus kota bisnis, Solo memiliki masyarakat heterogen/majemuk, baik etnik, ras, agama, budaya, pendidikan, maupun sosial ekonominya. Banyaknya pendatang yang masuk ke wilayah komunitas Jawa di Solo Raya telah memaksa penutur bahasa Jawa itu menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya dengan hadirnya keterbukaan komunikasi di era global, pada akhirnya juga memaksa penutur bahasa daerah dan bahasa Indonesia di Solo Raya berpindah kepada bahasa asing (Inggris) yang berstatus lebih kuat atau sebagai *LWC*, meskipun masih terbatas dalam kepentingan-kepentingan tertentu saja. Konsekuensi dari kondisi itu, penggunaan bahasa Jawa semakin berkurang, demikian pula penggunaan bahasa Indonesia juga semakin tidak konsisten terhadap kaidah. Sementara

penggunaan bahasa asing (utamanya untuk kepentingan bisnis) semakin meluas.

Ada sejumlah faktor yang berperan dalam menentukan kelangsungan hidup suatu bahasa. Satu di antaranya adalah kebijakan bahasa yang digariskan oleh pemerintah yang dilaksanakan lembaga yang ditunjuk (Wijana, 2006:29). Pada dasarnya tidak mungkin suatu bangsa atau negara hidup menyendiri tanpa berhubungan dengan bangsa atau negara lain, sehingga secara langsung mengakibatkan terjadinya komunikasi di antaranya. Dalam peristiwa komunikasi antarbangsa itu, akan terjadi proses saling mempengaruhi. Menurut Mackey (dalam Wijana, 2006:64) besarnya pengaruh itu didasarkan atas berbagai indikator geolinguistik seperti demografi, persebaran, ekonomi, kultural, dan ideologi.

Pada lazimnya dalam sebuah masyarakat diglosik, bahasa-bahasa yang ada di dalamnya memiliki peran dan fungsi berbeda-beda. Bahasa daerah biasanya memiliki peran dan fungsi yang rendah. Bahasa Indonesia memiliki peran dan fungsi lebih tinggi, dan bahasa asing, terutama Bahasa Inggris memiliki fungsi yang paling tinggi. Peran dan fungsi yang berbeda-beda itu akan melahirkan prestise berbahasa yang berbeda-beda. Pada lazimnya orang merasa berprestise tinggi jika dia dapat berbahasa Inggris dengan baik, yakni bahasa yang memiliki fakta keinternasionalan. Sebaliknya orang merasa berprestise rendah jika hanya dapat berbahasa daerah saja (Rahardi, 2006:57).

Kenyataan kebahasaan yang demikian itu umum terjadi dalam masyarakat di berbagai negara. Seperti di Eropa, terdapat bahasa patois (*patoic language*) yaitu bahasa yang tidak terpelihara dan tidak dikembangkan secara baik karena hanya dipakai oleh masyarakat kelas bawah. Bahasa semacam itu biasa disebut sebagai bahasa kelompok dunia keempat. Sementara bahasa Inggris dianggap sebagai bahasa masyarakat modern atau kelompok dunia pertama. Bahasa-bahasa di Rusia disebut sebagai bahasa kelompok dunia kedua. Adapun bahasa-bahasa di Asia, Afrika, dan Amerika Latin disebut sebagai bahasa kelompok dunia ketiga.

Dari pandangan tersebut, dapat ditarik simpulan bahwa sesungguhnya bahasa yang digunakan seseorang sangat menentukan prestise dari kelompoknya. Kenyataan ini berlaku secara universal tidak hanya dalam masyarakat bahasa Indonesia. Bahasa-bahasa yang bergengsi tinggi pada umumnya cenderung dipinjam atau dipungut kosakataya. Leksikon-leksikon tertentu digunakan dengan maksud untuk bergaya, menyombongkan diri, atau menaikkan 'gengsi'. Pemungutan dan percampuran leksikon-leksikon bahasa yang demikian itu tidak disebabkan semata-mata karena faktor kedekatan bahasa (*language closeness*) atau aspek kebutuhan kebahasaan (*felt-need aspect*), tetapi sesungguhnya lebih karena ada maksud untuk mencapai prestise tertentu dalam praktek berbahasa (*felt-prestige aspect*).

Dari data yang dikumpulkan diketahui bahwa sebagian dari masyarakat Solo Raya lebih senang menggunakan bahasa asing untuk memberi nama hotel dan restorannya. Ada yang menggunakan leksikonnya, ada pula yang mengikuti strukturnya. Hal itu tampak pada penggunaan nama-nama berikut. (1) Hotel Lor In; (2) Kusuma Sahid Prince Hotel; (3) Novotel; (4) The Sunan Hotel; (5) Hotel Riyadi Palace; (6) Hotel Indah Palace; (7) Arancia Hotel; (8) Hotel Diamond; (9) Hotel Grand Orchid; (10) Hotel Grand Soba; (11) De Solo Boutique Hotel; (12) Lawu Resort Hotel; (13) River Hill Tawangmangu; (14) Pose In Solo Hotel; (15) Malioboro in Solo Hotel; (16) Solo Inn Hotel; (17) Fave Hotel; (18) Ibis Hotel; (19) Hotel Grand Setia Kawan; (20) Mina Hotel.

Gejala tersebut juga tampak dalam penggunaan nama-nama restoran berikut. (1) Solo Resto; (2) Sun City Restaurant; (3) Tom's Resto & Steak; (4) Garden Restaurant; (5) New De Paris; (6) Orient; (7) Golden Restaurant; (8) Fai Kie Kafe Garden; (9) Bandar AA Resto & Launge; (10) Boga International Restaurant; (11) Central Restoran; (12) Che's Resto; (13) Diamond International Restaurant; (14) Kopitiam Oey; (15) Komaci Japanese Resto; (16) Straberry Special Food & Steak; (17) Social Kitchen; (18) Sun City Restaurant; (19) Hoka-Hoka Bento; (20) California Fried Chicken.

Penggunaan nama dengan bahasa asing yang 'mewabah' dewasa ini merupakan bukti akan kecenderungan masyarakat yang lebih mengutamakan bahasa asing daripada bahasa Indonesia terutama dalam dunia bisnis. Hal itu dilakukan para penutur bahasa Indonesia karena mereka menganggap bahasa asing lebih prestise dan memiliki daya jual lebih tinggi dari segi ekonomi. Hal itu dapat dipahami sebagai manifestasi dari spirit multikultural yang juga berlaku pada masyarakat Solo Raya. Meskipun sesungguhnya sejak dulu kota Solo ini telah dikenal sebagai pusat kekuasaan, ekonomi, dan budaya Jawa.

Pertimbangan seseorang dalam menggunakan bahasa itu merupakan manifestasi sikapnya terhadap bahasa. Garvin dan Mathiot (dalam Rahardi, 2006:64) menyatakan bahwa sikap berbahasa seseorang merupakan penentu utama perilakunya dalam aktivitas berbahasa. Orang yang suka menggunakan kata-kata asing, kata-kata dari bahasa yang memiliki prestise tinggi merupakan wujud nyata dari aspek sikap yakni kebanggaan bahasa (*language pride*). Sama kasusnya juga pada orang yang suka bergaya ilmiah karena menguasai bidang ilmunya. Demikian pula pada orang yang tidak loyal terhadap bahasanya sendiri, tidak bangga, dan tidak paham terhadap kaidah kebahasaan dan budayanya sendiri, maka mereka cenderung untuk tidak bersikap positif terhadap bahasanya sendiri.

Di antara melemahnya semangat masyarakat dalam menggunakan bahasa Indonesia di era global ini, ternyata masih ada yang sangat **melegakan** karena masih ada masyarakat yang tidak terkena 'wabah' tersebut. Beberapa di antaranya masih menggunakan nama yang bernuansa

Indonesia, bahkan ada pula yang tetap menggunakan bahasa daerah. Fenomena ini menandakan bahwa pengguna bahasa tersebut bangga terhadap bahasanya sendiri, dan mereka berpandangan bahwa prestise usahanya tidak harus dibangun dengan nuansa yang berbau asing.

Penamaan hotel yang bernuansa nasional/lokal, tampak pada nama-nama berikut. (1) Hotel Sanashtri; (2) Hotel Arini; (3) Rumah Turi; (4) Omahsinten; (4) Hotel Trihadi; (4) Hotel Mekar Sari; (4) Hotel Pramesthi; (5) Hotel Komajaya Komaratih; (6) Hotel Griya Kencana; (7) Hotel Suka Marem; (8) Hotel Atina Graha; (9) Hotel Setya Rahayu; (10) Hotel Sendang Asri; (11) Hotel Larasati; (12) Hotel Sidodadi; (13) Hotel Suko Asih; (14) Hotel Watu Gedhe; (15) Hotel Puri Kamulyan; (16) Hotel Asri; (17) Hotel Ayu; (18) Hotel Sri Rejeki; (19) Hotel Srikandi; (20) Hotel Pondok Sari.

Sementara penggunaan nama bernuansa nasional/lokal pada restoran tampak pada nama-nama berikut. (1) Adem Ayam; (2) Cak Eko Bakso Malang; (3) Warung Tengkleng Yu Tentrem; (4) Pondok Jowi; (5) Masjo (Masakan Jowo); (6) Rasa Mirasa; (7) Kedai Cobek; (8) Kondhang Rasa; (9) Ayam Bakar Wong Solo; (10) Pecel Dheso; (11) Waru Doyong; (12) Gula Klapa; (13) Ayam Penyet Ria; (14) Soto Mbok Giyem; (15) Soto Ndelik; (16) Soto Sawah; (17) Madukoro; (18) Dapur Solo; (19) Bubur Lemu Bu Kedul; (20) Nasi Liwet Wongso Lemu.

Selain itu tampak dalam pemilihan kata dengan permainan bahasa sebagai berikut. (1) Nasi Ijo Lezate; (2) Mareme; (3) Izhakuiki; (4) Takasi mura; (5) Sotokuiki; (6) Nikiecho; (7) Nikiizaku. Sekilas nama-nama tersebut bernuansa asing (Jepang), tetapi sesungguhnya merupakan bahasa Jawa.

Faktanya, tidak ada korelasi yang signifikan antara nama dengan kesuksesan usaha yang dilakukan. Menurut para informan kesuksesan usaha itu lebih dipengaruhi oleh kualitas produk dan pelayanan prima (*best service*) yang ditawarkan, bukan sekedar kesan mentereng dan kebarat-baratan pada namanya. Namun, barangkali banyak usaha yang terpaksa menggunakan nama asing karena merupakan '*franchise*', sehingga terikat pada kontrak kerja. Hal itu masih bisa dimaklumi, meskipun sesungguhnya pemerintah dapat membuat kebijakan yang mengatur masalah itu, misalnya dengan pengindonesiaan nama-nama asing sebagai penyerenta atau pendamping nama asingnya.

Membangun sikap berbahasa yang positif, sesungguhnya merupakan kata-kata kunci sekaligus titik fokus untuk melambatkan laju verbalisme bahasa. Sikap bahasa yang positif juga menghambat masuknya bahasa asing yang berlebih-lebihan yang tidak sepenuhnya dapat diterima oleh warga masyarakat bahasa dalam wahana kebudayaannya.

2. Dampak Penggunaan Bahasa Asing bagi Eksistensi Bahasa Indonesia

Penggunaan nama asing pada hotel dan restoran pada umumnya bertujuan agar lebih berorientasi internasional guna menarik minat wisatawan asing. Adapun penggunaan nama lokal kedaerahan (Jawa) juga bertujuan untuk menarik simpati warga masyarakat terutama lokal Solo Raya untuk berkunjung ke arena bisnisnya.

Dalam realitasnya, nama usaha --dalam kajian ini khususnya tentang hotel dan restoran--, hanya merupakan salah satu indikator untuk meraih sukses bisnis. Banyak hotel dengan nama asing yang ramai didatangi pengunjung. Banyak pula hotel dan restoran dengan nama lokal Jawa yang juga ramai pengunjungnya. Hotel Pramesthi, Sanasthri, Arini, Komajaya Komaratih, misalnya pengunjungnya banyak. Demikian pula rumah makan Adem Ayem, Soto Mbok Giyem, Masjo (Masakan Jowo), Rasa Mirasa, dan Ayam Bakar Wong Solo, juga sangat populer dan banyak pengunjungnya.

Lepas dari berbagai harapan pada pemilihan nama untuk usahanya yang lebih bertendensi ekonomi itu, sesungguhnya pemakaian bahasa asing yang tidak tepat memiliki dampak yang luas terhadap aspek psikologis masyarakat dan sekaligus terhadap perkembangan bahasa lokal (daerah) dan bahasa nasional (Indonesia).

Dampak penggunaan nama asing terhadap hotel dan restoran antara lain adalah adanya kecenderungan warga masyarakat yang melemah kecintaan dan kebanggaannya terhadap bahasa daerah dan budaya lokal, serta menurunnya apresiasi dan minat masyarakat terhadap budaya dan bahasa nasional, yang pada gilirannya akan berujung pada memudarnya karakter bangsa sehingga masyarakat kehilangan identitas bangsa. Padahal masalah itu sangat krusial bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, sudah selayaknya jika bangsa Indonesia melakukan upaya untuk melakukan konservasi bahasa dan budaya daerah agar terjaga kelestariannya, dan membina serta mengembangkan bahasa dan budaya nasional, sebagai penciri identitas bangsa.

Antisipasi dan solusi atas berbagai sikap negatif terhadap bahasa dan budaya nasional itu antara lain dapat dilakukan baik melalui jalur pendidikan, jalur budaya, maupun hukum.

E. Penutup

Masyarakat multikultural di Solo Raya tidak dapat terlepas dari arus globalisasi yang menimbulkan transformasi sosial budaya, termasuk dalam hal penggunaan bahasanya. Orientasi hidup masyarakat tidak lagi lokal melainkan universal. Lebih-lebih dalam dunia bisnis, kecenderungan masyarakat menuju ke arah universal semakin terasa. Oleh karena itu, wajarlah jika kemudian dalam rangka meraih sukses dalam bisnis sebagian dari masyarakat Solo Raya lebih suka menggunakan bahasa asing untuk

memberi nama hotel dan restorannya. Ada yang menggunakan leksikonya, ada pula yang mengikuti strukturnya.

Penggunaan nama dengan bahasa asing yang ‘mewabah’ dewasa ini merupakan bukti akan kecenderungan masyarakat multikultural yang mengutamakan bahasa asing daripada bahasa Indonesia terutama dalam dunia bisnis demi mendapatkan prestise dan daya jual atau nilai ekonomi tinggi.

Penggunaan bahasa asing yang tidak tepat memiliki dampak psikologis pada melemahnya kecintaan dan kebanggaan masyarakat terhadap bahasa dan budaya milik bangsa sendiri. Apabila hal itu dibiarkan, maka pada gilirannya akan dapat melunturkan nasionalisme dan bahkan dapat berujung pada memudarnya karakter dan jatidiri bangsa. Padahal bangsa yang besar dan terhormat dalam percaturan dunia adalah bangsa yang berbudaya, berkarakter, dan memiliki jatidiri yang jelas.

Mengingat pentingnya fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional sekaligus kebanggaan dan lambang identitas bangsa, sudah selayaknya jika bangsa Indonesia melakukan upaya untuk menjaga perkembangannya agar kedudukannya tetap terhormat seperti ketika disepakai bersama oleh bangsa Indonesia. Upaya pengembangan bahasa Indonesia dapat dilakukan melalui berbagai jalur, antara lain jalur pendidikan, budaya, dan hukum agar bahasa Indonesia tetap berjaya. Semoga.

DAFTAR PUSTAKA

- Appadurai, Arjun. 1991. “Global Ethnoscape: Notes and Quenesfor Transnational Anthropology” dalam *Recapturing Anthropology Working in the Present*. Richard G. Fox (Ed.). Santa Fe, New Mexico: School of American Research Press.
- Azwar, Saefuddin. 2003. *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*. Edisi ke- 2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dewanto, Nirwan. 1991. “Kebudayaan Indonesia: Pandangan 1991” dalam *Prisma* No. 10 Tahun XX, Oktober 1991.
- Fasold, Ralp. 1991. *Sociolinguistics of Language*. Oxford: Blackwell Publisher.
- Garcia, Ricardo L. 1982. *Teaching in a Pluralistic Society: Consepts, Models, Strategies*. New York: Harper & Row Publisher.
- Garvin, P.L. Mathiot, M. 2006. “The Urbanization of The Guarani Language: Problem in Language and Culture” in Fishman 19 *Reading in The Sociology of Language*. Mouton: The Haque-Paris.
- Koentjaraningrat. 1987. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru.
- Kridalaksana, Harimurti. 2001. *Kamus Linguistik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Kretch, David, Richards Crutchfield, & Egerton L. Ballachey. 1962. *Individual in Society*. New York: Me Crow-Hill Book Company. Inc.
- Miles, M.B. & A.M. Huberman. 1984. *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. Beverly Hills: Sage Publication.
- _____. 1992. *Analisis Data Kualitatif* (Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi). Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Rahardi, Kunjana. 2006. *Dimensi-Dimensi Kebahasaan Aneka Masalah Bahasa Indonesia Terkini*. Jakarta: Erlangga.
- Subroto, Edi, Maryono Dwirahardjo, Budhi Setiawan. 2007. "Model Pelestarian dan Pengembangan Kemampuan Berbahasa Jawa Krama di Kalangan Generasi Muda Wilayah Surakarta dan Sekitarnya". *Laporan Hasil Penelitian Hibah Penelitian Tim Pascasarjana HPTP Tahun I Tahap I*.
- Sunarto & Agung Hartono. 2002. *Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional dan PT Rineka Cipta.
- Tomas, Linda & Shan Wareing. 2007. *Bahasa, Masyarakat, dan Kekuasaan* (Terj. Sunoto dkk.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Toffler, Alvin. 1987. *Kejutan Masa Depan* (Terj. Sri Koesdiyantinah). Jakarta: PT Pantja Simpati.
- Wijana, Dewa Putu dan Muhammad Rohmadi. 2006. *Sosiolinguistik Kajian Teori dan Analisis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yin, Robert K. 2000. *Case Study Research: Design and Methods (Studi Kasus: Desain dan Metode)*. Terjemahan M. Djauzi Mudzakir. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

ooOoo

Modifikasi dan Alih Wahana Sastra Tradisional dalam Konteks Pemartabatan Bangsa

Ganjar Harimansyah
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

Kongres Bahasa Indonesia X
Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 28—31 Oktober 2013

Daftar Isi

Alu-aluan _____	1
“Garis Nasib” Sastra Tradisional _____	2
Modifikasi dan Alih wahana _____	3
Revitalisasi Sastra Tradisional dan Pemertabatan Bangsa	Error! Bookmark not defined.
Modifikasi dan Alih Wahana dalam Perspektif Semiotika Wacana Multimodal __	14
Daftar Pustaka _____	16

Alu-aluan

Yang modern, terbaru, atau mutakhir dalam kebudayaan lazim dipertentangkan dengan yang tradisional. Asumsi itu pada akhirnya mendudukkan sesuatu yang tradisional selalu dianggap “kuno” dan ketinggalan zaman, sedangkan yang modern selalu berhubungan dengan “tren”, terbaru (*up to date*), dan sesuai dengan zamannya.

Dalam dunia sastra, banyak orang menganggap bahwa sastra modern akan mengalahkan sastra tradisional. Sastra modern dianggap lebih mampu diterima dan dinikmati oleh generasi muda, khususnya.

Perubahan zaman yang dipacu modernisasi dan disertai gelombang globalisasi menjadi tantangan berat bagi eksistensi kesenian tradisional. Hanya sastra tradisional yang mampu beradaptasi dengan perubahan yang akan tetap bertahan.

Oleh karena itu pula, tidak salah apabila perubahan zaman yang menuntut modernisasi menjadi tantangan berat bagi eksistensi sastra tradisional. Para pendukung sastra tradisional, termasuk di dalamnya pelaku dan pemangkunya, perlu segera memilih strategi dan langkah ampuh untuk menjaga kelestarian sastra tradisional. Modernisasi bukan untuk dihindari, justru harus dimanfaatkan untuk memutakhirkan sastra tradisional.

Setakat ini, di Indonesia memang terdapat sastra tradisional yang masih mempunyai banyak pendukung, tetapi ada pula yang mulai ditinggalkan pendukungnya. Sastra yang mulai ditinggalkan pendukungnya dapat dipredikasi akan hilang atau akan diganti dengan jenis sastra yang baru.

Kondisi semacam ini sangat alamiah.

Hanya sastra tradisional yang mampu beradaptasi dengan perubahan yang akan tetap bertahan. Beradaptasi dapat dilakukan dengan modernisasi. Upaya ini adalah sah karena sastra bukanlah benda mati yang statis. Sastra, sebagai ekspresi dari para seniman dan masyarakatnya, akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Ketidakmampuan para seniman beradaptasi dengan perubahan zaman lambat laun dapat menyurutkan keberadaan sastra tradisional.

Modernisasi itu dapat berupa modifikasi dan alih wahana agar sesuai dengan tuntutan zaman. Di sisi lain, kedua upaya itu merupakan cara meraih simpati generasi penerus, baik pelaku maupun penikmat sastra tradisional. Bagaimanapun, keberadaan sastra tradisional sangat bergantung pada generasi penerus yang akan mengelola sastra tradisional tersebut di kemudian hari. Jika regenerasi tidak berjalan dengan baik, terutama untuk pada para pelakunya, masa depan sastra tradisional tersebut akan terancam punah .

"Garis Nasib" Sastra Tradisional

Seolah sudah menjadi "garis nasib", sastra tradisional selalu diposisikan dalam keadaan "ketinggalan zaman" karena banyak kasus menunjukkan bahwa sastra tradisional tidak dapat mengikuti perubahan zaman. Akibatnya, sastra tradisional itu bernasib "suram"; mereka seolah-olah hidup "segan mati tak mau". Banyak orang menuduh semua itu sebagai akibat modernisasi dan globalisasi di sisi lain.

Memang tidak bisa dimungkiri, modernisasi yang disertai globalisasi membuka peluang pengaruh dari luar yang bakal mengubah sastra tradisional. Proses saling mempengaruhi adalah gejala yang wajar dalam interaksi antarmasyarakat. Melalui interaksi dengan berbagai masyarakat lain, apalagi dengan masyarakat dunia, bangsa Indonesia mengalami proses dipengaruhi dan mempengaruhi, termasuk dalam sastra.

Seolah sudah menjadi "garis nasib" juga, sastra tradisional diasumsikan orang awam dengan sesuatu yang "kuno" karena telah lahir berpuluh-puluh atau beratus-ratus tahun yang lalu. Apabila mengaitkannya dengan mental-leksikon orang awam tentang "tradisional", asumsi itu benar adanya. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (KBBI, 2011: 1483) pun mendefinisikan kata tradisional sebagai 'menurut tradisi', sedangkan tradisi diartikan sebagai adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat. Dengan mengacu pada definisi tersebut, sastra tradisional memang terkait dengan sastra masa lalu yang diciptakan oleh nenek moyang dan sampai sekarang masih dijalankan atau dimainkan oleh masyarakat sekarang ini.

Modifikasi dan Alih wahana

Perlu digarisbawahi bahwa era modernisasi yang disertai dengan globalisasi tidak selalu berarti ancaman bagi sastra tradisional. Dengan semangat modernisasi dan memanfaatkan arus globalisasi, kita justru dapat memutuskan “garis nasib” sastra tradisional yang “negatif” itu.



Salah satu adegan dalam Sendratari Ramayana ketika tokoh Hanoman membakar Kerajaan Alengka. Teknik pemanggungan yang canggih mampu memikat penonton (sumber foto: <http://www.yogyes.com>)

Dalam bersastra, mengikuti arus modernisasi dan globalisasi bukanlah hal yang tabu. Upaya ini sebenarnya penyiasatan agar sastra tradisional tetap bertahan. Banyak sastra tradisional yang dapat bertahan justru karena mengikuti arus modernisasi dan globalisasi itu. Di dalam proses kreatifnya tentu ada kreasi dan pengembangan ide melalui berbagai bentuk ekspresi. Apabila dalam praktiknya, karya sastra tradisional yang dikreasi itu ternyata diubah bentuk atau direka ulang (dimodifikasi) agar mengikuti

dinamika zaman atau selera masyarakat, hal itu tentu merupakan sesuatu yang mungkin. Apabila karya seni tradisional itu mampu menggerakkan seniman lain untuk mereproduksi ke dalam bentuk, media, sarana, atau sudut pandang kreasi yang lain (alih wahana¹), hal tersebut juga bukanlah suatu proses yang harus dianggap aneh atau mengada-ada, melainkan sesuatu yang niscaya terjadi.

¹ Istilah “alih wahana” belum tercantum *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, baik dalam cetakan pertama (2008) maupun cetakan kedua (2011). Dalam konteks proses kreatif, istilah ini menjelaskan suatu perubahan satu karya seni ke dalam karya seni lain yang tidak hanya sebatas pada jenis, bentuk, atau genre, tetapi juga pada wahananya (alat atau sarannya). Misalnya, alih wahana lagu ke lukisan atau sebaliknya, alih wahana karya sastra ke film (istilah khususnya “eksransasi”) atau sebaliknya, atau alih wahana karya sastra ke dalam lukisan atau sebaliknya.

Dalam modifikasi, memanfaatkan perangkat teknologi modern merupakan salah satu cara untuk meningkatkan nilai mutu sastra tradisional, bukan sekadar untuk kepentingan nilai jual yang bisa melanggengkan sastra itu. Misalnya, Sendratari² Ramayana yang rutin digelar di kompleks candi Prambanan. Teknologi canggih yang digunakan untuk mendukung pentas itu terbukti lebih memukau penonton. Teknik pencahayaan modern dan cerita yang direka ulang membuat panggung menjadi lebih hidup sehingga para penonton tidak bosan menyaksikannya. Bahkan, pada tanggal 15 Oktober 2012, Sendratari Ramayana itu pernah meraih penghargaan Guinness World Record dalam kategori jumlah penari terbanyak. Pentas-pentas seni tradisional semacam itu, yang dimodifikasi dan disesuaikan dengan selera masa kini, ternyata selalu dibanjiri penonton, bukan saja penonton



Ki Narto Sabdo, dalang yang berhasil memodifikasi *pakem* dan digemari generasi muda.

(Sumber foto: [http:// www. maspatikrajadewaku.wordpress.com](http://www.maspatikrajadewaku.wordpress.com))

dari Indonesia, tetapi juga dari mancanegara.

Kita tidak dapat memungkiri bahwa hampir semua jenis sastra sebenarnya hasil “kompromi” dengan tuntutan zaman. Cerita-cerita yang ada di dalam pertunjukan wayang kulit, misalnya, walaupun terdapat aturan baku dalam cerita (dan pementasannya [*pakem*]), ada juga dalang yang dalam mementaskan wayang kulitnya mencoba keluar dari *pakem* dan

terbukti berhasil. Ki Narto Sabdo, misalnya. Ia berhasil memodifikasi *pakem* itu. Ia pun terkadang menyingkat cerita yang biasanya berlangsung semalam suntuk

² Sendratari merupakan kependekan dari seni drama dan tari. Sendratari merupakan gabungan drama atau cerita yang disajikan dalam bentuk tarian tanpa adanya dialog. Rangkaian peristiwa diwujudkan dalam bentuk tari yang diiringi musik (biasanya music gamelan). Meskipun tanpa dialog, di dalam sendratari biasanya diberikan narasi singkat agar penonton mengetahui peristiwa yang sedang dipentaskan.

menjadi lebih singkat (lama pagelaran wayang untuk satu *lakon* cerita biasanya sekitar 7—8 jam). Di sela-sela pertunjukannya, ia memasukkan seni musik campur sari. Pada awalnya, ia ditentang oleh pihak yang fanatik dengan pementasan wayang klasik, tetapi apa yang dilakukan oleh Ki Narto Sabdo justru banyak disukai generasi muda. Mereka senang karena pementasan wayang kulit menjadi menghibur, meriah, dan kontekstual. Mempelajari berbagai kejadian kontekstual yang berkembang di masyarakat juga menjadi modal utama agar sastra tradisional yang mereka dukung tidak stagnan atau jalan di tempat.



Poster Pementasan Wayang Ki Enthus Susmono

Apa yang dilakukan oleh Ki Narto Sabdo banyak diikuti oleh dalang-dalang lain, bahkan modifikasi yang dilakukan jauh lebih radikal, seperti yang dilakukan oleh Ki Enthus Susmono. Ia mencoba memasukan unsur-unsur hiburan modern dalam pertunjukannya. Ia mengolaborasikan pertunjukan wayang konvensional dengan musik orkestra modern. Musik pengiring dari wayang itupun tidak hanya gamelan, tetapi menggunakan orkestra. Format musik pengiringnya tidak saja bernuansa *gendhing-gendhing* Jawa, tetapi juga musik klasik dan kontemporer, mulai dari musik klasik Eropa sampai jazz dan dangdut, bahkan juga kasidah yang bernuansa Timur Tengah.

Karya-karya tradisional dengan elemen masa kini terbukti dapat menjembatani tradisi yang telah ditinggalkan generasi muda. Dengan iringan musik rok dan pop, cerita wayang orang (wayang *wong*) yang dulunya terkesan kuno dan susah untuk dimengerti telah membaurkan diri ke dalam budaya modern yang dapat dimengerti masyarakat luas. Pementasan *Hanoman-The Musical* (produksi kelima dari MSP Entertainment) pada tanggal 23 Februari 2013 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, misalnya.



Salah satu adegan dalam pementasan *Hanoman-The Musical* yang menceritakan kemenangan Hanoman atas Prabu Maesasura yang membawa kebahagiaan di Kahyangan. (sumber foto: <http://www.djarumfoundation.org>)

Pementasan wayang orang plus musik itu berhasil menghadirkan cerita wayang orang ala Broadway yang modern, berani, dan eksperimental dalam balutan musik rock dan pop. Pementasan itu melibatkan seniman Broadway, seperti Sydney James Harcourt dari *The Lion King* New York, Daniel Torres dari Andrew Lloyd Webber's *Evita*, dan Brian Justin Crum dari

pertunjukan Broadway *Addams Family*, *Tarzan*, *Grease*. Tidak hanya itu saja, deretan artis Broadway, seperti penyanyi rok asal Inggris, Max Morgan, yang telah bermain di beberapa karya drama sinema, serta pemenang Hollywood Artist in Music Award 2013, Laura Vall dari grup *The Controversy*, pun turut berpartisipasi. Para artis kelas dunia ini pun ikut berkolaborasi dengan seniman Indonesia seperti Volland Humonggio, Aqi Alexa, Anji, Piyu, Ki Dalang Sambowo, dan kelompok Wayang Orang Bharata.

Pementasan *Hanoman-The Musical* yang dipadati oleh pengunjung dari berbagai usia itu menjadi bukti sukses sebuah modifikasi. Modifikasi itu telah berhasil mengangkat salah satu jenis kesenian tradisional, termasuk sastra di dalamnya, yang telah banyak dilupakan oleh banyak orang.

Modifikasi, sebagai upaya melestarikan warisan budaya Indonesia, juga dapat diterapkan untuk mengangkat drama yang berdasarkan legenda rakyat. Misalnya, Paduan Suara Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, mementaskan drama musikal yang berjudul *Sang Kuriang*, sebuah kisah legenda rakyat Jawa Barat yang dikemas dalam bentuk opera—dengan melibatkan Wawan Sofwan sebagai sutradara, Dian HP sebagai komposer, dan Avip Priatna sebagai sutradara musik. Pertunjukan ini digelar pada tanggal 1—3 Februari 2013 di Teater Jakarta, Taman Ismail Marzuki. Di dalam pertunjukan itu disajikan perpaduan dua tradisi antara kisah legenda tradisional Jawa Barat dengan balutan musik opera yang identik

dengan kebudayaan klasik Eropa. Drama musikal itu berhasil membawa penonton terpana sepanjang pertunjukan.

Pementasan yang menghadirkan legenda populer dari Tanah Sunda itu didasarkan pada naskah musikal (libreto) karya sastrawan Utuy Tatang Sontani (meninggal pada 1979). Walaupun legenda ini sudah sangat tua, tetapi pertunjukan tersebut terasa tetap aktual dan modern. Perlu diketahui pula bahwa ada modifikasi dalam cerita *Sang Kuriang* yang dilakukan oleh Utuy dari kisah legenda yang sebelumnya telah dikenal. Modifikasi itu dapat dilihat dari perbedaan antara naskah karya Utuy dan cerita asalnya. Perbedaan itu, antara lain, mengenai karakter si Tumang yang bukan seekor anjing seperti dalam versi tradisional, melainkan seorang budak

miskin, cacat, bongkok, dan buruk rupa. Dalam akhir kisah ini, Sangkuriang juga tidak menendang perahu menjadi gunung³, tetapi di akhir cerita Dayang Sumbi justru bunuh diri untuk menolak menjadi istri Sang Kuriang. Akhirnya Sang Kuriang menyusul kematian Dayang Sumbi dengan bunuh diri juga. Hal ini membuat kisah Sang Kuriang berakhir lebih tragis dan membuat efek dramatik yang memukau. Utuy juga sengaja memodifikasi judul naskahnya *Sang Kuriang* (bukan Sangkuriang), yang dimaksudkan sebagai 'Sang Dewata'.



Sumber foto: <http://www.djarumfoundation.org>

³ Cerita Sangkuriang merupakan legenda terjadinya Gunung Tangkuban Perahu, gunung yang terletak di sebelah utara kota Bandung, Jawa Barat.



Tari Golek Menak, hasil alih wahana karya sastra Serat Menak ke dalam bentuk tari. Adegan pertarungan Dewi Adaninggar dan Dewi Kelaswara dalam Adaninggar Kelaswara. Ketika bertarung, keduanya menaiki burung garuda.

(Sumber foto: <http://kfk.kompas.com>)

sebagai nama bagi sejumlah jenis minuman dan makanan.

Alih wahana dari karya sastra ke dalam bentuk seni tari juga tidak kalah menarik. Misalnya, tari Golek Menak—salah satu seni tari klasik Jawa yang lahir dari lingkungan Keraton Kesultanan Yogyakarta. Tari Golek Menak ini berdasarkan cerita yang ada dalam teks Serat Menak⁴. Kreasi tari ini pertama kali dicetuskan oleh Almarhum Sri Sultan Hamengku Buwono IX (1940—1988) di masa awal pemerintahannya.

Alih wahana dari teks Serat Menak ke dalam tari Golek Menak membawa perubahan-perubahan (transformasi) yang signifikan karena adanya perbedaan

Pengubahan cerita legenda yang berupa sastra lisan ke dalam bentuk novel atau drama, seperti yang dilakukan Utuy Tatang Sontani dapat juga dikatakan sebagai alih wahana. Dalam khazanah sastra Indonesia, sudah banyak karya sastra tradisional yang dialihwahanakan. Legenda atau cerita rakyat itu (misalnya, cerita Sangkuriang) direka ulang oleh pengarang kontemporer dengan perubahan sudut pandang, disalin ke dalam bentuk novel, dipentaskan berulang-ulang oleh sejumlah kelompok teater tradisional maupun modern, atau juga dimanfaatkan

⁴ Serat Menak merupakan naskah Jawa yang bersumber dari teks Melayu berjudul *Hikayat Amir Hamzah*. Hikayat itu sendiri merupakan saduran dari *Qissa il Emri Hamza* yang berasal dari Parsi. Hooykaas menyimpulkan bahwa Hikayat Amir Hamzah merupakan karya sastra Islam tertua karena beberapa ciri yang ada dalam hikayat itu, yakni banyaknya kisah pengembaraan, kisah-kisah tentang negara-negara di daratan Asia, serta kentalnya unsur Syi'ah dalam teks tersebut (Liaw Yock Fang, 2011: 313).

wahana yang digunakan, yakni dari karya sastra yang bermedia bahasa menjadi tarian yang bermedia gerak tubuh. Dalam karya tari Golek Menak, tema peperangan terasa sangat dominan, yang tentunya berbeda dengan teks Serat Menak. Selain itu, di dalam tarian sering dimunculkan properti berupa burung garuda yang tidak ada dalam teks Serat Menak. Ia ditampilkan semata untuk menambah semarak tarian. Cerita yang paling populer, misalnya, adalah *Adaninggar Kelaswara* yang berkisah tentang peperangan antara Dewi Adaninggar dari Cina melawan Dewi Kelaswara yang berakhir dengan kekalahan Dewi Adaninggar. Perang itu bermotif kecemburuan Adaninggara pada Kelaswara yang berhasil diperistri oleh Amir Ambyah.

Di sisi lain, karena tari Golek Menak merupakan alih wahana dari teks sastra yang bernuansa Islam, aspek kostum sangat diperhatikan dalam penggarapannya. Disesuaikan dengan nafas Islam yang menjadi latar penciptaan teks, seluruh tokoh dalam tari Golek Menak mengenakan baju berlengan panjang dari bahan beludru yang bersulam benang emas atau satin. Dalam versi drama tari, disajikan pula dialog yang menggunakan bahasa Jawa Bagongan⁵.

Setakat ini, di Indonesia, alih wahana yang paling lazim adalah perubahan dari karya sastra ke dalam film atau sebaliknya. Tercatat cukup banyak novel atau film yang mengalami perubahan bentuk itu, khususnya pada karya-karya yang cenderung dikategorikan sebagai karya populer⁶. Namun demikian, sebenarnya upaya alih wahana dari karya sastra, khususnya cerita-cerita rakyat, ke dalam film telah dilakukan sejak tahun 1920-an. Sebagai contoh, film *Loetoeng Kasaroeng*—

⁵ Bahasa Jawa Bagongan merupakan modifikasi bahasa Jawa ragam madya dengan sebelas kosakata yang berbeda, seperti *manira* untuk *saya* dan *pakenira* untuk *kamu/Anda*, yang tentunya berbeda dengan bahasa Jawa yang ada dalam teks Serat Menak.

⁶ Alih wahana ini mengalami perkembangan pesat di awal tahun 2000-an. Misalnya, pada novel laris yang berjudul *Ayat-Ayat Cinta* (Republika, 2004) karya Habiburrahman El Shirazy yang difilmkan pada tahun 2007 dengan judul sama dan disutradarai oleh Hanung Bramantyo, novel *Laskar Pelangi* (Bentang Pustaka, 2005) karya Andrea Herirata yang digarap menjadi film oleh Riri Riza pada tahun 2008 dengan judul yang sama, atau novel *Ronggeng Dukuh Paruk* karya Ahmad Tohari yang difilmkan dengan judul *Sang Penari* (2011, sutradara Ifa Isfanyah). Sebaliknya, perubahan dari film menjadi novel, seperti terjadi pada film *Biola tak Berdawai* karya Sekar Ayu Asmara yang digubah menjadi novel (Akur, 2004) oleh Seno Gumira Ajidarma atau film *12:AM* karya Ery Sofid yang dijadikan novel (GagasMedia, 2005) oleh Veven Sp. Wardana.

film pertama yang diproduksi di Indonesia. Film *Loetoeng Kasaroeng* dibuat berdasarkan cerita pantun dengan judul yang sama, yang pada masa itu populer di masyarakat Sunda, dengan tokoh utama yang menyerupai seekor lutung⁷. Film bisu ini dirilis pada tahun 1926 oleh NV Java Film Company dan disutradarai oleh dua orang Belanda, yang G. Kruger dan L. Heuvelcorp. Film yang dibintangi oleh aktor-aktris asli Indonesia ini diputar perdana di kota Bandung dan berlangsung dari tanggal 31 Desember 1926—6 Januari 1927 di dua bioskop terkenal, yakni bioskop Metropole dan Majestic. Film *Lutung Kasarung* ini tercatat pernah dibuat ulang dua kali, yaitu tahun 1952 dan 1983. Pada tahun 1921, cerita rakyat ini pun pernah diangkat ke dalam *gending karesmen*, yaitu drama yang diiringi musik tradisional Sunda, oleh R.A. Wiranatakusumah, Bupati Bandung pada waktu itu. Semua upaya itu tidak saja menjadikan cerita *Lutung Kasarung* menjadi populer di kalangan masyarakat Sunda, tetapi juga mendudukkan cerita itu menjadi milik seluruh masyarakat Indonesia.



Tokoh Petruk, Gareng, dan Bagong dala Wayang Hip Hop
(Sumber gambar: <http://wayanghiphop.com>)

Modernisasi terkadang dilakukan secara ekstrem; modifikasi dan alih wahana pun dilakukan bersamaan. Wayang Hip Hop dari Yogyakarta, misalnya. Dua tahun terakhir ini, wayang ini konsisten menggarap seni progresif dengan menampilkan pola-pola pementasan wayang yang dipadukan iringan musik hip hop. Wayang dimodernisasi dengan menggunakan bahasa pengantar campuran bahasa Indonesia dan Jawa sederhana. Kemasan tampilannya jenaka. Ceritanya menjadi terasa lebih ringan karena dibumbui canda tawa. Nuansa *beat hip hop* dan liriknya sebagai narasi cerita.

⁷ Lutung Kasarung (bahasa Sunda, artinya 'lutung yang tersesat') adalah legenda masyarakat Sunda yang menceritakan tentang perjalanan Sanghyang Guruminda dari Kahyangan yang diturunkan ke Buana Panca Tengah (Bumi) dalam wujud seekor lutung (sejenis monyet). Lutung Kasarung adalah seekor makhluk yang buruk rupa. Dalam perjalanannya di Bumi, sang lutung bertemu dengan putri Purbasari Ayuwangi yang diusir oleh saudaranya yang pendengki, Purbararang. Pada akhirnya ia berubah menjadi pangeran dan mengawini Purbasari. Mereka memerintah Kerajaan Pasir Batang dan Kerajaan Cupu Mandala Ayu bersama-sama.



Personel Wayang Hip Hop dan Dalang Wayang Hip Hop
(Sumber foto: <http://kumpulanilmu2.blogspot.com/>)

Di dalam pertunjukan Wayang Hip Hop ini, penonton masih melihat adanya dalang yang duduk bersila di hadapan wayang, tetapi dandanannya tak biasa: *blangkon* dengan kombinasi pakaian adat Jawa, kacamata hitam, dan sepatu kets. Di dalam adegan pertama wayang, ada suluk pewayangan, tetapi yang mengiringinya adalah musik *elektro hip hop* dari *disc jockey* (DJ) yang keras mendentum dengan *beat-beat* cepat ala *rapper*, bukan suara pentatonis dari gamelan Jawa. Pakaian tokoh-tokoh wayangnya pun

tak lagi berbahan kain laiknya dalam wayang purwa. Tokoh punakawan Petruk dan Gareng, misalnya, hadir dalam *pakeliran* bercelana jeans, berkaos katung, dan berkalung besar laiknya penyanyi rap.

Konsep Wayang Hip Hop sangat berbeda dengan wayang purwa yang masih setia pada *pakem* tradisi. Di dalamnya ada modifikasi tokoh wayang purwa dengan konsep yang lebih kekinian. Lakon yang dibawakan juga tidak sesuai dengan *pakem* dan banyak dilakukan perubahan. Tak jarang, tokoh selebritis masa kini, seperti Lady Gaga, dibaurkan dengan tokoh Petruk dan yang lainnya. Cerita yang dimainkan pun banyak mengangkat kondisi sosial masa kini.

Ki Catur 'Benyek' Kuncoro, dalang sekaligus *rapper* Wayang Hip Hop, menolak bahwa kreasi yang dilakukannya bersama kawan-kawannya itu merusak kaidah seni tradisi pewayangan. "Kontra pasti ada. Mungkin bisa dikatakan diterima di kalangan anak muda. Saya pikir tidak masalah kalau ada yang kontra. Saya tidak akan merusak wayang, tetapi yang saya pikirkan bagaimana wayang pada 25 tahun yang akan datang," katanya (www.antaraneews.com, Jumat, 27 Juli 2012). Banyak seniman lain melakukan langkah seperti Ki Benyek. Sebut saja Nanang Hape dengan wayang urban-nya, yang mengombinasikan wayang dengan elemen teatrical. Nanang juga memadukan wayang-nya dengan musikalitas gamelan dan band.

Pilihan Ki Benyek dkk. itu memang tidak semata tuntutan tren, tetapi jawaban terhadap tantangan dari modernisasi dan globalisasi itu sendiri. Pertunjukan seni kontemporer di Indonesia memang sedang *booming*. Namun, lebih dari itu, seni pertunjukan tradisional juga harus berkembang tanpa harus tercerabut dari akar tradisinya.

Revitalisasi Sastra Tradisional dan Pemertabatan Bangsa

Sastra tradisional yang masih ada sangat mungkin dimodifikasi dan dialihwahanakan, tetapi bagaimana dengan sastra tradisional yang hampir punah atau terlanjur mati? Seni tersebut dapat dipertahankan atau dihidupkan kembali melalui revitalisasi. Sebagai sebuah konsep, revitalisasi tidak sekadar “menghidupkan kembali”, tetapi justru yang terpenting adalah memulihkan kembali ingatan kolektif masyarakat agar dapat mengisi “kekosongan” yang ditimbulkan oleh “kehilangan”. Melalui kegiatan ini dapat dibaca kemungkinan-kemungkinan untuk dijadikan acuan dan diharapkan menjadi representasi peristiwa budaya. Revitalisasi akan menjadi penting ketika “sesuatu yang hilang dan terlupakan” itu bermanfaat bagi kehidupan masyarakat selanjutnya. Artinya, revitalisasi seni tradisional menjadi upaya yang memungkinkan sastra itu mampu menjawab perubahan zaman.

Dalam revitalisasi, perlu dilakukan seleksi. Karya-karya tradisional itu tidak semuanya tanggap dengan perubahan zaman, dalam arti tidak mempunyai daya untuk dimodifikasi atau dialihwahanakan dengan tuntutan masa kini. Sastra tradisional yang akan direvitalisasi patut ditapis; sastra mana yang tanggap dan mana yang sudah kedaluwarsa. Yang kedaluwarsa cukup dicatat dalam sejarah, disimpan di museum sebagai bandingan dan pelajaran, sebagai bagian dari sejarah dari mana kelak bisa melihat perkembangan diri sebagai masyarakat. Untuk menilai kedaluwarsa tidaknya suatu sastra, tentu yang jadi ukurannya adalah kemampuan daya dan nilainya yang mampu menjawab tantangan kontemporer.

Merevitalisasi sastra tradisional pada hakikatnya terletak pada pemertabatan masyarakat pendukung sastra itu. Melalui dialog budaya, usaha pemertabatan itu dapat diarahkan untuk mengembalikan suku, etnik, dan masyarakat kembali menjadi komunitas-komunitas yang merasa memiliki sastra itu, menjadi pemilik keluhuran nilai-nilai yang ada dalam sastra itu. Untuk itu, regerasi melalui pendidikan akan menjadi kunci dan bisa dilakukan melalui pemaduan usaha-usaha produktif untuk menjawab persoalan keseharian yang kongkret. Usaha produktif itu tentunya merupakan bagian integral dari proses menyadarkan masyarakat sebagai bagian dari sebuah bangsa dari tuntutan modernisasi dan globalisasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Pemertabatan tidak cukup hanya dengan mempersoalkan dan memperbincangkannya semata, tetapi bagaimana membangun jati diri masyarakat dan

mengaktulisasikannya dalam realitas kehidupan nyata. Tidak bisa dimungkiri bahwa yang terjadi sekarang ini, fungsi dan peran masyarakat dalam membentuk kekuatan budaya telah dieksploitasi oleh kecenderungan yang bersifat material, sementara sastra tradisional lebih mengacu pada konsep kehidupan bersama, tenggang rasa dan gotong royong itu, hampir kehilangan maknanya.

Istilah pemertabatan mungkin mengesankan bahwa masyarakat pendukung sastra tradisional sekarang dalam keadaan tidak berdaya atau terpuruk. Namun, dalam konteks pemertabatan, istilah ini melukiskan keadaan negatif yang ingin diubah menjadi positif. Untuk mengubahnya, pertama dan terpenting adalah pemberdayaan masyarakat pendukung kebudayaan itu sendiri. Pemerintah atau lembaga-lembaga kebudayaan dan sastra tidak bisa menggantikan peranan masyarakat itu sebagai aktor utama pemberdayaan. Pemberdayaan dalam pemertabatan bukanlah hadiah.

Modernisasi sastra tradisional dapat memperkuat sastra tradisional itu sendiri. Dengan syarat bahwa para pendukung sastra tersebut harus kreatif dan bisa menyesuaikan dengan selera baru. Tangan-tangan kreatif para seniman pasti mampu untuk menghidupkan kembali sastra tradisional yang hampir punah atau telah mati.

Modifikasi dan Alih Wahana dalam Perspektif Semiotika Wacana Multimodal

Apabila mencermati upaya modernisasi dalam sastra tradisional, khususnya modifikasi dan alih wahana dalam sastra tradisional, khusus yang direpresentasikan dalam seni pertunjukan, fenomena itu merupakan sebuah wacana dengan karakteristik khusus, yakni wacana yang di dalamnya tersimpan informasi dan keterangan transformasi tertentu yang mengandung pengetahuan budaya tentang pelaku dan dunianya.

Fenomena itu menjadi studi menarik dalam analisis semiotika wacana multimodal. Dalam konteks ini, sastra tradisional yang dimodifikasi dan dialihwahanakan dianggap sebagai sebuah wacana multimodal karena ia melibatkan interaksi beberapa sumber daya semiotik, seperti bahasa (lisan dan tulisan atau naskah dan dialog)⁸, gestur, busana, arsitektur, dan efek pencahayaan, gerakan, pandangan, sudut pandang kamera, dll. (misalnya dalam film atau teater) (lihat O'Halloran, 2004).

Artinya, modernisasi sastra tradisional mencerminkan budaya suatu masyarakat tertentu dalam mempertahankan miliknya yang berharga, yang dalam beberapa hal mencerminkan ideologi yang beroperasi dalam masyarakat itu. Sebuah pertunjukan wayang kulit kontemporer, misalnya, yang di gelar di sebuah gedung pertunjukan mewah dan modern serta ditonton oleh generasi muda bukan hanya dapat dibaca sebagai pertunjukan fungsional; pertunjukan itu memiliki tanda-tanda dari semua fungsi praktis yang dirancang pelaku seni tentang pertunjukan itu. Paling tidak, pertunjukkan itu mencerminkan makna tertentu, yaitu keberhasilan seni tradisional wayang kulit menembus lintas generasi dan sosial.

Dalam sastra, kajian semiotika itu telah mengidentifikasi kebutuhan untuk mengembangkan teori kesadaran sosial dan deskripsi semiotik secara holistik, tidak hanya untuk semua petunjuk dan sistem tanda, tetapi juga mampu memperhitungkan karakteristik khusus yang berbeda dari setiap fenomena

⁸ Tradisi semiotika sosial (Hodge & Kress, 1988), berdasarkan pandangan Halliday (1978), memberikan wawasan pada kita bahwa bahasa mencerminkan sebuah fungsi organisasi sosial, yakni bahasa sebagai sumber daya sosial. Semiotika sosial telah menempatkan posisi tanda-tanda dalam konteks formasi sosial dan mengkonstruksi wacana bukan sebagai fenomena yang terisolasi.

semiotik.⁹ Sehubungan dengan itu, dalam semiotika wacana multimodal¹⁰, sebuah pertunjukan seni dan segala aspek pendukungnya bukan sekadar bagian dari budaya masyarakat yang menegaskan dan membangun kembali nilai-nilai dan cita-citanya, melainkan representasi sebuah kekuasaan. Terlepas dari “kekuasaan” itu positif atau negatif, sebuah upaya pelestarian sastra tradisional adalah citra masyarakatnya dan seberapa kuat semangat pendukungnya dalam mempertahankannya.

Dalam pandangan Kress dan van Leeuwen (2001:1), studi wacana multimodal itu sendiri telah dipengaruhi tiga faktor pendorong besar selama abad kedua puluh. Pertama, seperti yang diamati, dalam budaya Barat beragam aktivitas seni-budaya—baik yang bersifat ‘populer’ maupun serius—telah bergeser dari “monomodal” menuju multimodal dan multimedia. Aktivitas seni-budaya itu telah menggunakan beragam media/bahan; telah lintas batas antara berbagai seni, desain, dan disiplin ilmu. Oleh karena itu, modifikasi dan alih wahana menjadi kelumrahan dalam proses kreatif dan reproduksi sebuah karya seni.

Kedua, semiotika modern terinspirasi untuk menyeberangi batas-batas di luar kajiannya. Aliran utama semiotika berusaha untuk mengembangkan kerangka teoritis semiotik yang berlaku untuk semua mode, dari mulai kostum dalam pentas puisi rakyat sampai kostum yang dipakai para pemain teater modern. Dorongan utama ketiga untuk studi tentang wacana multimodal adalah perkembangan teknologi, khususnya teknologi komputer, untuk merekam, memutar ulang, dan menganalisis teks dan fenomena multimodal.

⁹ Kebutuhan itu sudah diperkirakan oleh Saussure (1916/1996). Ia memperkirakan bahwa pada suatu saat kita perlu suatu ilmu yang mempelajari tanda-tanda kehidupan dalam masyarakat (lihat Saussure, 1996:83—84). Adapun Barthes (1957/1972), ia menyarankan pengembangan ilmu tentang tanda-tanda (semiologi) karena pada suatu hari akan banyak masalah yang memerlukan bidang ilmu di luar bidang bahasa. Sebagai sebuah ilmu, menurut Barthes, semiologi harus mampu menjelaskan interaksi antara tanda-tanda di dalam teks-teks untuk memaknai tanda-tanda yang lebih kompleks yang ada di luar teks. Preziosi (1986: 45) menyebut pengembangan itu sebagai implikasi holistik dari pendekatan semiotik multimodal.

¹⁰ Kerangka teoretis semiotik sosial yang telah diperluas tersebut mampu memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan pendekatan analisis wacana kritis (misalnya, Fairclough, 1992), peran wacana dalam pemberdayaan sosial dan perubahannya [misalnya, O'Halloran, (2004)] yang telah memunculkan studi multimodal (misalnya, O'Toole (1994) dengan perspektif analisis wacana kritis.

Daftar Pustaka

- Barthes, Roland. 1981. *Elements of Semiology*. New York: Hill and Wang.
- Barthes, Roland. 2010. *Imaji/Musik/Teks*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Berger, Arthur Asa. 2010. *Pengantar Semiotika: Tanda-Tanda dalam Kebudayaan Kontemporer*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Fairclough, Norman. 1992. *Discourse and Social Change*. Cambridge: Polity Press.
- Gee, James Paul. *An Introduction to Discourse Analysis, Theory and Method*. London: Routledge, 2005.
- Hall, Stuart. 1997. *Representation: Cultural Representations dan Signifying Practices*. London: Sage Publications.
- Kress, G. dan van Leeuwen T. 2001. *Multimodal Discourse: The Modes and Media of Contemporary Communication*. London: Arnold.
- Liaw Yock Fang. 2011. *Sejarah Kesusasteraan Melayu Klasik*. Jakarta: YOI.
- Lindsay, Jennifer. 1991. *Klasik, Kitsch, Kontemporer: Sebuah Studi tentang Seni Pertunjukkan Jawa*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Meinhof, U. dan Richardson, K (Ed.). *Text, Discourse, and Context*. London: Longman, 1994.
- O'Halloran, Kay. I (Edior). 2004. *Multimodal Discourse Analysis: Systemic-Fungsional Perspectives*. London-New York: Continuum.
- O'Halloran, K. L., Tan, S., Smith B. A., dan Podlasov, A. 2009. "Multimodal Discourse: Critical Analysis within an Interactive Software Environment" dalam *Critical Discourse Studies*. Diunduh dari <http://multimodal-analysis-lab.org/events/publications.html> pada tanggal 31 Januari 2010.
- O'Toole, M. 1994. *The Language of Displayed Art*. London: Leicester University Press.
- Preziosi, D. 1986. "The Multimodality of Communicative Events" dalam J. Deely, W. Brooke, & F.E. Kruse (Eds.), *Frontiers in Semiotics*. Bloomington: Indiana University Press.

- Sausure, Ferdinand de. 1996. *Pengantar Linguistik Umum* (Seri ILDEP). Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Soedarsono, R.M. 1998. *Seni Pertunjukan Indonesia di Era Globalisasi*. Jakarta: Depdikbud.
- Soedarsono, R.M. 2003. *Seni Pertunjukan dari Perspektif Politik, Sosial, dan Ekonomi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Storey, John. 2007. *Cultural Studies dan Kajian Budaya Pop*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Tim Redaksi. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Edisi Keempat, Cetakan Kedua. Jakarta: Depdiknas dan Gramedia Pustaka Utama.

PENGUATAN DIPLOMASI KEBAHASAAN MENUJU SEABAD BAHASA INDONESIA BERMARTABAT

Kisyani-Laksono (kisyani@unesa.ac.id)

Abstrak

Setelah 85 tahun dikumandangkan sebagai bahasa Nasional, perjalanan bahasa Indonesia mengalami pasang surut. Menuju pada usia seabad bahasa Indonesia pada tahun 2028 nanti, apakah yang dapat dilakukan untuk itu? Tulisan ini mencoba menyajikan berbagai fenomena kebahasaan yang marak akhir-akhir ini beserta beberapa solusi alternatif untuk menguatkan diplomasi kebahasaan. Diplomasi kebahasaan sebenarnya tidak hanya berwujud dalam pembicaraan resmi antarnegara, tetapi dapat juga dimaknai dengan “pengetahuan atau kecakapan dalam hal perhubungan antara negara dan negara yang berwujud pada komunikasi lewat suara atau tulisan.” Aturan kebahasaan sebagai penguat diplomasi sudah disahkan dan digulirkan. Beberapa peringkat bahasa Indonesia di dunia maya membuktikan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sangat layak untuk diperhitungkan menjadi bahasa internasional. Selain itu, komunikasi dalam bahasa Indonesia di dunia maya menjadi salah satu alternatif diplomasi kebahasaan yang layak diperhitungkan mengingat batas negara dan bahasa semakin kabur. Bidang Seni dan Sastra pun perlu diperhitungkan untuk penguatan diplomasi kebahasaan. Akan tetapi, beberapa fakta yang melanggar aturan, seperti pidato resmi, nota kesepahaman, nama dan rambu yang tidak menggunakan bahasa Indonesia dapat menjadi preseden buruk menuju usia seabad bahasa Indonesia. Pelanggaran terhadap peraturan tampaknya tidak berakibat apa-apa, tidak ada sanksi. Oleh sebab itu, jika bangsa Indonesia punya impian supaya bangsa dan bahasa bermartabat, berbagai langkah untuk mencintai, menghormati, dan menghargai bahasa Indonesia dapat terus diteladankan dan ditumbuhkembangkan untuk mewujudkan impian itu. Semoga langkah menuju seabad bahasa Indonesia bermartabat menjadi langkah yang baik untuk mewujudkan bangsa yang bermartabat pula.

A. Pendahuluan

Setelah 85 tahun dikumandangkan sebagai bahasa Nasional—terhitung sejak 28 Oktober 1928--perjalanan bahasa Indonesia mengalami masa pasang surut. Dari sisi kekukuhan suatu bahasa, bangsa Indonesia boleh berbangga karena pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia terus dilakukan untuk menguatkan bahasa Indonesia. Bahkan saat ini “Kamus Besar Bahasa Indonesia” edisi keempat (2008) sudah semakin baik biarpun belum dapat dikatakan sempurna. Pemekaran kosakata terus diupayakan untuk mengimbangi perkembangan ilmu dan teknologi. Tata Bahasa nya pun mulai lebih bermakna dan membumi karena dalam pembelajaran disampaikan secara terintegrasi dan komunikatif. Selain itu, aturan-aturan yang mendukung penggunaan bahasa Indonesia juga telah ada dan disahkan. Banyaknya komunikasi di dunia maya yang menggunakan bahasa Indonesia ternyata menjadi dasar penghitungan penggunaan

bahasa di dunia maya. Hal itu sedikit banyak mencerminkan eksistensi bahasa Indonesia dalam kancah global.

Akan tetapi, dari sisi penerapan dan penggunaan, masih banyak hal-hal yang perlu dicermati dan diperbaiki. Pilihan kata dan pilihan bahasa saat berhadapan dengan pihak asing menjadi persoalan tersendiri seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi (cf. Samuel, 2008). Anggapan masyarakat terhadap pilihan kata atau bahasa yang dianggap lebih modern/maju pun mulai mewarnai. Anggapan masyarakat secara umum bahwa bahasa Indonesia yang dicampur dengan bahasa asing dianggap lebih “intelektual” perlu dikaji ulang lagi. Apalagi jika hal tersebut terkait dengan diplomasi kebahasaan¹.

Saat ini, batas perhubungan antara negara dan negara menjadi semakin kabur karena komunikasi dan alat transportasi semakin maju. Oleh sebab itu, diplomasi kebahasaan pun meluas, mulai dari bahasa yang digunakan dalam pidato resmi pada pertemuan antarnegara, nota kesepahaman, papan penulisan nama dan rambu-rambu, sampai pada komunikasi di dunia maya, serta seni dan sastra. Semua itu dapat menjadi sarana diplomasi kebahasaan yang memadai. Hanya saja, fenomena yang terjadi akhir-akhir ini perlu dicermati kembali. Menginjak usia 85 tahun bahasa Indonesia, diplomasi kebahasaan—dalam bahasa Indonesia—perlu dicermati lagi dan dikuatkan untuk menapak usia seabad menuju bahasa Indonesia yang bermartabat.

B. Peraturan yang Mendukung

Saat bahasa Indonesia menginjak usia ke-81, Indonesia seharusnya bangga karena telah disahkannya UU Republik Indonesia no 24 Tahun 2009 tentang “Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.” Butir-butir Bahasa Negara tertuang dalam Bab III pasal 25--45. Dalam UU tersebut, tampak sekali penguatan eksistensi dan diplomasi bahasa Indonesia. Hal itu secara eksplisit tertoreh dalam pasal 26—39 yang selalu diawali dengan “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam ...” . Pada pasal 40 disebutkan “Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 39 diatur dalam Peraturan Presiden.

¹ Kata “diplomasi” dapat dimaknai sebagai ‘pengetahuan dan kecakapan dalam hal perhubungan antara negara dan negara’ di samping makna formalnya sebagai ‘urusan atau penyelenggaraan perhubungan resmi antara satu negara dan negara yg lain’ atau ‘urusan kepentingan sebuah negara dng perantaraan wakil-wakilnya di negeri lain’. Bahkan dalam bahasa percakapan, diplomasi dapat dimaknai ‘kecakapan menggunakan pilihan kata yg tepat bagi keuntungan pihak yg bersangkutan’ (Depdiknas, 2008).

Selanjutnya, dalam pasal ke-41 dan 42 disebutkan bahwa Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia merupakan kewajiban pemerintah dan ketentuannya akan diatur dengan peraturan pemerintah. Bahkan dalam Bagian Keempat, Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia Menjadi Bahasa Internasional juga telah diancang dengan baik dan dalam pasal 44 ayat 3 disebutkan “Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan peraturan pemerintah.”

Beberapa peraturan pemerintah yang menindaklanjuti UU tersebut memang belum disahkan, akan tetapi, saat menginjak usia ke-82, pada 1 Maret 2010 berlaku “Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia nomor 16 tahun 2010 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pidato Resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden Serta Pejabat Negara Lainnya” sebagai salah satu tindak lanjut atau bentuk penjabaran UU no 24 tahun 2009.

Dalam Perpres tersebut jelas dan tegas disebutkan dalam pasal 1 bahwa “Presiden dan/atau Wakil Presiden menyampaikan pidato resmi dalam bahasa Indonesia di luar negeri.” Hal yang setara juga terdapat dalam pasal 8 **yang berbunyi** “Presiden dan/atau Wakil Presiden menyampaikan pidato resmi dalam Bahasa Indonesia pada forum internasional yang diselenggarakan di dalam negeri”. Selanjutnya, dalam pasal 16 disebutkan bahwa “Pidato resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden dan pejabat negara lainnya yang disampaikan dalam Bahasa Indonesia dapat memuat bahasa asing sepanjang dimaksudkan untuk memperjelas pemahaman tentang makna pidato tersebut.”

Dalam pasal 6 memang disebutkan bahwa “(1) Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat menyampaikan pidato resmi dalam bahasa tertentu selain Bahasa Indonesia pada forum internasional sesuai dengan Penjelasan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.” Penjelasan pasal 28 berbunyi “Yang dimaksud dengan ‘pidato resmi’ adalah pidato yang disampaikan dalam forum resmi oleh pejabat negara atau pemerintahan, kecuali forum resmi internasional di luar negeri yang menetapkan penggunaan bahasa tertentu.”

Jadi, di luar negeri pun, sepanjang forum tersebut tidak menetapkan penggunaan bahasa tertentu, Presiden RI wajib menggunakan bahasa Indonesia. Sebenarnya ada beberapa keuntungan yang dapat dipetik jika presiden atau pejabat

negara berpidato dengan bahasa Indonesia di luar negeri karena minimal dari negeri tersebut pasti akan ada orang (termasuk intelijen) yang dapat berbahasa Indonesia. Ini berarti, orang dari daerah itu harus belajar bahasa Indonesia dan lebih lanjut hal itu berarti bahasa Indonesia akan dikenal dan dipelajari di luar negeri.

Pada sisi lain, pemerintah juga mengatur pencantuman label berbahasa Indonesia pada kemasan produk pangan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Adapun aturan tentang kewajiban mencantumkan label dalam bahasa Indonesia pada barang (produk nonpangan) diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.62/2009 yang terbit Desember 2009 dan kemudian diubah menjadi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/2010 yang diterbitkan tanggal 21 Mei 2010. Penerapan aturan yang mewajibkan pencantuman label berbahasa Indonesia pada produk pangan dan nonpangan ditujukan untuk melindungi konsumen dari produk yang tidak memenuhi standar mutu dan keamanan.

Berbagai aturan yang ada tampaknya belum dapat mengobati gejala luntarnya rasa kebanggaan berbahasa Indonesia. Hal itu tampaknya juga merebak ke berbagai wilayah. Bahkan ada beberapa pihak yang mengalami krisis kepercayaan diri dalam berbahasa. Hal ini berpengaruh terhadap menurunnya upaya untuk menghargai budaya dan bahasa sendiri. Seperti halnya anggapan bahwa produk asing lebih baik, lebih modern, lebih berharga daripada produk Indonesia; bahasa asing pun dianggap lebih maju dan lebih modern daripada bahasa Indonesia. Bahkan dalam beberapa wawancara terbatas, bahasa asing dianggap lebih bergengsi dan lebih halus daripada bahasa Indonesia. Kasus Vicky yang mencampuradukkan kosakata asing dan berakibat pada kaburnya makna, yang oleh sebagian orang dianggap “keren” merupakan hal yang memprihatinkan. Sampai sebegitu parahkah kosakata bahasa Indonesia sehingga tidak dapat mawadahi konsep dan keinginan seseorang dalam mengekspresikan diri? Pemerintah tampaknya perlu menyosialisasikan slogan lama “Aku cinta buatan Indonesia, aku bangga berbahasa Indonesia”.

C. Fenomena Kebahasaan

1. TIK dan Bahasa Indonesia di Dunia Maya

Saat ini, *web* atau situs merupakan sajian internet yang paling populer. Selain itu, situs merupakan salah satu wujud dari teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di samping pos-el (pos elektronik), telepon genggam, dan *video conference*. Saat ini,

TIK telah berkembang dengan pesat karena dikembangkannya satelit komunikasi dan serat kaca (*fiber optic*). Derasnya arus TIK memunculkan transformasi besar dalam bidang kebahasaan. Saat ini dan masa mendatang, kembang tumbuhnya suatu bahasa di masa depan akan banyak ditentukan oleh pengoptimalan TIK.

TIK erat berkaitan dengan komputer. Dalam hal teknologi komputer, saat ini sudah banyak diketahui adanya teknologi untuk memindahkan tulisan menjadi suara. Bahkan teknologi yang mengandalkan menu “*speech*” (dengan logat bahasa Inggris) sudah disematkan di salah satu merek komputer. Bukan tidak mungkin nanti menu *speech* dengan pilihan logat bahasa tertentu akan segera ada (aplikasi tulis ke suara). Bahkan teknologi untuk menyalin suara langsung ke bentuk tulis (tanpa kita mengetiknya) juga sudah diperkenalkan belasan tahun lalu, saat komputer masih menggunakan cakram atau *floppy disk* besar (catatan: tahun 2000-an sudah ada program “*Dragon*” yang disediakan untuk itu dengan cara seseorang harus membaca sekian puluh naskah sehingga suaranya dapat dikenali). Saat ini aplikasi suara ke tulis (*voice to text converter*) sudah semakin berkembang. Dengan aplikasi ini, pada saat seseorang berbicara, di layar langsung keluar tulisan sesuai apa yang diucapkan oleh orang tersebut. Jika hal ini sudah menyebar luas, seorang guru dapat saja berbicara di kelas (jika masih menggunakan kelas) dan di layar langsung akan muncul tulisan-tulisan mengenai apa yang disampaikan itu dan ada juga catatan dalam bentuk cetak (*print out*) dalam huruf biasa dan braille (cf. Kisyani-Laksono, 2011a). Catatan itu dapat juga diprogram langsung masuk ke dunia maya, baik dalam bentuk tulis dan/atau suara. Dalam hal ini, catatan atau suara dalam bahasa tertentu itu akan dapat diakses di seluruh dunia. Dengan kata lain, diplomasi kebahasaan kemudian mulai menembus ruang dan waktu. Oleh sebab itu, keberadaan suatu bahasa di dunia maya termasuk jejaring sosialnya akan sangat menentukan kembang tumbuhnya bahasa tersebut serta membantu penguatan diplomasi kebahasaannya.

Dalam beberapa catatan di dunia maya, bahasa Indonesia ternyata menempati peringkat ke-4 sebagai bahasa yang paling banyak digunakan dalam unggahan *blog* di *WordPress* hingga Mei 2013. Saat itu ada 3,5% isi yang ada di *WordPress* ditulis dalam bahasa Indonesia. Peringkat pertama adalah bahasa Inggris yang mendominasi dengan 66% lalu bahasa Spanyol 8,7%, dan bahasa Portugis 6,5%. □ □ Menurut data *WordPress*, hingga Mei 2013 ada sekitar 66,283 juta situs web di seluruh dunia yang menggunakan *WordPress* (<http://www.asal-usul.com>; <http://kaskus.co.id>;

<http://news.okezone.com>).

Selain itu, wikipedia berbahasa Indonesia menduduki peringkat ke-26 dari 250 wikipedia berbahasa asing di dunia dan peringkat 3 di Asia setelah bahasa Jepang dan Mandarin (<http://www.wikipedia.com>).

Bahasa Melayu dalam kedudukannya sebagai bahasa dunia berada pada peringkat ke-7 dengan jumlah penutur sekitar 259 juta. Bahasa Melayu digunakan di Indonesia (bahasa Indonesia), Malaysia, Brunei, serta sebagian kecil penduduk Thailand, Singapura, dan Timor Timur. Bahkan sejak Desember 2007 Bahasa Indonesia—yang penuturnya dihitung sebagai penutur bahasa Melayu—telah ditetapkan sebagai bahasa resmi kedua di Vietnam. Urutan pertama s.d. ke-6 untuk penutur terbanyak adalah bahasa Mandarin (1,5 miliar penutur); Inggris (500 juta); Hindi (497 juta), Spanyol (400 juta), Arab (300 juta), Rusia (278 juta). Adapun urutan ke-8 s.d. ke-10 adalah: Portugis (240 juta), Bengali (230 juta), dan Perancis (200 juta) ([ww.asal-usul.com](http://www.asal-usul.com)). Akan tetapi, patut dipertimbangkan bahwa penghitungan jumlah penutur ini adalah jumlah penduduk pada negara yang menggunakan bahasa tersebut, bukan didasarkan pada penghitungan nyata terkait dengan bahasa sehari-hari yang digunakan (<http://www.asal-usul.com>; <http://news.kompas.com>).

Di *google translate* (<http://translate.google.com>), bahasa Indonesia masuk dalam urutan ke-28. Sekarang ada 72 bahasa di *google translate*, termasuk bahasa Jawa.

Yang perlu diperhatikan adalah kendala bahasa saat ini sudah mulai dapat ditembus—biarpun belum sempurna--dengan berbagai sarana yang tersedia di dunia maya. Upaya penguatan diplomasi kebahasaan lewat dunia maya perlu terus ditingkatkan dan digalakkan dengan lebih saksama. Pengenalan kosakata baru lewat berbagai jejaring sosial dapat lebih diberdayakan karena dunia maya tampaknya akan lebih dominan di masa mendatang. Dunia maya akan menjadi sarana pembelajaran, komunikasi, perdagangan, penyebaran informasi yang menjanjikan, dan penguatan diplomasi kebahasaan.

2. Seni dan Sastra sebagai Diplomasi

Dalam bidang seni, ada beberapa lagu Indonesia yang populer di luar negeri dan menjadi sarana diplomasi kebahasaan yang menarik. Lagu “Bengawan Solo” ciptaan Gesang tahun 1940-an dinyanyikan di berbagai negara dengan lirik aslinya dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, lagu “Bengawan Solo” juga telah dialihbahasakan ke

versi bahasa Inggris dibawakan oleh Mona Fong, penyanyi kelahiran China, penyanyi jazz asal Jepang keturunan Brazil, Lisa Ono dan beberapa penyanyi lainnya. Lagu itu juga telah diterjemahkan dalam bahasa Mandarin dan Jepang.

Selain “Bengawan Solo”, ada juga lagu “Nina Bobok” yang dinyanyikan seperti syair aslinya oleh Anneke Gronloh, Wieteke van Dort, Li Xiao Mei dan yang terbaru dinyanyikan dalam versi serius oleh Claudia Patacca dan Gerrit Ellen dalam sebuah orkestra di Belanda (<http://www.youtube.com/watch?v=dhDXScliWQQ>).

Selain itu, ada juga lagu “Cari Jodoh” dari Wali Band; Lagu “Sephia” dari Sheila on 7; “Tak Bisakah” dan “Di Belakanku” dari Peterpan; “Sempurna” Andra & The Backbone; “Hingga Akhir Waktu” dari Nine Ball; “Teman Tapi Mesra (TTM)” dari Maia Estianty. Lagu-lagu tersebut ada yang dinyanyikan dalam versi asli bahasa Indonesia dan ada juga yang diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa setempat. Melalui lagu, bahasa Indonesia terasa indah, puitis; membawa pendengar pada alam keindahan, kedalaman, romantisme; menggiring imajinasi jauh tinggi melebihi sekadar kata-katanya; serta memperkuat karakter kecintaan akan bahasa (cf. Kisyani-Laksono, 2011b). Lagu-lagu yang dapat menembus batas budaya ini merupakan penguat diplomasi kebahasaan yang patut terus dikembangkan. Secara berkebalikan, lagu dalam bahasa asing yang dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia secara tidak langsung juga dapat memperkuat diplomasi kebahasaan.

Selain lagu, seni kuliner Indonesia yang mendunia juga merupakan sarana diplomasi kebahasaan yang baik karena akan banyak bumbu, cara memasak, dan jenis makanan dalam kosakata bahasa Indonesia yang diperkenalkan dalam kancah internasional. Rasa yang merasuk lewat lidah akan membuat orang penasaran untuk mengetahui dan mengingat nama masakan, bumbu, dan cara memasaknya akan menjadi salah satu alternatif penguat diplomasi kebahasaan.

Berbagai kesenian dan budaya Indonesia dengan segala pernik-perniknya yang membawa kosakata bahasa Indonesia juga dapat menjadi alternatif lain untuk penguat diplomasi kebahasaan.

Selain seni, beberapa karya sastra Indonesia juga mendunia. Karya yang mendunia ini diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Dalam proses pengalihbahasaan itulah kosakata bahasa Indonesia dapat muncul dan diperkenalkan karena memang tidak semua kosakata dapat dialihpadankan dengan baik. Pengalihbahasaan yang agak rumit adalah pengalihbahasaan puisi karena selain terkait dengan makna, pertimbangan diksi yang cermat, dan rima; masalah nilai rasa budaya

yang melingkupi puisi juga harus ikut tergambar.

3. Sikap Negatif

Saat melaksanakan Kongres Bahasa Jawa di Surabaya tahun 2012, George Quinn dari Australia Nation University (ANU) menyampaikan materi dengan judul "*Unggah-Unguh Lan Bahasa Indonesia: Masalah Rong Werno Sing Ngruwedi Pamulanganing Basa Jawa Marang Siswa Manca*". Saat itu dia mengeluhkan bahwa jumlah mahasiswa yang mengambil mata kuliah bahasa Jawa dan bahasa Indonesia di Australia dan Amerika semakin sedikit. Dia kemudian bertanya kepada peserta kongres: "Adakah yang tahu mengenai sebab-sebab penurunan minat para mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut?" Para peserta kongres hening sejenak. Kemudian George Quinn dengan *gamblang* menyatakan bahwa sebabnya terletak pada sikap berbahasa masyarakat Jawa/Indonesia (termasuk para peserta kongres) karena saat para mahasiswa dari Australia dan Amerika itu datang ke Indonesia dan ke Jawa, mereka cukup menggunakan bahasa mereka saja karena mereka mendapatkan jawaban dari masyarakat Indonesia/Jawa dalam bahasa para mahasiswa itu. Oleh sebab itu, banyak yang kemudian tidak berminat lagi untuk belajar bahasa Indonesia/Jawa. Selain itu, papan nama, petunjuk, dll. di Indonesia banyak yang menggunakan bahasa mereka. Bahkan George Quinn menyentilnya dengan "Papan nama dan petunjuk di Indonesia/Jawa malah tidak ada bahasa Indonesia/bahasa Jawanya".

Seleian itu--dalam beberapa kesempatan--,saat sarapan di hotel ternyata kosakata "dadar" sudah tidak digunakan lagi. Orang lebih suka menyebut *omelett* untuk meminta dadar dari koki. Istilah koki pun sekarang sudah mulai digeser oleh *chef* (dengan pemakaian yang merujuk pada semua koki, apa pun pangkatnya). Kata *driver* sudah menggeser kosakata sopir, *security* sudah akan menggeser satpam, dst. Dalam wawancara terbatas dengan beberapa orang, kosakata penggeser tersebut dianggap lebih keren, lebih modern, lebih berprestise daripada kosakata bahasa Indonesianya. Oleh sebab itu, ke depan diperlukan penertiban untuk menjalankan peraturan yang tercantum dalam UU No 24 tahun 2009 dengan benar. Berbagai peraturan pemerintah yang dicantumkan sebagai bentuk kelanjutan UU seharusnya segera disusun dan disahkan untuk segera dilaksanakan.

Sebenarnya, salah satu sebab kepunahan bahasa adalah ditinggalkan penuturnya (karena terpaksa atau karena bahasa lain diasosiasikan lebih maju/modern).

Jadi, jika secara bawah sadar kita sudah menganggap bahasa asing lebih maju atau lebih modern daripada bahasa Indonesia, itu merupakan tanda-tanda.

a. Pidato

Sesuai dengan Sumpah Pemuda 1928 dan UUD 1945 (Bab XV, pasal 36), bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara (cf. Halim dalam Halim, Ed. 1980). Hal itu kemudian dieksplisitkan lagi dengan UU Republik Indonesia no 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan. Terjabar lagi dalam “Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 16 tahun 2010 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pidato Resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden Serta Pejabat Negara Lainnya” yang berlaku mulai 1 Maret 2010. Dalam pasal-pasal tersebut tegas disebutkan bahwa “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri.”

Saat UU No 24 baru diundangkan, presiden yang saat itu berada di Australia menyampaikan pidato dengan bahasa Indonesia. Pidato presiden sebagai orang nomor satu di Indonesia memang seharusnya mengikuti UU yang ada termasuk Perpres yang telah disahkannya. Akan tetapi, saat pidato dalam pertemuan *Asia Pacific Economic Community (APEC)* di bulan Oktober ini, presiden tidak menggunakan bahasa Indonesia. Dalam acara tersebut, selain Presiden RI, para pemimpin dunia juga memberikan pidato pembukaan. □□ Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, memberikan paparan dalam bahasa Jepang; Presiden Rusia Vladimir Putin berpidato dengan bahasa Rusia. Sederet pimpinan negara lainnya, seperti Presiden Meksiko Enrique Peña Nieto, Presiden China Xi Jinping, dan Presiden Korea Park Geun-Hye juga lebih memilih bahasa tempat mereka berasal. □□ Bahkan, Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, yang menjadi pembicara sempat menggunakan bahasa Melayu untuk mengawali diskusinya (cf. <http://news.kompas.com>). Jadi, dalam menyampaikan pidatonya tersebut, Presiden RI lebih memilih berpidato dalam bahasa internasional daripada dalam bahasa Indonesia.

Sebenarnya bukan hanya saat APEC saja, pidato Presiden RI yang tidak menggunakan bahasa Indonesia. Sejak UU RI no 24 disahkan dan diberlakukan, sudah beberapa kali hal tersebut berulang. Pada Mei dua tahun lalu (26 Mei 2011), Presiden RI juga tidak menggunakan bahasa Indonesia saat membuka Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-16 Gerakan Non Blok (GNB) di Grand Hyatt, Nusa Dua, Bali.

Selain dua pidato ini masih ada beberapa pidato lain yang tidak menggunakan bahasa Indonesia. Selain itu, dalam beberapa pidato Presiden RI yang berbahasa Indonesia, beberapa kosakata asing sering muncul dan mewarnai, bukan sebagai penjelas, tapi justru sebagai inti.

Memang dalam Perpres no 16 tahun 2010, pasal 16 menyebutkan bahwa “Pidato resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden dan pejabat negara lainnya yang disampaikan dalam Bahasa Indonesia dapat memuat bahasa asing sepanjang dimaksudkan untuk memperjelas pemahaman tentang makna pidato tersebut.” Jadi, bahasa asing digunakan bukan untuk yang utama, tetapi untuk membantu memperjelas, apalagi jika ada padanan dalam bahasa Indonesia yang belum populer.

Mendengarkan dan menyaksikan pidato Presiden RI dalam acara APEC di Indonesia di bulan Oktober--bulan bahasa, saat orang-orang berupaya membangkitkan rasa cinta dan bangga berbahasa Indonesia—terasa seperti minum kopi pahit tanpa gula (nikmat bagi yang sudah terbiasa, tapi menyisakan kesedihan bagi yang tidak terbiasa). Saat masyarakat Indonesia mencari sosok panutan dalam bulan bahasa seharusnya sosok panutan itu lantang berpidato dalam bahasa Indonesia. Apa yang terjadi ini sebenarnya tidak sesuai dengan Perpres yang menyebutkan dalam pasal 8 “Presiden dan/atau Wakil Presiden menyampaikan pidato resmi dalam Bahasa Indonesia pada forum internasional yang diselenggarakan di dalam negeri termasuk untuk pidato resmi balasan (pasal 11 ayat 3). Bahkan dalam pasal 12 ayat 1 disebutkan bahwa Pidato Presiden dan/atau Wakil Presiden selain yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) bukan termasuk pidato resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden.”

Tampaknya, hanya ada dua alternatif yang dapat ditawarkan berdasarkan hal ini: Apakah diperlukan amandemen khusus untuk UU No 24 tahun 2009 atau orangnya yang harus mengikuti UU? Jawabannya berpulang pada pemerintah dan masyarakat pendukungnya.

Dalam lingkup yang lebih kecil, saat pertemuan resmi tingkat perguruan tinggi dengan delegasi dari Asia: Jepang, Korea, atau China, para pemimpinnya menggunakan bahasa asal atau bahasa nasional mereka saat menyampaikan pidato awal atau sambutan, biarpun saat ramah-tamah mereka kemudian beralih kode ke bahasa Inggris dengan lancar.

Selanjutnya, dalam sebuah film yang menceritakan kehidupan George Bush, dikisahkan saat perdana menteri Inggris Tony Blair bertelepon dengan Presiden Perancis Jacques Chirac. Dalam telepon yang cukup lama itu, Tony Blair selalu menggunakan bahasa Inggris dan Jacques Chirac selalu menggunakan bahasa Perancis. Kedua orang saling paham, tetapi tidak ada yang kemudian beralih kode mengikuti bahasa mitra bicaranya. Keduanya saling mempertahankan penggunaan bahasanya sampai komunikasi berakhir. Hal itu paling tidak menunjukkan kesetiaan dan kebanggaan berbahasa mereka yang sangat kuat melekat.

Beberapa hal tersebut menunjukkan bahwa ke depan diperlukan sosok panutan yang dapat diteladani penggunaan bahasanya dan diperlukan langkah-langkah penertiban untuk menjalankan peraturan dengan benar.

b. Nota Kesepahaman

UU RI No 24 tahun 2009 dalam pasal 31 menyebutkan “(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga Negara Indonesia; (2) Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.”

Aturan itu dengan tegas menyebutkan bahwa semua nota kesepahaman wajib menggunakan bahasa Indonesia sebagai salah satu dokumennya. Hanya saja, perlu dilacak kembali sekarang, berapa jumlah nota kesepahaman dengan pihak asing dalam suatu instansi? Berapa yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai salah satu dokumennya? Ke depan diperlukan penertiban untuk menjalankan peraturan tersebut dengan benar.

Selain itu, istilah “nota kesepahaman” di Indonesia jika tidak dipopulerkan lama-lama akan tergeser dengan istilah MOU (*memorandum of understanding*) yang lebih terasa akrab di telinga.

c. Nama dan Rambu

Di Arab Saudi, kosakata bahasa Indonesia bertebaran di berbagai tempat, bahkan di masjid Nabawi, kosakata bahasa Indonesia/bahasa Melayu ikut menghiasi, menjadi nama, petunjuk, dan doa setelah tulisan dalam bahasa Arab. Bagi orang Indonesia hal itu membanggakan dan itu semua terjadi karena banyak orang Indonesia—khususnya

TKI dan TKW--yang mencari nafkah di Arab Saudi. Mereka lah yang berjasa karena telah ikut mempopulerkan bahasa Indonesia di luar negeri.

Akan tetapi, di Indonesia, kosakata Indonesia dan petunjuk dalam bahasa Indonesia justru mulai tergantikan, khususnya di kota-kota besar. Saat masuk ke Plaza Indonesia dan *The Plaza* di Jakarta, mari kita hitung, berapa banyak kata bahasa Indonesia yang kita jumpai sebagai petunjuk arah, menu makanan, atau nama toko? Dalam denah petunjuk yang ada di Plaza itu hanya kata “Indonesia” dalam “Plaza Indonesia” yang berbahasa Indonesia, selebihnya tertera bukan dalam bahasa Indonesia, mulai dari tulisan “*You are here, north lobby, west lobby, thamrin lobby, south lobby. The plaza office, car calls; Alphabetical Shops list Plaza Indonesia extension, luxury brands: home & lifestyle; food and beverage; gifts, chocolates, and florist*”, dst. Masuk ke tempat itu terasa kita tidak seperti berada di Indonesia.

Padahal dalam UU No 24 tahun 2009 pasal 38 disebutkan bahwa (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum; (2) Penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai bahasa daerah dan/atau bahasa asing.”

Selain itu, di beberapa kota di Indonesia, nama perumahan sekarang banyak menggunakan kosakata asing: *riverside* dianggap lebih modern daripada “pinggir sungai”. Kata *regency* atau *residence* dianggap lebih memiliki daya jual sehingga nama Taman Wisata *Regency* atau *Diamond Park Residence* lebih disukai. Nama San Diego Hill sebagai nama tempat pemakaman menjadi populer, biarpun saat pertama mendengar nama itu terkesan seperti bukan di Indonesia tempatnya. Nama perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang saat ini juga banyak yang tidak menggunakan bahasa Indonesia lagi. Padahal dalam UU No 24 tahun 2009, pasal 36 disebutkan bahwa “(3) Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.; (4) Penamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing apabila memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan.”

Saat masuk ke toko swalayan, sulit mencari tulisan “sabun mandi”, yang ada adalah *soap* atau *body foam*. Sulit juga menemukan kata cairan penyegar, yang ada

adalah *face tonic*. Kata pelembab juga sulit ditemukan, yang ada adalah *moisturiser*. Kata “pasta gigi” memang ada, tapi lebih banyak *toothpaste*. Padahal pemerintah telah mengatur pencantuman label berbahasa Indonesia pada kemasan produk pangan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Adapun aturan tentang kewajiban mencantumkan label dalam bahasa Indonesia pada barang (produk nonpangan) diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/2010 yang diterbitkan tanggal 21 Mei 2010. Pada dasarnya, penerapan aturan yang mewajibkan pencantuman label berbahasa Indonesia pada produk pangan dan nonpangan ditujukan untuk melindungi konsumen dari produk yang tidak memenuhi standar mutu dan keamanan. Oleh sebab itu, ke depan diperlukan penertiban untuk menjalankan peraturan tersebut dengan benar.

Simpulan

Berdasarkan beberapa sajian tersebut, patut dicermati bahwa upaya penguatan diplomasi kebahasaan sebenarnya sudah dikukuhkan dengan berbagai aturan kebahasaan. Akan tetapi, aturan tersebut tampaknya tidak diterapkan dengan baik. Penghargaan, penghormatan, dan rasa cinta serta bangga berbahasa Indonesia perlu dibangkitkan. Perlu gerakan mencintai dan menghormati bahasa Indonesia di negeri sendiri. **Mencintai bahasa Indonesia tidak harus anti bahasa asing**. Penggunaan bahasa asing atau bahasa lain dapat saja dilakukan, akan tetapi alangkah baiknya jika itu ditulis dengan bahasa Indonesia terlebih dahulu, baru diikuti bahasa asingnya. Karakter “cinta tanah air, cinta bahasa, cinta budaya, dan cinta produk Indonesia” perlu terus diteladankan dan ditumbuhkembangkan. Ke depan diperlukan penertiban untuk menjalankan peraturan yang tercantum dalam UU No 24 tahun 2009 dengan benar. Berbagai peraturan pemerintah yang dicantumkan sebagai bentuk kelanjutan UU segera disusun dan disahkan untuk segera dilaksanakan.

Diplomasi kebahasaan dapat diterapkan dengan berbagai cara bahkan dapat juga secara individual. Sikap positif yang menghargai bahasa Indonesia, setia, dan bangga berbahasa Indonesia perlu terus dikembang-tumbuhan. Jika bangsa Indonesia punya impian supaya bangsa dan bahasa bermartabat, berbagai langkah untuk mencintai, menghormati, dan menghargai bahasa Indonesia dapat terus diteladankan dan ditumbuhkembangkan untuk mewujudkan impian itu. Penyebarluasan bahasa

Indonesia perlu terus dilakukan. Jika rasa setia dan bangga telah kukuh tertanam, bahasa Indonesia akan menjadi jiwa bangsa dan dengan itu bahasa Indonesia akan semakin kuat dan bermartabat, baik di dalam negeri sendiri maupun di luar negeri. Semoga langkah menuju seabad bahasa Indonesia bermartabat menjadi langkah yang seiring sejalan untuk mewujudkan bangsa yang bermartabat pula...aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Depdiknas. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Edisi Keempat. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- <http://news.kompas.com>, diunduh 10 Oktober 2013
- <http://news.okezone.com>, diunduh 15 September 2013
- <http://translate.google.com>, diunduh 1 Oktober 2013
- <http://www.asal-usul.com>, diunduh 10 September 2013
- <http://www.kaskus.co.id>, diunduh 15 September 2013
- <http://www.liputan6.com>, diunduh 10 Oktober 2013
- <http://www.wikipedia.com>, diunduh 15 September 2013
- <http://www.youtube.com/watch?v=dhDXScliWQQ>, diunduh 5 Oktober 2013
- Kisyani-Laksono. 2011a. "Pendidikan Masa Depan". Dalam Sirikit Syah dan Martadi. 2011. *Rekonstruksi Pendidikan: Kumpulan Pemikiran tentang Perlunya Merekonstruksi Pendidikan di Indonesia*. Editor Sirikit Syah dan Martadi. Surabaya: Unesa University Press.
- Kisyani-Laksono. 2011b. "Pendidikan Karakter Melalui Lagu". Dalam Sirikit Syah dan Martadi (editor). 2011. *Bunga Rampai Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik generasi Masa Depan*. Surabaya: Unesa University Press.
- Pemerintah Republik Indonesia. 1945. UUD 1945.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. UU Republik Indonesia no 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2010. Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia nomor 16 tahun 2010 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pidato Resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden Serta Pejabat Negara Lainnya.

- Pemerintah Republik Indonesia. 2010. Peraturan Menteri Perdagangan NO 22/M.DAG/PER/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No 62/M.DAG/PER/2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label pada Barang.
- Quinn, George. 2012. "*Unggah-Unguh Lan Bahasa Indonesia: Masalah Rong Werno Sing Ngruwedi Pamulanging Basa Jawa Marang Siswa Manca*". Makalah dalam Kongres Bahasa Jawa. Surabaya: Panitia Kongres Bahasa Jawa.-
- Samuel, Jerome. 2008. *Kasus Ajaib Bahasa Indonesia: Pemodernan Kosakata dan Politik Peristilahan*. Terj. Dhany Saraswati Wardhany. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).

Subtema: 3

**SUMBANGAN BAHASA ASING DAN BAHASA DAERAH
DALAM KOMUNIKASI LINTAS BUDAYA DAN
PEMBANGUNAN BANGSA**

Nia Rohayati, FKIP Universitaw Galuh
Zainal Abidin Naning, FKIP, Universitas Sriwijaya

Makalah ini membahas keterkaitan bahasa asing dan bahasa daerah yang menopang perkembangan bahasa Indonesia melalui sastra, media cetak dan penerjemahan dalam rangka peningkatan pemahaman komunikasi lintas budaya dan pembangunan bangsa. Pengembangan bahasa Indonesia dan pengembangan bangsa berkaitan erat dengan upaya penciptaan kesalingmengertian baik melalui komunikasi, misalnya, pertukaran gagasan dan penyatuan cita-cita bangsa, maupun melalui dialog atau forum kerja sama di bidang bahasa, budaya dan sastra. Kegiatan ini memperkaya khazanah dan meningkatkan harkat bahasa Indonesia. Komunikasi antar etnis masyarakat Indonesia, dan juga antar bangsa, memerlukan peran penting penyerapan gagasan-gagasan kreatif dan inovatif bahasa daerah dan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia yang bermartabat serta mendukung kemajuan bangsa Indonesia dalam kancan pergaulan antara bangsa.

Kata kunci: bahasa asing, bahasa daerah, sumbangan, budaya, sastra, media cetak, komunikasi lintas budaya, penerjemahan

1. Pendahuluan

Bahasa Indonesia berperan sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Pada kenyataannya, bangsa Indonesia bermuasal dari berbagai suku yang mendiami kepulauan Nusantara dari Sabang sampai Merauke dan juga memiliki beragam bahasa lokal. Kondisi unik ini menjadi semacam wadah yang memproses penyatuan gagasan, fikiran,

tindakan, bahasa dan budaya, yang pada akhirnya menentukan keberadaan bangsa dan bahasa di percaturan dunia internasional.

Sebagaimana pengalaman bangsa Amerika membangun negerinya dan sekarang ini menguasai dunia, demikian pula ini bisa terjadi dengan bangsa Indonesia dan bahasanya. Bangsa Amerika awalnya dibentuk oleh imigran dari berbagai kelompok etnis, budaya, agama, dan suku bangsa yang berbeda, menyatu, dan menjadi bangsa baru yang maju. Kelompok masyarakat yang berbeda itu – kaum puritan dari Inggris, pemeluk Katolik dari Jerman, Belanda dan Perancis, kaum Protestan dan Yahudi dari berbagai negara Eropa dan Uni Soviet mengubah diri dan membangun bangsa yang cinta kebersamaan meskipun memiliki perbedaan-perbedaan. Sejak awal pembangunan mereka telah berkembang berlandaskan semboyan *E Pluribus Unum* (bahasa Latin) atau *Unity in Diversity* (bahasa Inggris) yang berarti keanekaragaman yang manunggal. Bangsa Indonesia juga memiliki semboyan yang sama yaitu Bhinneka Tungga Ika.

Proses pembangunan bangsa Indonesia dan komunikasi tentang cita-citanya tidak terlepas dari komunikasi lintas budaya dan peranan penerjemahan. Ketiga hal ini dapat membangun kebersamaan dan menciptakan kesalingpahaman warga masyarakatnya. Dalam berkomunikasi, mereka dipengaruhi latar belakang budaya masing-masing meskipun telah memiliki bahasa Indonesia. Berbagai gagasan berbahasa daerah – komunikasi, sastra dan budaya, atau karya jenius lokal harus dicarikan padanannya dalam bahasa Indonesia sehingga muncul pengertian yang sama. Dengan kata lain, pembangunan bangsa Indonesia dipengaruhi oleh pemahaman lintas budaya dan penyamaan persepsi yang dijumpai melalui penerjemahan.

2. Komunikasi Lintas Budaya

Setiap detik manusia menggunakan bahasa untuk menangkap dan mengungkap, merumuskan dan menyampaikan gagasan, perasaan, keinginan, harapan dan cita-citanya. Setiap saat manusia terlibat dalam berbagai kegiatan komunikasi dengan sesama, bahkan dengan diri sendiri. Komunikasi antar penutur bahasa yang sama sesekali menimbulkan kesalahpahaman. Kesalahpahaman akan lebih besar lagi jika penutur berasal dari budaya berbeda meskipun mereka menggunakan bahasa yang sama. Dengan kata lain, pemahaman lintas budaya dibutuhkan ketika komunikasi terjadi antara warga budaya yang berbeda.

Peran penting pemahaman lintas budaya tercipta atau disadari keberadaannya justru karena adanya kesalahpahaman antara orang-orang yang berbeda latar belakang budayanya. Kasus perbedaan persepsi yang ditimbulkan oleh perbedaan budaya bisa terjadi di tingkat lokal, regional atau pun internasional, meskipun mereka menggunakan bahasa yang sedikit agak berbeda atau persis sama. Misalnya, kata *bono* (kedengaran seperti bunuh) di daerah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Kalau mendengar seseorang mengatakan ‘*Kau kubono,*’ pendengar bukan orang Musi Banyuasin mungkin mendapat kesan bahwa orang Musi Banyuasin suka membunuh, padahal artinya, ‘Kupukul kau.’ Jika seorang ayah mengatakan ‘*Kubono,*’ tidaklah mungkin ayah akan membunuh anaknya. Di Medan orang menggunakan kata *motor* dan *semalam* yang bisa berubah artinya kalau dipahami oleh orang Palembang. Dalam bahasa Melayu Medan, *motor* artinya mobil sedang untuk orang Palembang artinya perahu motor atau sepeda motor. *Semalam* di Medan artinya kemarin, dan di Palembang artinya tadi malam.

Di tingkat regional, pengguna bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia dalam hal tertentu mengalami kesulitan saling memahami karena pemakaian istilah tertentu yang mempunyai makna berbeda, atau konsep sama yang terungkap dengan istilah berbeda. Ketika kita sudah duduk di bis, misalnya, jika ada orang Malaysia bertanya, ‘*Duduk di mana?*’ apa yang harus kita lakukan? Padahal maksud jiran kita tadi bertanya, ‘*Tinggal di mana?*’ Kalau kita telusuri justru jiran kita tadi benar kalau melihat makna kata dasarnya dan kita bandingkan struktur morfologi kata bentukannya. Kita menggunakan istilah kartu penduduk untuk identitas alamat kita. Penduduk artinya seseorang tinggal di suatu tempat, dan kita tidak pernah mengatakan kartu *peninggal untuk mengatakan identitas seseorang untuk mengetahui di mana dia tinggal. Dalam tayangan suatu program televisi tanggal 28 April 2010, Krisdayanti hendak dicomblangi oleh Siti Nurhaliza dengan seorang duda Malaysia. Siti Nurhaliza menggunakan kata *datuk* untuk merujuk kepada duda yang sudah tua tersebut sedang Krisdayanti menggunakan kata *kakek* dalam merujuk kepada orang yang sama. Hal yang menarik justru dampak tayangan film anak-anak Ipin dan Upin di TPI. Film berseri ini ternyata memberi kesempatan anak-anak Indonesia belajar bahasa Malaysia. Ternyata anak-anak yang suka menonton film tersebut belajar menggunakan kata-kata dan logat bahasa Malaysia ketika mereka berkomunikasi dengan sesama dan dengan orang tuanya. Ini dapat dianggap proses pendidikan multikultural.

Kesalahpahaman juga muncul karena pemakaian istilah tertentu atau perilaku tertentu di tingkat internasional, yang pada dasarnya mengacu kepada perbedaan budaya. Di Inggris, permainan bola kaki disebut *football*, sedang di Amerika Serikat disebut *soccer*. *Football* di Amerika Serikat sangat berbeda dengan *football* di Inggris. Ketika Kruschov, pemimpin Uni Soviet terkenal di era Sukarno berkuasa di Indonesia, mengunjungi Amerika Serikat, dia mengepalkan kedua tangan, mengacungkan dan mengerak-gerakkan kedua tangannya dengan maksud atau makna 'saya senang bertemu dengan anda, saya datang membawa *good will*, demi persahabatan bangsa Amerika Serikat dan Uni Soviet' Namun warga Amerika Serikat menjadi marah karena gerakan Kruschov mempunyai makna terbalik, seperti jago tinju yang merayakan kemenangan, dan gerakan tersebut menggambarkan sikap negatif di mata orang Amerika.

Episode ini di bawah ini menggambarkan perbedaan budaya meskipun para mitra menggunakan bahasa yang sama, yaitu bahasa Inggris. Latar belakang budaya masing-masing sangat kuat mempengaruhi perilaku mereka. Ketika seorang Amerika dari Texas ingin mendirikan perusahaan di Indonesia, dia mengundang tiga mitra Indonesia dan empat mitra Jepang. Rapat dijadwalkan mulai pukul 9 pagi. Tiga mitra Indonesia ini membawa tiga teman lainnya (yang tidak diundang) dan datang terlambat sekitar 45 menit. Empat mitra Jepang datang di ruang rapat tepat waktu tetapi menyusun kembali kursi duduk sehingga mereka menjadi satu kelompok, padahal di mata pengusaha Texas susunan kursi yang disiapkannya bertujuan membaurkan mitra kerja agar mereka bisa langsung berkomunikasi. Mitra Jepang yang mengelompok sesama mereka dianggap tidak mau membaur. Ketika harus mengambil keputusan mitra Jepang harus konsultasi dulu dengan atasan di Jepang (Elashmawi, 1997). Tamu tak diundang ikut rapat. Mengapa mitra Indonesia membawa teman lainnya? Terlambat 30 – 60 menit untuk mitra Indonesia ini bukan masalah. Ketika sajian rapat hanya secangkir kopi, mitra Indonesia menganggap pengusaha Amerika tersebut pelit. Mengapa mitra Jepang harus duduk berdekatan, tidak sesuai tempat yang disediakan? Mengapa mereka harus konsultasi terlebih dahulu? Apa mereka tidak bisa mengambil keputusan cepat dan mandiri? Peristiwa di atas menggambarkan kuatnya pengaruh budaya asal yang tanpa disadari selalu dibawa dan ditampilkan ketika kelompok budaya berbeda berkomunikasi. Kejelian dan sikap tanggap terhadap perbedaan ini penting untuk dicermati dengan keyakinan bahwa siapa pun orangnya dan dari mana saja asal budayanya mereka memiliki maksud baik ketika berkomunikasi.

Untuk mencapai kesalingpahaman, setiap orang harus menunda sikap mengadili atau menghakimi bahwa pihak lain salah atau tidak tahu sopan santun. Justru sikap terbuka dan ingin belajar dari orang lain diperlukan untuk menjembatani komunikasi antar budaya.

Victor (2010) memberi contoh empat aspek yang mungkin menghambat komunikasi bisnis antara budaya: (1) sikap etnosentris, (2) organisasi sosial, (3) penyelamatan muka, dan (4) perilaku nonverbal. Sikap etnosentris artinya memandang pihak lain dari budaya yang berbeda dengan pandangan nilai-nilai budaya kita sendiri tanpa terlebih dahulu memahami sudut pandang pihak lain tersebut. Ketika promotor Don King mengundang beberapa selebriti untuk menyaksikan satu pertandingan tinju yang digelarnya, para selebriti tersebut protes karena mau diberi karcis gratis. Untuk mereka, diberi karcis gratis dianggap seolah-olah mereka tidak mampu membayar.

Organisasi sosial, misalnya, sistem kekeluargaan juga berbeda. Di Amerika, seorang menantu cukup memanggil nama kepada mertuanya, dan tidak mengadaptasi sapaan yang lazim dipakai pasangannya seperti di Indonesia. Kami memanggil mertua *papa* karena pasangan kami menyapanya demikian, dan kami menjadi sangat kurang ajar kalau memanggil namanya seperti dilakukan menantu Amerika. Untuk orang Indonesia (mungkin budaya Asia juga) kehilangan muka sangat menakutkan. Jarang sekali seorang dosen Indonesia mengatakan tidak tahu ketika menjelaskan dan/atau menjawab pertanyaan mahasiswanya. Untuk mengatakan tidak tahu, kita menggunakan kata 'mungkin.' Padahal, kalau kita mengikuti kuliah yang disampaikan seorang profesor Amerika, kita dapat mendengar beberapa kali dia mengatakan tidak tahu.

Sadar atau tidak sadar, kita menghadapi berbagai kendala ketika berkomunikasi dengan warga lainnya yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Cara kita berbicara di luar kata-kata yang kita ucapkan, seperti volume suara, intonasi, nada suara, dsb, juga mengandung makna tertentu. Suara keras menandakan kekasaran di Indonesia, juga di Thailand, tetapi di negara-negara Arab hal itu justru menandakan kekuatan dan ketulusan. Oleh karena itu, orang Arab berteriak ketika mereka berbicara kepada orang yang mereka sukai. Bagi orang Arab, suara yang lemah mengisyaratkan kelemahan dan tipu daya (Mulyana, 2010, hlm 29).

Ketrampilan pemahaman lintas budaya mengharuskan seseorang memiliki kemampuan mengerti aspek-aspek budaya dari kelompok lain dan mampu berkomunikasi sejalan dengan konsep budaya kelompok tersebut. Di Malang, ketika ditawari minum apa saat

makan siang bisa menimbulkan respons aneh bagi wong Palembang. Kalau kita minta teh, kita disodori *teh manis* padahal ini tidak lazim untuk wong Palembang. Wong Palembang mengantisipasi *teh tawar* bukan *teh manis*. Dalam istilah pendidikan, makna tesis dan disertasi berbeda bagi alumni Inggris dan alumni Amerika Serikat. Alumni Inggris menulis disertasi untuk program S2 dan tesis untuk program S3. Sebaliknya, alumni Amerika Serikat menulis tesis untuk program S2 dan disertasi untuk program S3. Jika seseorang mengatakan sudah menulis disertasi dan memiliki gelar master artinya dia alumni Inggris.

Pemahaman aspek-aspek budaya lain perlu dijelaskan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Fantini (2000) dan Saville-Troke (1982) menganjurkan pemahaman lintas budaya melalui perilaku kebahasaan. Ungkapan bahasa yang muncul harus dikaitkan dengan aspek budaya, misalnya, cinta monyet dan nasi sudah menjadi bubur. Karena banyak monyet di Indonesia dan diamati perilakunya, percintaan anak remaja dikatakan cinta monyet, sedang di Amerika Serikat disebut *calf love* (cinta anak sapi). Orang Indonesia makan nasi dan mengenal bubur. Nasi menjadi bubur padanannya dalam bahasa Inggris ialah *susu yang tumpah* (Terjemahan peribahasanya: Tidak ada gunanya menangisi susu yang tumpah). Sumbangan bahasa daerah dan bahasa asing dapat memuluskan komunikasi lintas budaya serta membuka wawasan baru bagi penutur bahasa Indonesia.

Byram (2000) mengusulkan pemahaman berbagai aspek yang dapat mendorong seorang menguasai pengetahuan dan ketrampilan lintas budaya: (1) sikap ingin tahu dan terbuka akan budaya lain, (2) pengetahuan pola dan gaya hidup kelompok masyarakat atau bangsa lain, (3) kejelian dan kehalusan rasa memahami pihak lain. Setiap orang memiliki niat baik dalam berkomunikasi dengan sesama, namun interpretasi seorang dipengaruhi dengan pandangan budaya asalnya. Sikap etnosentris (memandang apa pun dan siapa pun dengan kaca mata budaya sendiri) mengaburkan kenyataan bahwa manusia itu sama dan dalam berkomunikasi semua orang ingin saling mengerti dan memahami pihak lainnya. Dalam era globalisasi sekarang ini, pengetahuan dan ketrampilan pemahaman lintas budaya sangat diperlukan agar kita tidak terhambat berkomunikasi dengan warga dunia lainnya. Kita harus belajar berbagai budaya, bahasa, sastra asing yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan bangsa. Sikap ilmiah dan kepioniran bangsa-bangsa Eropa dan Amerika Serikat, sikap ekspansif bisnis bangsa Cina, Jepang dan Korea, sikap merantau ke negeri lain bangsa India (misalnya, 30% tenaga medis di Amerika Serikat berasal dari India) patut dipelajari sampai keakar

budayanya. Tidak heran kalau Presiden Barrack Obama menugasi Letjen Stanley McChristal, pemimpin operasi militer di Afganistan untuk ‘*develop a corps of experts in Afghanistan’s language and culture*’ (Boessenkool, 2009). Dengan kata lain, pemerintah Amerika Serikat melalui instruksi Presiden Barrack Obama menugaskan pengembangan sekelompok tenaga ahli yang memahami bahasa dan budaya Afganistan.

3. Penerjemahan dan Pembangunan Bangsa

Komunikasi dan pemahaman lintas budaya berkaitan erat dengan peranan penting penerjemahan. Sumbangan bahasa asing dan bahasa daerah dalam hal penerjemahan dapat memperkaya dapat memperkaya khazanah bahasa Indonesia. Kalau dicermati dari perspektif global, penerjemahan memiliki peran yang sangat strategis bagi pembangunan nasional, sebagai bagian pengembangan intelektual dan pembentukan citra. Peran strategis yang dimiliki oleh penerjemahan ditunjukkan oleh kenyataan bahwa (1) penerjemahan merupakan akses terhadap inovasi Iptek dan (2) media bagi pengenalan dan apresiasi lintas budaya (Yadna, 2006:3). Buku-buku ilmiah karangan Ibnu Sina, antara lain *Al Qanun* dan *Kitab As-shifa*, yang merupakan buku-buku ilmiah karangan sarjana Islam, diterjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Latin dan bahasa Inggris. Kedua buku itu merupakan rujukan utama dan terdepan pada awal perkembangan ilmu kedokteran dunia. Buku-buku iptek modern berbahasa Inggris diterjemahkan ke berbagai bahasa dunia, termasuk bahasa Jepang dan bahasa Indonesia. Buku *Bhagavad Gita* pertama kali diterjemahkan dari bahasa Sansekerta ke dalam bahasa Inggris oleh Charles Wilkins di tahun 1785. Novel *One Day in the Life of Ivan Denisovich* karangan Alexander Solzhenitsyn diterjemahkan dari bahasa Rusia ke dalam bahasa Inggris oleh Bela Von Block dan diterbitkan di tahun 1963. Pemerintah India mendirikan National Translation Mission, yang bertugas mengidentifikasi penerjemah handal dan buku-buku yang harus diterjemahkan, mempelajari hak cipta, serta menyediakan dana sebesar 739,7 juta rupee (Sinha, 2010). Sinha berargumentasi bahwa proyek seperti ini sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kemakmuran. Dalam skala internasional, kegiatan ini menciptakan kesalingpahaman, perdagangan internasional, dan perdamaian yang lebih baik.

Bersama teman-teman, kami pernah mengerjakan proyek penerjemahan 14.000 halaman bahan pelatihan keselamatan kerja dan

pengetahuan teknik dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia untuk sebuah perusahaan asing dan penerjemahan lisan langsung sebanyak 1500 jam (Naning dan Rohayati, 2005). Di perusahaan ini terdapat sekitar 30 orang asing yang berbahasa Inggris (dan tidak bisa berbahasa Indonesia) dan ratusan orang Indonesia yang sebagian besar tidak bisa berbahasa Inggris. Proyek terjemahan ini memberi pengetahuan dan ketrampilan sumber daya manusia Indonesia (para pegawai Indonesia di perusahaan tersebut) agar bekerja lebih baik dan aman bebas kecelakaan dan memiliki pengetahuan teknis canggih sesuai peralatan yang dimiliki perusahaan tersebut. Pegawai Indonesia di sini belajar, berfikir, dan bekerja mengikuti sistem baru yang tidak mereka temui kalau bekerja di perusahaan Indonesia, misalnya, disiplin waktu, kepatuhan pada disiplin kerja, dan bahkan kebiasaan memasang sabuk pengaman ketika mengendarai mobil. Transfer ilmu dan teknologi terbantu karena adanya bahan bacaan terjemahan, pelatihan langsung oleh orang asing, dan pengenalan sistem kerja yang efisien.

Budaya lokal juga diperkenalkan melalui karya terjemahan. Serat Centhini diterjemahkan dari bahasa Jawa ke dalam bahasa Indonesia. Rihcard McGinn, seorang ahli bahasa dari Ohio University dan peneliti jangka panjang bahasa Rejang (Bengkulu/ Sumatera Selatan) menerjemahkan konsep-konsep lokal, pribahasa, cerita rakyat penutur bahasa Rejang ke dalam bahasa Inggris (komunikasi lisan, 2007).

Selain itu, untuk contoh konsep lokal, misalnya perbedaan, *ora ngerti* dan *ora ru* dalam bahasa Jawa dapat dijelaskan oleh penuturnya secara gamblang karena mereka mengetahui makna utuh menurut perspektif emik seperti dijelaskan oleh antropolog. *Ora ngerti* artinya tidak mengetahui berdasarkan informasi yang telah dimiliki dalam benak. *Ora ru* artinya tidak mengetahui karena belum mendapat informasi dari pandangan mata. Di sini terlihat secara gamblang sudut pandang penutur asli. Dalam memahami bahasa, budaya, sastra, dan pemikiran jenius lokal diperlukan perspektif emik. Orang Jawa menikmati pertunjukan wayang semalam suntuk. Kelompok masyarakat lain belum tentu bisa menikmati pertunjukan wayang seperti mereka.

Kemal Attaturk, pemimpin kemerdekaan Turki, menghendaki adanya reformasi bahasa; bahasa Turki harus berperan menjadi satu unsur landasan pembangunan bangsa (Guncarglar, 1994). Abrahamian (1998) meyakini bahasa ibu sebagai simbol identitas bangsa bagi mereka yang mengenal bahasa asing. Kita menghargai bahasa sendiri setelah mengenal bahasa lain. Bahasa daerah dan bahasa Indonesia memiliki ciri-ciri unik tersendiri: lae (Batak),

dorang (Ambon), sapaan untuk orang kedua (bahasa Indonesia) membawa muatan budaya.

Bahasa merupakan kendaraan sastra; penerjemahan merupakan sarana modifikasi gagasan-gagasan yang terungkap dari unsur-unsur berbeda. Warga dunia menggunakan bahasa untuk saling memahami meskipun mereka dari dunia dan budaya berbeda. Novel karya Gabriel Garcia Marquez berjudul *Chronicle of Death Foretold* diterjemahkan dari bahasa Spanyol ke dalam bahasa Inggris. Warga dunia yang mengerti bahasa Inggris dapat menikmati karya terjemahan tersebut. Jika ada terjemahan dalam bahasa Indonesia, maka orang Indonesia pun dapat menikmatinya juga. Di sinilah nampak peran penting penerjemahan yang dapat menjembatani warga dunia untuk bisa menikmati karya sastra. Penerjemahan juga menjembatani komunikasi gagasan warga dunia yang pada dasarnya menginginkan kebahagiaan dan perdamaian.

Departemen Luar Negeri Republik Indonesia menyediakan dokumen resmi terjemahan baik dari Inggris ke bahasa Indonesia, misalnya, Piagam Kerjasama ASEAN, atau dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, misalnya, sejarah dan konsep Pancasila. Karya terjemahan seperti ini tidak lain merupakan usaha peningkatan pemahaman antar warga dunia yang menggunakan bahasa yang berbeda. Di PBB, utusan negara mana pun harus memahami bahasa resmi PBB. Kalau pun mereka menggunakan bahasa Inggris, misalnya, sebagai salah bahasa resmi PBB, masing-masing duta dan stafnya yang berasal dari negara bukan berbahasa Inggris membawa nilai, norma, pandangan, ikatan budaya asal. Kemampuan pemahaman lintas budaya mereka perlukan ketika berkomunikasi dengan utusan negara lain. Penerjemahan juga diperlukan ketika mereka ingin memahami berbagai isu penting. Pada akhirnya, kebijakan yang sampai kepada pemerintah masing-masing mempengaruhi kemajuan dan pembangunan negara masing-masing.

Di Indonesia, pemasyarakatan sastra dilakukan dengan tetap memperhatikan dan memanfaatkan kekayaan sastra nusantara, antara lain, mengacu pada nilai-nilai budaya masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, pemasyarakatan sastra hendaknya mempertimbangkan hal berikut: (1) untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap karya sastra Indonesia, penerbitan karya sastra Indonesia perlu digalakkan, (2) penerjemahan karya sastra ke dalam bahasa-bahasa internasional perlu digalakkan, (3) mendorong keikutsertaan sastrawan Indonesia dalam pertemuan-pertemuan sastra internasional, dan (4) memberdayakan tiga komponen kehidupan sastra, yaitu sastrawan, karya sastra, dan masyarakat (Muhyidin, 2009:8)

Usaha membangun nasion secara terus menerus bisa kita telusuri dari karya-karya pengarang Indonesia asal Sumatera, Muhammad Yamin. Muncul sebagai ketua Jong Sumatranen Bond di tahun 1926, konsep “tanah air” bagi Yamin bergeser dari Sumatra menjadi Indonesia. Pada tahun 1928 Yamin merupakan salah satu penggerak Sumpah Pemuda. Karya-karyanya kemudian mencerminkan semangat yang berkobar-kobar untuk membangun kesatuan, ... menggali nilai historis Indonesia, ... untuk membangun dan mengimajinasikan Negara-bangsa yang tidak serta merta ada begitu saja (Budianta, 2009:2). Perumusan semboyan Bhinneka Tunggal Ika oleh Muhammad Yamin menyatukan beribu-ribu pulau di khatulistiwa menjadi Indonesia yang memiliki beragam bahasa dan budaya.

4. Penutup

Serpihan-serpihan informasi di atas merujuk kepada tiga hal pokok. Pertama, bahasa yang diungkapkan oleh penutur aslinya membawa muatan budaya. Pemahaman makna tidak cukup hanya dengan merujuk kepada bentuk bahasa yang disampaikan (lisan dan tertulis) tetapi diwarnai oleh aspek-aspek budaya yang mengiringinya. Dengan demikian, komunikasi antar kelompok budaya meskipun menggunakan bahasa yang sama mesti disertai dengan pemahaman lintas budaya. Kedua, gagasan-gagasan dan cita-cita berbagai kelompok budaya -- tingkat lokal, regional, atau internasional – pada dasarnya menghendaki kebahagiaan dan kemaslahatan bersama. Komunikasi antar penutur bahasa dan kelompok budaya dijumpai oleh pemahaman lintas budaya dan penerjemahan. Ketiga, penerjemahan dapat mendukung identitas dan pembangunan bangsa. Penyebaran informasi baru hasil terjemahan dari bahasa asing atau bahasa lokal ke dalam bahasa Indonesia menciptakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi sumber daya manusia Indonesia, merekatkan persatuan, dan meningkatkan pembangunan bangsa.

PUSTAKA ACUAN

Abrahamian, Levon. 1998. *Mother Tongue: Linguistic Nationalism and the Cult of . Translation in Post-communist Armenia*. Berkeley: Institute of Slavic, East European and Eurasian Studies.

Boessenkool, Antoine. 2009. *Translation Power*. Defense News, diterbitkan 8 Juni 2009 dan diunduh 3 Mei 2010.

Byram, Michael. 2000. *Assessing Intercultural Competence in Language Testing*. SPROGFORUM. No. 8 Vol. 6, hlm. 8-13

Elashmawi, Farid. 1997. *Overcoming Multicultural Clashes in Global Joint Ventures*. Economic and Business Review Indonesia. No. 278.

Fantini, Alvino. 2001. *Exploring Intercultural Competence: A Construct Proposal*. NCOLCTL Forth Annual Conference, diunduh 27 Maret, 2008

Meilani, Budianta. 2009. *Sastra dan Interaksi Lintas Budaya*. Laman Pusat Bahasa. Diunduh 7 Mei 2010.

Muhyidin, Asep. 2009. *Pemertahanan Nilai Nilai Budaya Lokal dalam Pemelajaran Sastra di Sekolah*. Makalah KIKI HISKI XX 2009, Bandung, 5 – 7 Agustus 2009.

Mulyani, Deddy. 2010. *Pasar Bebas dan Komunikasi Nonverbal*. Pikiran Rakyat, Sabtu, 24 April 2010, hlm. 29

Naning, Zainal A. dan Nia Rohayati. 2005. *In Retrospect to a Translation Project. Makalah pada International Conference on Translation*, Universitas Sebelas Maret, Solo, 14 – 15 September 2005

Gurgarglar, Sehnas Tahir. 1994. *The Politics and Poetics of Translation in Turkey, 1923-1960*. New York: Rodovi BV Amsterdam

Saville-Troike, Muriel. 1982. *Sociolinguistics and Communication*.
New York: Harcourt Brace Ltd.

Sinha, R. Mahesh K. 2009. India National Translation Mission. [http: www.mt.archive.info/MTS-2009](http://www.mt.archive.info/MTS-2009), diunduh 3 Mei 2010.

Victor, David A. 2010. Cross-cultural/ International Communication.
[http: www.referencebusiness.com](http://www.referencebusiness.com), diunduh 14 April 2010.

Yadna, IB Putra. 2006. Implikasi Budaya dalam Penerjemahan.
Denpasar: Universitas Udayana

PENANGANAN BAHASA MASYARAKAT ASLI
PORT NUMBAY DI KOTA JAYAPURA YANG TERANCAM PUNAH
(FAKTA, SEBAB, GEJALA, DAN STRATEGIPEMEIHARAANNYA)

Novaria Panggabean, S.S.

(novapanggabean 49@yahoo.co.id)

Balai Bahasa Provinsi Papua dan Papua Barat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

ABSTRAK

Suatu bahasa terancam punah atau tidak dapat diketahui melalui penggunaannya pada dan oleh masyarakat penuturnya. Agar tidak punah, preservasi dan pemberdayaan terhadap berbagai bahasa daerah di seluruh Indonesia serta pengembangan bahasa Indonesia perlu dilakukan secara serius, terus-menerus, dan berkesinambungan. Ancaman kepunahan bahasa-bahasa masyarakat asli Port Numbay di Kota Jayapura dapat disebabkan oleh perubahan budaya global; hegemoni dan persaingan antara bahasa daerah dengan bahasa nasional dan bahasa asing; loyalitas penutur yang rendah terhadap bahasa daerahnya; pengalihan pemakaian bahasa dari bahasa daerah sendiri ke bahasa lain karena alasan ekonomi, sosial, politik, dan/atau psikologis.

Penelitian ini akan mendeskripsikan alternatif penanganan bahasa Kayo Pulo, Tobati, dan Skouw di Kota Jayapura yang terancam punah dengan mengungkap fakta, sebab, dan gejala kepunahannya serta mengkaji strategi pemeliharannya.

Tujuan teoretis yang dirasakan sangat penting dan mendasar pada saat ini ialah ketiga bahasa daerah di Kota Jayapura ini bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kedudukan dan fungsinya. Penuturnya, yang seharusnya semakin lama semakin banyak populasinya, tetapi dalam kenyataannya justru sebaliknya. Bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa migran (bahasa kelompok pendatang) lebih dominan pemakaiannya daripada bahasa penduduk asli. Penduduk asli lebih beradaptasi pada bahasa Indonesia, bahasa migran, dan bahasa asing daripada bahasa ibunya sendiri. Realita ini menyebabkan bahasa Kayo Pulo, Tobati, dan bahasa Skouw semakin terpinggirkan di habitatnya sendiri. Metode yang digunakan dalam penelitian ialah metode penelitian kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif: ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri (Bogdan dan Taylor 1992:22, dan Moleong, 2000:3).

Kata kunci: bahasa terancam punah, bahasa migrant, sikap hidup, modernisasi

1.Pendahuluan.

Di wilayah Kota Jayapura terdapat 7 (tujuh) bahasa masyarakat asli Port Numbay yakni bahasa Kayo Pulau, bahasa Tobati/Enggros, Bahasa Skouw, bahasa Nafri, bahasa Mosso, bahasa Elsend, bahasa Sentani. Bahasa masyarakat asli Port Numbay ini dituturkan diantara penutur bahasa yang beragam. Keberadaan penutur bahasa yang beragam di kota Jayapura sudah nmerupakan gejala keterpinggiran tiga bahasa Port Numbay yang akan diteliti yaitu (bahasa Kayo Pulau, Tobati/Enggros, dan bahasa Skouw).

Berdasarkan hasil penelitian Balai Bahasa Jayapura yang bertajuk *Study Kebahasaan dan Kesastraan Masyarakat Asli Port Numbay Di Kota Jayapura (Bahasa Kayo Pulau, Tobati, dan Skouw)*, bahasa-bahasa lokal atau bahasa masyarakat asli Port Numbay sedang dalam keadaan kritis atau sedang dalam taraf menunggu kepunahannya. Keterancamannya bahasa Port Numbay diprediksi tidak lebih dari 20 hingga 30 tahun ke depan atau lebih cepat dari persediksi tersebut.

Hal ini sejalan dengan pengamatan dan penelitian para praktisi bahasa, sejumlah besar bahasa dan sastra daerah di Papua kini terancam punah. Kepunahan itu disebabkan oleh banyak faktor dan ciri-cirinya pun telah dibuat oleh berbagai pihak. Sebagai contoh, pengelompokan yang dibuat oleh Krauss (dalam Fautngil, 2010) tentang klasifikasi bahasa-bahasa di dunia yang terancam punah menjadi tiga kelompok, yakni (1) bahasa yang tidak dikuasai dan tidak digunakan oleh anak-anak dari penutur suatu bahasa sehingga kurang aman (*moribund*); (2) bahasa yang dalam dua tiga generasi tidak lagi dikuasai dan dipelajari oleh keturunan penutur suatu bahasa sehingga pada kategori berbahaya (*endangered*); dan (3) bahasa yang termasuk kategori aman(*safe*).

Tabel berikut adalah klasifikasi keamanan bahasa-bahasa hampir punah sesuai jumlah penutur menurut Edwards (dalam Fautngil 2010).

TABEL 1 KALSIFIKASI BAHASA HAMPIR PUNAH SESUAI DENGAN JUMLAH PENUTUR MENURUT EDWARDS

No.	State of Health	Number of speaker	Number of Languages
1.	Excellent change of survival (aman)	More than5000	3
2.	Moderately endangered (kurang aman)	1000-5000	13
3.	Endangered (Berbahaya)	500-1000	11
4.	Quite Endangered (cukup berbahaya)	100-500	13
5.	Extremely Endangered (sangat berbahaya)	10-100	5
6.	Verging on extinction (ambang kepunahan)	Fewer than 10	8

Sumber:Edwards (1994).

Pernyataan mengenai proses kepunahan bahasa itu diperkuat oleh hasil penelitian Mu'adz (dalam Fautngil, 2010). Dikatakan bahwa di Indonesia saat ini terdapat dua kategori bahasa, yakni *endangered* dan *safe*. Kategori *moribund* akan terus berproses secara perlahan-lahan menuju *endangered* atau bahaya. Selanjutnya dikatakan bahwa berdasarkan jumlah bahasa yang ada di Indonesia saat itu, yakni 670 bahasa, dan hanya 50 bahasa yang masuk kategori *safe* karena berpenutur di atas 100.000 orang. Delapan bahasa dari 50 bahasa itu berpenutur lebih dari 2 juta orang. Hal ini berarti 620 bahasa dalam kategori *endangered* dan disebutkan sebagai *threatened* atau terancam. Dari 620 bahasa itu, terdapat sejumlah bahasa yang dikelompokkan dalam kategori *moribund*. Mu'adz menyatakan, proses *moribund* didasarkan atas kenyataan bahwa: (1) sekitar 600 bahasa memiliki penutur asli yang sangat kecil; (2) sekitar 600 bahasa itu tidak memiliki tradisi tulis; dan (3) dominasi oleh satu bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi yang mematikan pemakaian 600 bahasa daerah dimaksud.

Mengenai keadaan bahasa yang berhubungan dengan jumlah penduduk, Fautngil berpendapat, apabila berpatokan pada pendapat Krauss, maka dari 262 bahasa yang ada di tanah Papua hanya 2 (dua) atau 0,75% bahasa daerah yang dianggap *safe* atau aman. Kedua bahasa itu adalah bahasa Dani Barat di sekitar Lembah Baliem dan Ekagi atau Ekari dengan bahasa Mee di wilayah Paniai. Dengan demikian, sebanyak 260 atau sekitar 99,24% bahasa daerah asli di Papua dikelompokkan ke dalam kategori *endangered* atau berbahaya dan *moribund* atau ditinggalkan penuturnya. Bahasa-bahasa yang saat ini dirasakan sebagai bahasa yang luas sebarannya, seperti bahasa Biak, Sentani, Yali, Maibrat, dan Moni juga tidak terlepas dari ancaman kepunahan yang lebih condong ke proses *moribund* dan *endangered*.

Pernyataan terakhir ini didasarkan atas fakta bahwa sebagian besar generasi yang lahir pada tahun 2000 ke atas terutama yang ada di kota dan pinggiran kota, sudah berbahasa ibu bahasa Melayu Papua yang merupakan suatu variasi dialektal bahasa Indonesia. Khusus untuk kelompok ini mungkin hanya bisa mengerti bahasa daerahnya tetapi sudah tidak menggunakannya lagi. Apabila mereka sudah berumur 50 tahun berarti sudah tidak ada lagi bahasa daerah untuk mereka. Persoalan yang sama akan terjadi untuk generasi selanjutnya dan terhadap bahasa-bahasa yang berpenutur antara 10.000-99.999 orang, yakni sebanyak 20 bahasa atau 7,54%.

Bagaimana dengan bahasa-bahasa lain yang berpenutur antara 1.000-9.999? Para ahli memperkirakan, bahasa-bahasa tersebut hanya akan dapat bertahan sekitar 30 tahun. Jumlah

bahasa di Papua yang dalam kondisi seperti itu cukup banyak, yakni 92 bahasa atau 34,71%. Bahasa-bahasa kelompok ini sebagian besar (80%) terdapat di daerah pedalaman Papua dan sebagian kecil (20%) terdapat di kota, pinggiran kota, dan pulau-pulau dalam wilayah kota yang mudah mendapat pengaruh dari luar.

Di Papua kelompok bahasa terbanyak adalah bahasa yang berpenutur antara 100 sampai 999 orang, yakni 129 bahasa (48,67%) dan penutur di bawah 100 orang sebanyak 22 bahasa (8,30%). Di antara 22 bahasa tersebut, lima di antaranya belum diketahui jumlah penuturnya. Bahasa-bahasa yang belum diketahui jumlah penuturnya itu tergambar dalam tabel berikut.

TABEL 2 BAHASA –BAHASA DAERAH DI PAPUA YANG BELUM DIKETAHUI JUMLAH PENUTURNYA

No.	Nama Bahasa	Lokasi Penutur
1.	Iha Base Pidgin	Semenanjung Bomberai, bagian barat dan utara Fakfak. Dasar bahasanya adalah bahasa Iha.
2.	Onin Base Pidgin	Semenanjung Onim.
3.	Kehu	Sekitar Kali Wapoga di Paniai.
4.	Murkim	Di Kiwirok
5.	Sowanda	Perbatasan daerah Waris.

Sumber: *Paper* "Presented in The International Conference On Papuan Cultural Diversity in the Mosaic of Indonesian Culture" by Christ Fautngil.

TABEL 3 BAHASA DAERAH DI PAPUA TERANCAM PUNAH DENGAN JUMLAH PENUTUR KURANG DARI 100 ORANG

No.	Bahasa	Jumlah Penutur	Daerah Pakai
1.	Kanum	80	perbatasan timur Merauke kampung Pagai
2.	Kapori	60	Kaureh
3.	Mor 1	60	Semenanjung Bomberai Teluk Bintuni
4.	Kwerisa	55	Kampung Kay Kali Rouffer, Teluk Gelvink
5.	Morori	50	Pantai Selatan Merauke berbahasa Marind
6.	Marengi	47	Kampung Marengge, Bonggo
7.	Burumakok	40	Kampung Burumakok Kurima
8.	Masep	40	Mamberamo, pantai Barat Sarmi
9.	Beneraf	40	Kampung Beneraf, pantai timur Sarmi
10.	Kembra	30	Sebelah timur Kali Sogber Okibab
11.	Mander	20	Tor Atas
12.	Woria	12	Kampung Botawa pedalaman W. Bawah
13.	Kanum Badi	10	Perbatasan Sebelah timur Merauke
14.	Saponi	10	Kampung Botawa W. Bawah
15.	Dusner	6	Teluk Wandamen
16.	Tandia	2	Timur Teluk Cenderawasih Sebelah Selatan S. Wandamen, kali Woshim
17.	Mapia	1	Pulau Mapia

Keterangan: data-data di atas diambil antara tahun 1991-1999. Sumber data dari: (1) SIL Internasional tahun 2000; (2) Hasil Penelitian Pusat Bahasa terdahulu; dan (3) Data Penelitian Fautngil tahun 2010.

Apabila pendapat Edwards di atas diterapkan di Papua bahwa bahasa yang dianggap aman adalah bahasa dengan jumlah penutur di atas 5000 orang, maka sekitar 68 bahasa di

Papua atau sekitar 25,66% dianggap aman. Namun, masih terdapat 197 bahasa lagi atau sekitar 74% yang dianggap dalam berbagai tingkatan bahaya (*endangered*) karena jumlah penuturnya di bawah 1000 orang.

Melihat kondisi kebahasaan dan penutur bahasa daerah di Papua yang sangat bervariasi serta dikaitkan dengan keadaan latar belakang geografis, sosial budaya dan kemajuan yang telah dan sedang dilaksanakan saat ini, maka jalan tengah yang dapat ditempuh untuk mengklasifikasikan bahasa-bahasa di Papua adalah penggabungan pendapat Krauss dan Edwards yang dilakukan oleh Fautngil. Penggabungan itu dianggap penting sebab harus diadakan penyesuaian mengingat kedua acuan tersebut tidak sepenuhnya dapat diterapkan di Papua.

Bertolak dari kenyataan di atas, dan berpatokan pada kedua acuan yang telah disebutkan, berikut disajikan tabel acuan alternatif yang telah dimodifikasi oleh Fautngil berdasarkan jumlah penutur, jumlah bahasa, dan asumsi waktu bertahannya suatu bahasa sesuai dengan usia hidup manusia, keadaan geografis dan sebaran penduduk.

TABEL 4 ACUAN ALTERNATIF TINGKAT KEBERTAHANAN BAHASA TERANCAM PUNAH BERDASARKAN JUMLAH PENUTUR , DAN JUMLAH BAHASA

No.	Klasifikasi	Jumlah Penutur	Jumlah Bahasa	Waktu Bertaha dalam Tahun
1.	Aman	lebih 100.000	2	50—ke atas
2.	Kurang Aman	10.000—99.999	20	40—50
3.	Berbahaya	1000—9.999	92	30—40
4.	Cukup Berbahaya	100—999	129	20—30
5.	Sangat Berbahaya	10—99	14	10—20
6.	Ambang Kepunahan	10	8	kurang 10

Sumber: *Paper* "Presented in The International Conference On Papuan Cultural Diversity in the Mosaic of Indonesian Culture" by Christ Fautngil.

Klasifikasi aman untuk 100.000 penutur dengan waktu bertahan lebih dari 50 tahun didasarkan atas pertimbangan umur hidup manusia dan pengaruh luar serta letak geografis. Hanya ada dua bahasa yang masuk klasifikasi ini, yakni bahasa Dani Barat di Lembah Baliem dan bahasa Ekagi (Ekari) atau bahasa Mee.

Bahasa-bahasa yang kurang aman (*moribund*), yakni 10.000—99.999 penutur terdapat pada 20 bahasa yang diperkirakan dapat bertahan hidup antara 40—50 tahun. Perkiraan ini didasarkan atas beberapa pertimbangan seperti umur manusia dan upaya-upaya pelestarian bahasa dan budaya oleh penuturnya sendiri, dan juga karena letak geografisnya yang sebagian besar berada di daerah pedalaman sehingga masih dapat mendukung kelestariannya.

Diklasifikasikan sebagai *moribund* karena sebagian dari anak-anak tidak lagi mempelajari bahasa daerahnya dan tidak ada budaya tulis serta kuatnya pengaruh bahasa nasional. Kondisi seperti ini terjadi misalnya pada bahasa Biak, Sentani, dan Maibrat.

Klasifikasi berbahaya untuk penutur 1.000—9.999 orang dengan daya tahan hidup antara 30—40 tahun berlaku untuk 92 bahasa. Klasifikasi ini pun dapat dikategorikan sebagai *moribund* dan *endangered* karena cirinya sama seperti telah disebutkan di atas, yaitu wilayahnya sudah termasuk daerah terbuka. Klasifikasi cukup berbahaya terdapat pada bahasa yang berpenutur antara 100—999 dengan jumlah terbanyak, yakni 129 bahasa. Daya tahan hidup kategori ini diperkirakan 20—30 tahun. Disebut sebagai klasifikasi berbahaya (*endangered*) sebab walaupun sebagian besar generasi masih menggunakan bahasa ini, namun pengaruh luar sangat kuat mengingat hasil-hasil pembangunan yang sedang dilaksanakan dan kehadiran masyarakat yang berasal dari luar. Pengaruh seperti itu sangat beresiko terjadi terhadap bahasa Kayo Pulau, bahasa Tobati, bahasa Enggros, bahasa Skouw, dan bahasa Nafri.

Klasifikasi berikutnya adalah yang sangat berbahaya (*extremely endangered*) karena daya tahan hidup bahasa-bahasa itu hanya berkisar 10—20 tahun. Walaupun jumlah bahasa sedikit, yakni 14 bahasa, tetapi sebagai salah satu kekayaan budaya masyarakat Papua yang mengandung ilmu pengetahuan, bahasa-bahasa itu harus diperhatikan. Klasifikasi terakhir, yakni ambang kepunahan (*verging on extinction*) terdapat pada delapan bahasa dan daya tahan hidupnya kurang dari 10 tahun. Kelompok sangat berbahaya dan ambang kepunahan mungkin saja sedang atau sudah berlangsung karena data ini diambil antara tahun 1991—1999. Pernyataan ini diperkuat oleh fakta mengenai jumlah penutur di bawah 100 orang dan 10 orang pada tahun 1991. Setelah hampir 20 tahun berlalu, dapat dipastikan bahwa data atau kondisi itu sudah berubah.

Bagaimana dengan bahasa Kayo Pulau, bahasa Tobati, dan bahasa Skouw? Apakah aman dari ancaman kepunahan? Untuk menjawab pertanyaan ini, berdasarkan data-data yang dikemukakan di atas, apabila berpatokan pada formulasi daya tahan hidup bahasa yang dimodifikasi oleh Fautngil tahun 2010, maka bahasa-bahasa Port Numbay, yakni bahasa Kayo Pulau, Tobati, dan Skouw tidak terlepas dari ancaman kepunahan. Besarnya jumlah bahasa daerah di wilayah Kota Jayapura ini berbanding terbalik dengan besarnya jumlah penutur bahasa masing-masing. Catatan *Summer Institute of Linguistics*, pada tahun 2006 bahasa Kayo Pulau berpenutur sebanyak 573 orang, bahasa Tobati berpenutur 350 orang,

bahasa Sentni berpenutur 30.000 orang, bahasa Nafri berpenutur 1.630 orang, bahasa Skouw berpenutur 700 orang, bahasa Elseng berpenutur 200 orang, dan bahasa Mosso berpenutur 125 orang. Data terbaru dari Badan Bahasa pada tahun 2010, bahasa Nafri berpenutur 1.800 orang dan bahasa Skouw berpenutur 500 orang. Kecilnya jumlah penutur setiap bahasa daerah ini berpengaruh terhadap daya hidup mereka. Seperti yang dinyatakan oleh Edwards (dalam Fautngil, 2010) bahwa bahasa-bahasa daerah dengan penutur antara 1.000 – 5.000 berada dalam kondisi yang kurang aman dan bahasa-bahasa daerah dengan jumlah penutur antara 500 – 1.000 berada dalam kondisi yang berbahaya. Sejalan dengan pendapat Edwards tersebut ada kemungkinan bahasa – bahasa daerah di wilayah kota Jayapura ini berada dalam kondisi yang tidak aman.

. Berdasarkan data kependudukan tahun 2010 dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jayapura tahun 2010, penduduk Kampung Kayo Pulau sebanyak 877 orang; penduduk Kampung Tobati dan Kampung Enggros 739 orang; dan penduduk Kampung Skouw (Skouw Mabo, Yambe, dan Sae) sebanyak 2.096 orang, jika dilihat dari jumlah penutur bahasa-bahasa tersebut bahwa bahasa Kayo Pulau dan bahasa Tobati berada dalam kategori cukup berbahaya karena berada pada range 100-999 orang, sedangkan bahasa Skouw dalam kategori berbahaya karena pada range 1.000-9.999 penutur.

TABEL 5 JUMLAH PENDUDUK KETUJUH KAMPUNG TIGA BAHASA

Nama Kampung	Nama Bahasa	Jumlah Penduduk	Total Penduduk
Kayo Pulau	Kayo Pulau	591	877
Kayo Batu		286	
Tobati	Tobati	371	739
Enggros		368	
Skouw Mabo	Skouw	582	2.096
Skouw Yambe		849	
Skouw Sae		665	
		3.712	

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jayapura tahun 2010.

Dalam Tabel 5 di atas tergambar bahwa jumlah penduduk setiap kampung itu identik dengan jumlah penutur bahasa daerah masing-masing. Karena penduduk kampung tersebut homogen

tanpa ada etnik pendatang. Diasumsikan bahwa etnik penutur ketiga bahasa di atas yang tinggal menetap di luar kampung sudah tidak secara aktif lagi menggunakan bahasa daerahnya.

Hipotesis-hipotesis sosiolinguistik terkait dengan kecepatan kepunahan bahasa antargenerasi penutur dapat diterangkan sebagai berikut, dengan asumsi: satu generasi baru muncul setelah 25 tahun. Jika satu bahasa hanya digunakan oleh penutur yang berusia 25 tahun ke atas dan usia di bawahnya tidak lagi menggunakannya, maka 75 tahun kemudian atau tiga generasi lagi bahasa itu akan terancam punah. Jika satu bahasa hanya digunakan secara aktif oleh penutur berusia 50 tahun ke atas dan usia di bawahnya tidak lagi menggunakannya, maka ada kemungkinan 50 tahun kemudian atau dua generasi lagi bahasa itu akan punah. Jika satu bahasa secara aktif hanya digunakan oleh penutur yang berusia 75 tahun ke atas dan penutur berusia di bawahnya tidak lagi fasih menggunakannya, terutama dalam ranah keluarga, maka diperkirakan 25 tahun kemudian atau satu generasi lagi bahasa itu akan punah. Rumusan hipotesisnya adalah semakin muda usia penutur setiap bahasa tidak lagi fasih menggunakan bahasa ibunya dalam pergaulan sehari-hari, maka semakin cepat bahasa tersebut mengalami kepunahan.

2.Masalah

Jika parameter kepunahan bahasa-bahasa seperti diuraikan di atas ditujukan terhadap bahasa Kayo Pulau, bahasa Tobati, dan bahasa Skouw, maka ketiga bahasa tersebut saat ini berada pada tingkat cukup berbahaya dengan daya tahan hidup antara 20-30 tahun. Pernyataan ini akan lebih menguat jika dikaitkan dengan kondisi Jayapura sebagai Ibukota Provinsi Papua yang senantiasa berkembang. Penutur ketiga bahasa itu berada di wilayah Kota Jayapura yang senantiasa berinteraksi dengan penduduk kota yang berpenutur beragam bahasa dan merupakan sasaran pembangunan dan pengembangan Kota Jayapura. Gejala ini bahkan sedang terjadi yang menyebabkan saat ini penutur aktif bahasa Kayo Pulau, bahasa Tobati, dan bahasa Skouw sudah sangat berkurang sehingga terancam punah.

Dengan demikian, masalah utama dalam penelitian ini adalah Penanganan Bahasa Masyarakat Asli Por Numbay di Kota Jayapura Yang Terancam Punah.

Masalah utama ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana fakta terancam punahnya bahasa Kayo Pulau, bahasa Tobati, dan bahasa Skouw saat ini?

- 2) Apa penyebab terancam punahnya bahasa Kayo Pulau, bahasa Tobati, dan bahasa Skouw?
- 3) Bagaimana gejala terancam punahnya bahasa Kayo Pulau, bahasa Tobati, dan bahasa Skouw?

Hasil temuan dari ketiga rumusan masalah itu kemudian dirumuskan lagi satu pertanyaan masalah menyangkut penanganan untuk pelestarian ketiga bahasa tersebut, yakni:

- 4) Bagaimana strategi untuk menyelamatkan bahasa Kayo Pulau, bahasa Tobati, dan bahasa Skouw dari kepunahan?

Keempat masalah di atas mendorong perlunya dilakukan penelitian secara sistematis dan ilmiah terhadap bahasa masyarakat Asli Port Numbay (bahasa Kayo Pulau, bahasa Tobati, dan bahasa Skouw) di Kota Jayapura.

3. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ialah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif ialah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif: ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri (Bogdan dan Taylor 1992:22, dan Moleong, 2000:3).

Senada dengan Bogddan dan Taylor, menurut Subroto (1992:7), metode kualitatif bersifat deskriptif digunakan untuk mencatat dengan teliti dan cermat data yang berwujud kata-kata, kalimat, wacana, gambar, foto, catatan harian, dan memorandum, *video-tape*. Dari data yang bersifat deskriptif itu peneliti akan melakukan analisis dan membuat generalisasi atau kesimpulan umum yang merupakan sistem atau kaidah yang bersifat mengatur atau gambaran dari orang-orang yang dijadikan subjek penelitian.

4. Situasi Kebahasaan di Papua Khususnya di Kota Jayapura

Tanner (1982) menyatakan bahwa bahasa-bahasa daerah setidak-tidaknya memiliki tiga kecenderungan. Ketiga kecenderungan itu adalah (a) cenderung akan hilang atau punah; (b) cenderung akan bertahan hidup; dan (c) cenderung akan berintegrasi dengan bahasa yang memiliki fungsi yang lebih besar atau luas. Suatu bahasa memiliki kecenderungan punah jika penuturnya tidak setia atau penuturnya sedikit. Suatu bahasa memiliki kecenderungan bertahan hidup jika penuturnya setia, penuturnya banyak, memiliki tradisi tulis, dan ada upaya pembakuan. Contoh penanganan bahasa semacam ini adalah bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Suatu bahasa cenderung akan berintegrasi dengan bahasa yang memiliki fungsi yang

lebih luas jika terjadi dominasi bahasa yang lebih luas terhadap bahasa yang lebih kecil atau bahasa minor.

Pendapat Tanner tersebut masih relevan dengan kondisi bahasa Kayo Pulau, Tobati dan Skouw di Kota Jayapura. Meskipun ada sedikit pergeseran, yang terjadi di Kota Jayapura mirip dengan yang dikemukakan oleh Tanner. Kecenderungan perubahan fungsi bahasa yang terjadi di Kota Jayapura adalah sebagai berikut.

- 1) Di perkampungan, bahasa daerah (Kayo Pulau, Tobati, dan Skouw) masih menjadi pilihan pertama pemakaian bahasa. Namun demikian, bahasa Indonesia sudah menjadi tantangan dan pesaing bagi pemilihan dan pemakaian bahasa, khususnya bagi generasi penerus dalam penggunaan bahasa itu pada semua ranah.
- 2) Di daerah perkotaan ada kecenderungan bahasa Kayo Pulau, Tobati, dan Skouw mulai kehilangan penutur. Pemakaian bahasa cenderung didominasi oleh bahasa komunikasi luas, yaitu bahasa Indonesia, bahkan bahasa asing lainnya.
- 3) Perubahan struktur sosial dan komposisi penduduk, yaitu kaum migran lokal dan regional dengan penduduk pribumi, menyebabkan terjadinya heterogenitas penduduk. Heterogenitas penduduk menyebabkan heterogenitas bahasa. Dalam hal ini peran bahasa Kayo Pulau, Tobati, dan Skouw akan tergerus. Oleh karena itu, bahasa Kayo Pulau, Tobati, dan Skouw memiliki kecenderungan punah lebih besar daripada bahasa yang berstatus sebagai bahasa komunikasi luas.
- 4) Seleksi alamiah akan menentukan bahasa yang bertahan hidup dan yang tidak bertahan hidup atau punah.

Berdasarkan kecenderungan yang terjadi, di Kota Jayapura sudah terjadi dua peristiwa bahasa. Pertama, terjadi kepunahan bahasa daerah; dan kedua, terjadinya devitalisasi (pelemahan untuk mati perlahan-lahan) terhadap bahasa daerah dan berstatus hampir punah. Kelompok bahasa yang mengalami kepunahan adalah bahasa Kayo Pulau, Tobati, dan Skouw. Bahasa-bahasa yang termasuk kelompok satu dan kelompok dua adalah bahasa-bahasa yang sudah mengalami penurunan vitalitas. Stewart (dalam Fishman, ed. 1968:536) menyatakan bahwa vitalitas bahasa adalah *use of the linguistic system by an unisolated community of native speakers* (sistem pemakaian bahasa oleh penutur yang tidak terisolir). Hal itu mengisyaratkan bahwa keberadaan masyarakat penutur asli yang hidup menjadi suatu

hal yang penting bagi kehidupan bahasa itu. Satu bahasa dapat punah atau hilang vitalitasnya karena penutur aslinya sudah tidak ada. Semakin banyak dan penting penutur asli bahasa itu semakin besar keterpakaian bahasa itu dan semakin besar pula peluang untuk standarisasi dan kemandiriannya. Sebaliknya, semakin kecil jumlah dan rendah status penutur asli bahasa tersebut makin besar pula kemungkinan bahasa itu direaksi sebagai alat yang cacat dan tercemar sehingga tidak pantas untuk digunakan.

Berdasarkan pendapat Stewart tersebut dapat disimpulkan bahwa penyebab kepunahan suatu bahasa antara lain : (1) Ketidaksetiaan penutur terhadap bahasa daerahnya sendiri (sikap terhadap bahasanya); (2) Jumlah penutur yang sedikit; (3) Penutur yang terpencar-pencar yang mengakibatkan terpolarisasinya penggunaan bahasa; (4) Rendahnya status sosial penuturnya yang mengakibatkan hilangnya vitalitas bahasa (5) Status bahasa yang mayoritas menjadi bahasa minor; (6) Perubahan komposisi penduduk; (7) Transformasi sosial budaya.

Ketidaksetiaan penutur terhadap bahasanya dan jumlah penutur yang sedikit merupakan faktor yang sangat dominan mempengaruhi kepunahan bahasa. Sementara itu, penutur yang terpencar dengan status sosial yang masih rendah akan memperlemah peran sosial bahasanya. Karena peran sosialnya rendah, daya tahan hidup bahasa itu juga menjadi lemah apalagi jika status bahasa itu adalah bahasa minor.

5. Pergeseran dan Pemertahanan Bahasa

Pergeseran bahasa dan pemertahanan bahasa sebenarnya seperti dua sisi mata uang: bahasa menggeser bahasa lain, atau bahasa yang tak tergeser oleh bahasa lain. Bahasa tergeser adalah bahasa yang tidak mampu mempertahankan diri. Kedua kondisi itu merupakan akibat dari pilihan bahasa dalam jangka panjang dan bersifat kolektif. Pergeseran bahasa berarti suatu komunitas meninggalkan suatu bahasa sepenuhnya untuk memakai bahasa lain. Bila pergeseran sudah terjadi, maka komunitas tersebut secara kolektif memilih bahasa baru.

Prasyarat nyata bagi pergeseran bahasa adalah kedwibahasaan, tetapi banyak masyarakat dwibahasa, diglosianya benar-benar stabil. Barangkali tanda awal pergeseran adalah Bergeraknya satu bahasa (bahasa baru) ke dalam ranah yang semula memakai bahasa lain. Tahap-tahap selanjutnya memiliki beberapa ciri. Bahasa yang sedang bergeser itu mungkin akan dianggap atau dipandang rendah (*inferior*) dibandingkan dengan bahasa baru,

bahkan mungkin dipandang lebih rendah dari satu atau lebih ragam bahasa dari bahasa yang sama. Bisa jadi terdapat ketidakseimbangan dalam peminjaman bahasa: kata-kata dari bahasa baru bebas dipinjam oleh bahasa lama, tetapi arah yang sebaliknya sangat jarang. Jika agama merupakan suatu jalan untuk bergeser ke kelompok lain, pergeseran bahasa akan mendekati sempurna bila kegiatan keagamaan diselenggarakan dalam bahasa baru. Akhirnya, suatu tanda yang tak mungkin salah lagi bagi tahap akhir pergeseran bahasa adalah kalau orang tua yang dwibahasawan mewariskan hanya bahasa baru kepada anak-anak mereka.

Tanda-tanda yang lebih luas lagi adalah adanya kondisi-kondisi sosial ekonomi dalam skala besar yang menyebabkan pergeseran bahasa. Orang yang tinggal di pusat perkotaan, industri, atau perdagangan, kalau dia adalah penutur bahasa minoritas, sangat mungkin bergeser bahasanya ke bahasa yang dipakai secara luas di situ. Orang yang tinggal di wilayah terpencil secara geografis, atau bertani, mempunyai kesempatan lebih baik untuk mempertahankan bahasa minoritas. Terbukanya jalur transportasi dan komunikasi ke kota, dari pusat kebudayaan yang terkait dengan bahasa baru juga mendorong pergeseran.

6. Kepunahan Bahasa

Pergeseran bahasa kadang-kadang mengacu kepada kepunahan bahasa. Hal ini terjadi manakala guyub bergeser ke bahasa baru secara total sehingga bahasa terdahulu tidak dipakai lagi. Ada sedikit kontroversi tentang kepunahan bahasa, yaitu apakah kepunahan bahasa itu mengacu kepada komunitas (guyub) tutur yang hanya terdiri dari penutur-penutur terakhir yang hidup saja, ataukah juga mengacu kepada pergeseran sepenuhnya dalam suatu guyub tertentu tanpa memperhatikan apakah di tempat lain masih ada orang-orang yang memakai bahasa itu? Dorian (1978) mengemukakan, kepunahan bahasa hanya dapat dipakai bagi pergeseran total di dalam satu guyub saja dan pergeseran itu dari bahasa yang satu ke bahasa yang lain, bukan dari ragam bahasa yang satu ke ragam yang lain dalam satu bahasa. Artinya, bahasa yang punah itu tidak tahan terhadap persaingan bahasa lain, bukan karena persaingan prestise antaragam bahasa dalam satu bahasa. Istilah “kepunahan bahasa” itu bisa mencakup pengertian luas atau terbatas.

Ada dua aspek kepunahan bahasa yang menjadi minat pakar linguistik, yaitu aspek linguistik dan aspek sosiolinguistik, dari aspek linguistik, bahasa yang berada dalam saat-saat terakhir pemakaiannya dalam suatu guyub mengalami perubahan-perubahan dalam sistem lafal dan sistem gramatika, dalam beberapa hal terjadi pijinisasi atau penyederhanaan. Dalam

aspek sosiolinguistik, yang dicari adalah seperangkat kondisi yang menyebabkan guyub itu menyerah dalam suatu bahasa bagi kelangsungan bahasa lain.

Menurut Kloss (1984), ada tiga penyebab utama kepunahan bahasa: (a) kepunahan bahasa tanpa pergeseran bahasa (guyub tuturnya lenyap); (b) kepunahan bahasa karena pergeseran bahasa (guyub tutur) tidak berada dalam "wilayah tutur yang kompak", atau bahasa itu menyerah kepada "pertentangan intrinsik prasarana budaya modern yang berdasarkan teknologi"; dan (c) kepunahan bahasa nominal melalui metamorphosis (misalnya suatu bahasa turun derajat menjadi berstatus dialek ketika guyub tuturnya tidak lagi menulis dalam bahasa itu dan mulai memakai bahasa lain).

7. Vitalitas dan Revitalisasi Bahasa

Pembicaraan tentang (re)vitalisasi bahasa tidak terlepas dari konteks konsep/pembicaraan kekhawatiran perubahan bahasa (*language change*), peralihan bahasa (*language shift*) dan kematian bahasa (*language death*). Kematian bahasa terjadi kalau bahasa tersebut tidak ada lagi penuturnya. Ini bisa karena penuturnya sudah mati semua, mungkin karena bencana alam (seperti bahasa Tambora di Sumbawa), atau secara alamiah penutur terakhir mati.

Di Australia sudah banyak bahasa asli aborigin yang mati, atau akan segera mati karena penuturnya sekarang bisa dihitung dengan jari dan sudah tua-tua. Dalam kebanyakan hal, istilah kematian bahasa sering dipergunakan dalam konteks hilangnya bahasa (*language loss*) atau beralihnya penutur bahasa ke bahasa lain (*language shift*). Kematian bahasa adalah titik akhir suatu proses, yang biasanya didahului oleh adanya kontak bahasa (*language contact*) yang mengkondisikan adanya perubuhan dan/atau peralihan bahasa. Proses ini umumnya bersifat pelan dan bertahap dalam jangka waktu yang relatif lama (*gradual*) pada situasi diglosia ke arah bahasa yang lebih berprestise (Dorian 1982; Fasold 1992:213). Adalah suatu kenyataan bahasa selalu berubah. Ini adalah hukum alam, dan tidak bisa dicegah. Yang memprihatinkan adalah jika perubahan tersebut bersifat negatif, dan mengarah pada ke kematian bahasa. Ini sudah terjadi terkait dengan perubahan bahasa minoritas di berbagai belahan dunia dewasa ini (lihat misalnya, Dixon 1991; Krauss 1992). Ini seiring dengan meluasnya penggunaan bahasa (inter)nasional tertentu, misalnya bahasa Inggris di Australia yang mendesak bahasa asli Aborigin, bahasa Rusia di Rusia.

Dalam konteks Indonesia, bahasa Indonesia dan bahasa Melayu regional telah terbukti mengancam bahasa daerah minoritas. Karena bahasa memang selalu berubah, yang diharapkan adalah perubahan yang berkelanjutan yang positif dan stabil. Artinya, bahasa

tersebut tetap dipergunakan oleh masyarakat tuturnya dan diturunkan kepada generasi berikutnya secara berkelanjutan. Inilah konsep/pengertian pemertahanan. Dalam pengertiannya ini, bahasa bertahan secara dinamis walaupun mengalami perubahan (dalam sub-sistemnya, misalnya leksikon, bunyi dan konstruksi-konstruksi tertentu) dari generasi ke generasi. Masalah pemertahanan ini tidak menjadi isu pada kelompok penutur bahasa besar dan kuat. Semuanya berjalan baik, dan pemertahanan tidak dilakukan sepenuhnya secara sadar.

Untuk bahasa minoritas, terpinggirkan, dan terancam punah, masalah pemertahanan bahasa menjadi isu dan mesti dilakukan penuh kesadaran dan dengan berbagai upaya. Karena itu, definisi pemertahanan bahasa yang ada biasanya dikaitkan dengan pemertahanan bahasa untuk bahasa terdesak/minoritas, yang didalamnya terkandung usaha terencana dan sadar untuk mencegah merosotnya penggunaan bahasa dalam kaitan berbagai kondisi tertentu, yang bisa mengarah ke perpindahan bahasa (*language shift*) atau ke kematian bahasa (*language death*), (lihat, Nahir 1984; Marshall 1994). Revitalisasi bahasa bisa didefinisikan sebagai usaha untuk meningkatkan bentuk atau fungsi penggunaan bahasa untuk bahasa yang terancam oleh kehilangan bahasa (*language loss*) atau kematian bahasa (*language death*) (King 2001). Peningkatan bentuk dan fungsi ini bisa empat berupa yang baru, atau bisa juga pembangkitan yang sudah ada yang mungkin sudah ditinggalkan atau menyusut intensitas penggunaannya. Kata kuncinya, vitalitas (bahasa), bisa didefinisikan sebagai penggunaan sistem bahasa oleh sekelompok penutur asli yang tidak terisolasi (Sterwart :536). Dan (re)vitalisasi berarti proses pembangkitan (kembali) vitalitas dari bahasa yang terancam sehingga penggunaan bahasa oleh penutur aslinya bisa berkelanjutan. Ini terkait dengan konsep RLS (*reversing language shift*, atau pembalikan perpindahan bahasa) dari Fishman (1991), dan juga konsep pembaharuan bahasa (*language renewal*) dan pembangkitan bahasa (*language revival*).

8.Fakta/ Gejala Kepunahan Bahasa Port Numbay

Fakta yang ditemukan pada keti (bahasa Kayo Pulau, Tobati/Enggross, dan Skouw) telah terjadi pergeseran penggunaan bahasa dari bahasa daerah Port Numbay (bahasa Kayo Pulau, bahasa Tobati/Enggros, dan Bahasa Skouw) ke Bahasa Indonesia. Berikut adalah fakta dan gejala terjadinya kepunahan bahasa Port Numbay dapat ditelusuri dengan pernyataan sebagai berikut:

- 1) Jumlah penutur bahasa Portnumbay dari waktu ke waktu cenderung terus menurun atau mengalami pergeseran.

- 2) Jumlah penutur bahasa Portnumbay semakin berkurang, yaitu hanya kalangan tua yang secara alami populasinya yang akan terus menurun yang dapat berbahasa daerah, sedangkan kaum muda walaupun populasinya meningkat, namun tidak pernah bertambah jumlahnya sebagai penutur bahasa ibunya.
- 3) Bahasa daerah dianggap kurang dapat memenuhi kebutuhan berkomunikasi di zaman globalisasi ini terutama pada komunitas yang semakin heterogen di kota Jayapura. Melihat realitas yang ada, semakin banyak penutur bahasa daerah yang enggan menggunakan bahasa daerahnya, baik di rumah maupun dalam pergaulan sehari-hari, (ranah penggunaan bahasa daerah semakin menyempit.)
- 4) Bahasa daerah kurang atau tidak lagi digunakan pada ranah keluarga, ranah agama, ranah lingkungan, dan ranah pertemanan sebagai pilihan dalam komunikasi sehari-hari, karena berbagai alasan, seperti pengaruh globalisasi, ketidaksinambungan komunikasi jika berbahasa daerah, perkawinan campur dan sebagainya.
- 5) Generasi muda tidak tertarik untuk menggunakan bahasa daerahnya karena pemakaiannya yang terbatas jika dibandingkan dengan bahasa Indonesia.
- 6) Kaunm muda kurang memiliki upaya untuk mengerti dan memahami bahasa ibunya.

9.Penyebab Terancam Punahnya Bahasa Port Numbay

Kecendrungan yang terjadi di kota Jayapura masyarakat asli penutur bahasa daerah sudah tidak menggunakan fungsi bahasa daerahnya lagi.

Hal-hal berikut penyebab terancam punahnya bahasa Port Numbay;

- 1) Para orang tua tidak lagi mengajarkan bahasa daerahnya kepada anak-anaknya. Dalam hal ini,tidak terjadi pewarisan bahasa Ibu dari orang tua kepada generasi penerus (anak-anak muda)
- 2) Bahasa daerah tidak lagi digunakan dalam komunikasi sehari-hari di rumah. Ini menyebabkan tidak terjadinya transmisi bahasa ibu kepada anak-anak.
- 3) Tejadinya urbanisasi kaum muda.
- 4) Tingginya mobilitas masyarakat penutur
- 5) Banyaknya jumlah suku membuat para penutur bahasa daerah membuat para penutur bahasa daerah mencari bahasa kedua sebagai lingua franca, untuk saling berkomunikasi di antara suku yang berbeda.

10.Rumusan Strategi Penanganan Bahasa dan Sastra Daerah Port Numbay

Bahasa adalah salah satu dari bagian budaya yang harus dijaga kelestariannya. Upaya pelastarian bahasa yang paling mudah dilakukan adalah melalui penggunaan bahasa oleh para

penuturnya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, harus ada upaya penyelamatan terhadap bahasa daerah yang terancam punah. Dalam kaitan itu, langkah-langkah strategis yang perlu diperhatikan untuk penanganan bahasa-bahasa Port Numbay yang terancam punah adalah sebagai berikut. :

- 1) Setiap keluarga penutur bahasa Portnumbay tetap aktif menggunakan bahasa daerah di lingkungan keluarga dan masyarakat penutur bahasa daerah itu dalam komunikasi sehari-sehari
- 2) Pemuka adat diminta agar menggunakan pengaruhnya mendorong anak-anak dan generasi muda untuk tetap setia menggunakan bahasa daerah, selain berupaya menguasai bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing. Mereka perlu diberi pemahaman bahwa bahasa daerah adalah identitas atau jati diri dan kebanggaan masyarakat asli Port Numbay.
- 3) Sikap positif masyarakat Port Numbay terhadap bahasa daerahnya perlu ditumbuhkan sedemikian rupa, selain bermanfaat bagi usaha pembinaan dan pengembangan bahasa daerah tersebut, juga merupakan pengejawantahan kecintaannya, baik terhadap daerah asalnya maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4) Menanankan rasa bangga penutur terhadap bahasa daerahnya, di mulai dari lingkungan keluarga,
- 5) Upaya melestarikan bahasa daerah di Port Numbay, selain . dukungan masyarakat penuturnya, juga diperluan dukungan dari pemerintah daerah, termasuk para pemangku kepentingan di bidang pendidikan dan kebahasaan.
- 6) Pihak-pihak yang dimaksud terutama pihak pemangku kekuasaan dan/atau jabatan di lingkungan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota/pemerintah daerah membuat perda perawatan bahasa daerah.
- 7) Para pendidik atau guru-guru di sekolah, para penyusun kurikulum, pembuat silabus, dan perancang pembelajaran bahasa, sebaiknya segera memikirkan agar memasukkan bahasa daerah ke dalam pembelajaran di sekolah.
- 8) Perlu dipikirkan pembentukan sekolah bahasa berbasis masyarakat khusus untuk anak-anak atau membentuk suatu lembaga yang dapat menangani bahasa daerah di kampung. Lembaga ini dapat berupa sanggar be;ajar bahasa daerah atau sekolah berbasis kampung sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam menjaga pengembangan dan pembinaan bahasa daerah.

- 9) Pentingnya untuk menghidupkan kembali fungsi atau peran bahasa daerah seperti dalam peristiwa budaya dan adat-istiadat.
- 10) Perlu dilakukan/ditingkatkan kegiatan pendokumentasian bahasa-bahasa masyarakat asli Portnumbay, misalnya dalam bentuk kamus, daftar kosakata dasar dan budaya, atau penelitian fonologi, morfologi, dan sintaksis, termasuk penyusunan dan penerbitan buku cerita rakyat masyarakat asli Portnumbay.

11. Penutup

Bahasa port Numbay di prediksi akan punah dalam waktu kurang lebih 50 tahun lagi. Pernyataan ini didasarkan atas umur hidup manusia, berkurangnya jumlah penutur aktif ketiga bahasa Port Numbay, masuknya pengaruh dari luar, lokasi bahasa kota Jayapura adalah daerah perkotaan dan merupakan ibukota provinsi, daya saing yang kurang dari bahasa-bahasa daerah yang ada.

Penanganan bahasa Kayo Pulau, bahasa Tobati, dan bahasa Skouw yang hampir punah dan yang akan punah tidak akan berhasil jika dilakukan setengah-setengah. Untuk itu, perlu dilakukan kerja sama yang sinergis antara pemangku budaya (masyarakat) Kayo Pulau, Tobati, dan Skouw dengan pemerintah daerah. Peran pemerintah daerah menjadi penting karena pemeliharaan budaya daerah menjadi hak otonomi pemerintah daerah. Berbagai alternatif penanganan yang telah disajikan tidak akan berhasil jika para pemangku budaya tidak diikutsertakan dalam proses penanganannya. Oleh karena itu, diharapkan peran aktif pemilik budaya untuk menyelamatkan kebudayaannya. Model penanganan bahasa Kayo Pulau, Tobati, dan Skouw yang hampir punah dan akan punah ini dapat juga diterapkan pada penanganan bahasa-bahasa lain yang memiliki kecenderungan dan karakteristik pola pemakaian bahasa yang sama pada bahasa-bahasa daerah di tanah Papua. Karakteristik itu antara lain, sedikitnya jumlah penutur bahasa dan fungsi bahasa group yang sangat terbatas.

Pemerintah daerah juga diharapkan membuat kebijakan pengembangan dan pelestarian bahasa daerah secara komprehensif. Pengembangan dan pelestarian ini bertujuan meningkatkan mutu bahasa daerah sehingga penutur bahasa daerah memiliki keterampilan, pengetahuan, dan sikap positif terhadap bahasa daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwasilah, A. Chaedar. 1993. *Pengantar Sosiologi Bahasa*. Bandung: Angkasa
- Baker, Colin. 1975. *A Parents' and Teachers' Guide to Bilingualism*. Clevedon, Philadelphia, Adelaide: Multilingual Matters Ltd.
- Best. W. John. 1977. *Research in Education. Third Edition*. Englewood Cliffs. New York Jersey.
- Brown, H. Douglas. 1980. *Principles Of Languages Learning and Teaching*. New Jersey: Prentice-Hall Inc.
- Edwards, John. 1994. *Multilingualism*. Penguin Books.
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Jayapura. 2010. *Profil Kampung*. Jayapura.
- Fautngil, Christ. 2010. *The Marginalisation of The Languages of Papua(makalah)*. Jayapura: Uncen.
- Halim, A. 1976.ed. *Politik Bahasa Nasional I dan II*. Jakarta : Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Halliday. 1975. *Learning Kow to Mean: Exploration The Development Of Languages*. New York: Elsewer.
- Fishman, J.A. 1968.ed. *Readings in the Sociology of Language*. The Hague: Mouton.
- Fishman, Joshua A. 1972. "Domains and the Relationship between Micro and Macrosociolinguistics", dalam Jhon J. Gumperz dan Dell Hymes(penyunting). 1972. *Directions in Sociolinguistics: The Ethnography of Communication*. New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc., hlm. 435—453.
- Jacobson, Romans. 1960. *Linguistics and Poetics*; dalam Sebeoh T. (ed) 1960. *Style In Language*. Cambrige Mass. MIT Press (350-77).
- Kota Jayapura dalam Angka 2010.
- Mbete, Aron Meko. 2001. Paradigma Baru Pemertahanan dan Pengembangan Bahasa Daerah dalam *LINGUISTIKA*, Edisi Keempatbelas, Maret 2001. Denpasar: Program Pascasarjana Magister dan Doktor Linguistik UNUD.
- Maturbongs, Antonius et.al., 2012. "Study Kebahasaan dan Kesastraan Port Numbay di Kota Jayapura". Jayapura: Balai Bahasa Provinsi Jayapura.
- Moleong, J. Lexy. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nababan, P.W.J.dkk. 1984. *Sosiolinguistik: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah.
- Ruskhan, Abdul Gaffar, dkk. (Penyunting). 2006. *Bahasa dan Peta Bahasa di Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.

- SIL International. 2006. *Bahasa-Bahasa di Indonesia (Languages of Indonesia)*. Edisi Kedua. Jakarta: SIL Internasional Cabang Indonesia.
- Sobarna, Cece. 2006. *Pemertahanan Bahasa Daerah: Menuju Kesetaraan Bahasa dalam Bumiku, Bahasaku*, Mahmud, dkk (Ed.) 2006. Bandung: Jurusan Sastra Indonesian Fasa UNPAD.
- Soegono, Dendy *et al.* 2008. *Bahasa dan Peta Bahasa di Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Stewart, W.A. 1968. "A Sociolinguistic Typology for Describing Multilingualism" dalam Fishman J.A. *Readings in the Sociology of Language*. The Hague: Mouton.
- Trudgill, P. 1974. *Sociolinguistics: An Introduction*. Harmondsworth: Penguin.
- Widodo, Supriyanto, dkk. 2007. *Pemertahanan Bahasa Nafri*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Wood, Barbara S. 1981. *Children and Communication*. Englewood Clif. New Jersey: Prentice Hall, Inc.
- Wikipedia.com

Pemartabatan Bahasa dan Budaya Daerah sebagai Upaya Penguatan Jati Diri Bangsa

Rajab Bahry

1. Pendahuluan

Pemartabatan merupakan suatu kata yang menandung arti ada usaha atau kegiatan yang bertujuan menjadikan sesuatu menjadi bermartabat. Hal ini dapat dengan mudah dipahami karena kata dasar pemartabatan adalah martabat yang berarti tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri. Makna pemartabatan adalah proses, cara, atau perbuatan memartabatkan (Depdiknas, 2008). Dengan demikian, pemartabatan bahasa dan budaya daerah bermakna proses, cara, atau perbuatan memartabatkan bahasa daerah dan budaya daerah. Bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan oleh masyarakat daerah sebagai alat komunikasi dalam keluarga. Budaya daerah bermakna budaya yang lahir atau berasal dari masyarakat tertentu.

Dalam ungkapan sehari-hari sering terdengar semboyan “bahasa menunjukkan bangsa”. Semboyan ini bermakna pengenalan atau pemahaman suatu masyarakat dapat ditinjau dari bahasanya. Bahasa merupakan tanda atau identitas dari masyarakat. Hal ini juga mengandung arti bahwa bukan hanya dikenal dari segi suku, melainkan dapat dikenal dari watak pribadi pengguna bahasa tersebut. Memang jelas bahwa bahasa yang digunakan suku tertentu menunjukkan identitasnya dalam level suku, namun dalam suku itu sendiri sudah pasti terdapat beberapa karakter pribadi yang tercermin dari penggunaan bahasanya.

Istilah jati diri merupakan penanda atau ciri khusus menandai seseorang atau segolongan orang, atau bangsa. Dalam KBBI disebutkan bahwa jati diri adalah ciri-ciri, gambaran, atau keadaan khusus seseorang atau suatu benda, atau identitas (2008). Jadi, dapat dikatakan bahwa jati diri merupakan ciri khas seorang, segolongan orang, atau bangsa yang membedakannya dengan orang lain. Semua bangsa dan suku mempunyai ciri khas yang dimiliki dan tentu berbeda dengan ciri khas yang dimiliki bangsa atau suku lain. Ciri khas inilah yang menjadi tanda pengenalan yang membantu kita membedakan satu suku atau bangsa dan ciri ini pula yang membantu kita memahami masyarakat tertentu.

Salah satu aspek yang menjadi jati diri bangsa adalah bahasa. Ini bermakna bahwa satu masyarakat dikenal jati dirinya dari bahasa yang digunakannya. Dalam konteks ini, bangsa Indonesia memiliki jati diri sebagai masyarakat daerah dan juga mempunyai jati diri sebagai bangsa Indonesia. Hal ini terjadi karena masyarakat Indonesia memiliki bahasa daerah masing dan juga mempunyai bahasa persatuan atau bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Dengan demikian, masyarakat Indonesia harus berusaha menjaga dan melestarikan bahasa daerah masing

dan juga mempunyai kewajiban menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia. Hal ini sangat penting karena melestarikan dan menjaga adalah tugas bersama. Misalnya, membina bahasa daerah adalah kewajiban negara, namun negara tidak wajib membina bahasa daerah yang tidak lagi digunakan oleh masyarakat pemakainya. Dengan demikian terkandung makna bahwa kerja sama negara dan masyarakat sangat diperlukan dalam pelestarian bahasa-bahasa daerah.

Aspek yang lain yang dapat menjadi jati diri masyarakat adalah seni budaya, tradisi, tata nilai, perilaku masyarakat, dll. Setiap suku dan bangsa sudah pasti mempunyai budaya, tradisi, tata nilai masing-masing. Budaya yang telah turun-temurun yang mereka miliki merupakan simbol jati diri suku tersebut dan budaya ini perlu dipertahankan agar lebih bermartabat. Terdapat banyak kata-kata bijak, pepatah, pantun yang dimiliki oleh masyarakat yang dapat menjadi pedoman dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dari budaya yang ada pada masyarakat tersebut, orang lain dapat mengenal jati diri mereka dan dapat memahami dan mengenal mereka.

Aspek lain yang penting diperhatikan dalam konteks jati diri masyarakat adalah kearifan lokal. Secara umum kearifan lokal dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Secara konseptual, kearifan lokal merupakan kebijaksanaan manusia yang bersandar pada filosofi nilai-nilai, etika, cara-cara dan perilaku yang melembaga secara tradisional. Kearifan lokal adalah nilai yang dianggap baik dan benar sehingga dapat bertahan dalam waktu yang lama dan bahkan melembaga (Sartini, 2004). Batas kelokalan itu relatif sifatnya. Kelokalan berkait dengan ‘batas lingkungan sosial’ dari keberlakuan ‘substansi kearifan’ dalam ‘praktek’ kehidupan. Salman (2010) memberikan contoh dari ucapan berbahasa Melayu seperti ”kalah jadi abu, menang jadi arang” atau “guru kencing berdiri, murid kencing berlari” menemukan konteks manifestasinya pada lingkungan sosial yang paham bahasa Melayu, dan jika kemudian bahasa itu menjadi bahasa Indonesia, kelokalan itu bermakna Indonesia. Di pihak lain, ucapan “alon-alon asal klakon” (Jawa Tengah) atau “rawe-rawe rantas malang-malang putung” (Jawa Timur) hanya termanifestasi dalam kelokalan di kedua kawasan itu. Itulah *budi bahasa*, yang sekaligus *bahasa budi* menurut Salman.

Secara etimologi kearifan lokal merupakan usaha manusia dengan menggunakan akal budinya (kognisi) untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu. Kearifan lokal merupakan pengetahuan yang eksplisit yang hadir dan berevolusi dalam waktu yang panjang. Kearifan lokal itu merupakan sumber energi potensial dari sistem pengetahuan kolektif untuk hidup bersama secara dinamis dan damai. Secara

substansial, kearifan lokal adalah nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan berlaku serta menjadi acuan dalam bertingkah laku dalam suatu komunitas (Ridwan, 2007).

Upaya penguatan jati diri suatu masyarakat tentu akan bermuara pada penguatan jati diri bangsa. Masyarakat suatu daerah merupakan elemen yang sangat diperlukan dalam setiap negara sehingga segala sesuatu yang bernilai pada masyarakat tentu juga bernilai bagi negara sebagai suatu lembaga yang lebih besar. Dengan demikian, salah satu usaha penguatan jati diri bangsa akan dibahas dari sisi pemertabatan bahasa dan budaya daerah serta kearifan lokal.

Dalam makalah ini akan dibahas bahasa, kekayaan seni atau budaya, dan kearifan lokal yang berkembang di Aceh. Pembahasan akan difokuskan pada pemertabatan bahasa dan budaya daerah Aceh sebagai upaya penguatan jati diri bangsa. Apa saja upaya yang sudah dilakukan atau harus dilakukan agar bahasa di daerah Aceh lebih bermartabat. Selain itu, budaya apa yang menonjol di Aceh yang perlu segera mendapat perhatian oleh pemerintah atau usaha apa yang sedang atau ditempuh dalam mempertahankan budaya daerah tersebut. Selanjutnya, kerifan lokal apa yang perlu dikedepankan di daerah Aceh agar jati diri orang Aceh dapat dipertahankan dan dapat dipahami oleh masyarakat lokal, nasional, dan internasional.

2. Bahasa Daerah di Aceh

Bahasa daerah sebenarnya telah mempunyai dasar hukum yang kuat di Indonesia. Dalam penjelasan pasal 32 dan 36 UUD 1945 disebutkan bahwa (1) budaya bangsa adalah buah budinya seluruh rakyat Indonesia, (2) bahasa-bahasa daerah yang terdapat di seluruh Indonesia termasuk budaya bangsa, dan (3) unsur budaya bangsa tetap dihormati dan dipelihara oleh negara (Anonim, 2002). Akan tetapi, sekarang banyak muncul gejala kurang pedulinya masyarakat terhadap bahasa daerah. Gejala ini juga banyak yang muncul di Aceh. Orang mulai merasa bahwa lebih bermartabat jika mereka menggunakan bahasa Indonesia di rumah tangga, padahal mereka etnik Aceh. Banyak juga orang sudah mulai merasa martabat meningkat jika menggunakan bahasa asing. Seharusnya masyarakat sadar akan fungsi bahasa, baik bahasa daerah, bahasa nasional, maupun bahasa asing.

Dendy Sugono (2007) menyatakan bahwa bahasa ibu (bahasa daerah) menjadi penting karena bahasa itu memiliki peran sebagai sarana pembentukan kepribadian anak-anak bangsa. Pernyataan ini bermakna bahwa bangsa Indonesia dibentuk pribadinya daerah dan juga sumber munculnya rasa nasional melalui bahasa daerah yang diturunkan dari orang tuanya. Dengan demikian, dapat dipahami betapa pentingnya bahasa daerah dalam pembentukan karakter anak bangsa. Hal ini memang sudah terbukti dari tokoh-tokoh pemersatu bangsa Indonesia.

Selanjutnya, Juti (2000) mengutip pendapat Naisbit yang mengatakan bahwa era globalisasi tidak akan dapat menghapus kekhususan suatu bangsa, bahkan justru sebaliknya terjadi yaitu pada era globalisasi kekhususan akan semakin mengental. Salah satu kekhususan pada bangsa adalah bahasa. Jika kita perhatikan kutipan ini, kita setuju hal ini terjadi jika masyarakat satu bangsa sadar betul akan makna jati diri bangsanya. Dalam era global kita sebenarnya harus menunjukkan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Jika tidak mampu, kita akan menjadi korban era global tersebut.

Dari pendapat di atas terlihat betapa pentingnya bahasa daerah bagi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah mengakui bahwa bahasa daerah merupakan kebudayaan bangsa Indonesia. Selanjutnya, bahasa daerah lebih terasa penting lagi bila dikaji pembentukan negara kita yang terdiri atas berbagai suku yang notabene beragam bahasa daerah. Artinya, bahasa daerah masih dipelihara oleh penutur masing-masing, sedangkan sebagai alat perhubungan antarsuku digunakan bahasa nasional.

Salah satu fungsi bahasa daerah adalah sebagai pendukung sastra daerah dan bahasa Indonesia. Fungsi ini merupakan fungsi yang sangat bermartabat. Artinya, bahasa daerah memang digunakan untuk mendukung sastra daerah, yakni segala yang berkaitan dengan sastra daerah diungkapkan oleh masyarakat menggunakan bahasa daerah. Jika, ini terus digunakan bahasa daerah tersebut mempunyai martabat yang tinggi di mata penuturnya dan juga di mata penutur lain.

Selanjutnya, bahasa daerah juga dapat mendukung bahasa Indonesia. Hal ini dimungkinkan terjadi dalam bahasa Indonesia. Pusat Bahasa (kini bernama Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa) memang mengutamakan konsep yang tidak ada dalam bahasa Indonesia hendaknya diambil dari bahasa daerah. Tujuannya agar bahasa daerah lebih dekat dengan masyarakat Indonesia dibandingkan dengan bahasa asing. Selain itu, bahasa menjadikan bahasa daerah bermartabat di negerinya sendiri.

Sejak tahun 2006, Pusat Bahasa membuat program pencarian istilah-istilah dari bahasa daerah yang belum ada dalam bahasa Indonesia. Kata-kata ini digunakan untuk memperkaya bahasa Indonesia. Setiap Balai Bahasa dan Kantor Bahasa di Indonesia ditugaskan untuk menginventaris kata-kata daerah yang akan dicalonkan memperkaya bahasa Indonesia dan akan dicetak dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* edisi keempat. Balai Bahasa Banda Aceh juga mencari istilah-istilah daerah yang diperkirakan belum ada dalam bahasa Indonesia. Pada waktu itu telah dikumpulkan kata-kata dari empat bahasa daerah. Bahasa Aceh mencapai 637 kata, bahasa Gayo 387 kata, bahasa Alas 177 kata, dan bahasa Devayan 9 kata (Bahry, 2008).

Pemasukan kata-kata daerah menjadi istilah nasional merupakan kebanggaan bagi penutur bahasa daerah. Mereka merasa bahasa daerah mereka bermakna bagi bangsa Indonesia. Kebanggaan itu juga pasti terjadi pada masyarakat Aceh. Dengan adanya bahasa-bahasa daerah Aceh yang menjadi istilah dalam bahasa Indonesia, martabat bahasa Aceh tersa meningkat.

Permasalahan yang muncul adalah sedikit sekali kata-kata dari bahasa-bahasa daerah Aceh (yang sudah dicalonkan) diterima menjadi istilah bahasa Indonesia. Dalam KBBI edisi keempat, kata yang diterima menjadi istilah Indonesia yang berasal dari Aceh hanya sekitar 75 kata yang berasal dari bahasa Aceh, 42 dari bahasa Gayo, dan 23 dari bahasa Alas. Dari 1.210 kata yang dicalonkan, hanya 140 kata yang diterima. Jumlah ini sangat sedikit dibandingkan dengan kata yang dicalonkan. Penulis memang sadar bahwa penerimaan istilah tidak sembarangan diterima menjadi istilah bahasa Indonesia. Artinya, harus ada pengkajian yang mendalam dan juga ketelitian yang tinggi dalam analisisnya. Akan tetapi, ada kata yang kemungkinan tidak menjadi perhatian petugas KBBI sehingga tidak masuk. Contoh, ada kata “seunalin” dalam bahasa Aceh yang artinya hadiah yang diberikan khusus kepada orang yang dihormati. Demikian juga kata “ungus” dalam bahasa Gayo yang artinya “makan tebu” hendaknya masuk karena khusus maknanya. Nah, kata ini seharusnya dapat mengisi istilah bahasa Indonesia karena spesifik. Namun, dengan adanya kata-kata bahasa-bahasa daerah Aceh yang menjadi istilah dalam bahasa Indonesia, martabat bahasa Aceh meningkat sehingga mampu memperkuat jati diri masyarakat Aceh menjadi kuat dan akan bermuara pada penguatan jati diri bangsa Indonesia.

3. Kekayaan Seni Budaya

Di daerah Aceh terdapat beberapa etnik di antaranya Aceh, Gayo, Alas, Tamiang, Jamee, Kluet, Haloban, Julu, Sigulai, dan Devayan. Dalam konteks ini dapat disebutkan setiap suku mempunyai bahasa dan bahasa itu melahirkan seni budaya masing-masing. Bahasa sebagai akar budaya perlu kita lestarikan karena memang dilindungi oleh negara. Hal ini jelas tercermin dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, dinyatakan bahasa daerah sebagai salah satu unsur kebudayaan nasional perlu dipelihara dan dikembangkan (Mahsun, 2003). Selain itu, dalam Politik Bahasa disebutkan bahwa bahasa daerah berfungsi sebagai (1) lambang kebanggaan daerah, (2) lambang identitas daerah, (3) alat perhubungan di dalam keluarga dan masyarakat daerah, (4) sarana pendukung budaya daerah dan bahasa Indonesia, serta (5) pendukung sastra daerah dan sastra Indonesia (Alwi, 2003). Dengan demikian, budaya daerah yang berkembang di Aceh semua mengarah pada budaya nasional. Artinya, seni budaya yang menonjol pada masyarakat akan menjadi budaya nasional.

Pengertian kebudayaan dapat dilihat dari pendapat beberapa ahli. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa kebudayaan berarti buah budi manusia yang merupakan hasil perjuangan manusia terhadap pengaruh alam dan zaman. Sutan Koentjaraningrat mengatakan bahwa kebudayaan berarti keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakannya dengan belajar serta keseluruhan hasil budi pekertinya. Takdir Ali Syahbana mengatakan bahwa kebudayaan adalah manifestasi dari cara berpikir manusia. (Widyosiswoyo, 1996). Dari tiga pendapat ahli terdapat inti yang mengisyaratkan bahwa kebudayaan itu merupakan ciptaan manusia dalam menjalani kehidupan. Jadi, setiap masyarakat menciptakan budaya sesuai dengan pola pikir yang mereka miliki dan didasari pandangan hidup atau filsafat yang mereka anut.

Unsur yang ada dalam kebudayaan itu bermacam-macam. C. Kluckhohn mengatakan bahwa kebudayaan universal mengandung tujuh unsur, yaitu sistem religi dan upacara keagamaan, sistem organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, sistem mata pencaharian hidup, sistem teknologi dan peralatan, bahasa, dan kesenian (Widyosiswoyo, 1996). Dari unsur-unsur ini munculah budaya pada masyarakat dan budaya yang lahir itu mungkin saja hanya pada taraf lokal saja. Namun, mungkin saja budaya lokal dari masyarakat bisa mencuat hingga tingkat nasional, dan bahkan sampai pada tingkat internasional.

Jika, satu kebudayaan lokal mampu mencuat pada tingkat internasional, budaya itu telah menjadi budaya dunia sehingga martabat budaya tersebut lebih meningkat lagi. Dalam konteks ini, salah satu budaya dari daerah Aceh, tepatnya dari suku Gayo yang mendiami pedalaman Aceh, telah menjadi budaya internasional yaitu tari Saman.

Saman adalah kesenian suku Gayo yang sudah turun-temurun dimainkan hanya oleh laki-laki dengan cara duduk berjejer dan menepuk dada dengan gerakan ke kiri dan ke kanan ke depan dan ke belakang dan tepukan tangan serta diiringi dengan *sek* dan *jangin* (Bahry 2011). Kesenian Saman belum diketahui secara pasti kapan lahirnya. Masyarakat Gayo hanya meyakini dan mengatakan bahwa sejak mereka lahir sudah ada kesenian ini diaminkan oleh pemuda di tanah Gayo. Ada sebuah kisah yang mungkin kebenarannya perlu ditelusuri. Sewaktu Marcopolo dan rombongan singgah di Perlak, dia tidak berani keluar dari tempat penginapan karena ada suara gaduh (mungkin dia duga ada orang berkelahi). Namun, penduduk setempat mengatakan tidak perlu takut karena suara gaduh itu adalah suara “orang Gayo” sedang menepuk dada sambil bernyanyi. Setelah itu Marcopolo berani keluar dan melihat pemuda Gayo sedang duduk berjejer sambil menepuk dada dan berdendang. Pada waktu itu tidak disebutkan kesenian apa namanya, namun dapat dipercaya bahwa itu tari Saman yang sekarang karena di daerah Perlak hingga sekarang ada suku Gayo, yakni di daerah Lukup, Kabupaten Aceh Timur. Di daerah ini, sampai sekarang masyarakat Gayo masih mempertahankan saman. Buktinya, pada Pekan Kebudayaan

Aceh (PKA) ke-6 tahun 2013 ini Saman dari Lukup, Aceh Timur, mendapat juara kedua dalam festival tari Saman.

Dalam syair saman terdapat nilai budaya dalam hubungan manusia dengan agama, manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan dengan diri (Bahry, 2005). Nilai yang ada dalam syair Saman minimal menggambarkan pola pikir dari masyarakat Gayo yang tertungkap dalam pelaksanaan Saman. Nilai-nilai tersebut akan diwariskan kepada anak cucu dan menjadi budaya yang hidup dalam masyarakat. Hal ini sangat penting diperhatikan oleh kita bersama, terlebih-lebih lagi kesenian ini juga sudah menjadi perhatian dunia. Mungkin saja dunia luar tertarik karena ada sesuatu yang dapat dipetik dari budaya tertentu. Misalnya, Saman sangat menarik dari segi sosial karena adanya saman yang diadu antarkampung yang durasinya satu hari satu malam (*saman serlo sara ingi*) dan ada dua hari dua malam (*saman roa lo roa ingi*). Dalam kegiatan itu biasanya dijalin persahabatan antarindividu dan jalinan ini berlanjut untuk kehidupan selanjutnya. Oleh karena itu, rasa persatuan dan kesatuan antarmasyarakat erat sekali dalam kesenian Saman.

Sejak 24 November 2011 tari Saman telah ditetapkan oleh Unesco sebagai Warisan Dunia Takbenda. Penetapan ini dilakukan Unesco dalam sidangnya di Bali. Dengan penetapan ini, tari Saman merupakan Warisan Dunia Takbenda ke-5 dari enam daftar Warisan Dunia Takbenda dari Indonesia. Warisan Dunia Takbenda dari Indonesia, yaitu Wayang ditetapkan 2003, Kesris ditetapkan 2005, Batik ditetapkan 2009, Angklung ditetapkan 2010, Tari Saman ditetapkan 2011, dan Noken ditetapkan 2012 (Wikipedia). Dengan demikian, pemerintah dan masyarakat Indonesia mempunyai kewajiban untuk menjaga budaya bangsa yang telah diakui oleh dunia.

Setelah ditetapkan sebagai Warisan Dunia Takbenda, tidak berarti penetapan ini tanpa batas. Kata Arif Rahman (BBC, 2011), dalam dokumen Unesco disebutkan setiap empat tahun sekali nanti akan dinilai kembali apakah apa yang diajukan pada empat tahun yang lalu itu konsisten dilakukan atau tidak. Kalau tidak, bisa akhirnya dicoret kembali. Jadi, tari Saman yang sudah bermartabat di mata dunia, mungkin saja akan menjadi biasa-biasa saja jika masyarakat kita lengah dalam memeliharanya.

Pada uraian berikut ini akan dijelaskan sedikit tentang Warisan Budaya Takbenda. Pemda Pekalongan (2012) menguraikan bahwa

Warisan budaya takbenda meliputi praktik dan ekspresi hidup yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tradisi-tradisi yang hidup terus-menerus diciptakan oleh masyarakat dalam menanggapi lingkungan mereka, interaksi mereka dengan alam dan sejarah mereka. Dimensi budaya ini merupakan hal tepat tentang apa yang membuat budaya menjadi kekuatan untuk dialog, pertukaran dan pengertian antara masyarakat.

Menjaga tradisi yang masih hidup akan membantu untuk memanfaatkan kekuatan dari keragaman budaya masyarakat yang lebih kohesif dan dunia yang lebih damai.

Selanjutnya, Direktur Jenderal UNESCO, Irina Bokova, menjelaskan bahwa

“warisan budaya tidak berwujud merupakan jembatan kita dari masa lalu ke masa depan. Ini adalah cara kita memahami dunia dan cara kita membentuknya. Ini adalah fondasi kebijaksanaan dan pengetahuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan bagi semua. Warisan budaya takbenda adalah milik berharga dari masyarakat, kelompok dan individu, sehingga perlu untuk menjaga dan menyebarkannya ke generasi yang akan datang ” (Pemda Pekalongan, 2012)

Dari kedua kutipan di atas, dapat dilihat betapa perlunya pelestarian budaya yang dalam masyarakat kita. Tradisi yang masih hidup dapat menjadi kekuatan dalam masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik. Pada bagian lain Dirjen Unesco bahwa warisan budaya merupakan fondasi kebijaksanaan dan pengetahuan untuk melawujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, kita sepakat bahwa warisan budaya ini perlu dijaga bersama.

Permasalahan yang segera diatasi sekarang ini adalah warisan budaya, dalam hal ini Saman, harus disebarluaskan dan dilestarikan. Pihak Unesco mengatakan bahwa penetapan ini kan ditinjau kembali. Jika, ternyata nanti perkembangannya tidak sesuai dengan apa yang diusulkan dalam proposal ke Unesco, penetapan ini akan dicabut kembali. Penulis yakin ini akan menjadi masalah yang besar bagi Saman. Saman yang dikenal sekarang ini, terutama yang berkembang di Jakarta, bukanlah Saman yang diusulkan ke Unesco. Masyarakat Jakarta, terutama di sekolah sudah mengenal tari “Saman” dengan pemainnya perempuan. Padahal, Tari yang diaminkan wanita dengan duduk berderet (yang sering disebut “Saman” di Jakarta) memang ada di Aceh dan ini berasal dari Aceh Besar. Nama tari tersebut bukan Saman, melainkan *MEUSEKAT* yang diambil dari nama ulama yang menciptakannya yaitu Ibnu Maskawih. Tari ini dikembangkan oleh Tgk. Di Mata Ie di Aceh Selatan (Ishak: 1973). Tari ini juga populer di Aceh Barat dengan nama *Ratep Meusekat*. Sampai sekarang tari masih ada di Aceh dan sering disebut namanya *Tari Ratoh Jaroe*. Dengan demikian, jelas bukan Saman, hanya sekolah di Jakarta saja yang menyebutnya tari Saman.

Kekeliruan ini sudah begitu meluas bahkan ada beberapa perguruan tinggi bidang seni yang sudah menetapkan “tari Saman” sebagai salah satu mata kuliah, namun materinya bukan Saman, melainkan Meusekat. Begitu juga buku Kurikulum 2013 bidang Bahasa Indonesia Kelas IV dicantumkan foto perempuan untuk tari Saman. Jika kekeliruan ini tidak diluruskan, Saman yang menjadi budaya Gayo akan tidak dikenal sehingga filosofi Saman akan hilang dari masyarakat. Mengapa demikian? Jawabannya sederhana karena kapan “Saman” Jakarta akan diadu antarkampung dan kapan mereka dapat mengikat rasa sosial dengan menerapkan

baserinen? Ini tidak mungkin terjadi karena “Saman” yang di Jakarta hanya untuk hiburan semata tanpa memahami filosofi Saman. Akhirnya harus kita prediksi bahwa tari Saman yang sudah bermartabat di tingkat dunia akan tidak dikenal sehingga jati diri masyarakat pemilik Saman tidak dikenal lagi, padahal Saman sudah dikenal oleh dunia luar.

Salah satu solusi untuk pemertabatan Saman adalah dengan cara meluruskan pandangan masyarakat Jakarta, terutama sekolah, yang selama ini menganggap tari yang dibawakan perempuan itu Saman. Tari yang sudah mereka geluti selama ini silakan saja berlangsung, tetapi namanya kembalikan kepada nama asal yaitu tari *Meusekat*. Hal lain yang dapat dilakukan yaitu Dinas Pariwisata Aceh dan juga Jakarta membuat pertunjukan tari tradisional seperti yang dilakukan di Yogyakarta. DIY termasuk daerah yang sangat kaya seni pertunjukan tradisional. Kekayaan seni ini dapat dilihat dalam berbagai atraksi yang diselenggarakan Dinas Pariwisata. Tempat pertunjukan seni tradisional di Yogyakarta ada dua puluh delapan lokasi (Sutiyono, 2010). Dengan adanya pertunjukan tradisional ini, masyarakat tau bentuk tari tradisional Indonesia sehingga tidak terjadi kekeliruan yang menyebabkan seni tertentu tidak bermartabat.

4. Kearifan Lokal dalam Kebahasaan dan Kesastraan Aceh

Bahasa Aceh (BA) merupakan salah satu bahasa daerah di Provinsi Aceh. Bahasa ini digunakan secara aktif sebagai sarana komunikasi antarwarga masyarakat Aceh. Sebagaimana bahasa-bahasa lain di dunia ini, BA mempunyai keunikan-keunikan tertentu. Salah satu keunikannya adalah BA mempunyai khazanah ungkapan yang khas bila dibandingkan dengan ungkapan bahasa-bahasa lain.

Dalam BA, sebagai penguat makna komunikasi tentang suatu konteks sering digunakan ungkapan, terutama ungkapan-ungkapan yang disandarkan tamsilannya pada berbagai referen, seperti benda-benda, manusia, tumbuh-tumbuhan, dan binatang. Ungkapan-ungkapan tersebut umumnya digunakan untuk mendeskripsikan keadaan, perangai, atau tindakan seseorang yang dipandang positif atau negatif, yang harus diikuti atau dijauhi. Ungkapan ini sering disebut *Hadih Maja* dalam bahasa Aceh. *Hadih maja* sebenarnya merupakan representasi kristalisasi nilai-nilai sosial budaya orang Aceh yang berkaitan erat dengan nilai-nilai keagamaan. (Harun, 2009).

Dalam ungkapan BA, penggunaan simbol-simbol verbal yang disandarkan tamsilannya pada referen benda-benda, manusia, tumbuh-tumbuhan, dan binatang dimaksudkan untuk memperlancar komunikasi dan memperkuat makna suatu konteks. Tanpa menggunakan bentuk-bentuk tersebut rasanya akan mengurangi kelancaran komunikasi. Sebagai contoh, seseorang yang berbicara mengenai profesional dan proporsional dalam bekerja tidak lupa menambahkan

sebuah ungkapan untuk memperkuat tentang apa yang telah dikemukakannya. Ungkapan tersebut adalah, “*Geutanyo bèk lagèee bue drop daruet!*” Artinya, ‘Kita jangan seperti monyet menangkap belalang’. Maksudnya, dalam konteks kehidupan terdapat manusia yang ditamsilkan seperti ini, yaitu orang yang serakah atau tamak terhadap suatu materi. Yang sudah ada belum sempat ia nikmati, yang lain terus dicari, bahkan dengan cara-cara yang salah. Satu urusan belum sempat ia kerjakan pekerjaan lain ia tangani. Ungkapan ini ditujukan kepada orang yang tidak fokus terhadap suatu pekerjaan, banyak pekerjaan ditangani, namun satu pun tak ada yang selesai dikerjakan.

Berdasarkan teori memetik dan sosiolinguistik, bahasa (dan sastra) mencerminkan masyarakatnya. Karakter, tabiat, perangai, dan prototipe suatu bangsa, antara lain, dapat ditelusuri melalui rekaman kebahasaan atau kesastraan yang dimiliki bangsa tersebut. Rekaman tersebut merupakan kristal pengalaman yang terjadi secara berulang-ulang sehingga terformulasi dalam rangkaian kata, frasa, klausa, atau kalimat yang secara bentuk dan makna mengikat sebuah gagasan yang memiliki nuansa makna yang sangat kuat. Rangkaian kata, frasa, klausa, atau kalimat yang sarat akan makna itu, antara lain, disebut ungkapan.

Secara leksikal, ungkapan dapat diartikan sebagai rangkaian simbol-simbol verbal untuk merujuk kepada pendeskripsian, penganalogian, dan pengumpamaan suatu karakter, tabiat, perangai, dan prototipe manusia. Jika dikaitkan dengan sastra, ungkapan ini berkongruen dengan majas, yaitu ungkapan yang mengandung makna tambahan atau mengandung makna berbagai perasaan tertentu, dan nilai rasa tertentu yang lazim disebut dengan makna konotatif; makna tersebut merupakan makna sebaliknya dari makna denotatif. Fungsinya adalah sebagai penguat nilai rasa komunikasi dalam suatu wacana, baik wacana lisan maupun wacana tulis.

Dalam masyarakat Aceh, para penyampai pesan, baik lisan maupun tulisan sering membumbui pesan-pesannya itu dengan berbagai ungkapan yang sesuai dengan konteks pembicaraan. Tujuannya tidak lain adalah untuk memantapkan pemahaman tentang apa yang disampaikannya. Sebagai penguat rasa atau makna komunikasi tentang suatu konteks sering digunakan ungkapan yang relevan, sebagai “bumbu penyedap”, terutama ungkapan-ungkapan yang disandarkan tamsilannya pada berbagai referen, seperti binatang, tumbuh-tumbuhan, manusia, dan benda-benda alam lainnya. Ungkapan-ungkapan tersebut umumnya digunakan untuk mendeskripsikan, menganalogikan, dan mengumpamakan karakter, tabiat, perangai, dan prototipe atau tindakan seseorang yang dipandang positif yang harus dianut, atau yang dipandang negatif yang harus dijauhi.

Pemakaian Ungkapan Bahasa Aceh dalam Konteks Kearifan Lokal Aceh

Jika kita perhatikan secara cermat, ada kecenderungan bahwa orang Aceh agak ekstrim dalam hal penggunaan diksi dalam ungkapannya, khususnya ungkapan yang bereferen binatang. Binatang yang dirujuk pun cenderung kepada binatang-binatang yang kurang bersahabat dengan manusia. Ungkapan-ungkapan tersebut dapat bersifat multitafsir, sesuai dengan konteks pemakaiannya. Artinya, penjabaran tafsiran maknanya dapat dirujuk kepada apa atau siapa saja yang sesuai. Kepada yang disebut *uleue* atau *lhan* ‘ular’, bisa bermakna yang suka menelan sesuatu yang besar-besar yang bukan miliknya. Hal ini biasa ditujukan kepada para koruptor dan sebagainya. Di pihak lain, kepada yang suka kepada sesuatu secara berlebihan atau di luar kewajaran juga bisa disebut *uleue*, seperti *that uleue-ih keu inöng* ‘sangat *doyan* ia kepada perempuan’. Cermati beberapa pemakaian ungkapan tersebut dalam konteks berikut!

Ungkapan Bereferensi Flora (Tumbuh-Tumbuhan)

Data 1	:	<i>Meunyo ka pakat lampoh jirat tapeugala.</i>
Arti	:	‘Kalau sudah sepakat, kompleks perkuburan kita gadaikan’
Makna	:	Ungkapan ini mengindikasikan bahwa musyawarah dan mufakat merupakan nilai-nilai kearifan yang selalu dijunjung tinggi oleh masyarakat Aceh. Kompleks perkuburan yang dalam norma agama Islam haram diperjualbelikan pun rasa-rasanya boleh digadaikan jika itu keputusan hasil musyawarah.
Amanat	:	Demi kenyamanan bersama dalam bermasyarakat, kedepankanlah musyawarah dan mufakat dalam memutuskan segala perkara!

Data 2	:	<i>adat meukoh reubong, hukom meukoh purieh adat jeuet barangkaho takong, hukom hanjeuet barangkaho takieh</i>
Arti	:	‘adat terpotong rebung, hukum terpotong bambu ‘adat boleh sembarangan kita seruduk, hukum tidak boleh sembarangan kita kias’
Makna	:	Ungkapan ini mengandung pesan bahwa berkaitan dengan persoalan adat ada kelonggaran atau dispensasi dalam penerapannya, tetapi persoalan hukum tidak boleh sembarangan, harus sesuai dengan norma hukum yang berlaku, khususnya hukum Islam.
Amanat	:	Bagi masyarakat Aceh, hukum Islam merupakan prinsip utama dalam menjalani kehidupan. Maka, jangan bermain-main dengan syariat Islam.

Data 3	:	<i>meunyo le pade di dalam blang, h’an padup na tulo pajoh</i>
Arti	:	‘kalau banyak padi di sawah, tidak seberapa yang pipit makan’
Makna	:	Ungkapan ini sasarannya ditujukan kepada orang, khusus orang kaya, agar jangan takut mengeluarkan sebagian hartanya untuk berinfak atau berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Dari hartanya yang banyak itu, tak akan membuatnya papa jika ia menyumbangkan sebagian kepada orang lain yang membutuhkan.
Amanat	:	Tak akan miskin orang yang gemar menyumbang.

Ungkapan Bereferensi Founa (Binatang)

Data 1	:	<i>lagè keubiri jikap lé asèe</i>
Arti	:	'seperti domba digigit anjing'
Makna	:	Ungkapan ini ditujukan kepada orang yang pasrah dengan penganiayaan yang menimpa dirinya. Dalam konteks kehidupan terdapat manusia yang ditamsilkan seperti binatang ini, yaitu <i>cuek</i> atas kemungkaran yang terjadi di depan matanya; pasrah atas penganiayaan yang menimpa dirinya; tak berani memperjuangkan atau mempertahankan hak-haknya, dan sebagainya. Ibarat seekor domba yang diburu oleh anjing, tanpa perlawanan, sang domba langsung terpojok, takluk, dan membiarkan tubuhnya dimangsa, dicabik-cabik anjing sampai akhirnya sang domba mati. Berbeda dengan tabiat kambing, yang berontak sekuat tenaga jika mengalami nasib seperti domba tersebut meskipun akhirnya ia juga menemukan ajalnya tersebut sebab keberingasan anjing. Matinya domba termasuk mati konyol, sedangkan matinya kambing tergolong "mati syahid". Orang-orang yang berjiwa seperti ini dipandang sangat hina; seperti binatang digigit oleh binatang bernajis.
Amanat	:	Janganlah kita tergolong orang yang bertabiat seperti domba, cegahlah setiap kemungkaran yang terjadi di sekitar kita sesuai dengan kemampuan, perjuangkan/pertahankan hak-hak yang kita miliki .

Data 2	:	<i>lagè bue drop daruet</i>
Arti	:	'seperti monyet menangkap belalang'
Makna	:	Ungkapan ini ditujukan kepada orang yang tidak fokus terhadap suatu pekerjaan; banyak pekerjaan ditangani, namun satu pun tak ada yang beres dikerjakan. Dalam konteks kehidupan terdapat manusia yang ditamsilkan seperti ini, yaitu orang yang serakah atau tamak terhadap sesuatu materi. Ibarat monyet yang sedang menangkap belalang, ditangkapnya satu belalang, dijepitnya di ketiak kiri; lalu ditangkapnya belalang kedua, dijepitnya di ketiak kanan; kemudian ditangkapnya lagi belalang ketiga dengan tangan kiri sehingga belalang pertama lepas, dan seterusnya. Monyet tersebut tetap lapar tanpa dapat memakan seekor belalang pun, padahal jika satu dapat satu dimakan, monyet tersebut sudah kenyang. Yang sudah ada belum sempat ia nikmati, yang lain terus dicari bahkan dengan cara-cara yang keji. Satu urusan belum sempat ia kerjakan pekerjaan lain ia tangani.
Amanat	:	Sempurnakan suatu urusan sebelum beranjak kepada urusan yang lain. Kerjakan sesuatu secara profesional dan proporsional sesuai dengan kemampuan kita.

Data 3	:	<i>uleue beumate, ranteng bek patah</i>
Arti	:	'ular dapat dimatikan, tapi ranting jangan patah'
Makna	:	Prinsip damai tercermin dalam proses penyelesaian sengketa, terutama dalam kehidupan masyarakat Aceh yang memang dilandasi oleh norma dan hukum yang kuat. Hal ini tergambar dalam ungkapan berikut.
Amanat	:	Selesaikan suatu perkara tanpa mengorbankan suatu perkara!

Berdasarkan data yang teramati dapat dikatakan bahwa amanat yang terdapat dalam ungkapan BA (khususnya ungkapan yang bereferen binatang) adalah bahwa orang Aceh memosisikan orang-orang yang memiliki moral tercela setara dengan binatang. Jenis binatang

yang direpresentasikan sesuai dengan tingkat tabiat atau sifat cela yang dimiliki manusia tersebut. Ada kecenderungan bahwa orang Aceh agak ekstrim dalam hal penggunaan diksi dalam ungkapannya. Binatang yang dirujuk pun cenderung kepada binatang-binatang yang kurang bersahabat dengan manusia. Ungkapan-ungkapan tersebut dapat bersifat multitafsir, sesuai dengan konteks pemakaiannya. Artinya, penjabaran tafsiran maknanya dapat dirujuk kepada apa atau siapa saja yang sesuai. Kepada yang disebut *uleue* atau *lhan* ‘ular’, bisa bermakna yang suka menelan sesuatu yang besar-besar yang bukan miliknya. Hal ini biasa ditujukan kepada para koruptor dan sejenisnya. Di pihak lain, orang yang suka kepada sesuatu secara berlebihan atau di luar kewajaran juga bisa disebut *uleue*, seperti *that uleue-ih keu inöng* ‘sangat *doyan* ia kepada perempuan’.

Dalam bahasa Aceh banyak sekali ungkapan yang dapat menjadi jati diri masyarakat. Ada ungkapan yang positif yang dapat menuntun kita dalam menjalani hidup ini. Ungkapan ini dapat menjadi renungan atau juga acuan dalam bertindak dan dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, tidak jarang didapati ungkapan sindiran yang harus kita jauhi dalam kehidupan dan dalam hubungan sosial. Kesemua ungkapan ini sangat berguna jika masyarakat masih memahami bahasa dan budaya daerah. Artinya, ungkapan itu akan tidak bermakna jika masyarakat sudah tidak lagi memelihara bahasa daerah.

5. Penutup

Pemertabatan bahasa-bahasa daerah mempunyai implikasi dalam peningkatan jati diri bangsa secara menyeluruh. Salah satu cara pemertabatan bangsa yang sudah ditempuh Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa adalah usaha penggunaan istilah-istilah bahasa daerah pada istilah baru yang belum ada dalam bahasa Indonesia (hal ini memang tidak bertentangan dengan prinsip pengembangan bahasa yakni bahasa Indonesia dapat diperkaya dengan bahasa daerah dan bahasa asing). Dalam konteks ini, tim penyusun istilah di Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa harus jeli melihat istilah dari bahasa daerah yang potensial menjadi istilah Indonesia. Banyak kata bahasa daerah yang telah diusulkan, namun tidak diterima menjadi istilah Bahasa Indonesia dan mungkin karena kekurangjelian tim pemeriksa.

Salah satu budaya daerah Gayo dari Provinsi Aceh telah dikenal secara luas di dunia. Unesco telah mengakui tari Saman sebagai Warisan Dunia Takbenda. Melalui tari Saman dunia sudah mengenal jati diri salah satu suku di Indonesia. Selain itu, tentu istilah-istilah dalam tari Saman akan dikenal dunia seperti *rengum*, *dering*, *sek*, *penangkat*, *jangin*, *saur*, *uluni lagu*, *anakni lagu*, *bulang teleng*, *baju kantong*, dan lain-lain. Dengan demikian, budaya daerah ini sudah bermartabat di mata kita dan dunia. Oleh karena itu, pengembangan dan penampilannya

tari Saman hendaknya sesuai dengan aslinya, walaupun penarinya boleh dilakukan oleh siapa pun. Masyarakat luas, terutama pelajar di Jakarta, hendaknya belajar Saman yang benar dan juga harus tahu bahwa tari “Saman” di sekolah Jakarta yang dimaikan oleh perempuan bukan tari Saman, melainkan tari *Meusekat*.

Bahasa Aceh kaya akan ungkapan-ungkapan dan ini lazim digunakan masyarakat dalam berkomunikasi. Ungkapan-ungkapan ini bersumber dari filosofi kehidupan orang Aceh. Dengan demikian, untuk memahami jati diri orang Aceh perlu pelestarian ungkapan-ungkapan ini, yang dalam istilah Aceh sering disebut *Hadih Maja*. Hadih maja ini menjadi kearifan lokal bagi masyarakat Aceh. Agar nilai-nilai kearifan lokal yang terdapat dalam masyarakat Aceh dapat teraplikasikan dengan baik, diperlukan tindakan konkret, khususnya dari pemerintah, dalam melestarikannya. Tindakan tersebut, antara lain, melalui penelitian yang komprehensif guna menginventarisasi, mendeskripsikan, dan membukukannya sebagai referensi bagi masyarakat luas.

Daftar Pustaka

- Alwi, Hasan, Dendy Sugono. (ed). 2003. *Politik Bahasa: Risalah Seminar Politik Bahasa*. Jakarta: Pusat Bahasa
- Anonim, 2002. *Undang-Undang Dasar Tahun 1945*, Surabaya: Bina Pustaka Tama
- Bahry, Rajab. 2005. Saman: Sejarah, Pelaksanaan, dan Nilai yang Terkandung di dalamnya. (hasil penelitian tidak diterbitkan) Banda Aceh: Balai Bahasa
- 2008. *Pelestarian Bahasa Daerah Merupakan Usaha Mempererat Persatuan dan Kesatuan Bangsa*. Jurnal Kekelpt. Volume 4, Edisi Desember 2008.
- 2011. *Kamus Besar Bahasa Gayo-Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- BBC. 2011. Unesco Tetapkan Tari Saman sebagai Warisan Budaya http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2011/11/111124_samanunesco.shtml/ Diunduh tgl. 11 Oktober 2013.
- Depdiknas. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: Balai Pustaka
- Harun, Mohd. 2009. *Memahami orang Aceh*. Bandung: Citapustaka Media Perintis
- Ishak, Syamsuddin, dkk. 1973. *PKA – II Pencerminan Aceh yang Kaya Budaya*. Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Pusat Publikasi Pemerintah Departemen Penerangan RI.
- Juti, Muradi. 2000. *Peningkatan Mutu dan Pemsyarakatan Penggunaan Bahasa Indonesia untuk Memperkukuh Jati diri Bangsa dalam Era Globalisasi* (dalam Bahasa Indonesia dalam Era Globalisasi). Jakarta: Depdiknas
- Mahsun. 2003. *Bahasa Daerah Sebagai Sarana Peningkatan Pemahaman Kodisi Kebinekaan dalam Ketunggalikaan Masyarakat Indonesia: Ke Arah Pemikiran dalam Mereposisi Fungsi Bahasa Daerah* (dalam Politik Bahasa). Jakarta: Pusat Bahasa
- Pemda Pekalongan. 2012. Kekuatan Warisan Budaya Tak Benda untuk Kehidupan Dunia yang Lebih Damai. <http://www.pekalongankab.go.id/fasilitas-web/artikel/sosial-budaya/3240-kekuatan-warisan-budaya-tak-benda-untuk-kehidupan-dunia-yang-lebih-damai.html>. Diunduh 11 Oktober 2013.
- Ridwan, Nurma Ali. 2007. “Landasan Keilmuan Kearifan Lokal”. Jurnal *Ibda'*, Vol. 5, No. 1, Januari—Juni 2007:27—38.

- Salman, Darmawan. 2010. "Potensi Kearifan Lokal sebagai Solusi Penyelesaian Konflik dan Kekerasan". Dalam *Telaah Dinamika Pranata Sosial tentang Kearifan Lokal: Etika Hubungan antar Manusia dalam Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata*. Penyunting Suya Yuga dan Madio Sudarmo. Jakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
- Sugono, Dendy. 2007. *Perencanaan Bahasa Daerah dalam Upaya Pemeliharaan Bahasa dan Sastra Daerah*. Makalah Kongres Bahasa-Bahasa Daerah Wilayah Barat, Bandar Lampung.
- Sutiyono. 2010. *Manajemen Seni Pertunjukan Kraton Yogyakarta Sebagai Penanggulangan Krisis Pariwisata Budaya*. Jurnal Bahasa dan Seni, Tahun 38, Nomor 2, Agustus 2010.
- Widyosiswoyo, Sartono. 1996. *Ilmu Budaya Dasar*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Wikipedia. Daftar Refresentatif Budaya Takbenda Warisan Manusia http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Representatif_Budaya_Takbenda_Warisan_Manusia. diunduh tgl. 11 Oktober 2013.

**PEMARTABATAN BAHASA DAN BUDAYA DAERAH
SEBAGAI UPAYA PENGUATAN JATI DIRI BANGSA**

Rajab Bahry

Makalah ini disampaikan pada Kongres Bahasa Indonesia 2013

**BADAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA
2013**

Makalah belum disunting

MENG-INDONESIAKAN--BAHASA MELAYU, MENGGLOBALKAN
BAHASA INDONESIA

Restu Gunawan

MAKALAH KONGRES BAHASA INDONESIA X
Hotel Grand Sahid Jaya, 28—31 Oktober 2013

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JAKARTA 2013

Meng-Indonesiakan--Bahasa Melayu, Mengglobalkan Bahasa Indonesia¹

Restu Gunawan²

A. Bahasa Melayu dalam Tradisi Lisan dan Toponim

Sebelum mulai diskusi ingin saya menyampaikan sebuah kutipan dari pernyataan Soekarno pada tahun 1926 yang mengatakan:

“hendaknya rakyat Marhaen dan kaum bangsawan berbicara dalam bahasa yang sama. Hendaknya seseorang dari satu pulau dapat berhubungan dengan saudara-saudaranya di pulau lain dalam bahasa yang sama. Bagi kita yang beranak pinak seperti kelinci untuk menjadi satu masyarakat, satu bangsa, kita harus memiliki satu bahasa persatuan-bahasa dari Indonesia yang baru.ketika aku mengumumkan pemakaian bahasa Indonesia, kami memerlukan satu sebutan yang dapat dipakai secara menyeluruh untuk kalangan tua dan muda, kaya dan miskin, presiden dan rakyat kecil. Di saat itulah kami mengembangkan sebutan Pak atau Bapak, Bu atau Ibu dan Bung yang berarti Saudara. Selama masa dari zaman revolusi kebudayaan inilah aku mulai dikenal sebagai Bung Karno³.

Dari kutipan tersebut jelas bahwa dalam memperjuangkan sebuah bangsa yang merdeka, diperlukan alat komunikasi yang sama dan disepakati oleh seluruh pendukungnya. Masalahnya adalah bagaimana bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai bahasa dan etnis dapat membuat kesepakatan bersama, tentu bukan perkara mudah.

Bagaimana bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu bisa berproses menjadi alat komunikasi antar bangsa-bangsa di Nusantara? Tentu peran para petualang dan pedagang yang berdiaspora ke berbagai wilayah sangat besar. Hal ini dapat ditelusuri dari keberadaan berbagai komunitas Melayu yang ada di Indonesia melalui tradisi lisan dan toponim misalnya.

¹ Disampaikan dalam Kongres Bahasa Indonesia di Hotel Sahid Jakarta tanggal 28 – 30 Oktober 2013

² Pegawai di Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kemendikbud dan juga sejarawan, email: restu_gunawan@yahoo.com

³ Cindy Adams; *Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*; (Edisi Revisi); Jakarta: Yayasan Bung Karno, 2011, hal. 88

Ketika kita ke Belu, kawasan paling timur dari Nusa Tenggara Timur ada kisah tentang orang Melaka yang menjadi pendiri kerajaan di wilayah Nusa Tenggara Timur:

Dalam sejarah Timor Barat di kenal cerita asal usul pendatang yang berasal dari Malaka yaitu di Belu Selatan dan di Belu Utara. Rombongan dari Malaka, datang secara bergelombang dan berombongan. Rombongan dari Malaka dikenal dengan istilah *Sinan Mutin Malaka*. Migran dari Malaka membangun beberapa kerajaan di Belu. Di Belu Selatan di kenal kerajaan Wehali yang dalam tradisi dikenal dengan istilah Wesei Wehali. Kerajaan ini merupakan kerajaan terbesar dan terkuat di Timor. Di Belu bagian Utara di kenal kerajaan Lamaknen dan kerajaan Jenilu yang didirikan para migran dari Malaka.

Cerita Sinan Mutin Malaka dilansir pertama kali oleh H.J. Grijzen, Kontrolir di Belu pada tahun 1904 dikutip Parera (1971) sebagai berikut:

Ada 4 suku (*hutun rai hat*) mereka meninggalkan Malaka mencari tempat baru dengan menggunakan perahu layar. Secara berantai mereka berlayar melewati beberapa tempat: Jawa, Bali, Makasar, Larantuka dan akhirnya mendarat di Pantai Selatan, Timor Barat, sampai di Amanatun. Sewaktu mendarat mereka mendaki gunung di pinggir pantai untuk melihat keadaan. Mereka melihat suatu dataran luas yang indah dan hijau dekat pantai. Rombongan 4 suku dari Malaka akhirnya mendarat di Besikama Belu Selatan. Ke-4 suku menempati tempat yang berlainan di dataran tersebut. Tiga suku dari rombongan tersebut memiliki pemimpin, tetapi suku yang ke empat tidak memiliki pemimpin. Rombongan dari Malaka ini membawa berbagai benda pusaka dan anakan pohon. Tiap-tiap pemimpin menanam salah satu anakan pohon yang dibawa dari Malaka, di depan kediamannya⁴.

Rombongan pendatang dari Malaka ini membawa barang pusaka antara lain: tanah, kelewang, meriam, gong, gading dan perhiasan. Selain itu ada kisah rombongan migran lain dari Malaka yang dikenal seorang tokoh bernama Rai Taek Malaka. Ia kawin dengan seorang putri lokal bernama Hoar Nai Dahorek. Mereka kemudian melahirkan para raja-raja di Timor.

⁴ Munandjar Widyatmika; *Makalah Seminar Hubungan Kesejarahan Indonesia – Malaysia disampaikan di Johor tahun 2010*; Sinan Mutin Malaka Pendiri Kerajaan Wesei Wehali di Wilayah Belu Selatan, Timor.

Cerita lain, bila kita ke Buton maka tradisi lisan di Sulawesi Tenggara akan mengenal cerita “Sedjarah Melaju” yang bertahun 1021 hijriah atau 1621 M dikisahkan bahwa raja Iskandar, anak raja Darab, Rum bangsanja, Makaduniah nama negerinya, Dzu’l-Karnain gelarannya, hendak berjalan ke matahari terbit bertemu dengan kerajaan Hindi. Rajanya Kida Hindi menyuruh rakyat menyongsong dan berperang dengan pasukan Iskandar. Alkisah Raja Hindi kalah dan masuk Islam, Iskandar dikawinkan dengan anak raja Kida Hindi, bernama Sjahrul Bariah, beranak Aristun Syah Walad al Malik. Berkahwin dengan puteri dari Raja Turkistan, lahir raja Aftas. Raja Askaniat kemudian menurun raja-raja sampai pada Tersil Berderas, yang beristerikan anak Raja Sulan di negeri Amdan Negara. Dari perkahwianan itu lahir tiga anak laki-laki: Raja Hiran (di benua Hindi), Raja Suran (diambil nenenda menjadi raja di Amdan Negara), dan Raja Pandin (raja di benua Turkistan).

Raja Sulan berkuasa di Amdan Negara yang luas wilayahnya, hanya benua Cina saja yang belum takluk. Dalam upaya untuk menyerang negeri Cina, Raja Suran terlebih dahulu tiba di sebuah negeri bernama Gangga Nagara. Gangga Syah Johan, raja negeri itu dapat dikalahkan setelah diputus kepalanya dengan tebasan parang Raja Suran. Perjalanan diteruskan hingga tiba di negeri Ganggaju. Singkat ceritera anak Raja Suran yang bernama Paldu Tani dijadikan raja di Amdan Negara. Dari sosok Raja Suran sebagaimana kisahnya telah dipaparkan di atas tersebutlah Johor, Tumasek, dan Amdan Negara, yang ada hubungannya dengan ceritera yang masih dikenal dalam tradisi lokal (lisan maupun tulisan) di Buton.

Contoh lain, di Batavia (Jakarta), Islam dan masjid rupanya telah menjadi salah satu ciri khas dari kampung-kampung di Jakarta. Untuk itulah ketika Belanda mulai masuk ke Jakarta (Batavia) banyak menemui masjid yang disebutnya sebagai ‘Gereja Melayu’, hal ini setidaknya-tidaknya digunakan sampai akhir abad 18. Begitu juga orang-orang Melayu, ketika datang ke Jakarta mereka mendirikan masjid untuk menyampaikan syiar-syiar dan dakwah Islam.⁵

Orang Melayu mempunyai kedudukan yang tinggi di antara etnis yang lain. Penyebutan wong encik (encik= anda) merupakan sebutan kehormatan bagi orang Melayu. Selain dalam penyebutan, uang Melayu juga digunakan sebagai

⁵ Ridwan Saidi; *Orang Betawi dan Modernisasi Jakarta*; Jakarta: LSIP, 1994, hal. 210

alat tukar misalnya jembatan lima, jembatan tiga dan jembatan dua yang saat ini sudah menjadi nama-nama kampung di Jakarta, penamaannya berasal dari tarif tol lintas jembatan yang masing-masing nilainya 5 kepeng dan 3 kepeng. Bahkan mode pakaian Melayu pun sering digunakan etnis lain. Seperti yang dikeluhkan oleh kapten Jawa. Pada tahun 1701 misalnya dua orang Kapten Jawa, Naya Gatti dan Suta Wangsa mengeluhkan orang-orang sesuku mereka yang berpakaian layaknya orang Melayu atau Bali, karena hal itu berarti melepaskan diri dari kekuasaan kedua kapten tersebut.

Demikian juga pada kelompok masyarakat Melayu diangkat ketuanya dengan pangkat kapten Melayu. Meskipun berjumlah kecil ada tokoh yang menonjol yaitu Entjik Amat. Entjik Amat berasal dari Phatani (Thailand Selatan), ia pulang ke Phatani pada 1656, diganti oleh Entjik Bagus. Entjik Bagus tewas pada perang Banten. Diganti oleh Wan Abdul Bagus⁶.

Berdasarkan contoh tersebut, menunjukkan bahwa diaspora orang Melayu ke berbagai penjuru telah berlangsung lama. Ini tentu berkaitan dengan tradisi bahari yang mereka lalui. Ketika mereka melakukan migrasi ke berbagai tempat telah menjalani pula tradisi dan penggunaan bahasa sebagai komunikasi. Jadi tidak berlebihan jika Bahasa Melayu kemudian menjadi bahasa pengantar bagi bangsa-bangsa di Nusantara. Jadi bahasa Melayu selain digunakan sebagai bahasa pengantar telah pula digunakan dalam penulisan karya-karya sastra, yang beredar di berbagai daerah di Nusantara.

B. Era Pers Berbahasa Melayu: 'Bangsawan Pikiran' dan 'Kaum Muda'

Bahasa Melayu (melayu rendah) telah digunakan oleh Belanda untuk berhubungan dengan penduduk di wilayah timur kepulauan ini dan pelabuhan-pelabuhan di kawasan barat. Ragam bahasa Melayu inilah yang umumnya digunakan dalam pergaulan antara pribumi dan pendatang. Pada awal 1620, bahasa Melayu disamping bahasa Belanda sudah digunakan sebagai bahasa Gereja Protestan di Batavia. Kendati semula hanya merupakan *lingua franca*, penduduk dari berbagai latar belakang etnik di bagian lain Pulau Jawa

⁶ Restu Gunawan; Kampung Melayu Jakarta: Segregasi Sosial dan Konflik Permukiman Perkotaan, makalah seminar Kesejarahan Indonesia – Malaysia 2010

mengakuinya bahwa Bahasa Melayu sebagai kebutuhan. Di kepulauan Maluku bahasa Melayu menemukan bentuknya yang lain. Berkat pemakaiannya oleh para misionaris sebagai bahasa gereja dan pendidikan, bahasa ini diterima luas oleh masyarakat lokal. Belanda karena dipaksa keadaan, sejak zaman VOC sudah menerima bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar tak resmi serta sebagai bahasa administrasi dan perdagangan⁷.

Penyebaran bahasa Melayu mengalami perluasan secara formal berkat adanya pers berbahasa Melayu dan berbahasa anak negeri. Pada Januari 1856 terbit *Soerat Kabar Berbahasa Melajoe* di Surabaya, sedangkan yang berbahasa anak negeri misalnya *Bromartani* di Surakarta terbit pada Januari 1855. Periode antara 1863 dan 1871 adalah titik balik yang menentukan dalam kebijakan pemerintah Hindia Belanda di bidang pendidikan. Menjelang 1863, pendidikan untuk kalangan pribumi dipertanyakan oleh tokoh-tokoh liberal seperti Thorbecke dan Fransen van de Putte yang meminta upaya lebih besar Gubernur Jenderal agar memperjuangkan kondisi yang menciptakan kesempatan yang lebih luas bagi penduduk pribumi untuk memperoleh pendidikan.⁸

Tumbuhnya perhatian terhadap pendidikan kaum pribumi pada 1880-an dan 1890-an mendorong munculnya beberapa jurnal pendidikan. Pada Januari 1887 upaya pertama menerbitkan jurnal untuk guru dan siswa sekolah guru di Hindia Belanda dilakukan oleh P. Schuitemaker di Probolinggo. Diberi nama *Soeloeh Pengadjar*, jurnal itu dipimpin oleh LF. Tuijl Schuitemaker, kepala sekolah pada sekolah guru di Probolinggo. Diterbitkan dalam bahasa Melayu dan Jawa dengan tarif berlangganan 9 gulden per tahun, jurnal bulanan 12 halaman ini terutama dimaksudkan sebagai forum bagi para guru dan murid sekolah guru di sekitar Probolinggo, daerah lain di Pulau Jawa dan luar Jawa. Walau isinya berorientasi pedagogis topik tulisannya meliputi bahasa Melayu, geografi, sejarah dan pelajaran membuat edaran. Jurnal ini hanya bisa bertahan hingga akhir 1895 antara lain karena masalah keuangan.⁹

Pada 1900-an hasrat akan kemajuan yang telah dimulai kurang lebih pada dasawarsa terakhir abad sebelumnya, telah mewujudkan dalam bentuk tumbuhnya

⁷ Ahmad Adam; *Sejarah Awal Pers dan Kebangkitan Kesadaran Keindonesiaan*; Jakarta: Hasta Mitra, 2003, hal. 15.

⁸ Ahmad Adam, hal 36

⁹ Ahmad Adam, hal. 150

masyarakat koperasi yang mendirikan toko-toko priayi di beberapa tempat. Jika pada dasawarsa terakhir abad ke 19 beberapa kelompok dan asosiasi kecil lokal dibentuk oleh kalangan priayi dan guru, pada 1900 kebutuhan akan organisasi masyarakat Jawa yang lebih besar dan beranggotakan kelompok yang lebih luas lebih dirasakan lagi oleh kalangan elit kaum pribumi.

Kepedulian akan kemajuan yang mempengaruhi masyarakat Hindia Belanda memberi Brousson ide mendirikan majalah yang bisa menjadi juru bicara intelektual baru itu. Pada pertengahan 1902, Brousson membuat kesepakatan dengan Abdul Rivai untuk menerbitkan sebuah majalah bergambar di Belanda untuk diedarkan di Hindia Belanda. Pada Juli 1902, *Bintang Hindia* terbit untuk pertama kali didirikan oleh Brousson dan Abdul Rivai di Negeri Belanda.¹⁰ Sebelumnya *Insulinde* 1901 terbit di Sumatera Barat yang berisi tentang hasrat kemajuan. Ini adalah jurnal untuk guru dan pegawai pemerintah¹¹.

Ketika nomor contoh pertama *Bintang Hindia*, Abdul Rivai editornya. Sekalipun Brousson menjadi pemimpin redaksi, Abdul Rivailah yang sesungguhnya melakukan bagian terbesar pekerjaan keredaksian. Brousson sebagai pemegang saham utama serta pemilik majalah menentukan isinya. Abdul Rivai menulis bahwa majalah dua mingguan yang ia sebut *soerat tjerita* mempunyai tujuan ambisius dan mulia untuk memajukan pengetahuan rakyat Hindia Belanda hingga mereka bisa mencapai status 'bangsawan pikiran'.

Dalam edisi contoh, Rivai menyebutkan majalah ini ditujukan bagi pembaca dari seluruh lapisan masyarakat di Hindia Belanda. *Bintang Hindia* ditujukan bagi para aristokrat, kaum pribumi, Arab, pegawai Tionghoa, juga kalangan militer di Yogyakarta, Solo, Madura, Ambon, Ternate dan Banda serta kalangan pedagang, siswa sekolah pimpinan, sekolah guru, sekolah Dokter Jawa dan seluruh pegawai lainnya. Untuk memikat para pembaca Arab dan Tionghoa, Rivai berjanji akan menerbitkan artikel dan berita mengenai Timur Tengah dan Tiongkok, sementara untuk memenuhi kebutuhan pembaca yang ingin belajar bahasa Belanda, ia juga memuat beberapa artikel dalam bahasa Belanda. Bagi Rivai, penerbitan *Bintang Hindia* bukan didorong oleh kepentingan komersial

¹⁰ Ahmad Adam, hal.169

¹¹ Taufik Abdullah; *Schools and Politic: The Kaum Muda Movement in West Sumatra (1927 – 1933)*; Monograph Series Cornell Modern Indonesia Project, New York, 1971, hal. 10.

semata. Dicitak dengan kertas sangat berkualitas harga langganan *Bintang Hindia* 3 gulden pertahun tentu paling murah selama kurun waktu itu. Malah sebaliknya sungguh-sungguh tulus hendak menjadikan berkala ini medium untuk menyuarakan ide-idenya mengenai kemajuan kehidupan moral dan sosial bangsa Hindia. Clockener Brousson juga mempunyai motivasi mulia ketika meluncurkan terbitan ini. Sebagai seorang idealis yang romantik, ia adalah propagandis etis tulen yang bersemangat, yang berkeinginan menumbuhkan jembatan persahabatan dan kesetiaan rakyat Hindia Belanda pada Belanda dan ratunya.

Seruan Rivai ini diulang oleh orang pribumi lain di jajaran redaksi *Bintang Hindia*, Raden Koesomo Joedha yang mendorong orang Jawa khususnya supaya menjadi pembaca dan menjadi pelanggan *Bintang Hindia*.

Dilihat dari isinya, *Bintang Hindia* jelas merupakan majalah berillustrasi pertama yang lewat artikel dan ilustrasinya memberi kesadaran dan dedahan mengenai dunia di luar Hindia Belanda kepada para pembacanya. Sejak terbitan pertamanya 1902, Abdul Rivai telah memberi kesan pada para pembaca mengenai perlunya berubah ke cara hidup yang lebih modern. Dalam artikelnya tentang 'bangsawan pikiran' yang belakangan menjadi slogan di antara generasi yang lebih muda dalam gerakan modernisasi dan kemajuan di Hindia Belanda Abdul Rivai menulis:

Bila kita bandingkan bangsa Hindia dengan bangsa kulit putih maka pelbagai perbedaan, bahkan seperti bumi dan langit. Di Eropa ada dua jenis bangsawan:

Bangsawan usul dan bangsawan pikiran. Bangsawan usul terjadi karena sudah takdir, jika nenek moyang adalah bangsawan maka keturunannya menjadi bangsawan pula. Itulah bangsawan usul. Meskipun pengetahuan dan kepandaiannya seperti kodok dalam tempurung. Sedangkan bangsawan pikiran didapat dengan cara belajar dan mempelajari sendiri sekalian pikiran dan pendapat-pendapat orang-orang yang berilmu dari pasal yang telah dipelajarinya dan dari perkara-perkara lain yang patut diketahui oleh segala orang yang berpelajaran.

Penggolongan Rivai atas intelektual sebagai 'bangsawan pikiran' menunjukkan bahwa ia menempatkan kaum terpelajar di Hindia Belanda (Indonesia) dalam posisi yang sangat penting dalam memimpin bangsanya menuju kemajuan. Rivai membandingkan kelompok ini yang dikatakan akan segera bertambah di Hindia

Belanda. Dengan menyebut bahwa bangsa Eropa telah bersenjata, Rivai mengimbau kaum muda pribumi agar mempersenjatai diri mereka:

Musuh yang bersenjata itu hanyalah boleh dilawan oleh musuh, yang bersenjata pula. Demikian juga ilmu dan kepandaian itu hanyalah cakap dilawan dengan ilmu kepandaian... Walaupun imbauan kepada kaum pribumi untuk mengejar kemajuan menyiratkan bahwa mereka harus bersiap-siap menantang bangsa-bangsa Eropa, Rivai mengemukakannya dalam pengucapan yang ambigu yakni dibarengi pujian atas usaha pemerintah meningkatkan jumlah sekolah-sekolah bagi kaum pribumi...

Kecuali Clockener Brousson dan mantan walikota Tuinenburg pengelola kantor *Bintang Hindia* di Bandung, seluruh editor dan pembaca naskah majalah ini berkebangsaan Hindia Belanda. Majalah itu sangat populer bahkan sampai di rumah-rumah keluarga yang bersahaja pun guntingan gambar kulit dengan *Bintang Hindia* dipajang di dinding. Untuk mendorong para pembaca Tionghoa agar mendukung majalahnya, Rivai juga menerbitkan laporan-laporan mengenai kegiatan Tiong Hoa Hwee Koan. Menurut Rivai warga Tionghoa sudah progresif dan pencapaian mereka harus diikuti oleh kaum cendekia Hindia Belanda. Ia menyatakan:

Bahwa pikiran dan pendapatan bangsa Cina di tanah Hindia sekarang telah terbagi dua: kaum kuno dan kaum muda. Dalam dua tiga tahun ini kita melihat bahwa kedua kaum itu berusaha hendak mengembangkan pikiran dan pendapatan seseorang.¹²

Lewat *Bintang Hindia*, Rivai juga mempopulerkan istilah 'kaum muda' yang didefinisikan sebagai semua orang Hindia (tua dan muda) yang tidak suka lagi mengambil aturan kuno, adat kuno kebiasaan kuno tetapi yang mau memuliakan diri dengan pengetahuan dan ilmu. Di sisi lain istilah kaum tua atau kaum kuno ia tujukan pada mereka yang terobsesi pada kemulian (gila hormat) dan adat Jawa sembah dan jongkok. Dalam analisisnya tentang masyarakat Hindia Belanda, Rivai merasa ada tiga kelompok yang sangat berbeda yaitu orang

¹² Ahmad Adam, hal. 178

awam, bangsawan usul dan bangsawan pikiran. Dari ketiganya, ia yakin hanya kelompok terakhirlah yang bisa memimpin proses modernisasi masyarakat.

Pada 1905, Rivai mengusulkan pembentukan sebuah organisasi besar kaum pribumi yang bisa menyatukan seluruh kaum muda atau elemen progresif. Organisasi itu diusulkan bernama Perhimpunan Kaoem Moeda, dan harus berusaha didirikan cabang di berbagai kota dan daerah untuk membaca kebutuhan kaum pribumi. Dalam usulannya ini, Rivai memberi contoh kaum Tionghoa yang menurut dia telah berhasil mendirikan perhimpunan kaum muda sendiri, yaitu Tiong Hoa Hwee Koan.

Ide untuk membentuk organisasi semacam itu memberi pertanda pembentukan Boedi Oetomo (BU) tiga tahun kemudian. Seperti BU organisasi yang dibayangkan Rivai meletakkan pendidikan dan pengajaran sebagai program utama dalam mengejar kemajuan. Tetapi sebenarnya masyarakat Tionghoa dan Tiong Hoa Hwee Koan-lah yang sangat mempengaruhi Abdul Rivai hingga ia mengusulkan agar gerakan serupa diluncurkan oleh para cerdik pandai bangsa Hindia Belanda. Bagi bangsa Hindia Belanda (Indonesia), *Bintang Hindia* adalah pembuka mata yang mendorong mereka mengubah sikap dan nilai tradisional menjadi lebih modern dan kebaratan. Rivai memang dipandang sebagai penggagas utama ide-ide baru itu dan merupakan penemu istilah 'kaum muda' dan majalahnya juga memuat tulisan para intelektual 'Indonesia' dan Tionghoa yang berbagi cita-cita yang sama dengan apa yang didengungkan Rivai. Artikel dan ilustrasi dalam majalah ini meliputi subyek yang sangat beragam.

Tulisan Rivai yang memberi semangat untuk bangkit dari tidur panjang mendorong kalangan intelektual yang baru muncul untuk membaca *Bintang Hindia*. Kendati punya citra sebagai berkala yang disponsori pemerintah, *Bintang Hindia* berhasil menarik perhatian kaum terpelajar, para guru, pejabat priyayi dan siswa dalam polemik mengenai tradisi dan perubahan dalam masyarakat pribumi. Bagi banyak orang 'Indonesia' *Bintang Hindia* satu-satunya penerbit intelektual sejati pada masa itu, mengekspresikan sentimen yang telah mereka rasakan sejak lama.

Meskipun begitu, menjelang akhir 1906 kelangsungan hidup *Bintang Hindia* terlihat tak jelas. Pada Agustus 1906, surat edaran 6 November 1905, yang meminta para pejabat pemerintah menyokong majalah ini telah ditarik,

begitu pula fasilitas bebas biaya pos. Abdul Rivai, pemimpin redaksi yang melakukan sebagian besar tugasnya di Belanda, sudah makin sibuk dengan studinya. Apalagi timbul perselisihan antara Rivai dan Brousson mengenai orientasi yang harus dipilih *Bintang Hindia*. Rivai ingin isi majalah ini berwatak politis dan menggunakan bahasa yang dekat Melayu Rendah. Selain itu karena kesalahan pengelolaan keuangan Brousson, majalah ini tak bisa meraih keuntungan, namun justru terperangkap tunggakan uang langganan. Untuk memperbaiki organisasi *Bintang Hindia*, Brousson meninggalkan Jawa menuju Belanda pada Maret 1906. Pada 1907 artikel dalam bahasa Belanda menjadi lebih banyak daripada artikel dalam bahasa Melayu. Keluarnya Rivai dari jajaran dewan redaksi pada Juni 1907, untuk berkonsentrasi pada studi kedokterannya, merupakan akhir dari *Bintang Hindia* yang edisi terakhirnya terbit pada 15 Juni 1907. Karena Brousson belum bisa melunasi pinjaman dari pemerintah, ia pun menerbitkan *Bandera Wolanda* pada 1908 sebagai pelanjut *Bintang Hindia*.¹³

Pada awal abad 20 jumlah kaum pribumi yang bekerja sebagai koresponden dan *typesetter* juga makin banyak dan sering menyumbangkan artikel ke surat kabar tempat mereka bekerja. Ada empat belas surat kabar dan enam berkala yang beredar di Hindia Belanda pada 1900. Lima surat kabar berkala berbahasa anak negeri terbit harian. Tetapi hampir semua surat kabar itu hanya melayani pembaca Tionghoa serta menerbitkan berita dan artikel yang disesuaikan dengan selera warga Tionghoa. Bangkitnya kesadaran ke tionghoa-an yang ditandai dengan pembentukan Tiong Hoa Hwee Koan rupanya mendorong kaum Tionghoa peranakan berlangganan surat kabar. Persaingan di antara para penerbit dan editor untuk merebut pembaca Tionghoa yang jumlahnya terus meningkat ini menjadi intens. Para penerbit pribumi pun harus berupaya merebut pembaca dari kalangan non pribumi. Karena itu tak mengherankan ketika berkala pertama milik pribumi, *Soenda Berita* terbit perdana pada 17 Agustus 1903, penerbit dan editornya Raden Mas Tirta Adhi Soerjo mengumumkan bahwa 20 persen keuntungan iklan yang diperoleh akan disumbangkan ke badan-badan sosial. Tujuan Tirta ini jelas untuk meraih pelanggan dan pemasang iklan di kalangan Tionghoa, Indo dan juga Eropa di luar pembaca pribumi. Namun isi berkala ini tetap mengutamakan kepentingan kaum

¹³ Ahmad Adam, hal.181

pribumi. Ketergantungan pers pada pelanggan Tionghoa dan Indo diakui oleh Tirto Adhi Soerjo sendiri.

C. Bahasa Indonesia sebagai alat Perjuangan

Tahun 1920-an 1930-an boleh dikatakan sebagai dasarwarsa ideologi dalam sejarah perjuangan kebangsaan. Dalam proses perdebatan ini cita-cita demokrasi atau kedaulatan rakyat dan keadilan sosial disamping nasionalisme Indonesia Raya (yang mengalahkan nasionalisme lokal semakin tampil sebagai konsensus ideologis¹⁴).

Jika berbicara mengenai hal itu maka suka atau tidak suka kita harus menyebut peran beberapa pemuda Indonesia yang pergi ke Belanda untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi antara lain di Leiden, Amsterdam, Rotterdam, dan Wageningen. Di antara pemuda itu timbullah kebutuhan untuk mendirikan perkumpulan. Para mahasiswa di Belanda mendirikan organisasi mahasiswa mulai 1908 dengan nama *Indische Vereeniging* (Perhimpunan Hindia) pendahulu Perhimpunan Indonesia. *Indische Vereeniging* memasuki suatu periode baru dalam perkembangannya setelah pemimpin *Indische Partij* Dr. Tjipto Mangunkusumo, Douwes Dekker, Suwardi Suryaningrat dibuang ke Belanda pada tahun 1913, karena Gubernur Jenderal Idenburg takut pada gagasan revolusioner mereka. Bersama dengan kedatangan ketiga tokoh tersebut, masuk pula konsep Hindia Bebas dari Belanda dan pembentukan sebuah negara Hindia yang diperintah oleh rakyatnya sendiri.

Para mahasiswa yang tergabung dalam organisasi mahasiswa Indonesia di Belanda membentuk komunitas kecil yang berhubungan erat dengan seluruh mahasiswa yang ada di Belanda. Para mahasiswa muda itu kebanyakan berusia 20 tahunan. Kesepian serta rasa keterasingan budaya merupakan masalah besar yang harus ditanggulangi. Mereka menjalin persaudaraan satu sama lain serta saling membantu dan hanya sedikit bergaul dengan mahasiswa Belanda. Mahasiswa yang membawa serta keluarganya ke negeri Belanda sering mengundang mahasiswa ke rumah mereka untuk makan malam dan menjalin persahabatan.

¹⁴ Taufik Abdullah, *Nasionalisme dan Sejarah*; Bandung: Satya Historica, 2001, hal 40

Pada tahun 1920-an datang lagi mahasiswa ke Belanda seperti Darsono, Semaun, Abdul Muis. Kehadiran mereka sangat mempengaruhi sesama teman seperjuangan yang lebih muda. Para pendatang baru itu dengan cepat mendominasi *Indische Vereeniging* dan menyalurkan anggotanya ke dalam kegiatan aktif sehubungan dengan masalah baru di Indonesia. Dengan politik sikap ini maka keanggotaan *Indische Vereeniging* mulai mengalami perubahan.

Tahun 1924 atas perjuangan Hatta, *Indische Vereeniging* yang kemudian berubah menjadi *Indonesische Vereeniging* pun mengubah namanya menjadi Perhimpunan Indonesia. Organnya bernama 'Indonesia Merdeka' sedangkan slogan perjuangan pun mengalami radikalisasi pula 'Indonesia merdeka sekarang'. Tak lama kemudian di Bandung, *Indonesische Studieclub* berdiri dan kemudian 1927 di bawah pimpinan Soekarno mengubah namanya menjadi Perserikatan Nasional Indonesia.¹⁵

Dalam kata pengantar edisi pertama (1924) jurnal 'Indonesia Merdeka' sebagai ganti 'Hindia Poetra', dikatakan bahwa:

Dalam kata 'merdeka' terkandung ungkapan tentang tujuan dan usaha keras kami dan mulai sekarang dan seterusnya, 'Indonesia Merdeka' akan menjadi semboyan perjuangan Pemuda Indonesia. 'Merdeka' adalah cita-cita umum semua umat manusia, setiap bangsa mempunyai keinginan kuat untuk hidup merdeka. Gagasan tentang kemerdekaan tidak berbeda dari satu bagian dunia ke bagian dunia lainnya. Kemerdekaan adalah cita-cita umat manusia dan bukan cita-cita barat, seluruh bumi ini adalah kuil kemerdekaan.¹⁶

Indische Vereeniging resmi menjadi sebuah organisasi politik yang radikal pada bulan Januari 1925. Dalam rapat yang diselenggarakan pada 3 Pebruari 1925, nama baru Perhimpunan Indonesia resmi dipakai. Cara yang dipakai para pemimpin Perhimpunan Indonesia dalam menjalankan tugasnya adalah mengembangkan suatu ideologi nasionalis yang baru yang khas Indonesia bebas dari batasan Islam atau komunisme yang akan lebih memecah bangsa Indonesia. Ada empat pikiran pokok dalam ideologi yang dikembangkan Perhimpunan Indonesia yang menjadi dasar dari arus utama gerakan nasionalis setelah PKI ditindas. Dengan memperhatikan masalah sosial ekonomi, ideologi itu

¹⁵ Sartono Kartodirdjo; *Sejak Indische Sampai Indonesia*; Jakarta: Kompas Gramedia, 2005, hal. 9

¹⁶ John Ingleson; *Perhimpunan Indonesia dan Pergerakan Kebangsaan*; Jakarta: Grafiti Pers, 1993, hal. 9

menempatkan kemerdekaan sebagai tujuan politik yang utama: kesatuan nasional, perlunya mengesampingkan perbedaan khas dan bersifat kedaerahan serta membentuk front kesatuan melawan Belanda untuk menciptakan suatu front kesatuan untuk melawan Belanda. Kedua solidaritas, menghindari perbedaan antara orang Indonesia sendiri, menyadari besarnya pertentangan kepentingan antara penjajah dan yang terjajah dan perlunya kaum nasionalis mempertajam konflik antar ras kulit sawo matang dan ras kulit putih. Ketiga non kooperasi, yaitu perlunya menyadari bahwa kemerdekaan tidak dapat diberikan secara cuma-cuma oleh Belanda tapi harus direbut oleh bangsa Indonesia sendiri. Keempat adalah swadaya yaitu menolong diri sendiri dengan mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri.¹⁷

Selama berdiri, Perhimpunan Indonesia memegang posisi penting dalam gerakan kebangsaan Indonesia dan kedudukan ini sangat sulit dibayangkan jika melihat jumlah anggotanya. Pada tahun 1926, misalnya jumlah anggotanya baru 38 orang. Perhimpunan Indonesia adalah katalisator yang mengarahkan putra-putra golongan elit Indonesia agar membuang rasa rendah diri yang dipaksakan oleh penguasa kolonial dan untuk pertama kalinya menuntut kemerdekaan. Sumbangan Perhimpunan Indonesia terbesar adalah usahanya mengembangkan ideologi sekulernya yang menjadi dasar dari arus utama gerakan kebangsaan setelah tahun 1927. Perhimpunan Indonesia tidak hanya mengembangkan ideologi, sehingga anggota-anggotanya jadi terpikat oleh ide dan semangat nasionalisme baru. Ketika para anggotanya pulang ke tanah air, mereka tetap menjalankan aktifitas politik. PNI hampir seluruhnya adalah ciptaan Perhimpunan Indonesia demikian juga Partindo dan PNI baru. Selain itu, ada juga yang masuk Budi Utomo, Partai Sarekat Islam dan masuk kelompok studi di Surabaya.¹⁸

Pemakaian kata 'Indonesia' oleh anak-anak muda kala itu tidak hanya sebagai simbol tetapi menjadi alat perjuangan untuk menyatukan berbagai etnis yang ada di Indonesia mulai dari Papua sampai Aceh yang bahasa, adat istiadat dan kepercayaannya berbeda-beda. Disinilah *imagine community* telah mewujudkan dalam satu tatanan baru bernama 'Indonesia' yang berbangsa satu, bertanah air

¹⁷ Sartono Kartodirdjo, hal. 16

¹⁸ Sartono Kartodirdjo, hal 103

satu dan berbahasa satu dengan didukung oleh sejarah, adat istiadatnya masing-masing.

Kalau pada masa kolonial perlawanan terhadap penjajah menjadi katalisator dalam mengindonesiakan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, apakah mungkin dalam era saat ini bahasa Indonesia mampu menglobal dalam persaingan antar bangsa? Ataupun bahasa Indonesia akan kalah bersaing dengan bahasa Melayu yang merupakan bunda kandungnya? Untuk itu perlu berbagai media dan strategi untuk mewujudkannya.

Daftar Pustaka

- Ahmad Adam; *Sejarah Awal Pers dan Kebangkitan Kesadaran Keindonesiaan*; Jakarta: Hasta Mitra, 2003.
- Cindy Adams; *Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*; (Edisi Revisi); Jakarta: Yayasan Bung Karno, 2011
- John Ingleson; *Perhimpunan Indonesia dan Pergerakan Kebangsaan*; Jakarta: Grafiti Pers, 1993
- Munandjar Widyatmika; *Makalah Seminar Hubungan Kesejarahan Indonesia – Malaysia disampaikan di Johor tahun 2010*; Sinan Mutin Malaka Pendiri Kerajaan Wesei Wehali di Wilayah Belu Selatan, Timor.
- Restu Gunawan; *Kampung Melayu Jakarta: Segregasi Sosial dan Konflik Permukiman Perkotaan*, makalah seminar Kesejarahan Indonesia – Malaysia 2010
- Ridwan Saidi; *Orang Betawi dan Modernisasi Jakarta*; Jakarta: LSIP, 1994, hal. 210
- Sartono Kartodirdjo; *Sejak Indische Sampai Indonesia*; Jakarta: Kompas Gramedia, 2005
- Taufik Abdullah, *Nasionalisme dan Sejarah*; Bandung: Satya Historica, 2001
- Taufik Abdullah; *Schools and Politic: The Kaum Muda Movement in West Sumatra (1927 – 1933)*; Monograph Series Cornell Modern Indonesia Project, New York, 1971

DIPLPOMASI KEBAHASAAN SEBAGAI UPAYA PENGUATAN IDENTITAS DAN MARTABAT BANGSA¹

(ROBERT SIBARANI)²

1. Pengantar

Ada dua fungsi bahasa, yakni fungsi komunikatif dan fungsi simbolik (Edwards, 1985:17). Fungsi komunikatif sebuah bahasa menyangkut fungsi bahasa sebagai alat komunikasi, sebagai alat interaksi, sebagai alat penghubung atau sebagai alat pemersatu, sedangkan fungsi simbolik menyangkut fungsi bahasa sebagai lambang kelompok, sebagai lambang identitas, bahkan sebagai lambang kebanggaan kelompok.

Kita tahu bahwa bahasa Indonesia menjadi sangat penting dalam sentimen nasional karena daya simbolismenya yang sangat kuat selain karena aspek komunikatifnya. Seringkali fungsi simbolik suatu bahasa dengan kuat dimiliki seseorang, tetapi fungsi komunikatifnya tidak dimilikinya. Kedua fungsi bahasa itu harus ditumbuhkan dalam usaha menetapkan dan memantapkan kedudukan bahasa Indonesia.

Fungsi komunikatif bahasa Indonesia terjadi di beberapa ranah penting. Bahasa Indonesia dipergunakan sebagai alat komunikasi di situasi resmi atau formal, misalnya proses belajar-mengajar di sekolah atau kuliah, interaksi di kantor, pertemuan resmi seperti seminar, interaksi orang yang berasal dari etnik yang berbeda, dan interaksi generasi muda di perkotaan. Dengan fungsi komunikatif yang demikian, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional sangat luas tanpa mengambil alih fungsi komunikatif bahasa etnik.

Berdasarkan fungsi komunikatifnya, sebuah bahasa digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan informasi atau pesan dari

¹ Makalah yang disajikan dalam Kongres Bahasa Indonesia, 28 – 31 Oktober 2013 di Jakarta.

² Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sumatera Utara.

pembicara kepada pendengar. Sebagai alat komunikasi, setiap bahasa digunakan untuk menyampaikan pesan atau amanat dari penyapa (pengirim) kepada pesapa (penerima). Komunikasi melalui bahasa dapat dikatakan berhasil apabila amanat atau pesan yang disampaikan penyapa dapat diterima pesapa seperti apa yang dimaksudkan penyapa. Dari segi fungsi komunikatif, bangsa Indonesia berhasil karena hampir semua warga Indonesia dari kota sampai ke pelosok-pelosok telah mampu berbahasa Indonesia, paling tidak secara pasif. Dalam hal ini, bahasa Indonesia berperan sebagai penyampai informasi utama atau, dengan kata lain, bahasa Indonesia memiliki fungsi komunikatif utama di Indonesia.

Fungsi simbolik bahasa Indonesia adalah identitas nasional. Dengan berbahasa Indonesia, orang akan dapat mengetahui bahwa pembicara itu orang Indonesia. Hal itu akan jelas terlihat apabila ada orang Indonesia yang berbicara di luar negeri; orang yang dapat berbicara bahasa Indonesia akan cepat tahu bahwa mereka orang Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi penanda ke-Indonesia-an. Dengan bahasa Indonesia yang dimilikinya, seseorang memiliki identitas nasional, sebuah penanda kebangsaan, penanda kewarganegaraan, yakni bangsa Indonesia dan warga negara Indonesia.

Penentuan identitas nasional tidak selalu berjalan mulus. Sering sekali penentuan identitas nasional mengalami tantangan untuk menentukan identitas nasional. Perjuangan di antara komunitas yang berbeda sering berujung pada konflik sebagaimana yang disampaikan oleh Woodward, *“In global arena, national identities are contested, and struggles between different communities are represented by conflicting national identities – often with disastrous consequences...”* (1997:1). Untunglah, penentuan bahasa Indonesia, yang berasal dari bahasa Melayu Riau, untuk menjadi salah satu identitas nasional berjalan mulus meskipun dengan berbagai perjuangan yang panjang dalam sistem pendidikan bahasa Indonesia di tanah air.

Kebanggaan berbahasa Indonesia cukup tinggi bagi masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia merasa bangga dengan bahasa

Indonesianya. Kebanggaan berbahasa Indonesia lebih tinggi daripada berbahasa etnik sekarang ini. Para orang tua di desa merasa bangga kalau dia dapat berbahasa Indonesia meskipun secara terbata-bata.

Bahasa sebagai identitas bangsa tersebut dapat dikuatkan dengan diplomasi kebahasaan sekaligus untuk memperkuat martabat bangsa sebagaimana yang diuraikan berikut ini.

2. Diplomasi Kebahasaan sebagai penguatan Identitas dan Martabat Bangsa

Berkenaan dengan pokok permasalahan ini, istilah diplomasi kebudayaan (*cultural diplomacy*) lebih sering terdengar daripada diplomasi kebahasaan (*language diplomacy*). Sebagai bagian dari diplomasi kebudayaan, diplomasi kebahasaan merupakan media diplomasi untuk memperkenalkan Indonesia sekaligus membangun citra bangsa di mata masyarakat internasional serta mempersatukan suku-suku bangsa di dalam negeri.

Diperlukan upaya-upaya nyata untuk meningkatkan diplomasi kebahasaan terutama bahasa Indonesia di mata masyarakat dunia dan di mata segenap anak bangsa untuk menguatkan identitas dan martabat bangsa sebagaimana yang terlihat berikut ini.

Pertama, upaya menjadikan bahasa Indonesia atau bahasa Melayu menjadi bahasa resmi di pertemuan internasional seperti pertemuan di tingkat ASEAN dan pertemuan PBB. Dengan penggunaan bahasa Indonesia pada pertemuan-pertemuan internasional tersebut, itu sekaligus pengakuan identitas dan penguatan martabat bangsa.

Kedua, upaya meningkatkan studi Indonesia termasuk bahasa Indonesia di luar negeri terutama di negara-negara di benua Eropah,

Amerika, dan Australia. Ini sangat penting karena semakin banyak studi Indonesia termasuk bahasa Indonesia di luar negeri, maka semakin banyak orang yang tahu Indonesia. Beberapa tahun belakangan ini, beberapa studi Indonesia mengalami penutupan. Pemerintah Indonesia perlu melakukan diplomasi politik untuk tetap mempertahankan studi Indonesia tersebut.

Ketiga, upaya meningkatkan misi seni budaya Indonesia yang berbahasa Indonesia ke luar negeri sebagai sarana promosi, pencitraan, dan diplomasi politik atau kebudayaan.

Keempat, upaya membuka program-program radio berbahasa Indonesia di luar negeri terutama di negara-negara yang banyak warga negara Indonesia. Ini sangat penting untuk memperkuat rasa ke-Indonesiaan warga Negara Indonesia di luar negeri.

Kelima, upaya memperbanyak diskusi dan pertemuan rutin berbahasa Indonesia “Meja Indonesia” di Universitas Leiden, Belanda. Pertemuan rutin seperti ini memperkuat penggunaan bahasa Indonesia di luar negeri.

Keenam, melakukan expo atau pameran dengan label bahasa Indonesia di dunia internasional. Expo atau pameran bisa dianggap sebagai ajang untuk pamer kebolehan dalam bidang karya unggulan, produk andalan, karya puncak, atau karya mutakhir dari masing masing negara atau bangsa di dunia. Karena expo internasional sering kali diikuti oleh ratusan negara untuk ajang unjuk gigi, maka Indonesia perlu mempublikasikan dan menduniakan kehebatan asset atau karya Indonesia untuk mengangkat martabat bangsa Indonesia.

Ketujuh, upaya memberikan kursus gratis bahasa Indonesia bagi warga negara asing perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri seperti di kedutaan besar maupun konsulat.

Demikianlah beberapa upaya yang perlu dilakukan agar diplomasi kebahasaan dalam hal ini bahasa Indonesia dapat memperkuat identitas dan martabat bangsa Indonesia. Namun, tidak tertutup kemungkinan

masih ada upaya lain yang perlu dilakukan untuk menjadikan diplomasi kebahasaan sebagai penguat identitas dan martabat bangsa Indonesia.

3. Penutup

Semua upaya yang dipaparkan pada makalah singkat ini adalah sekedar gagasan yang didasarkan atas pengalaman dan “mimpi” untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai diplomasi kebahasaan untuk memperkenalkan Indonesia dan sekaligus mengangkat citra bangsa. Dengan demikian, diplomasi kebahasaan yang dimaksud di sini adalah diplomasi yang menggunakan bahasa sebagai sarana pendekatan. Diplomasi kebahasaan juga dapat diartikan sebagai suatu upaya pelaksanaan diplomasi dengan menggunakan bahasa dalam hal ini bahasa Indonesia sebagai media pendekatan untuk mencapai sasaran dan tujuan pelaksanaan politik luar negeri, khususnya dalam memelihara dan meningkatkan identitas dan martabat bangsa Indonesia di dunia internasional.

Terima Kasih!

DAFTAR PUSTAKA

- Danesi, Marcel. 2004. *A Basic Course in Anthropological Linguistics*. Toronto: Canadian Scholars' Press.
- Dashefsky, Arnold (Ed.). 1975. *Ethnic Identity in Society*. Chicago: College Publishing Company.
- Duranti, Alessandro (ed.). 1997. *Linguistic Anthropology*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Duranti, Alessandro. 2001 *Linguistic Anthropology*. Massachusetts: Blackwell Publishers
- Edwards, John. 1985. *Language, Society, and Identity*. Oxford: Basil Blackwell.
- Foley, William A. 1997 *Anthropological Linguistics: An Introduction*. Massachusetts: Blackwell Publishers.
- Halim, Amran (ed.). 1984 *Politik Bahasa Nasional*. (Jilid 1 & 2). Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Hardjosoemantri, Koesnadi. 1991/1992. "Kebudayaan Indonesia di Luar Negeri" dalam *Majalah Kebudayaan* (No.2, Tahun I), hal. 43-55.
- Hickerson, Nancy Parrott. 1980. *Linguistic Anthropology*. New York: Holt Rinehart and Winston.
- Hutchinson, John and Anthony D. Smith (Ed.).1996. *Ethnicity*. Oxford: Oxford University Press.
- Royce, Anya Peterson. 1982 *Ethnic Identity: Strategies of Deversity*. Bloomington: Indiana University Press.
- Salzmann, Zdenek. 1993. *Language, Culture & Society: An Introduction to Linguistic Anthropology*. Oxford: Westview.
- Sedyawati, Edi. "Strategi Kebudayaan Dalam Kaitan Dengan Beberapa Pokok Permasalahan Budaya" dalam *Majalah Kebudayaan* (No.5, Tahun III), hal. 6-9.
- Sibarani, Robert. 1992 *Hakikat Bahasa*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sibarani, Robert. 2004. *Antropolinguistik*. Medan: Poda.

Diplomasi Bahasa untuk Memartabatkan dan Memanusiakan Peserta Didik dalam Era Modern

oleh

Rosida Tiurma Manurung

Universitas Kristen Maranatha

rosidatm@gmail.com

Abstrak

Diplomasi bahasa mengandung pengertian bahwa praktik bahasa atau seni berbahasa yang telah disepakati dan dinegosiasikan dapat dijadikan sebagai alat yang strategis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Oleh karena itu, bahan ajar pun harus dimaknai, diisi, dan disisipi diplomasi bahasa yang diimplementasikan dalam praktik bahasa atau seni berbahasa yang mengandung pesan-pesan yang memanusiakan. Jadi, praktik bahasa atau seni berbahasa dalam bahan ajar bukan sekadar materi yang “tidak ber-roh, hampa, dan kosong” jika demikian, bahan ajar akan seperti pepesan kosong yang tidak memiliki kemanfaatan bagi kehidupan dan penghidupan manusia. Bahasa sebagai alat untuk “memartabatkan”, artinya peserta didik dapat memiliki kedudukan sebagai manusia yang terhormat dalam konteks ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan “memanusiakan”, artinya menjadi manusia seutuhnya, dalam pendidikan pada era modern ini dianggap sebagai solusi yang paling tepat sebab aktivitas pendidikan memiliki cara kerja bukan seperti mesin sehingga peserta didik, guru, juga bahan ajar harus “dimartabatkan” dan “dimanusiakan” agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal serta sesuai dengan yang visi dan misi yang diemban. Dalam penelitian ini, akan dibahas bagaimana diplomasi bahasa dapat memartabatkan peserta didik untuk menjadi insan yang humanistik. Dalam penelitian ini, akan dibatasi diplomasi bahasa dalam materi ajar pengajaran bahasa. Diharapkan melalui pengajaran bahasa sebagai praktik atau diplomasi untuk memanusiakan, peserta didik juga guru dapat menemukan kembali “martabat” dan “sisi kemanusiaan” yang boleh jadi sudah hilang dan tidak terdeteksi dalam dirinya.

Kata kunci: diplomasi bahasa, alat untuk memartabatkan dan memanusiakan, guru, peserta didik, era modern

I. Hakikat Diplomasi Bahasa

Pada era mutakhir yang modern, era global, zaman yang berteknologi tinggi dan serba digital, yang ditandai dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, manusia diperlakukan seperti mesin yang tidak punya hati, tidak memiliki rasa kemanusiaan, dan tidak memedulikan lingkungan sekitarnya. Oleh sebab itu, pendidikan harus dikemas dengan muatan yang berperspektif humanisme. Pendidikan tidak boleh dimaknai sebagai aktivitas atau kegiatan belajar-mengajar di kelas saja. Pendidikan haruslah mengacu kepada berbagai proses dan aktivitas yang harus bersifat produktif, kreatif, pengembang *skill*, kepribadian, integrasi, keprimaan, sampai pengokoh moral dan spiritual. Pendidikan harus diarahkan dan dikelola dengan tujuan yang jelas, yaitu mampu mengembangkan nilai-nilai positif pada peserta didik. Melalui pendidikan, harus dapat memunculkan sosok-sosok yang memiliki karakter dan kepribadian yang kokoh dan teruji, baik dalam bidang keilmuan maupun dalam bidang kemanusiaan.

Pendidikan yang memanusiakan berarti dapat menghasilkan peserta didik dalam era modern yang mampu memiliki rasa “kemanusiaan”, misalnya menolong sesama, berempati, menjunjung tinggi kejujuran, saling berbagi, setia, mau mengambil pelajaran berharga, gigih dan ulet, menghargai keberbedaan, toleransi, menghargai sesama, memiliki kesabaran, membalas kejahatan dengan kebaikan, selalu mengedepankan kebaikan daripada keburukan, senantiasa berusaha meningkatkan kualitas amal kebaikan, rendah hati, serta tulus. Diplomasi bahasa atau praktik berbahasa dapat dijadikan alat untuk memartabatkan dan memanusiakan peserta didik.

1.1 Pengertian Diplomasi

Istilah diplomasi sangat erat hubungannya dengan hubungan antarnegara, yaitu adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara melalui negosiasi dengan cara-cara damai apabila mungkin dalam berhubungan dengan negara lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diplomasi mengandung beberapa pengertian antara lain:

- urusan atau penyelenggaraan hubungan resmi antara satu negara dengan negara lain;
- urusan kepentingan sebuah negara dengan perantaraan wakil-wakilnya di negara lain;
- pengetahuan dan kecakapan dalam hal perhubungan antara negara dengan negara;

- kecakapan menggunakan pilihan kata yang tepat bagi keuntungan pihak yang bersangkutan (dalam perundingan, menjawab pertanyaan, mengemukakan pendapat dan sebagainya).

Menurut Kamus Inggris Oxford, kata diplomasi dapat diartikan sebagai “penyelenggaraan bisnis internasional para diplomat “ atau “seni yang diselenggarakan seorang diplomat”. Diplomasi dikatakan seni karena istilah tersebut adalah usaha untuk membuat orang lain menerima jalan pikiran kita.

Panikkar dalam bukunya *The Principal and Practice of Diplomacy* (dikutip oleh Roy, 1991) mengatakan diplomasi dalam hubungannya dengan politik internasional, adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain. Menurut Nicholson (1988), “Pada masa kekaisaran Romawi semua paspor, yang melewati jalan milik negara dan surat-surat jalan dicetak pada piringan logam dobel, dilipat, dan dijahit jadi satu dalam cara yang khas. Surat jalan logam ini disebut *diplomas*. Istilah *diplomacy* diperkenalkan ke dalam bahasa Inggris oleh Edward Burke pada tahun 1796 berdasarkan sebuah kata dari bahasa Perancis yaitu *diplomatie*. Secara harfiah diplomasi berasal dari kata *diploma* (Yunani: sebuah kertas yang dilipat dua) yang didesain sebagai dokumen resmi Negara/ dokumen sejarah, sebuah sertifikat perundingan, kewenangan, dan semacamnya. Berdasarkan *Bester’s New World Dictionary of the American Language* (1996) diplomasi adalah:

- 1) hubungan relasi antarbangsa, dalam membuat keputusan;
- 2) keahlian dalam melakukannya;
- 3) keahlian *dealing with people*.

1.2 Pengertian Diplomasi Bahasa

Seperti halnya dalam tindak berbahasa, diplomasi bahasa juga termasuk praktik kebahasaan yang memiliki unsur-unsur utama yaitu sumber (*source*), pesan (*message*), saluran (*channel*), penerima (*receiver*) dan efek (*effect*) serta umpan balik (*feed back*). Proses diplomasi bahasa terjadi dalam kegiatan komunikasi harus bersifat dua arah (sirkular). Dua pihak yang melakukan diplomasi bahasa sama-sama mempunyai hak untuk bicara dan didengarkan. Keduanya mempunyai tujuan tindak bahasa dan ingin mencapainya.

Tujuan dari setiap proses diplomasi bahasa adalah :

- 1) menciptakan pengertian yang sama atas setiap pesan dan simbol yang disampaikan;
- 2) merangsang pemikiran pihak penerima untuk memikirkan pesan dan rangsang yang diterimanya;
- 3) melakukan sesuatu tindakan yang selaras dengan pesan tersebut, yaitu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Kemampuan diplomasi bahasa merupakan kompetensi kognitif dari sebuah diplomasi maupun negosiasi. Kemampuan berdiplomasi bahasa yang baik akan dapat membawa kita untuk dikenal oleh orang lain, dapat membuat satu jalinan persahabatan, dan menciptakan satu hubungan antar manusia yang memuaskan.

Menjadi seseorang yang mampu untuk melakukan diplomasi bahasa adalah menjadi seorang yang mampu untuk menjadi pengirim dan penerima berita yang dapat menunjang suatu hubungan pribadi lebih baik. Pengirim dan penerima pesan adalah sosok yang mempunyai kebutuhan, keinginan, tujuan dan cara dalam melihat dunia ini berlainan sama sekali.

Seseorang dikatakan mampu berdiplomasi bahasa jika:

- 1) mampu merangkai kata menjadi sebuah kalimat yang benar-benar mewakili apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan;
- 2) mampu menyampaikan dengan benar dan tepat, sesuai dengan siapa dia berbicara, di mana, kapan (waktu) dan dalam suasana formal atau informal;
- 3) mampu menangkap respons pihak yang diajak bicara;
- 4) mampu menanggapi respons dengan benar dan tepat.

II. Diplomasi Bahasa untuk Memartabatkan dan Memanusiakan Bangsa

Martabat bangsa juga diukur juga oleh bahasa sebagaimana pepatah, “Bahasa menunjukkan bangsa.” Akan tetapi, pada saat ini, generasi muda sama sekali tidak percaya diri menggunakan bahasa Indonesia. Sepatutnya, Kita memang harus bisa menguasai bahasa bisnis dan ilmu pengetahuan di lingkungan internasional, seperti bahasa Inggris. Akan tetapi, kebanggaan menggunakan bahasa Indonesia di negeri sendiri tidak boleh luntur.

Kita memiliki potensi menjadi bangsa yang besar dan bermartabat jika kita mau menggunakan bahasa Indonesia dalam konteks yang benar. Hindarilah penggunaan bahasa kebangsaan di tengah plurilingual antarbangsa yang ke-Inggris-inggrisan. Bukan tidak

boleh menggunakan bahasa Inggris, tetapi gunakanlah bahasa Inggris sesuai dengan situasinya sehingga konteks bahasa Indonesia untuk pemertabatan bangsa dapat tercapai. Jika bangsa kita senantiasa bangga dan menjunjung tinggi bahasa kebangsaan yang sarat dengan nilai-nilai luhur, sudah tentu generasi bangsa akan teregister sebagai bangsa yang hebat dalam era modern ini.

Implikasi praktik kebahasaan yang memartabatkan bangsa adalah

1) menumbuhkembangkan respons positif dalam dalam pikiran dan perasaan manusia. mengembangkan dan menumbuhkan nilai-nilai positif manusia, seperti suka menolong, berbuat baik, beriman, dan bertaqwa;

2) mengajarkan pesan moral kepada manusia agar berbuat yang sesuai dengan harapan masyarakat, berempati, jujur, dan bertanggung jawab;

3) mendorong orang untuk membangun interaksi bukan semata-matademi kepentingan dirinya, tetapi demi kepentingan bersama;

4) memperkuat dan menumbuhkembangkan karakter pribadi, identitas dan ketahanan bangsa yang positif, tangguh, dan kuat, demi mencapai cita-cita bangsa dan negara.

III. Diplomasi Bahasa untuk Memartabatkan dan Memanusiakan Peserta Didik

Pemberian materi ajar kebahasaan tentang pemartabatkan dan pemanusiaan peserta didik dapat menggunakan model yang menghubungkan guru, peserta didik, dan lingkungan sehingga terbangun pengertian atau kesepakatan bersama tentang sesuatu, misalnya peserta didik harus membuat laporan hasil wawancara terhadap guru, teman, dan masyarakat sekitar sekolah tentang “semangat kebersamaan”. Dengan tema “semangat kebersamaan” dapat menumbuhkembangkan rasa kesatuan antaretnis, kepedulian, dan cinta tanah air. Para siswa dapat dipacu untuk menumbuhkembangkan rasa kemanusiaannya.

Pemberian tugas penganalisisan dan pengapresiasian karya sastra lokal yang mengandung keberagaman budaya dapat dijadikan strategi negosiasi atau diplomasi bahasa untuk memartabatkan dan memanusiakan peserta didik, misalnya *Robohnya Surau Kami* karya A.A. Navis yang mengemukakan latar dan kekayaan budaya Minangkabau, *Para Priyayi* karya Umar Khayam yang mengungkapkan nuansa dan ideologi Jawa, *Antologi Puisi* yang ditulis oleh D. Zawawi Imron yang menyoroti kultur Madura, *Upacara* karya

Korrie Layun Rampan yang mengungkapkan eksistensi suku Dayak, *Bila Malam Bertambah Malam* karya Putu Wijaya yang mengekspos kekayaan budaya Bali, dan *Dim Sum Terakhir* karya Clara Ng yang mendeskripsikan kehidupan di permukiman etnis China. Pengungkapan dan pendeskripsian kekayaan budaya lokal yang menjadi untaian kekayaan budaya Indonesia menjadi modal untuk melakukan diplomasi bahasa yang menunjukkan martabat bangsa.

Dalam pembelajaran bahasa di kelas, untuk melatih peserta didik menyampaikan pesan dan pikiran yang berperspektif humanistik, harus terjadi interaksi antara guru dan siswa. Interaksi ialah hal saling melakukan aksi, ada hubungan timbal balik, ada komunikasi dua arah. Interaksi tentu saja bersifat dinamis, tidak statis. Dalam pembelajaran bahasa, interaksi secara verbal memang paling menonjol dan dominan. Pengungkapan pikiran dan pesan – pesan dengan benar dan tepat, sesuai dengan situasi pertuturan itulah contoh nyata dari praktik diplomasi bahasa.

Peserta didik akan dimanusiakan dan dimartabatkan dalam kegiatan interaksi dan negosiasi apabila guru mendesain tugas-tugas yang memberdayakan *karakter dan humanistik* kepada peserta didik. Misalnya, memberikan tugas kelompok berupa laporan analisis hasil wawancara kepada pedagang kecil yang berjualan di dekat kampus. Selain peserta didik menerapkan teori teknik wawancara dan tata tulis laporan, mereka pun disentuh untuk mewujudkan *care* atau kepedulian kepada wong cilik. Di samping itu, pemberian tugas berupa diskusi kelompok dengan cara *role play*, memaksa peserta didik untuk memberdayakan *karakter kebangsaan* mereka. Dengan *role play*, mereka dapat berkreasi dalam memainkan watak, bersinergi dengan yang lain, melatih penghayatan peran, melatih daya kepekaan, dan melatih untuk mengaktualisasikan diri. *Role play* dalam pembelajaran bahasa, misalnya, memainkan peran sebagai siswa perantauan yang berkuliah di kota besar yang diperolok-olokkan oleh teman-temannya karena menggunakan bahasa Indonesia yang berdialek daerah dan diinterferensi oleh percampuran bahasa daerah dengan bahasa Indonesia. Selain tercapainya materi ajar yaitu interferensi bahasa, juga kegiatan *role play* dapat menumbuhkan nilai moral yaitu menghargai sesama, kemajemukan, dan setiap pribadi memiliki keunikan. Pemberian tugas dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi komputer, misalnya membuat *power point power point, iklan, film pendek, atau lagu* yang kreatif, inovatif, futuristik, dan penuh dengan visualisasi dan animasi ketika peserta didik mempresentasi tugas mereka. Praktik kebahasaan seperti itu dapat memperlihatkan bahwa peserta didik sebagai generasi bangsa mampu menunjukkan karakter

yang santun, berwibawa, dan sudah tentu positif sehingga mampu memperlihatkan jati bangsa yang terpuji serta dihargai oleh dunia internasional.

Dengan pendekatan *humanistik*, kita dapat mendesain aturan di kelas. Misalnya, aturan tidak boleh mencontek, aturan tidak boleh terlambat, aturan berpakaian rapi, aturan memakai sepatu, aturan tidak mengaktifkan *handphone*, tidak makan atau minum di kelas, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, dan aturan lain yang dapat memberdayakan keterampilan *karakter kebangsaan*. Dalam pembelajaran bahasa, kita dapat menerapkan aturan "zona penggunaan bahasa baku, baik, dan benar" di dalam kelas jika ada yang melanggarnya boleh saja yang bersangkutan didenda (misalnya Rp1000,00 per pelanggaran dan hasilnya dapat disumbangkan untuk program adik asuh). Bentuk pengajaran bahasa tersebut merupakan praktik diplomasi bahasa yang menghasilkan peserta didik sebagai generasi bangsa yang bertanggung jawab, konsisten, dan menjunjung tinggi aturan.

Peserta didik pun dapat mengembangkan diri dalam upaya melakukan praktik kebahasaan dengan aktif mengikuti kegiatan teater, unit kesenian, olah raga, kelompok belajar, dan kelompok penelitian untuk meningkatkan karakter kebangsaan dan rasa kemanusiaan. Di samping itu, untuk mendukung pembelajaran tentang diplomasi bahasa, diadakan kegiatan-kegiatan seperti debat antarkelas, presentasi hasil temuan penelitian oleh peserta didik di muka umum, lomba baca puisi dengan musikalisasi, penggunaan teknologi komputer dalam pembuatan poster tentang jargon/ ungkapan politik yang membangun dan mendidik bangsa, dan sebagainya. Sebagai bentuk pembelajaran bahasa yang bertolak ukur humanistik secara bergilir setiap kelas paralel satu minggu sekali mengajar di sekolah dasar yang mayoritas siswanya anak dari orang tua yang berekonomi lemah. Para siswa dilatih menjadi *volunteer/sukarelawan* untuk membantu adik-adik mereka belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar, belajar menulis, dan belajar membaca. Kepekaan peserta didik untuk berempati, merasakan kondisi yang memprihatinkan, menyaksikan secara langsung penderitaan hidup, dan mengetahui bahwa di sekitarnya ternyata ada komunitas atau kelompok yang kurang beruntung secara ekonomi akhirnya membuat peserta didik mau menghargai hidup dan kehidupan. Pelatihan menjadi *volunteer* dapat mengembangkan *karakter kebangsaan* dan pemahaman multibudaya peserta didik. Dengan praktik kebahasaan atau diplomasi bahasa seperti itu, peserta didik dibentuk dan ditumbuhkan untuk menjadi insan yang memiliki derajat kepedulian yang tinggi terhadap isu-isu kemanusiaan sehingga pada masa mendatang bangsa kita akan dikenal sebagai bangsa yang

berbudi, berempati, dan berkontribusi dalam penanganan dan penanggulangan masalah kemanusiaan baik secara lokal maupun secara global.

III. Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, hal-hal yang ditemukan adalah sebagai berikut.

1. Diplomasi bahasa mampu mengukuhkan nilai-nilai lokal yang positif, tetapi futuristik dalam pikiran dan perasaan bangsa Indonesia.
2. Diplomasi bahasa mampu menjadi alat penapis atau penyaring pengaruh dari luar.
3. Diplomasi bahasa merupakan bagian yang sangat penting dan memegang peranan dalam peradaban bangsa apa pun di mana pun di dunia ini.
4. Pengajaran bahasa dapat dijadikan alat untuk menumbuhkembangkan karakter kebangsaan.
5. Melalui pengajaran bahasa sebagai praktik atau diplomasi untuk memanusiakan, peserta didik juga guru dapat menemukan kembali “martabat” dan “sisi kemanusiaan” yang boleh jadi sudah hilang dan tidak terdeteksi dalam dirinya.
6. Untuk dapat melakukan diplomasi bahasa yang memartabatkan, sejak kecil, anak-anak sudah harus disugahi bacaan bahasa yang mengandung plot dan karakter yang positif, menampilkan keragaman nilai budaya, dan disertai dengan ilustrasi yang menarik dan menawan tentang khazanah budaya lokal yang bercirikan Indonesia sehingga mereka dapat menjadi insan yang berkarakter dan menjadi “manusia yang seutuhnya”, yang cinta kepada bangsa dan Negara, peduli kepada sesama, dan berakhlak luhur sehingga dapat menjadi insan yang bermartabat di tengah kancah global.

IV. Daftar Pustaka

- Alwi, Hasan. 1999. *Telaah Bahasa dan Bahasa*. Depdiknas: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Badri, Jusuf. 1993. *Kiat Diplomas*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Bester's New World Dictionary of the American Language (1996) Published by John Wiley & Sons
- Cultural Studies. 2000. *Teori Bahasa Pengantar Komprehensif*. Jakarta: Jalasutra Egleton Terry.
- Gulo, W. 2002. *Strategi Belajar-mengajar*. Jakarta: Gramedia.
- Pusat Bahasa. 2009. *Kamus Besar Bahasa Baku*. Edisi Keempat. Jakarta: Gramedia.
- Masrukhi. 2009. "Revitalisasi Pendidikan IPS sebagai Instrumen Integrasi Nasional". Dalam *Integrasi Sosial dalam Bermasyarakat majemuk pada Era Global*. Universitas Negeri Semarang: Fakultas Ilmu Sosial.
- Nicholson, Sir Harold. 1988. *Diplomacy*. Institute for The Study Diplomacy Editio, Washington
- Oxford Advanced Learner's Dictionary (OALD)*. 2010. Edisi ke-8. Inggris: Oxford University Press (OUP)
- Roy, S.L. 1991. *Diplomasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Zulnaidi. 2007. *Metode Penelitian*. Medan: Universitas Sumatera Utara.